"Bagi saya, Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Makassar kemarin merupakan Muktamar Muhammadiyah yang paling hebat sejak saya mengikutinya setiap lima tahun mulai dengan Muktamar ke-40 di Solo, pada tahun 1985. Muktamar Muhammadiyah terbaru telah diadakan secara sangat tertib tetapi cukup terisi dengan laporan yang substansial dan perdebatan yang bersemangat. Muktamar ini juga menghasilkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru termasuk sejumlah orang dari generasi baru yang membayangkan dinamika di dalam gerakan sosial keagamaan ini yang selalu berkemajuan. Konsep 'Kosmopolitanisme' Muhammadiyah masih agak asing buat telinga saya, tetapi saya ingin membelajari makna itu melalui pembacaan buku ini."

—Mitsuo Nakamura

Professor Emeritus, Chiba University, Japan;
Penulis *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, study tentang pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta.*

"Sejak lebih dari seabad yang lalu, Muhammadiyah merupakan pelopor di antara gerakan-gerakan pemurnian Islam di Indonesia. Dalam konteks itu, semua informasi mengenai permusyawaratan—termasuk kontestasi gagasan-gagasan—dalam tubuh Muhammadiyah sangat menarik dan penting untuk dicatat. Oleh karena itu, kita harus menyambut dengan gembira kumpulan tulisan yang termuat dalam buku ini, yang terkait Muktamar Muhammadiyah ke-47 bulan Agustus 2015. Tulisan-tulisan ini merupakan cara untuk menilai apa sungguhnya kepribadian Muhammadiyah sekarang dan bagaimana aspirasinya untuk mencapai 'Islam kemajuan".

—M.C. Ricklefs

Professor, the Australian National University (ANU);
Penulis *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang.*

Kesuksesan Muktamar Muhammadiyah ke-47 bersama Muktamar Aisyiyah pada tanggal 3-7 Agustus 2015 di Makassar telah menggambarkan secara nyata perubahan besar yang dialami kedua organisasi Muslim yang kita muliakan ini. Permusyawaratan tertinggi itu menunjukkan kematangan Muhammadiyah dan Aisyiyah, baik dalam berdemokrasi maupun dalam perkembangan dan pelestarian sebuah kultur intelektual yang baru, kritis, dan etis. Keberhasilan ini juga diperlihatkan di dalam kumpulan artikel Muhammadiyah edisi muktamar yang dimuat di dalam buku yang menggembirakan ini, "Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan". Melalui esei-esei ini, kita sebagai pembaca bisa menghargai bahwa Muhammadiyah telah menjadi kuat lewat amal usaha yang mencerdaskan anggotanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Esei-esei ini membuktikan bahwa Muhammadiyah telah menjadi gerakan Islamiyah yang betul-betul berkemajuan."

—Robert W. Hefner

Direktur Institute on Culture, Religion, and World Affairs in the Pardee School of Global Studies, Universitas Boston.

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PRESS MUP

ISBN: 978-602-361-035-8
9 786023 610358

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PRESS MUP

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN

Editor:
Abdul Mu'ti ♦ Fajar Riza Ulhaq
Azaki Khoirudin ♦ Ahmad Fuad Fanani

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PRESS MUP

Editor:
Abdul Mu'ti ♦ Fajar Riza Ulhaq
Azaki Khoirudin ♦ Ahmad Fuad Fanani

Prolog: **Haedar Nashir & M. Din Syamsuddin**
Epilog: **M. Amien Rais & Ahmad Syafii Maarif**

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN

Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN

Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015

Editor

Abdul Mu'ti | Fajar Riza Ulhaq
Azaki Khoirudin | Ahmad Fuad Fanani

MUP
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PRESS

2016

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN

Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47

Muhammadiyah di Makasar 2015

Editor:
Abdul Mu'ti, Fajar Riza Ulhaq, Azaki Khoirudin, Ahmad Fuad Fanani
Penyelaras Akhir: Dinan Hasbudin AR

Pendesain Sampul & Isi: design651@gmail.com

Diterbitkan oleh
Muhammadiyah University Press
Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

15.5 x 23.5 cm; xviii+454

ISBN: 978-602-361-035-8
Cetakan I: Mei 2016

Pengantar Editor

Visi Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan

Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang diselenggarakan bersama Muktamar Seabad Aisyiyah pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar alhamdulillah diapresiasi positif oleh banyak kalangan. Mitsuo Nakamura, ketika menghadiri Muktamar Muhammadiyah setelah mengikuti dari Muktamar Ormas lain, dengan sarkastik memberikan pengakuan di media cetak, "serasa keluar dari neraka ke surga". Wakil Presiden R.I. Dr (Hc) H Mohammad Jusuf Kalla, dalam sambutan penutupan bahkan menyebut sebagai Muktamar teladan.

"Muktamar teduh dan tidak gaduh", demikian tulis media cetak. Kesuksesan Muktamar, selain penyelenggaraan, juga sukses syiar. Media-media, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional diwarnai artikel gagasan yang ditulis baik oleh aktivis, akademisi, peneliti, dan lain-lain yang sangat kritis, sekaligus dengan isu-isu seputar Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Ide-ide segar dari para penulis Muhammadiyah berserak baik pra, sedang, dan pasca Muktamar. Berawal dari perbincangan di grup *WA (WhatsApp) Islam Berkemajuan*, pasca Muktamar, Mas Mu'ti (Abdul Mu'ti) meminta untuk menghimpun artikel-artikel yang terkait dengan Muktamar Muhammadiyah, sekaligus menjadi editor. Berbagai artikel yang cerdas, kritis, apresiatif tersebut kini telah terkumpul dan tersistematisasi dalam gagasan buku yang bertajuk "Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan".

Ekspresi Kosmopolitanisme

Mungkin pembaca ada yang bertanya, mengapa buku ini diberi judul "Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan"? Berangkat dari dinamika kepemimpinan Muhammadiyah dalam kurun 17 tahun reformasi mencerminkan kepemimpinan dari generasi produk generasi yang kosmopolitan. Setelah reformasi, Din Syamsuddin merupakan satu-satunya ketua umum yang memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun. Amien Rais terpilih pada 1995 di Muktamar Aceh tidak sempat menyelesaikan masa baktinya. Karena pilihan ijtihad politiknya, Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional pada 1998. Teman karibnya, Ahmad Syafii Maarif, melanjutkan periode yang tersisa hingga pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Syafii Maarif pun terpilih menjadi ketua umum di tengah transisi demokratisasi dan gejolak sosial-politik yang menguji konsistensi peran kebangsaan dan netralitas Muhammadiyah. Masa-masa sulit itu berhasil dilalui tanpa terperosok pada godaan pragmatisme politik.

Profil dan latar belakang kesarjanaan Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin merepresentasikan generasi Muhammadiyah kosmopolitan di mana "Timur" dan "Barat" bertemu, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari biografi sosio-intelektualnya. Adanya perbedaan karakter dan langgam kepemimpinan ketiganya merupakan sisi lain dari ketidaktunggalan ekspresi kosmopolitanisme itu sendiri. Sejarawan UGM, Bambang Purwanto (2015), menyebut Muhammadiyah sebagai contoh produk persilangan budaya di dalam keberagaman yang melibatkan Islam, Jawa, Minangkabau, dan modernitas Barat.

Jika membaca Muhammadiyah generasi awal merupakan produk modernisasi Islam dengan denyut kosmopolitanisme. Karena waktu itu tumbuh dalam spektrum keragaman "bangsa-bangsa" yang menjadi cikal bakal Indonesia yang majemuk di kemudian hari. Di sinilah kosmopolitanisme, menurut Vertovec dan Cohen, termanifestasi dalam perilaku yang terbuka dan kompetensi yang unggul dalam interaksi lintas budaya.

Tak diragukan lagi, ketiga figur di atas telah membesarkan tenda bangsa Muhammadiyah dalam semangat kosmopolitanisme Islam berkemajuan. Model Muhammadiyah kosmopolitan memaknai cakupan dan ruang aktualisasi dakwah lebih kontekstual. Persyarikatan Muhammadiyah akan sangat beruntung karena perjalanannya pasca muktamar Makassar akan disaksikan oleh tiga mantan ketua umumnya. Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin merupakan aset persyarikatan yang sangat berharga dengan kekhasan masing-masing personalnya yang membuatnya dicintai, dihormati, dibanggakan oleh semua warga Muhammadiyah. Ketiga tokoh tersebut berbicara bersama pada satu sesi khusus dalam agenda Muktamar. Ini adalah momen penting, semua warga Muhammadiyah bahkan masyarakat umum akan mendengar lontaran pemikiran dari ketiga tokoh bangsa tersebut untuk kemajuan Muhammadiyah dan bangsa.

Muhammadiyah sekarang mencoba menjadi gerakan pencerahan dengan membawa spirit Islam yang berkemajuan. Sebenarnya makna berkemajuan artinya adalah kosmopolitan. Di mana kata kosmopolitan itu berasal dari Yunani, berarti *citizen of the world***,** bahwa kita ini warga dunia. Warga Muhammadiyah memang hidup berkembang di Indonesia, akan tetapi secara peradaban, Muhammadiyah tidak menutup diri dari pengaruh peradaban dunia. Muhammadiyah memilih berdialog, berpikir keluar dari lingkup Indonesia untuk mempromosikan Islam Indonesia itu ke dunia luar. Tak hanya menerima pengaruh asing, tetapi juga berdialog, *sharing* tentang Indonesia kepada dunia luar. Meminjam bahasa Najib Burhani bahwa selama ini kita mengalami *inferiority complex*. Kita mengalami rasa minder ketika berhadapan dengan bangsa lain. Kita mengalami *majority with minority mentality* (mayoritas tetapi dengan mental minoritas). Karena itulah sikap-sikap tidak percaya diri dan sebagainya itu harus diatasi dengan semangat yang kosmopolitan.

Pada Muktamar ke-47, Muhammadiyah diharapkan mendapatkan momentum untuk melakukan transformasi nilai keislaman yang berkemajuan. Islam yang mengutamakan kesetaraan, welas asih, kemandirian, serta keadilan pada budaya politik kewargaan dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Semangat keislaman harus bersenyawa dengan hajat hidup

publik tanpa diskriminatif. Umat Islam Indonesia harus segera beranjak dari buritan menuju kemudi peradaban yang kosmopolitan. Pertanyaannya adalah mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Menurut Ahmad Najib Burhani dalam buku ini dijelaskan bahwa kelahiran Muhammadiyah merupakan produk dari interaksi Timur Tengah dan Barat lalu melahirkan kebudayaan baru khas di Indonesia. Muhammadiyah menyatukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter otentik bangsa Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana untuk dialog antar peradaban.

Visi Islam Berkemajuan

Gagasan Islam berkemajuan sebagai formula jawaban organisasi ini atas kompleksitas persoalan kebangsaan dan kemanusiaan hari ini harus dilembagakan dan dibudayakan sehingga menjadi spirit dan etos gerakan, tidak berhenti sebatas logos. Dalam Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah bahkan memilih tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Sebuah tema 'penegasan' bahwa hakikat pergerakan Muhammadiyah adalah sebagai "Gerakan Pencerahan". Gagasan ini merupakan kelanjutan pemikiran yang diusung sejak Muktamar Seabad Muhammadiyah yang mengusung Islam Berkemajuan sebagai karakter Islam yang kosmopolitan.

Pada Muktamar di Yogyakarta 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai "Islam kosmopolitan" yakni kesadaran bahwa pengikut Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki "rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional" (*Tanfidz Muktamar Se-Abad Muhammadiyah:* 2010, 18) Dalam dokumen *Pernyataan Pikiran*

Muhammadiyah Abad Kedua, produk Muktamar ke-46 ditegaskan definisi Islam berkemajuan sebagai berikut:

> "Islam berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia, Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, seta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang *memayungi kemajemukan suku, bangsa, ras,golongan dan kebudayaan umat manusia di muka bumi*"

Senada dengan itu untuk mempertegas karakter dan visi kosmopolitanisme Islam Berkemajuan, ada baiknya mengutip istilah dari begawan Muhammadiyah, Amin Abdullah yang menyatakan bahwa "Islam yang berkemajuan adalah Islam yang berada di tengah-tengah arus putaran globalisasi dalam *praxis,* globalisasi dan perubahan sosial dalam praktik hidup sehari-hari, dan bukannya globalisasi dalam *Theory*. Yaitu dunia global seperti yang benar-benar dialami dan dirasakan sendiri oleh para pelakunya di lapangan, yang sehari-hari memang tinggal dan hidup di negara-negara sumber dari globalisasi itu sendiri, baik dari segi transportasi, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan begitu seterusnya." Alam pikiran Muhammadiyah harus selalu berorientasi pada nilai-nilai peradaban yang kosmopolitan, melintasi sekat-sekat kultural, dan memperjuangkan tegaknya keadaban publik.

Dalam dunia yang global ini Muhammadiyah harus berupaya untuk ikut berdialog dan berbagi dengan berbagai peradaban dunia. Islam berkemajuan yang berwawasan dunia, keluar dari kungkungan negara-bangsa. Tidak hanya sebagai penerima pengaruh asing tapi juga memengaruhi masyarakat dunia. Inilah makna dari kosmopolitanisme yang dalam aktivitas nyata diwujudkan program internasionalisasi Mu-

hammadiyah. Menurut Amin Abdullah melalui lensa pandang seperti itu, manusia Muslim yang hidup saat hari ini Dimana pun mereka berada adalah warga dunia *(global citizenship*). Tidak hanya terbatas sebagai warga lokal (*local citizenship*). Sudah barang tentu, dalam perjumpaaan antara *local* dan *global citizenship* ini ada pergumulan dan pergulatan identitas yang tidak mudah, ada dinamika dan dialektika antara keduanya, antara *being a true Muslim* dan *being a member of global citizenship* sekaligus. Ujungnya adalah pada pencarian sintesis baru yang dapat memayungi dan menjadi jangkar spiritual bagi mereka yang hidup dalam dunia baru dan dalam arus pusaran perubahan sosial yang global sifatnya

Karena itu, Islam berkemajuan ala Muhammadiyah hari ini dan ke depan dihadapkan pada perubahan yang dahsyat. Perubahan itu meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, tatanan sosial-politik dan sosial-ekonomi, demografi, hukum, tata kota, lingkungan hidup dan begitu seterusnya. Situasi tersebut antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan tingkat literasi. Ini semua membutuhkan jawaban alternatif oleh Muhammadiyah yang sudah menegaskan dirinya sebagai gerakan pembaruan Islam. Berbagai rekomendasi dan program baru Muhammadiyah itu menunjukkan bahwa gerakan ini melangkah menuju gerakan Islam yang kosmopolitan, siap berdialog dan berkontribusi dengan berbagai peradaban. Melalui buku ini, semoga pikiran-pikiran dari para cerdik-cendekia mampu memberikan beragam perspektif yang menguatkan visi kosmopolitanisme Islam berkemajuan. Amin.

Abdul Mu'ti
Fajar Riza Ul Haq
Azaki Khoirudin
Ahmad Fuad Fanani

Isi Buku

4. Kepemimpinan Muhammadiyah—183

5. Internasionalisasi Pendidikan—219

6. Ijtihad Politik—255

7. Trisula Baru—293

Prolog (1)

MUKTAMAR TELADAN DAN MUHAMMADIYAH BERKEMAJUAN

HAEDAR NASHIR

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MUKTAMAR Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan bersama Muktamar Aisyiyah pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar alhamdulillah diapresiasi positif oleh banyak pihak. Muktamar teduh dan tidak gaduh, demikian tulis media cetak. Publik menilai sebagai Muktamar yang cerdas, demokratis, elegan, dan berkeadaban. Mitsuo Nakamura, pengamat Muhammadiyah dan belakang juga mengamati Nahdhatul Ulama, ketika menghadiri Muktamar Muhammadiyah setelah mengikuti dari Muktamar lain, dengan sarkastik memberikan pengakuan di media cetak, "serasa keluar dari neraka ke surga". Wakil Presiden R.I. Dr (Hc) H Mohammad Jusuf Kalla, dalam sambutan penutupan bahkan menyebut sebagai Muktamar teladan.

Penilaian positif itu tentu perlu disikapi dengan rendah hati dan tidak perlu membuat warga Muhammadiyah bertepuk dada. Memang begitulah Muktamar Muhammadiyah dari periode ke periode, berlangsung baik dan demokratis. Dengan rasa syukur perlu menjadi pemacu spirit untuk

membawa Muhammadiyah lebih maju pasca Muktamar yang sukses itu, sehingga gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 itu mampu berperan lebih optimal dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal.

Kesuksesan Muktamar Muhammadiyah tersebut sebenarnya menggambarkan siapa sesungguhnya Muhammadiyah, sehingga kesuksesan itu tidaklah tiba-tiba. Apa yang terjadi dan berkembang dalam permusyawaratan tertinggi itu menunjukkan kematangan Muhammadiyah dalam berdemokrasi. Warga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah dari seluruh pelosok tanah air mampu menyerap spirit bermusyawarah sebagaimana perintah ajaran Islam. Musyawarah itu mengandung makna "mengambil madu dari sarang lebah", artinya sesuatu yang sulit dan harus dilakukan dengan cermat dan jiwa besar, tetapi manakala berhasil maka manfaatnya besar seperti halnya fungsi madu bagi kesahatan tubuh.

Boleh jadi banyak orang Islam mengerti dan paham secara verbal tentang makna musyawarah maupun nilai-nilai ajaran Islam lainnya. Banyak yang sangat fasih dengan rujukan-rujukan Islam klasik yang kaya ditunjang retorika yang memukau sebagaimana sering menjadi kebanggan di sebagian kalangan umat. Tetapi, manakala ajaran Islam yang kaya nilai itu tidak dihayati dan didukung konsistensi sikap, maka lain di kata lain pula tindakannya. Karena kehilangan konsistensi, maka untuk bermusyawarah yang baik dan menghasilkan kesepakatan bersama pun, yang kelihatannya mudah akhirnya menjadi musykil, lalu berujung *dead-lock* alias jalan buntu. Alih-alih sukses bermusyawarah, malah bisa berbuah pecah.

Muhammadiyah alhamdulillah telah teruji dalam bermusyawarah di Muktamarnya yang penting itu. Keterujian itu selain karena kedewasaan sikap para anggotanya, pada saat yang sama karena sistem organisasi yang dikembangkannya relatif mapan. Dari sistem pemilihan hingga penjadwalan acara dan pelaksanaannya telah tertata secara tersistem dan terorganisasi baik. Proses pemilihan bahkan telah dimulai satu tahun sebelumnya melalui sidang Tanwir, yang tahapannya menurut istilah Prof H M Dien Syamsuddin "panjang dan berjenjang", sehingga tidak rawan politisasi. Dalam Muktamar itu terdapat dinamika, tetapi proses

dan hasil akhirnya bermuara elok, elegan, dan diterima utuh. Sidang tigabelas anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih bahkan hanya memerlukan waktu sepuluh menit untuk memilih Ketua Umum dan menetapkan Sekretaris Umum.

Muktamar sukses juga cermin dari kedewasaan orang Muhammadiyah yang lahir dari kepribadiannya. Warga Muhammadiyah itu dikenal terdidik, cerdas, dan kritis tetapi bersamaan dengan itu mereka juga bersahaja, kata sejalan tindakan, dan pada umumnya tidak terbiasa berpolitik. Dampak positif dari alam berpikir tersebut ialah lahirnya kematangan sikap dalam berorganisasi maupun dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan pada umumnya. Mereka memiliki pola tindak yang tertata dan tidak suka "jungkir-balik" alias kontroversi. Mungkin karena sikap-tindakannya rasional dan serba tertib, maka cenderung tidak "menarik" dan tidak "seksi" bagi media massa, namun di situlah kekuatan orang Muhammadiyah. Kadang media massa tertentu tidak gemar memberitakan Muhammadiyah, lebih suka yang lain, tetapi tidak masalah karena kemajuan Muhammadiyah tidak ditentukan oleh pemberitaan.

Orang Muhammadiyah maupun institusi Muhammadiyah tidak terbiasa "berpolitik praktis" sehingga sikapnya lugu, polos, dan lurus atau puritan. Sering sikap itu dikritik oleh sebagian pihak, sehingga menurut mereka kalah dari pihak lain. Lihatlah pihak lain sekarang banyak menguasai pemerintahan karena "berpolitik". Namun, lihat juga sisi lain. Kalau orang Muhammadiyah suka berpolitik, maka Muktamarnya tentu gaduh dan tidak teduh. Muktamar yang mengalami "dead-lock" atau berakhir pecah dan tidak menghasilkan kepengurusan yang diterima semua pihak, boleh jadi terjadi karena orang-orangnya terbiasa berpolitik praktis. Bagaimana saling rebut posisi secara niscaya dalam organisasi kemasyarakatan seperti dalam partai politik didorong oleh banyak kalkulasi dan kepentingan politik ke dalam maupun keluar.

Muktamar maupun kepemimpinan Muhammadiyah karena tidak diwarnai motif dan cara-cara partai politik, alhamdulillah juga tidak ditunggangi oleh kepentingan dan permainan aktor-aktor partai politik. Muktamarnya tidak diintervensi, apalagi dikendalikan oleh orang-orang

partai politik, yang memobilisasi dana dengan kalkulasi investasi politik ke depan. Bukan soal alergi politik maupun memandang politik negatif, tetapi kenyataan yang terjadi menunjukkan fakta nyata, bahwa sekali organisasi Islam itu berpolitik-praktis maka mau tidak mau terlibat dalam proses politik seperti berlaku di dunia partai politik. Kalau di partai politik memang demikian habitatnya, tetapi manakala di tubuh organisasi kemasyarakatan tidaklah tepat. Selalu ada resiko manakala organisasi dakwah kemasyarakatan melibatkan diri dalam politik praktis, ada sisi positif tetapi juga negatif tergantung pilihan masing-masing.

Muktamar organisasi kemasyarakatan gaduh misalnya, harus dilihat pula dari sisi permainan politik para aktor atau pengurusnya. Boleh jadi kebiasaan ala partai politik dilakukan oleh para anggota maupun pengurus organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Apalagi manakala orang-orang yang berada di organisasi kemasyarakatan itu dulunya orang partai politik yang terbiasa bermain politik atau memang berada di organisasi kemasyarakatan sekaligus sebagai aktivis partai politik. Sebutlah perilaku gemar bersiasat, memaksakan kehendak, mau menang sendiri, menonjolkan diri, kebiasaan tampil di ruang publik, memobilisasi dukungan, bersuara lantang penuh tekanan agar kemauan atau pendapatnya diikuti, serta selalu berikhtiar dengan segala cara agar dirinya memiliki posisi. Sifat seperti itu bukan stereotipe, tetapi bukti di lapangan sering berpola demikian. Muktamar maupun keberadaan organisasi dakwah akan gaduh karena sifat dan sikap berpolitik ala politisi dan partai politik seperti itu. Bagi mereka gaduh itu hal lumrah, sehabis itu normal kembali. Inilah yang sering menjadi sumber kericuhan atau ketidakstabilan organisasi dakwah sehingga Muktamar berakhir di jalan buntu.

Alhamdulillah Muktamar Muhammadiyah tidak mengalami nasib buruk dan sebaliknya berakhir baik, yang oleh Wakil Presiden disebut Muktamar teladan itu. Kini, pasca Muktamar ke-47, bagaimana Muhammadiyah melakukan langkah-langkah dinamis dan produktif dalam melaksakan keputusan Muktamar sehingga gerakan Islam ini makin berkemajuan. Lima tahun ke depan Muhammadiyah harus makin berkemajuan. Visi ke depan ialah Muhammadiyah yang profesional, modern,

maju, mandiri, unggul, dan berperan strategis dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Jika disimpulkan secara ringkas ialah Muhammadiyah yang berkemajuan. Sifat profesional, maju, mandiri, unggul, dan berperan strategis itu merupakan karakter Muhammadiyah berkemajuan. Muhammadiyah yang lebih maju dari sebelumnya secara signifikan. Di antara ciri Muhammadiyah berkemajuan yang perlu penekanan ialah sifat dinamis, mandiri, dan berkeunggulan.

Muhammadiyah yang berkemajuan merupakan keniscayaan bagi gerakan ini dalam memasuki abad kedua di tengah tantangan kehidupan yang kompleks. Visi Muhammadiyah berkemajuan sudah ditetapkan oleh Muktamar, yang perlu menjadi acuan bagi anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah dalam membawa gerakan Islam ini bergerak lima tahun ke depan. Pikiran-pikiran perseorangan yang berkembang di media massa maupun ruang publik lainnya dapat memperkaya visi Muhammadiyah, tetapi acuannya ialah pikiran-pikiran resmi organisasi. Sebab organisasi bergerak dan berkembang secara kolektif dan tersistem, bukan laju perorangan. Kebesaran Muhammadiyah hingga bertahan lebih satu abad dengan kemajuan yang diraihnya terletak pada kekuatan sistem dan kolektivitas.

Peran orang tentu dapat mempertajam dan memperkaya, serta menjadi pelaku dalam mengarahkan jalan organisasi. Ujian pembuktian pikiran dan tindakan orang yang hebat sekalipun justru teruji ketika berada dalam organisasi, seberapa berperan dalam memajukan gerakan secara nyata dan bukan sekadar simbolik. Peran simbolik sampai batas tertentu memang penting, tetapi organisasi yang modern dan rasional justru menuntut peran yang konkret dari para pelakunya dalam membesarkan dan memajukan organisasi. Jangan seolah-olah berperan hebat, tetapi dalam kenyataannya misalkan tidak membuahkan kemajuan yang signifikan bagi masa depan organisasi. Demikian halnya tidak sekadar beretorika dan berwacana, tetapi menjadi pelaku gerakan yang sesungguhnya. Dalam Muhammadiyah jika memiliki ide maka harus menjadi pelaku sekaligus, bukan sebagai pengamat dan pemberi istilah pada apa yang dilakukan Muhammadiyah selama ini. Muhammadiyah justru tumbuh besar karena bergerak di dunia

yang nyata dan membumi, bukan organisasi wacana dan hanya menjadi tempat bagi aktor-aktor simbolik, yang boleh jadi karakter simbolik itu hanya ada pada organisasi tradisional.

Gerak Muhammadiyah juga menjadi kuat dan berkembang karena yang diperankannya membumi. Amal usaha dan dakwah bil-hal yang dilakukan Muhammadiyah selain mampu menghadirkan kemanfaatan besar bagi masyarakat luas, juga hasil dari gerak kemandirian dirinya setahap demi setahap sehingga menjadi besar. Muhammadiyah terbiasa produktif, bukan konsumtif. Jangan pernah menyepelekan amal usaha dan kerja nyata Muhammadiyah maupun perannya selama ini. Boleh jadi masih kurang dan belum menjadi kekuatan penentu yang hebat, tetapi tidaklah gampang melakukan usaha-usaha yang nyata dan sesungguhnya besar manfaatnya itu. Berteori dan beretorika tentu lebih mudah, tetapi menjadi pelaku perubahan dan pembawa kemajuan bagi organisasi pergerakan di negeri ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak ada kambing jantan langsung bertanduk, begitu kata pepatah bijak yang pandai menghargai peluh orang yang berbuat nyata di bumi nyata.

Muhammadiyah juga mampu berkembang karena kemampuannya membangun keseimbangan antara peran ke dalam dan keluar. *Inward-looking* dan *outward-looking* sama pentingnya bagi suatu organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah yang menghidupi gerakannya dengan kekuatan sendiri. Terlalu melihat ke dalam tentu pandangan keluar menjadi terbatas dan sempit. Sebaliknya terlalu melihat keluar dan kurang memperhatikan ke dalam tentu tidak akan seimbang, karena segala hal juga harus dimulai dari dapur sendiri. Kalau dapurnya tidak berasap, mana mungkin mampu berbagi dengan tetangga. Kemampuan memberi dan berperan keluar itu akan lahir sepadan jika di dalam rumah sendiri memang sudah kokoh. Berteori tentu mudah bagaimana Muhammadiyah harus bersinar gemerlap keluar sementara di dalam tidak terurus dengan baik, kemungkinan yang terjadi seperti fatamorgana atau organisasi mercusuar. Di sinilah dinamika mengelola Muhammadiyah.

Muhammadiyah pasti terbuka pada setiap gagasan besar untuk kemajuan dan perluasan peran gerakannya. Tantangannya satu, bagaimana

dan siapa yang harus menjalankan dan mewujudkan pikiran-pikiran besar itu? Tentu para pimpinannya dari Pusat hingga Ranting, vertikal maupun horizontal. Masalahnya sering terjadi, mereka yang berpikiran hebat tidak sertamerta ketika menjadi pelaku atau pemimpin dalam Muhammadiyah secara otomatis mampu mewujudkan pikiran-pikiran besar itu. Pembaruan apapun dalam Muhammadiyah memerlukan pelembagaan dan pembuktian yang terimplementasi dalam gerak organisasi. Ketika pemikir menjadi pemimpin maka harus mewujudkan pikirannya secara terorganisasi atau terlembaga dalam gerak sistem. Ketika ada orang yang dipandamg hebat maka diperlukan pembuktian kehebatannya dalam memimpin dan mewujudkan visi gerakan secara melembaga. Kalau ada pengusaha besar yang sukses di luar secara individu, ketika berada di Muhammadiyah dituntut kehebatannya dalam memajukan ekonomi Muhammadiyah, dan seterusya. Di situlah tuntutan sekaligus tantangan dinamis dalam pergerakan Muhammadiyah.

Bagi anggota atau kader yang memiliki pikiran-pikiran maju selama ini dan diberi amanah untuk memimpin atau menjadi bagian dari kepemimpinan Persyarikatan maka tantangannya ialah bagaimana membuktikan diri mampu membawa Muhammadiyah ke arah kemajuan sesuai visi gerakannya. Menggagas dan mempublikasikan pikiran merupakan suatu tradisi yang baik sebagai bukti hasrat dan pikiran untuk memajukan Muhammadiyah. Lebih dari itu bagaimana ketika mengemban amanah memimpin organisasi maka siapapun kader yang menjadi pimpinan benar-benar membuktikan pengkhidmatannya secara optimal dalam memajukan Muhammadiyah. Artinya apa yang menjadi pemikiran dibuktikan dalam tindakan, bukan berhenti dalam narasi lisan dan tulisan.

Kiprah angggota, kader, dan pimpinan Muhammasdiyah di berbagai institusi sangatlah penting untuk membawa gerakan Islam ini maju memasuki abad kedua perjuangannya. Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua dituntut untuk menghadirkan dakwah dan tajdid yang lebih maju sebagaimana terkandung dalam visi Islam Berkemjuan. Pandangan Islam Berkemajuan merupakan wawasan Muhammadiyah sejak awal berdiri, yang secara sistematik telah dirumuskan dalam Pernyataan Pikiran

Muhammadiyah Abad Kedua. Dalam Muktamar ke-47 di Makassar tema Islam Berkemajuan menjadi wacana yang meluas yang menunjukkan gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini telah memperoleh tempat dan penghargaan yang positif di kancah nasional dan internasional.

Muktamar di Makassar yang berjalan sukses dan disebut teladan harus menjadi momentum mengembangkan spirit, pikiran, dan suasana Islam Berkemajuan. Pemikiran program, dakwah komunitas, Negara Pancasila sebagai *Darr al-'Ahdi wa Syahadah*, dan isu-isu strategis yang diputuskan dalam Muktamar mencerminkan pandangan Islam Berkemajuan sekaligus spirit orang-orang Muhammadiyah untuk membawa gerakan ini maju dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam peran kebangsaan. Muhammadiyah harus mampu membuktikan di fase baru itu tanpa retorika yang muluk-muluk tentang suatu model pergerakan Islam Berkemajuan dalam kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal.

Bagi Muhammadiyah pandangan Islam Berkemajuan itu sebagai titik tolak bergerak untuk membawa gerakan Islam ini menjadi gerakan yang juga berkemajuan. Orang-orang Muhammadiyah pun harus menjadi insan berkemajuan. Insan Muslim baik individu maupun kolektif haruslah maju di segala bidang kehidupan karena dirinya selain abdi Allah yang menjalankan fungsi ibadah (QS Adz-Dzariyat: 56), pada saat yang sama berperan sebagai *khalifat fil-ardl* yang berfungsi memakmurkan bumi (QS Al-Baqarah: 30; Hud: 61). Kaum muslimun di mana dan kapan pun berada haruslah berpikiran maju di segala aktivitas hidup. Bangunlah kehidupan yang serba utama baik dalam *habluminallah* maupun *habluminannas* secara harmoni (QS Ali Imran: 112). Kaum muslimun yang unggul harus beriman, berislam, berihsan, berilmu, dan beramal secara simultan.

Umat Muslim juga harus mau mengubah nasib (QS Ar-Ra'd: 11) serta memperhatikan masa depan (QS Al-Hasyr: 18) sehingga mencapai kemajuan melebihi umat-umat yang lain. Dengan kualitas kemajuan yang dicapai itu maka kaum Muslim dapat menjadi *khayra ummah* (QS Ali Imran: 110) yang menjadi *ummatan wasathan* dan *syuhada ala-nas* (QS Al-Baqarah: 143). Kaum muslimun dengan pandangan Islam Berkemajuan

akan memiliki kualitas dan daya saing tinggi, sehingga kehadiranhya menjadi rahmat bagi semesta alam.

Nabi Muhammad bersama kaum Muslimun selama 23 tahun di Makkah dan Madinah memberi uswah hasanah bagaimna menyebarluaskan dan mewujudkan Islam Berkemajuan. Banyak hadis Nabi yang mengajarkan umat untuk maju dan hidup dalam keutamaan. Nabi akhir zaman itu merupakan contoh utama dari Al-Quran yang berjalan, sebagaimana kesaksian Siti Aisyah. Di jazirah Arab yang semula jahiliyah Nabi berhasil mewujudkan Islam sebagai agama yang membangun peradaban yang utama, itulah Islam sebagai *Din al-Hadlarah.*

Dari teladan Nabi Muhammad itu maka Islam menjadi agama peradaban yang maju dan unggul selama lima sampai enam abad lamanya. Itulah era kejayaan Islam, era pencerahan Islam, dan era keemasan Islam yang menyinari dunia. Kala itu Islam menyebarluas ke seluruh penjuru dunia, tatkala masyarakat Barat masih tertidur lelap di era kegelapan. Dari rahim Islam Berkemajuan itulah lahir era dunia modern Islam, yang mengilhami bangsa-bangsa lain untuk memacu peradaban baru. Dalam konteks kemajuan dalam persepektif ajaran dan kesejarahan Islam itulah maka Muhammadiyah mengaktualisasikan gerakannya di abad kedua untuk menghadirkan gerakan pencerahan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sebagai wujud misi rahmatan lil'alamin. Maka, dari Muktamar teladan di Makassar Muhammadiyah harus tampil di abad kedua mewakili gerakan Islam Berkemajuan, yang mampu menghadirkan visi mencerahkan peradaban![]

PROLOG (2)

GERAKAN PENCERAHAN MENUJU INDONESIA BERKEMAJUAN

REFLEKSI, PROYEKSI, DAN REKOMENDASI

M. DIN SYAMSUDDIN

Bismillahirrahmanirrahim

ALHAMDULILLAH haqqa hamdi, wa syukrulillahi haqqa syukri, walaa haula walla quwwata illa billah. Muktamar Muhammadiyah ke-47 telah berlangsung dari 3 sd 7 Agustus 2015 bertepatan dengan 23 sd 27 Syawal 1346 H, di Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar adalah ajang silaturahmi untuk merajut temali hati sesama kita, yang kemudian diharapkan dapat berlanjut pada silatulfikri untuk menyamakan pikiran dan langkah dalam menghadapi tantangan masa depan guna menggerakkan Persyarikatan tercinta ke arah kemajuan dan kejayaan. Muktamar berjalan dengan baik dinamis, rasional, elegan dan bermartabat, sehingga dapat disebut sebagai "Muktamar Teladan".

Sesuai dengan temanya—Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan—Muktamar kali dimaksudkan untuk meneguhkan visi keislaman Muhammadiyah yakni Islam Berkemajuan, melalui strategi

perjuangannya yakni Dakwah Pencerahan, bagi terwujudnya visi kebangsaan yaitu Indonesia Berkemajuan.

Islam Berkemajuan adalah pandangan dunia atau *wijhah/worldview* Muhammadiyah tentang Islam yang merupakan *dinul hadharah*, agama kemajuan atau peradaban. *Wijhah* ini, selain memiliki dasar teologis pada dalil-dalil naqli dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, juga mempunyai relevansi bahkan urgensi dengan realitas kehidupan umat Islam dewasa ini yang belum menunjukkan cita kemajuan. Pemajuan kehidupan umat Islam, tidak mungkin tidak, adalah dengan mengedepankan suatu wawasan dan langkah Islam Berkemajuan.

Visi Islam Berkemajuan melintasi dimensi ruang dan dimensi waktu. Visi ini tidak terkait sekat tempat tertentu, karena jika demikian Islam akan kehilangan watak universalnya. Visi ini juga tidak terikat sela masa terbatas, karena jika demikian Islam tergerus oleh sifat keabadiannya. Visi Islam Berkemajuan melampaui wilayah dalam lintang bumi dan mendahului jelajah pada garis zaman. Visi Islam Berkemajuan bertumpu dan mengacu kepada dimensi gerak, yakni proses dinamis dan sistematis dalam penciptaan karya-karya kebudayaan dalam alir dan arus kemajuan berkelanjutan (*sustainable innovation*).

Bagi Muhammadiyah, Visi Islam Berkemajuan bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari apa yang digagas oleh KH. Ahmad Dahlan sejak kelahiran Muhammadiyah seabad yang lalu. Hingga saat ini visi itu masih relevan dengan kondisi kehidupan umat Islam, namun memerlukan revitalisasi dan kontektualisasi dengan dinamika zaman baru dalam semangat "*al-muhafazhah 'alal qadimis shalih wal ijad bil jadidil ashlah*", atau memelihara yang baik dari masa lalu dan menciptakan yang terbaik dari masa kini.

Dalam kaitan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia, adalah saatnya bagi Muhammadiyah untuk merealisasikan Visi Islam Berkemajuan sebagai jalan untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan. Halini, sebenarnya, merupakan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Maka dengan demikian, Dakwah

Pencerahan Muhammadiyah adalah jihad kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Di sini terjadi perpaduan antara wawasan keislaman dan wawasan keindonesian, yang keduanya beririsan dan bermuara pada tujuan sama. Perjuangan menegakkan cita-cita nasional itu adalah pengembanan misi kekhalifahan di muka bumi, yang tentu harus bermula dari tanah kelahiran sendiri. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ranah perjuangan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, Maka Negara Pancasila dapat dipandang sebagai *Darul 'Ahdi was Syhadah* atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian. Sebagai Negara Kesepakatan, Negara Pancasila adalah memang kesepakatan di antara berbagai kelompok dan golongan; Sebagai Negara Kesaksian atau Pembuktian, Negara Pancasila menjadi ajang perlombaan berbagai kalangan untuk mengisi dan mewarnainya dengan *sibghah* masing-masing.

Bagi umat Islam perlombaan mengisi dan mewarnai Negara Pancasila dengan sibghah Islamiyah merupakan perjuangan kebangsaan dan keagamaan sekaligus. Sebagai bagian terbesar dari bangsa, umat Islam memiliki tanggung jawab terbesar pula untuk menjadi faktor determinan (penentu) atau, paling tidak, faktor efektif Indonesia; bahwa maju-mundurnya Indonesia di masa depan harus ikut ditentukan oleh maju-mundurnya umat Islam. Hal inilah yang belum menjadi kenyataan dewasa ini.

Indonesia yang Berubah

Pada Pidato Tanwir 2012 dan 2014 telah disampaikan terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan Indonesia. Perubahan itu kini semakin menyata dan membawa dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya umat Islam. Tentu perubahan itu berdimensi positif dan negatif sekaligus. Dimensi positif ditandai oleh antara lain relatif meningkatnya tarap kesejahteraan masyarakat terutama kelas menengah (bahkan terjadi ledakan kelas menengah atau *middle class booming*), semakin terbukanya masyarakat kepada akses informasi dan ilmu pengetahuan, dan semakin terbukanya

ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Namun, hal-hal demikian bukan tanpa sisi negatif, selain dampak negatif dari arus liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya yang melanda bangsa sebelumnya.

Era reformasi, yang mendorong arus liberalisasi, juga membawa kecenderungan-kecenderungan lain yang berdampak pada peran organisasi masyarakat, antara lain: Pertama, menguatnya kecenderungan hidup individualistik, materialistik, dan hedonistik dalam masyarakat, yang tentu merupakan tantangan dakwah dan kendala besar bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenarnya-benarnya. Kedua, tumbuhnya perekonomian nasional yang memunculkan kekuatan ekonomi baru, yang walaupun minoritas tapi menguasai mayoritas aset ekonomi. Sebagai akibatnya, merajalela kekuatan uang yang mendorong pemilik modal memasuki dunia politik. Politik uang ini membawa daya rusak kuat terhadap kualitas demokrasi dan potensial mendorong demoralisasi rakyat. Ketiga, sebagai akibat amandemen konstitusi yang antara lain memberi kewenangan besar bagi partai-partai politik untuk menentukan keputusan politik strategis, maka proses politik dimonopoli oleh partai-partai politik. Sebagai akibatnya, organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki anggota acapkali terseret kepada kepentingan partai-partai politik, menjadi subordinat partai politik atau menjadi pelengkap penyerta, kalau tidak pelengkap penderita, dalam kehidupan politik.

Demokratisasi Indonesia

Demokrasi adalah pilihan baik, dan adalah tidak baik kita membalik arah jarum jam sejarah ke masa otoritarianisme. Namun, jika demokratisasi dibiarkan berjalan bebas dan liar tanpa kendali norma dan etika, maka akan muncul "otoritarianisme" baru dalam bentuk "kebebasan tak bertanggung jawab".

Inilah yang menggejala pada kehidupan politik nasional kita. Adalah benar bahwa demokrasi telah membawa hal positif bagi kehidupan bangsa seperti terbukanya ruang kebebasan berekspresi, terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan politik, terjadinya

desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke Daerah. Namun, pengamalan ajaran-ajaran demokrasi dari madzhab paling liberal bukan tanpa dampak negatif. Pemilihan langsung telah ikut mengganggu kohesi dan soliditas sosial masyarakat. Perbedaan kepentingan dalam Pemilu telah merusak ukhuwah bukan hanya *hizbiyah* tapi juga *jam'iyyah* dan pada giliran berikutnya merusak ukhuwah Islamiyah. Inilah yang telah terjadi pada Pemilu Legislatif, kala para kader dan tokoh dari suatu organisasi harus berhadapan (*head to head*) pada satu Daerah Pemilihan, baik dari partai-partai berbeda atau pun partai yang sama. Mereka tidak hanya mengail ikan di kolam yang sama, tapi saling melemparkan ikan ke muka kawan/lawannya.

Kerusakan semakin diperparah oleh keadaan bahwa persaingan di arena demokrasi membawa serta politik uang (*money politics*). *The power of money* (keuangan yang maha kuasa) ikut menentukan posisi dan kuasa politik. Sebagai akibatnya, kaum pemilik modal dapat mengendalikan dan mendiktekan arah kehidupan politik yang mendorong terjadinya politik transaksional. Kecenderungan ini potensial melahirkan "boneka-boneka politik" ataupun "kuda-kuda tunggangan politik". Mereka tampil atas *sponsorship* dan akan membalas budi kepada para sponsor. Inilah yang mendorong terciptanya lingkaran setan kolusi dan korupsi di negeri ini. Para politisi dengan kedua corak ini sulit diharapkan dapat melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam kehidupan bangsa. Yang tercipta adalah justeru lingkaran setan kerusakan.

Perubahan struktural yang menjadi tugas dan tanggung jawab partai-partai politik kurang membawa kebaikan terhadap perubahan kultural, bahkan perubahan struktural itu potensial membawa keburukan pada kehidupan kultural. Organisasi-organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada perubahan kultural menghadapi tantangan berat, yaitu harus menyanggah kerusakan tersebut. Organisasi-organisasi masyarakat yang harus memfokuskan perhatian pada penguatan landasan budaya masyarakat, kemudian kehilangan waktu karena terpaksa menanggulangi kerusakan-kerusakan dari limbah perubahan pada tataran struktural.

Dalam kaitan ini, Persyarikatan Muhammadiyah menghadapi tantangan dari dinamika politik nasional yang menampilkan persaingan antara partai-partai politik yang memiliki jalur resmi dalam proses pengambilan keputusan strategis di lembaga legislatif dan eksekutif, dan dilema Muhammadiyah antara peran utamanya sebagai gerakan kebudayaan pada satu sisi, dan tuntutan untuk ikut berperan dalam politik kebangsaan pada sisi lain.

Tantangan dan dilema itu bersumber dari realitas kehidupan kebangsaan yang telah berubah sejak era reformasi yang mendorong arus deras liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai akibatnya, tatanan kehidupan bangsa dan negara berubah, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan budaya. Konfigurasi sosial mengalami perubahan fundamental dengan munculnya kelompok-kelompok baru baik internal maupun eksternal umat Islam. Pusat-pusat kekuasaan sosial-ekonomi mengalami pergeseran dengan tampilnya kelompok pemilik modal yang menguasai bahkan memonopoli aset ekonomi dan pada giliran berikutnya mengendalikan dan mendiktekan kehidupan politik nasional.

Dalam latar perubahan dan realitas demikianlah Persyarikatan Muhammadiyah berada dan mengada. Gerakan Pencerahan Muhammadiyah, yang seharusnya melakukan perubahan, ternyata tidak luput dari imbas perubahan itu. Dalam kaitan perubahan, Muhammadiyah menempati posisi sebagai subyek dan obyek perubahan sekaligus, karenanya pada suatu waktu Muhammadiyah bisa berperan sebagai pemecah masalah bangsa (*problem solver*), tapi pada waktu lain ia menjadi bagian dari masalah (*part of the problem*).

Inilah tantangan dan dilema yg dihadapi Gerakan Pencerahan Muhammadiyah dewasa ini. Tantangan harus dihadapi dan dilema harus diatasi. Maka diperlukan dua hal: Mekanisme pertahanan diri (*self defense mechanism*) untuk menghadapi masalah dan tantangan yangberjangka pendek, dan strategi kebudayaan (*strategy of culture*) untuk menghadapi masalah dan tantangan yang berjangka panjang. Sebenarnya Muhammadiyah secara memadai memiliki konsep-konsep dasar terkait kedua hal tersebut, seperti Strategi Dakwah Kultural, Pikiran

Muhammadiyah Jelang Satu Abad, Pikiran Muhammadiyah Satu Abad, Program Persyarikatan, dan Nilai-nilai Dasar keorganisasian lainnya. Namun, penerapan konsep-konsep strategis itu memerlukan penyesuaian diri dengan dinamika eksternal baru, pemahaman yang dalam dan utuh, dan komitmen serta keyakinan yang kuat dari segenap pemangku amanat dan generasi penerus Gerakan Pencerahan Muhammadiyah.

Dinamika Gerakan

Sejak Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta Tahun 2010, Gerakan Pencerahan Muhammadiyah berlangsung dengan cukup dinamis. Cukup banyak cabang dan ranting baru yang bisa didirikan atau dihidupkan kembali; cukup banyak amal usaha baru yang bisa didirikan khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan; amal usaha pendidikan walau bertambah sedikit tapi cukup banyak yang mengalami peningkatan kualitas, beberapa perguruan tinggi baru dapat didirikan dan satu-dua sudah memperoleh predikat A institusi; upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak diuntungkan oleh proses pembangunan dapat disentuh walau belum masif; pemberdayaan ekonomi sudah mulai bangkit; relawan Muhammadiyah dapat hadir relatif cepat pada setiap bencana; tabligh dan tarjih tetap berlangsung memberi pencerahan; kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah untuk berzakat dan berwakaf masih ada; dan kegiatan-kegiatan lain yang bergerak maupun setengah bergerak.

Program-program monumental dan strategis dapat dimulai, seperti pembuatan Tafsir *At-Tanwir*. Tafsir ini sangat penting, selain akan menjadi rujukan keagamaan penting bagi warga Muhammadiyah dan umat Islam, juga akan menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah benar sebagai gerakan pencerahan. Prestasi sejumlah sekolah Muhammadiyah patut dibanggakan. Dalam bidang informasi, setelah perjuangan panjang sejak rekomendasi Muktamar Banda Aceh 1995, Televisi Muhammadiyah (TVMu) dapat diluncurkan walau masih belum dapat bersaing dengan televisi-televisi lain. Penyelenggaraan lembaga penyiaran ini ternyata tidak mudah dan tidak murah, maka harus terus diupayakan dukungan dari

segenap warga Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah. Siaran cerdas-mencerahkan TVMu tidak boleh kehilangan nafas dan merasa lelah; Sekali mengudara harus tetap mengudara.

Pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu di beberapa daerah memiliki arti strategis. Kegiatan ini merupakan pengamalan nyata dari Teologi Al-Maun, yaitu agar Muhammadiyah memberi perhatian terhadap kaum dhuafa dan mustadh'afin (*the deprived people*) yang menjadi korban dari proses pembangunan atau modernisasi. Dengan demikian Gerakan Dakwah Pencerahan berlangsung pada dua tataran strategis, memberdayakan yang masih lemah dan memajukan yang sudah berdaya.

Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian dapat didukung oleh Lazismu, yang sejak didirikan pada 2001 tetap menunjukkan kiprahnya sebagai salah satu ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Kendati perolehan dana belum terlalu signifikan, namun Lazismu dengan unit-unit pelaksana kerja di berbagai daerah memiliki arti penting bagi pelangsungan semangat filantropi di kalangan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.

Selain dakwah kepada kemajuan (*ad-da'wah ilal khair*), Gerakan Pencerahan pada sisinya yang lain yakni *amar ma'ruf nahi mungkar* harus tetap dilakukan, karena keduanya adalah prasyarat kemenangan. Jika yang kedua tidak dilakukan maka hasil yang pertama boleh jadi runtuh dan pupus karena terpaan badai kemungkaran dan kemaksiatan membawa daya rusak dahsyat. Hal ini menjadi serius lantaran kerusakan itu ikut diciptakan oleh peraturan dan kebijakan negara, seperti adanya sejumlah Undang-Undang dan turunannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu sebagai akibatnya tidak dapat mewujudkan kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Muktamar Yogyakarta 2010, maka setelah melalui pembahasan panjang dan mendalam, sejak 2011Muhammadiyah melancarkan gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* baru yaitu Jihad Konstitusi. Sudah banyak Undang-Undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, seperti UU tentang Migas, UU tentang Sumber Daya Air, dan UU tentang Ormas, yang kesemuanya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan pelurusan proses demokrasi, serta UU tentang

Rumah Sakit yang berhubungan dengan kepentingan Muhammadiyah. Alhamdulillah, dapat dikatakan bahwa sebagian besar permohonan Muhammadiyah dan para pendukung Muhammadiyah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir ini, Muhammadiyah sudah mendaftarkan tiga Undang-Undang sekaligus, yakni UU tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (sering disebut tentang Devisa Bebas), UU tentang Penanaman Modal, dan UU tentang Ketenagalistrikan. Ketiganya sangat berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi nasional, keuangan negara. dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Jihad Konstitusi merupakan bentuk dari *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berupaya untuk mencegah kerusakan pada hulunya. Oleh karena itu, walaupun memerlukan waktu panjang dan sangat melelahkan, Jihad Konstitusi untuk meluruskan "Kiblat Bangsa" tidak boleh berhenti.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia adalah penunaian misi *Islam rahmatan lil 'alamin* secara nyata. Kita tentu bersyukur atas apresiasi pihak luar terhadap keterlibatan Muhammadiyah sebagai anggota International Contact Group (ICG) pada pembicaraan damai (*peace talks)* antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) untuk mengatasi konflik berdarah yang melibatkan saudara-saudara Muslim di Mindano. Begitu pula, patut disyukuri bahwa Muhammadiyah dapat berperan aktif mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan dengan ikut membantu saudara-saudara Muslim di empat provinsi setempat untuk belajar di sejumlah Universitas Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga diajak untuk ikut terlibat mengatasi konflik berdarah antara umat Kristiani dan umat Islam di Republik Afrika Tengah dan di dua provinsi Nigeria, serta melanjutkan pembelaan bagi kemerdekaan Palestina dan kemerdekaan Kosovo. Di samping terlibat dalam resolusi konflik tersebut, Muhammadiyah dengan bekerja sama dengan lembaga/organisasi internasional juga aktif dalam menghadiri dan menyelenggarakan fora dialog antar agama dan antar peradaban, serta mengembangkan hubungan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi Islam di mancanegara. Kiprah *go international* dan peran global ini adalah suatu kemestian langkah bagi Muhammadiyah

pada era globalisasi dewasa ini, baik sebagai tuntutan dari keadaan maupun panggilan untuk merealisasikan misi kerahmatan dan kesemestaan Islam.

Penunaian langkah-langkah baru tersebut selain memiliki arti strategis bagi masyarakat dan kemanusiaan universal, juga bersifat komplementer terhadap Gerakan Pencerahan Muhammadiyah sebelumnya, khususnya yang mengambil bentuk pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Memang harus diakui bahwa tidak banyak "prakarsa tajdid" yang dapat dilakukan. Selain karena tajdid tidak lagi menjadi monopoli Muhammadiyah, juga disebabkan oleh karena tidak cukup tersedianya sumber daya manusia dan sumber dana, serta iklim tajdid (*biah tajdidiyah*) di tubuh Persyarikatan untuk lebih tampil sebagai Gerakan Pencerahan.

Kendala Gerakan

Gerakan Pencerahan Muhammadiyah menghadapi kendala-kendala yang bersifat internal dan eksternal, juga bersifat struktural dan kultural. Kendala eksternal berkaitan dengan perkembangan dan perubahan pada skala nasional Indonesia dan pada skala regional Asia Timur dan dunia. Kawasan Asia Timur, di mana Indonesia berada, menjadi kawasan pertumbuhan sejalan dengan pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik. Sebagai akibatnya, kekuatan-kekuatan ekonomi dunia mengalihkan perhatian ke negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Maka Indonesia menjadi obyek tarik menarik atau "rebutan" kekuatan-kekuatan adidaya tadi.

Dinamika regional dan global tersebut tentu membawa dampak domestik. Persaingan global kini merambah ranah domestik yang menampilkan komprador-komprador pihak asing baik perorangan maupun kelompok. Umat Islam, jika tidak siap, akan terkena imbas bahkan sasaran persaingan itu.

Sayangnya, pemerintah yang diharapkan dapat menampilkan fungsi melindungi dan melayani ternyata tidak cukup aktif dan efektif dalam melakukan aksi-aksi keberpihakan (*affirmative actions*). Bahkan, yang terjadi adalah pemerintah membuka jalan dan pintu lebar bagi pengaruh

asing tersebut. Celakanya, intervensi asing itu mempengaruhi proses legislasi dan penentuan kebijakanpemerintah, seperti terbukti pada banyaknya regulasi yang berpihak pada kepentingan asing.

Kendala besar Dakwah Pencerahan (*tanwir*) adalah adanya "Dakwah Penggelapan" (*tazhlim*) dalam berbagai manifestasinya. "Dakwah" terakhir ini berlangsung secara terrencana dan terarah menghasilkan kemungkaran terorganisasi (*organized munkarat*) yang membawa kerusakan serius dalam kehidupan umat dan bangsa.

Dilema Gerakan

Gerakan Pencerahan Muhammadiyah menghadapi dilema. Dilema ini lahir dari tarik-menarik antara watak hakiki Muhammadiyah dan dinamika sosial-politik yang dihadapinya. Pemahaman warga Muhammadiyah terhadap hakikat gerakan Muhammadiyah dan dinamika sosial-politik yang beragam membawa perbedaan corak aktualisasi diri organisasi dan pribadi. Tak jarang perbedaan itu memunculkan ketegangan bahkan perpecahan, apalagi jika ada intervensi kepentingan politik eksternal.

Muhammadiyah sejatinya adalah gerakan kebudayaan, bukan gerakan politik-kekuasaan. Namun, karena Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan, apalagi mementingkan ajaran amar makruf nahi munkar, maka Muhammadiyah tentu terlibat menegakkan moral dan etika dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Sebagai konsekwensi logis, Muhammadiyah terlibat dalam politik moral. Dalam kenyataan historis, Muhammadiyah tidak pernah tidak berpolitik memperbaiki moral bangsa. Pada awal kelahirannya Muhammadiyah berperan aktif dalam politik kebangsaan melalui keterlibatan dalam Boedi Oetomo (kediaman pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan menjadi tempat rapat-rapat Boedi Oetomo). Menjelang kemerdekaan Muhammadiyah berada di garda terdepan berjuang menegakkan kemerdekaan (Gerakan Kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan, dan menampilkan pejuang-pejuang seperti Sudirman; Ketua PP Muhammadiyah waktu

itu, KH. Mas Mansur, menjadi satu dari Empat Serangkai Tokoh Indonesia yang berhubungan dengan Pemerintah Penjajah Jepang). Di seputar kemerdekaan, dalam BPUPKI dan PPKI, terdapat tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Prof. Kahar Mudzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, yang berjasa dalam peletakan kerangka dasar negara.

Begitu pula pada episode sejarah kebangsaan selanjutnya, baik melalui tokoh-tokohnya maupun langsung secara kelembagaan, Muhammadiyah aktif dalam politik kebangsaan. Pada era Orde Lama, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Di awal era Orde Baru, Muhammadiyah aktif melahirkan Parmusi, dan menempatkan tokoh-tokohnya di jajaran pimpinan teras partai itu. Pengalaman pahit dalam Parmusi ikut mendorong Muhammadiyah untuk menegaskan khittah politiknya pada Muktamar 1971 di Makassar bahwa "Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun".

Khittah tersebut berfungsi meneguhkan organisasi sebagai gerakan keagamaan dan kebudayaan, dan menyelamatkan organisasi dari tarikan pengaruh partai politik. Dengan demikian Muhammadiyah tetap dapat mempertahankan marwahnya sebagai elemen masyarakat madani yang berpengaruh.

Pada sisi lain, dinamika sosial-politik sejak era reformasi (1998 sampai dengan sekarang), yang membuka peluang luas bagi partisipasi politik dan mobilitas sosial-politik warga masyarakat, menggoda sebagian anggota Muhammadiyah untuk terjun ke politik (praktis) kekuasaan atau *power politics*. Mereka "tergoda" untuk memasuki partai politik atau mendirikan partai politik. Bahkan banyak kader Muhammadiyah yang bercita-cita menjadi politisi sebagai jalur karier masa depan. Jika kecenderungan ini menimpa anggota biasa mungkin tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melanda anggota pimpinan (pemangku amanat), maka masalah menjadi serius, karena selain dapat mengganggu suasana hidup berorganisasi, juga potensial menimbulkan konflik kepentingan apalagi jika para kader menampilkan loyalitas ganda.

Inilah salah satu dilema yang dihadapi Muhammadiyah pada rezim partai politik dewasa ini. Muhammadiyah tentu memandang politik secara positif, sebagai aspek penting yang tidak terpisah dari agama. Dakwah Pencerahan Muhammadiyah meniscayakan dukungan politik, khususnya dari proses pengambilan keputusan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Kalau dulu para kader politik ini tersedia secara alamiah dari keberhasilan pendidikan dan pengkaderan Muhammadiyah, yang melahirkan sumber daya insani handal dan mumpuni, tapi sekarang menuntut adanya perekayasan sistematis.

Memang, kalau Muhammadiyah menginginkan ada kadernya yang berperan di lembaga legislatif dan eksekutif (kabinet) maka Muhammadiyah harus mendorong sebagian kadernya untuk menjadi fungsionaris partai-partai politik (tentu sebagai pimpinan bukan sekedar pekerja dalam partai). "Ketiadaan" kader Muhammadiyah dalam kabinet, umpamanya, adalah karena tiadanya kader Muhammadiyah yang memiliki peran penentu dalam partai-partai politik (misalnya sebagai ketua umum atau sekretaris jenderal partai). Keberadaan kader organisasi lain dalam kabinet adalah karena mereka menguasai kepemimpinan partai-partai politik, atau karena atas pertimbangan profesionalitas. Era rezim partai politik dewasa ini, sesuai amandemen konstitusi, kurang atau tidak memberi peluang bagi wakil organisasi masyarakat (kader Ormas mungkin saja terekrut tapi melalui endorsemen partai politik).

Dilema yang ada sering dilihat oleh sementara pimpinan dan warga sebagai tantangan bahkan ancaman bagi Muhammadiyah. Namun, bagi kalangan lain hal demikian justeru menyediakan peluang bagi Muhammadiyah untuk membangkitkan dan mengembangkan kemandirian organisasi, dan mengukuhkan organisasi sebagai elemen masyarakat madani sejati.

Agenda ke Depan

Menghadapi tantangan dan dilema di atas, Muhammadiyah tidak harus kehilangan asa dan kepercayaan diri. Muhammadiyah sesungguhnya

besar dan masih memiliki kebesaran. Muhammadiyah juga mempunyai pengalaman banyak menghadapi situasi serupa pada masa lalu, dan alhamdulillah berhasil melewati ujian dan cobaan sejarah. Bahkan, pengalaman sejarah itu mendatangkan hikmah dan anugerah yang membawa Muhammadiyah mengalami kemajuan menggembirakan.

Tekanan politik pada masa Orde Lama, ketika Bung Karno menerapkan Nasakom, Partai Masyumi yang dekat Muhammadiyah dibubarkan, dan banyak tokoh Muhammadiyah dipenjara, tidak membuat Muhammadiyah gaming dan goyang, justeru mendorong Dakwah Muhammadiyah tetap berlangsung dan Muhammadiyah mendapat peluang untuk tampil kembali di arena politik di awal Orde Baru dengan mendirikan Parmusi. Begitu pula, pada Era Orde Baru yang menerapkan monoloyalitas pegawai negeri dan strategi deislamisasi/deparpolisasi Islam, dakwah Muhammadiyah tetap dapat berlangsung walau tertatih-tatih dan bahkan memiliki momentum melakukan revivalisasi kultural Islam. Sebagai hasilnya, setelah itu terjadi kebangkitan kultural Islam (*Islamic cultural revival*) yang mendorong Islamisasi lanjutan.

Era Reformasi sesungguhnya menyediakan peluang bagi umat Islam (kelompok politik Islam) terutama dengan terbukanya ruang kebebasan dan demokrasi. Namun, karena keadaan demikian telah tidak dapat dikelola dengan taktis dan strategis, peluang yang ada hilang atau berkurang dan dikuasai pihak lain, terutama kaum pemilik modal dan mitra kolusinya.

Situasi politik nasional yang dihadapi Muhammadiyah dewasa ini selain mengandung tantangan juga membawa peluang. Seandainya Muhammadiyah mampu mengubah tantangan menjadi peluang, maka inilah saatnya Muhammadiyah mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri, seperti yang dimilikinya pada beberapa dasawarsa awal keberadaanya.

Menghadapi situasi dan kondisi demikian, ada beberapa opsi peran politik bagi Muhammadiyah:

Pertama, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai Gerakan Dakwah Pencerahan yang berorientasi kultural, yakni berorientasi pada penguatan landasan budaya dalam masyarakat, dengan tetap menjalankan

aktifitas politik tapi sebatas politik moral atau politik amar makruf nahi munkar. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak terpengaruh sama sekali terhadap politik kekuasaan, dan hubungan dengan partai politik dilakukan melalui pendekatan menjaga kedekatan yang sama (*keep close*) dengan semua partai politik. Dalam pemilu legislatif dan eksekutif (Pilpres) Muhammadiyah bersikap netral (tidak berpihak atau menjadi partisan). Namun yang pasti, Muhammadiyah harus tetap selalu berpihak kepada nilai-nilai kebenaran (berpolitik dengan prinsip), mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, tanpa harus takut terpinggirkan.

Kedua, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai Gerakan Dakwah Pencerahan yang berorientasi kultural, namun Muhammadiyah memandang penting jalur dakwah lewat politik (*da'wah bis siyasah*), maka Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha, atau mengembangkan "hubungan khusus" dengan partai politik tertentu, sebagai partai utama. Bedanya, pada yang pertama, Persyarikatan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai, sedangkan pada yang kedua partai memiliki independensi dan hubungan dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif (bukan sekedar simbolis).

Ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai Gerakan Dakwah Pencerahan yang berorientasi kultural, dan mengembangkan kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Namun, pada saat Pemilu (legislatif dan eksekutif) mendukung calon-calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, tentu dengan syarat mereka mempunyai sifat amanah/ bertanggung jawab, memiliki kecakapan, integritas moral, dan kapasitas intelektual, serta loyal atau peduli kepada organisasi Muhammadiyah. Pada opsi yang ketiga ini, orientasi politik Muhammadiyah bersifat rasional dan *ad hoc*, sangat tergantung kepada individu dan partai yang akan dipilih.

Apapun opsi peran politik Muhammadiyah di masa depan, yang utama adalah bahwa itu dijalankan atas tujuan dan kepentingan Dakwah Pencerahan Muhammadiyah, *izzul Islam wal Muslimin*, dan perwujudan cita-cita nasional: Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

Watak sejati Muhammadiyah ini sangat relevan dan penting untuk direvitalisasi dan diaktualisasi, yakni Muhammadiyah tetap pada misi suci kelahirannya: mencerahkan peradaban bangsa (*enlightening the nation*). Untuk itu, pendekatan politik Muhammadiyah adalah politik tinggi (*high politics*) yaitu politik adiluhung untuk mengalokasikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadaban, dan kemaslahatan, dari ranah hidup kemasyarakatan atau kebangsaan, baik dengan terlibat atau tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Dengan politik adiluhung, Muhammadiyah akan menjadi kekuatan efektif meluruskan kiblat bangsa. Seperti pada lirik Lagu Tema Muktamar—*Dari Makassar ke Makassar, khittah jadi pegangan dasar, gerakan pencerahan kian besar, Indonesia berada di jalan benar*—pilihan Muhammadiyah untuk menjadi gerakan kebudayaan dan peradaban sudahlah tepat. Jika pilihan ini dipertahankan dan ditingkatkan maka Muhammadiyah akan semakin mengukuhkan diri sebagai elemen masyarakat madani yang riil dengan kemandirian tinggi. Sebagai dampak sistemiknya, bangsa dan negara akan terjaga dan mengalami kemajuan serta kejayaan. Dalam hal inilah, Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah tidak sekedar menjadi Pembantu Pemerintah tapi Penentu Negara.

1
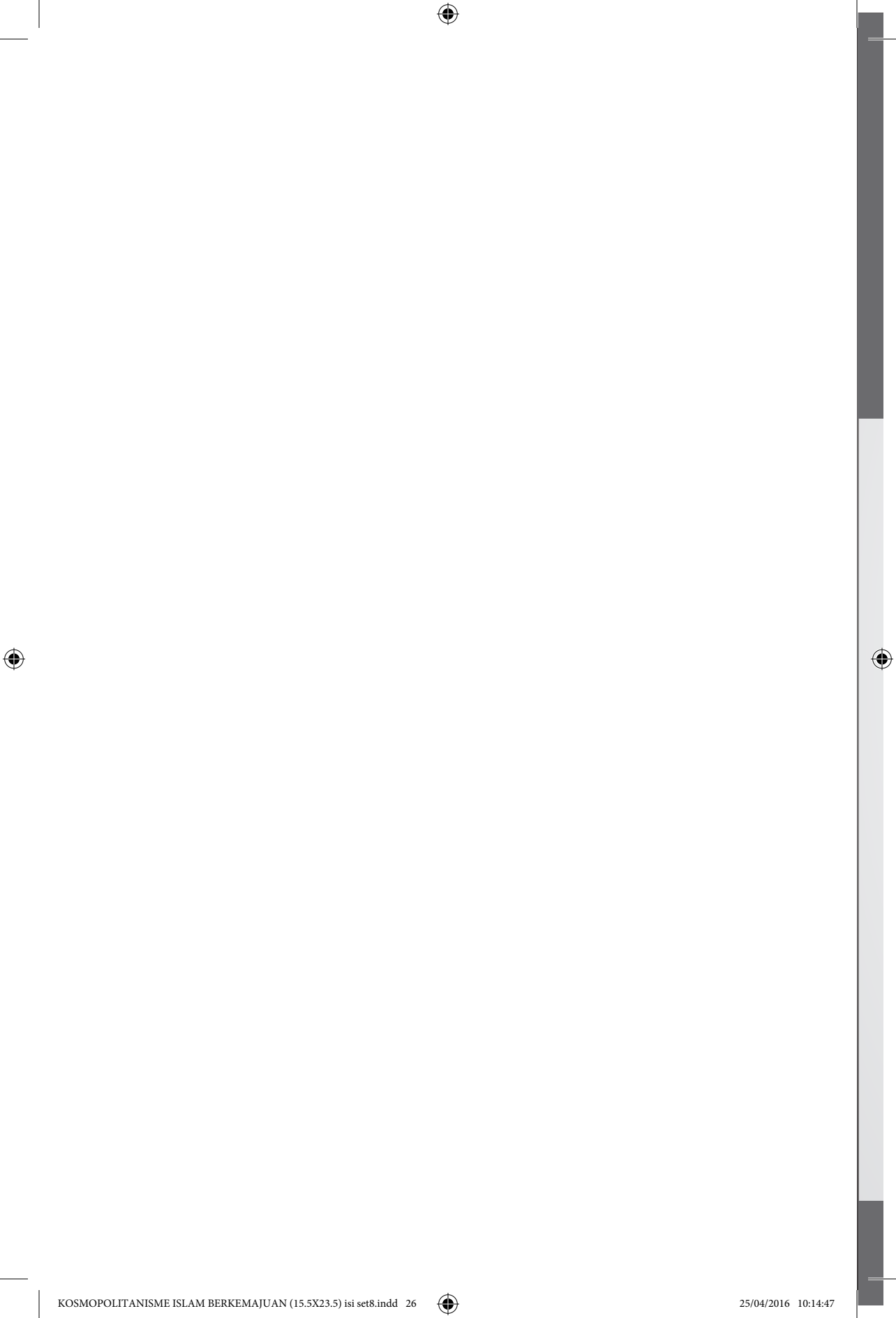
MUKTAMAR TELADAN

Muktamar Muhammadiyah (1) Kiprah Pencerah di Segala Zaman

ANITA YOSSIHARA

DIKISAHKAN, murid-murid KH Ahmad Dahlan merasa bosan karena sang guru terus-menerus mengajarkan Al-Qur'an Surat Al-Maun secara berulang-ulang. Para murid itu pun bertanya, mengapa Dahlan tidak beranjak mengajarkan surat lain. Dahlan pun balik bertanya, apakah murid-muridnya itu sudah mengamalkan Surat Al-Maun?

Para murid menjawab, mereka sudah mengamalkan, bahkan sudah menjadikan Al-Maun sebagai bacaan di setiap shalat.

Jawaban para murid itu tak membuat Dahlan berhenti mengajarkan Surat Al-Maun. Pria bernama kecil Muhammad Darwis itu malah meminta para murid untuk mendalami dan mengamalkan surat yang berisi seruan untuk tidak mengabaikan kaum marjinal tersebut.

Kisah itu menunjukkan bagaimana Dahlan, yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 1912, menyampaikan pentingnya kesalehan sosial. Bahwa ilmu agama harus diamalkan, direalisasikan dalam gerakan praksis.

Sari pati Surat Al-Maun itu pulalah yang menjadi salah satu rujukan Muhammadiyah untuk menjadi gerakan pembaruan (tajdid), seperti ditegaskan dalam Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.

Seperti dipaparkan Haedar Nashir dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Juni lalu, teologi Al-Maun melahirkan transformasi Islam untuk mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan.

Pernyataan Haedar itu tak berlebihan. Sejak berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah tak hanya berkiprah di bidang agama, tetapi juga fokus mengembangkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial.

Muhammadiyah hadir untuk menjawab tantangan zaman kala itu. Di bidang keagamaan, masih banyak ditemui ritual keagamaan yang kurang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (perkataan, perbuatan, serta perilaku Nabi Muhammad SAW). Seperti sebut saja takhayul, bidah (mengada-ada dalam beribadah), dan khurafat (animisme dan dinamisme).

Di bidang sosial, rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Hindia-Belanda umumnya masih miskin dan terbelakang. Mereka juga sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Buka Klinik Pengobatan

Untuk membuka akses kesehatan bagi masyarakat, Muhammadiyah mendirikan Pertolongan Kesengsaraan Oemat (kini disingkat PKU). Persyarikatan berlambang matahari bersinar itu pun membangun Rumah Miskin sebagai wadah perjuangan penanggulangan kemiskinan. Tak ketinggalan, panti asuhan anak didirikan untuk membantu kehidupan anak yatim.

Bahkan, dalam pendidikan, Dahlan sudah lebih dulu mendirikan sekolah Islam modern bernama Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan Hindia-Belanda itu dibentuk pada 1911. Tak seperti umumnya sekolah Islam kala itu, sekolah yang didirikan Dahlan sudah modern, diadakan di dalam ruang kelas, lengkap dengan meja, kursi, dan papan tulis.

Modernisasi juga terlihat dari kesadaran persyarikatan tentang pentingnya media massa sebagai ajang dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* (mengajak berbuat baik dan memerangi kemungkaran). Tiga tahun

setelah berdiri, Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama *Soewara Moehammadijah* (sekarang *Suara Muhammadiyah*).

Apa yang dirintis Dahlan pada awal berdiri Muhammadiyah terus berkembang hingga melintasi satu abad usia persyarikatan. Saat ini, Muhammadiyah memiliki lebih dari 12.000 sekolah Muhammadiyah, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah lanjutan. Tak hanya itu, Muhammadiyah juga mendirikan lebih dari 172 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Persyarikatan juga memiliki lebih dari 457 rumah sakit, ratusan balai pengobatan, dan panti asuhan. Untuk mendorong kegiatan perekonomian, Muhammadiyah mendirikan bank perkreditan rakyat serta pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

Islam Berkemajuan

Sejak awal berdiri, Muhammadiyah juga sudah memosisikan diri sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Hal itu salah satunya terlihat dalam statuta pertama Muhammadiyah yang menyatakan persyarikatan itu didirikan untuk memajukan agama beserta anggotanya.

Haedar membenarkan bahwa sejak awal Muhammadiyah menjadikan tajdid (pembaruan), reformis, dan modernis sebagai ideologi. Ideologi itu akan tetap dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi Muhammadiyah.

Tokoh intelektual Muhammadiyah, Achmad Jainuri, dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjelaskan, ada tiga aspek penting dalam wawasan Islam Berkemajuan. Pertama, filsafat keterbukaan, toleransi, dan pluralitas, di mana Muhammadiyah memahami keanekaragaman dalam konteks budaya.

Aspek kedua, memaknai ibadah dalam konteks kehidupan sosial yang sangat luas. Artinya, Muhammadiyah memandang ibadah bukan hanya sebagai ibadah yang jika sudah dilaksanakan maka gugurlah kewajiban seorang Muslim. Lebih dari itu, ibadah ditarik dalam konteks tanggung jawab sosial.

"Misalnya puasa, itu tidak dimaknai sebagai kewajiban saja. Puasa dimaknai sebagai ibadah untuk membentuk identitas diri menjadi orang yang sabar dan bisa menahan diri," kata Jainuri.

Aspek ketiga, lanjut Jainuri, adalah filsafat praksis. Muhammadiyah lebih mengutamakan amal dibandingkan pendekatan teologis. Hal itu terlihat dari tindakan Dahlan yang mengutamakan pembentukan berbagai amal usaha dibandingkan memperdebatkan masalah ketuhanan.

Komitmen untuk melakukan gerakan pencerahan (*tanwir*) kembali dikukuhkan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua usia persyarikatan. Muhammadiyah memaknai pencerahan sebagai gerakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.

Muhammadiyah memosisikan Islam sebagai jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan zaman, terutama persoalan-persoalan yang menyangkut kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lainnya.

Dalam pemikiran abad kedua Muhammadiyah dipaparkan bahwa persyarikatan meyakini Islam tidak hanya mengandung ajaran berupa perintah dan larangan, tetapi juga petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Kiprah Muhammadiyah sebagai Gerakan Pencerahan sudah diakui para pemimpin bangsa dan kalangan intelektual, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berbagai amal usaha yang didirikan, Muhammadiyah hadir di tempat-tempat di mana negara tidak hadir.

Hal itu pula yang mendasari banyak kalangan menaruh asa besar pada Muhammadiyah, tak terkecuali Soekarno, presiden pertama Indonesia. Saat memberikan sambutan dalam Muktamar setengah abad Muhammadiyah di Jakarta, 1962, Soekarno meminta masyarakat Indonesia, khususnya anggota Muhammadiyah, lebih banyak menyumbangkan tenaga, usaha, dan pikiran untuk mengabdi pada Tuhan, tanah air, dan bangsa.

Kini, setelah lebih dari 50 tahun berlalu, bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Saat-saat seperti inilah sumbangan tenaga, usaha, dan pikiran Muhammadiyah sangat dibutuhkan. Gerakan Pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan yang dijadikan tema Muktamar ke-47

Muhammadiyah diharapkan tak sebatas retorika. Banyak harapan Muhammadiyah bisa menjadi pencerah di segala zaman.[]

KOMPAS, 7 Juli 2015. Penulis adalah wartawan *KOMPAS*.

Muktamar Muhammadiyah (2)
Jihad Kebangsaan Muhammadiyah

Anita Yossihara

Muhammadiyah menempatkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai negara perjanjian atau kesepakatan (*darul ahdi*), negara kesaksian atau pembuktian (*darus syahadah*), serta negara yang aman dan damai (*darussalam*). Tidak ada keraguan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu ditegaskan dalam pokok pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012 yang ditetapkan dalam sidang Tanwir di Bandung, Jawa Barat. Muhammadiyah meneguhkan Indonesia sebagai negara hasil konsensus nasional yang mengikat semua komponen bangsa.

Sebagai hasil konsensus, Muhammadiyah merasa harus turut serta mengisi dengan pembangunan di berbagai bidang. Muhammadiyah juga menyadari pentingnya mendorong dan membantu bangsa mencapai cita-cita kemerdekaan, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Berkemajuan

Muhammadiyah berkomitmen menjadikan bangsa Indonesia sebagai Negara Berkemajuan. Negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan

berdaulat, seperti cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang Indonesia merdeka yang pada 17 Agustus 2015 nanti tepat berusia 70 tahun, Muhammadiyah melihat banyak kemajuan yang dicapai. Kemajuan yang dimaksud Muhammadiyah adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan berdemokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralitas yang terjaga dengan baik.

Meski demikian, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rizal Sukma, dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, menjelaskan, ada tiga persoalan mendasar yang berulang kali dihadapi bangsa Indonesia. Tiga persoalan itu adalah stagnasi, deviasi, dan distorsi kehidupan kebangsaan.

Tiga persoalan itu terlihat dari masih masifnya korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia belum juga terwujud.

Padahal, menurut Rizal, Indonesia memiliki modal menjadi negara maju atau berkemajuan. Salah satunya modal sejarah dan budaya yang telah terbukti berhasil menumbuhkan nasionalisme dan memerangi kolonialisme.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa sebenarnya sudah terlihat jauh sebelum kemerdekaan. Persyarikatan melahirkan banyak kader yang terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sebut saja Jenderal Sudirman, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Muzakir, Kasman Singodimedjo, dan lainnya. Para kader Muhammadiyah juga terlibat aktif dalam pembahasan Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam masa awal pembangunan negara-bangsa Indonesia turut menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Muhammadiyah sangat menyadari pentingnya memajukan bangsa, seperti cita-cita yang tercantum dalam konstitusi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Zainudin Maliki

mengatakan, kesadaran itu timbul karena sejak awal berdiri Muhammadiyah memang tak bisa lepas dan melepaskan diri dari politik.

Jihad Konstitusi

Peran yang diambil Muhammadiyah bukanlah politik praktis, melainkan politik kebangsaan. Jika dahulu peran politik Muhammadiyah ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangunan bangsa, kini Muhammadiyah punya ladang perjuangan lain. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebutnya jihad konstitusi.

Saat ini, Muhammadiyah melihat salah satu hambatan terwujudnya cita-cita kemerdekaan adalah banyak perilaku dan kebijakan yang menyimpang dari konstitusi. Oleh karena itulah Ketua Umum PP Muhammadiyah menyerukan jihad konstitusi.

Jihad dalam Islam berarti mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai yang diridai Allah SWT. Muhammadiyah mengartikan jihad konstitusi sebagai gerakan untuk mengembalikan undang-undang agar tak menyimpang dari konstitusi.

Muhammadiyah telah menginventarisasi, sedikitnya 115 undang-undang yang melanggar konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bukan hanya itu, Pasal 33 UUD 1945 itu juga mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Hal ini membuat Muhammadiyah mengajukan gugatan uji materi undang-undang yang dianggap telah menyeleweng dari amanat konstitusi. Semenjak 2012, Muhammadiyah telah mengajukan uji materi sedikitnya tujuh undang-undang.

Empat di antaranya sudah dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.

Keempat undang-undang tersebut berkaitan erat dengan rakyat. Bahkan, salah satu yang fenomenal adalah dikabulkannya uji materi terhadap Undang-Undang tentang Migas yang berdampak terhadap pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Selain tidak memiliki kekuatan hukum, keberadaan BP Migas juga dinilai bisa memicu liberalisasi dalam pengelolaan migas.

Selain itu, pembatalan semua pasal dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air juga merupakan "kemenangan" jihad konstitusi Muhammadiyah tersebut. Jihad itu membuat privatisasi dan komersialisasi pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta yang sampai menguasai sumber-sumber mata air di hulu sehingga merugikan rakyat bisa dicegah.

Setelah berhasil memenangi empat kali uji materi, Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Din menegaskan, Muhammadiyah tidak akan berhenti melakukan jihad konstitusi selama masih ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jihad konstitusi dilakukan hanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada negara. Dengan cara tersebut, negara bertanggung jawab penuh mengelola sumber daya alam untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Trisula Baru

Memasuki 100 tahun kedua ini Muhammadiyah juga menyiapkan trisula baru gerakan persyarikatan. Kader Muhammadiyah, yang juga

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014, Hajriyanto Y Thohari memaparkan, trisula baru gerakan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU).

Hal itu berarti perjuangan Muhammadiyah juga fokus pada penanggulangan bencana dan resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat, serta mobilisasi dana umat. Meski ada trisula baru, bukan berarti trisula lama perjuangan Muhammadiyah diabaikan. Muhammadiyah tetap menjalankan tiga program utama, yakni pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial.

Begitulah Muhammadiyah memaknai jihad. Berjihad bukan berarti harus berangkat ke medan perang dengan memanggul senjata. Di alam modern seperti sekarang, berpikir dan bergerak secara cerdas dan cermat dalam menjawab tantangan zaman juga jihad. Jihad yang terus dijalankan Muhammadiyah demi mewujudkan cita-cita Indonesia.

KOMPAS, 8 Juli 2015. Penulis adalah wartawan *KOMPAS*.

Muktamar Muhammadiyah (3)
Pendidikan Kebangsaan Muhammadiyah

Anita Yossihara

Di ruang tamu rumah berukuran 2,5 meter x 6 meter miliknya di Kampung Kauman, Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan memulai sebuah sekolah dengan metode pendidikan yang menyinergikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Tak mudah memperkenalkan gagasan baru tersebut. Banyak murid yang diajarnya memilih berhenti. Hanya delapan orang yang bertahan kala itu.

Berlandaskan kesadaran bahwa pendidikan merupakan peranti penting untuk meningkatkan taraf hidup kaum pribumi, Dahlan tetap pada langkahnya. Penolakan hingga berujung pemboikotan dari warga Kauman tidak menyurutkan keinginannya untuk mendirikan sekolah dengan metode pendidikan yang mirip dengan milik pemerintah.

Kegigihannya dalam mempertahankan idenya berbuah hasil. Setelah enam bulan berjalan, muridnya bertambah menjadi 20 orang. Sekolah yang diinginkannya pun terwujud pada 1911 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Berselang beberapa bulan, jumlah murid madrasah meningkat hingga 62 orang.

Melihat perkembangan yang menggembirakan, sejumlah pihak yang mendukung Dahlan mengusulkan pembentukan organisasi untuk meng-

urus tata kelola sekolah. Keberadaan organisasi dimaksudkan agar lembaga pendidikan yang dirintis Dahlan bisa berlangsung meski sang pendiri tak lagi terlibat di dalamnya atau ketika sudah mangkat.

Akhirnya, pada akhir 1912, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi baru resmi berdiri. Persyarikatan ini tak hanya ditujukan untuk mengelola sekolah yang dirintis Dahlan. Muhammadiyah juga menjadi sebuah gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran) dan gerakan tajdid (pembaruan) seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Marpuji Ali dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Juni lalu, menuturkan, pendidikan menjadi inti dari lahirnya gerakan Muhammadiyah. Sang pendiri, saat itu meyakini, melalui pendidikan akan muncul pencerahan yang bisa menyelesaikan masalah. Bentuk pendidikan dimanifestasikan dengan pendirian sekolah dan madrasah.

Hingga kini, semangat tersebut tak luntur. Lembaga pendidikan di bawah bendera Muhammadiyah kini tersebar hingga pelosok Tanah Air. Dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, dimiliki oleh persyarikatan yang berusia lebih dari satu abad ini.

Muhammadiyah boleh berbangga dengan banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki.

Tantangan

Marpuji menyebutkan, ada berbagai tantangan yang saat ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah. Beberapa di antaranya adalah kemunculan lembaga pendidikan baru yang menangani sekolah lebih serius sehingga melahirkan sekolah yang berkualitas. Kemudian, kemunculan pendidikan asing yang mendirikan cabangnya di Indonesia. "Muhammadiyah jika tidak bergerak akan ketinggalan," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu pemahaman yang cair dan terbuka terhadap pendidikan Muhammadiyah. Pesan Dahlan adalah menghidupkan warisan berupa etos kerja pembaruan pendidikan, bukan

sekadar mengadaptasi sistem pendidikan yang dapat lekang dimakan waktu. Dengan demikian, pendidikan Muhammadiyah tak akan tergerus.

Dalam garis besar program nasional bidang pendidikan, iptek, dan litbang yang disusun Muhammadiyah telah dirumuskan pembuatan cetak biru pendidikan Muhammadiyah. Rumusan ini ditujukan untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini dan sebagai antisipasi menghadapi masa depan pendidikan yang lebih kompleks.

Percepatan pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu juga tercantum dalam garis besar program tersebut. Muktamar ke-47 yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2015, dinanti sebagai momentum untuk mewujudkan program pendidikan Muhammadiyah yang bermutu dan unggul di setiap wilayah.

Anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Sumiyanto, berpendapat, peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah meliputi perbaikan kualitas kepala sekolah dan guru di sekolah Muhammadiyah. Mereka diharapkan mampu mengelola pembelajaran yang kreatif. Ini karena salah satu kunci keberhasilan pendidikan ternyata pada kepala sekolah dan guru.

Masyarakat

Perbaikan kualitas pendidikan Muhammadiyah kini menjadi keniscayaan. Jutaan anak Indonesia masih mempercayakan masa depannya di tangan pendidikan Muhammadiyah. Untuk itu, Muhammadiyah harus mempertahankan ciri khas perpaduan ilmu ilmiah dengan ilmu amaliah dalam lembaga pendidikannya sebagai landasan perbaikan kualitas.

Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja, dalam pidato sambutan pada malam peringatan 45 tahun Muhammadiyah di Jakarta pada 1957, tak meragukan mutu dari pendidikan Muhammadiyah. Hal ini dibuktikan dari jumlah pemimpin bangsa yang merupakan besutan pendidikan Muhammadiyah. Salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Kendati demikian, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam buku *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* menuturkan, kisah sukses Muhammadiyah di masa lalu tidak boleh hanya menjadi romantisisme sejarah, tetapi juga harus menjadi titik pangkal dan spirit moral untuk kembali mengukir keberhasilan. Muhammadiyah juga wajib melakukan introspeksi diri secara kritis.

Pendidikan Muhammadiyah pernah menjadi tonggak pembaruan pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Kini, belasan ribu lembaga pendidikan Muhammadiyah sepatutnya mampu memosisikan kembali menjadi pelopor pembaruan pendidikan untuk menjawab tantangan zaman. Lembaga pendidikan Muhammadiyah juga terus diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pencerah dan solusi bagi masalah bangsa.

KOMPAS, 9 Juli 2015 . Penulis adalah wartawan *KOMPAS*.

Dua Sayap Dua Muktamar

HAJRIYANTO Y THOHARI

DUA organisasi massa besar dan tua, kalau bukannya yang terbesar dan tertua, Muhammadiyah (lahir 1912: 103 tahun) dan Nahdlatul Ulama (lahir 1926: 89 tahun), akan menggelar Muktamar pada 2015.

Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) akan berlangsung 16-21 Syawal 1436 H (1-5 Agustus 2015) di Jombang, sementara Muktamar ke-47 Muhammadiyah berlangsung 18-22 Syawal 1436 H (3-7 Agustus 2015) di Makassar. Usia keduanya sama, besarannya nyaris sama, keduanya berMuktamar pada tahun yang sama, bulan yang sama, dan tanggal yang juga nyaris sama. Ini sebuah truisme belaka: takdir sejarah yang insya Allah membawa berkah.

Tema Muktamar keduanya juga nyaris sama: NU "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia", Muhammadiyah "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Sebuah kemiripan yang juga truisme belaka: menggambarkan wilayah kepedulian yang mengatasi dan melintasi golongan, suku, etnis, dan agama. Kepedulian yang sudah pada level kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Umat Islam, pemerintah, media, dan bangsa Indonesia menyambut antusiasme Muktamar akbar ini. Apalagi mereka yang menyadari betapa besar peran kedua ormas ini dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila ini. Sebagai arus utama (*mainstream*) Islam Indonesia, pendiriannya bahwa NKRI merupakan

bentuk final dari cita-cita bernegara bukan hanya memberikan jaminan tetap tegaknya Pancasila, melainkan juga menenteramkan semua pihak. Ini saja sudah merupakan sumbangsih kaum nahdliyin dan muhammadiyin yang tiada ternilai harganya.

Dengan kematangan dalam berislam yang moderat dan toleran, serta pandangan kenegaraannya yang nasionalis dan patriotis, keduanya menjadi jangkar utama bangsa yang majemuk ini. Para pemimpin keduanya boleh datang dan pergi secara silih berganti, tetapi mereka selalu merupakan tokoh-tokoh bangsa yang mengutamakan negara di atas golongan. Sungguh tak terbayangkan bagaimana wajah Islam Indonesia jika bangsa ini tak memiliki NU dan Muhammadiyah. Meski mungkin saja tetap ditakdirkan menjadi negara yang mayoritas Muslim, besar kemungkinan Indonesia secara ideologi dan politik akan berkembang menjadi seperti yang terjadi di beberapa negara lain yang kaotik dan konfliktual.

Memang harus diakui masih ada persoalan mengenai hubungan antara Islam dan negara, tetapi berkat kedua gerakan Islam moderat dan nasionalistis ini, persoalan tersebut dapat dikelola secara lebih dingin dan tenang, jauh dari pergolakan.

Laksana Dua Sayap

Sebagai kekuatan masyarakat madani, Muhammadiyah dan NU juga merupakan tulang punggung proses demokratisasi Indonesia. Dalam konteks ini, negara harus menahan diri untuk tidak menarik (*absorb*) keduanya ke dalam negara. Keduanya harus dipertahankan seperti sekarang ini, sebagai reservasi sosial politik (*socio-political reservoir*) yang terus memosisikan dirinya sebagai perantara (*broker*) antara negara dan masyarakat. Negara jangan terlalu kuat di hadapan rakyat yang lemah, dan rakyat jangan terlalu kuat di hadapan negara yang lemah. Negara yang terlalu kuat akan cenderung otoriter dan totaliter, sementara rakyat yang terlalu kuat di hadapan negara yang lemah akan menjerembabkan anarkisme.

Maka, tidak berlebihan kalau mendiang Nurcholish Madjid mengibaratkan jika umat Islam Indonesia, bahkan Indonesia itu sendiri, seekor burung garuda, maka Muhammadiyah dan NU adalah kedua sayapnya.

Tatkala keduanya mengepak secara kompak, umat dan bangsa ini akan dibawanya terbang membelah angkasa menerjang badai menggapai cita-cita nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selama satu abad, Muhammadiyah dan NU dengan setia mengawal perjalanan bangsa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itu. Pasalnya, tujuan tersebut sejatinya berimpitan secara organis dengan tujuan keduanya sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, yaitu "menegakkan kalimah Allah" (*li i'lai kalimatillah hiya l-'ulya*) demi mewujudkan "kejayaan Islam dan umat Islam" (*izzu 'l-Islam wa 'l-muslimin*) sebagai "kasih sayang bagi seluruh alam" (*rahmatan li 'l-'alamien*) tanpa membedakan suku, etnis, dan agama.

Luar biasa mulia, luar biasa berat. Bagi keduanya, apa yang disebut umat, rakyat, penduduk, atau warga negara, pada hakikatnya merupakan entitas yang identik dan sama: bangsa Indonesia.

Tak Versus, Tak "Vis à Vis"

Saya optimistis terhadap masa depan relasi kedua gerakan Islam ini. Memang, dalam beberapa hal ada perbedaan pemahaman dalam berislam di antara keduanya, tetapi tidak ada sikap penyesatan teologis, apalagi permusuhan di sana. Sebab, keduanya memahami betul mengapa perbedaan itu terjadi.

Para ulama di kedua ormas ini menguasai betul manhaj, mazhab, dan konvensi keilmuan dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan komprehensif. Maka, perbedaan yang terjadi sangatlah dewasa dan matang

yang alih-alih memecah belah umat, malah memperkaya khazanah dan mosaik Islam Indonesia.

Saya tidak yakin ada orang NU yang anti Muhammadiyah, sebagaimana tidak ada orang Muhammadiyah yang anti NU. Jika dulu orang dengan simplistis menyimpulkan selalu ada sindrom NU versus Muhammadiyah, atau Muhammadiyah vis a vis NU, dalam berbagai lapangan kehidupan, kini nuansa seperti itu tidak ada lagi.

Apalagi dari rahim kedua ormas ini bermunculan banyak aktivis muda penggiat gerakan toleransi dan pluralisme garda depan sekaligus menjadi tulang punggung dari kekuatan anti sektarianisme dan intoleransi yang gigih. Maka, sangatlah absurd kalau di antara kedua ormas itu sendiri ada sikap saling mengeluarkan.

Pun lapangan kepedulian dan pengabdian keduanya tidak lagi berbeda. Muhammadiyah, yang dulu memelopori pendidikan klasikal dan modern, kini juga menggarap pendidikan pesantren. NU, yang dulu diidentikkan dengan pesantren, kini mendirikan universitas-universitas besar di hampir seluruh kota.

Dalam satu dekade ke depan kita akan menyaksikan puluhan atau ratusan universitas besar yang didedikasikan oleh keduanya untuk bangsa. *'Ala kulli hal*, besar harapan bangsa diletakkan di pundak kedua sayap keindonesiaan ini. *Semoga!*

KOMPAS, 30 Maret 2015. Penulis adalah Wakil Ketua MPR RI 2009-2014

Muktamar Dua Gerakan Kebudayaan

BIYANTO

TIDAK berlebihan jika dikatakan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan gerakan kebudayaan. Dua organisasi masyarakat (ormas) itu telah banyak berjuang melalui jalur kultural. Yang menarik, keduanya akan berMuktamar dalam waktu yang hampir bersamaan tahun ini. Diawali pelaksanaan Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1–5 Agustus. Dilanjutkan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar pada 3–7 Agustus.

Dalam banyak hal, Muhammadiyah dan NU menunjukkan perjuangan yang hampir sama. Keduanya menjadikan organisasi sebagai media untuk mendakwahkan Islam yang moderat. Keduanya juga bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan amal sosial lainnya. Yang berbeda adalah strategi dakwah, pendekatan, budaya berorganisasi, dan karakter anggotanya. Juga ada perbedaan yang bersifat *furu'iyah* (cabang) dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama.

Sejumlah kesamaan dalam berkiprah itu menegaskan bahwa Muhammadiyah dan NU semestinya bersinergi untuk memperbaiki kualitas hidup umat. Keduanya harus lebih banyak melakukan pertemuan informal sehingga dapat saling bertegur sapa dan menjauhkan diri dari prasangka.

Jika menengok sejarah, seharusnya memang tidak ada halangan bagi Muhammadiyah dan NU untuk bersinergi. Apalagi jika melihat hubungan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari. Pendiri dan ideolog dua gerakan kebudayaan itu tercatat pernah belajar di Makkah pada guru yang sama, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib merupakan ulama besar kelahiran Minangkabau yang bermukim di Makkah. Dia telah menjadi guru bagi ulama Nusantara yang pergi haji sekaligus belajar di Tanah Suci.

Sejumlah ulama Muhammadiyah juga pernah nyantri di pesantren NU. Salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah asal Lamongan, Jawa Timur, KH Abdurrahman Syamsuri al Hafiz. Beliau pernah nyantri di Tebuireng dan diasuh langsung KH Hasyim Asy'ari. Bahkan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin juga sering menceritakan pengalamannya saat "menjadi NU". Menurut pengakuannya, Din pernah menjadi aktivis Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU).

Pengalaman beberapa tokoh itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU sesungguhnya memiliki modal sosial untuk bersinergi. Tetapi harus diakui, hubungan keduanya terkadang mengalami pasang surut. Itu terjadi tatkala keduanya bersinggungan dengan persoalan politik. Misalnya saat keduanya terlibat dalam Partai Masyumi pada masa Orde Lama. Demikian juga halnya saat sebelum dan sesudah pelengseran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden.

Tetap, di luar urusan politik, dua ormas tersebut dapat bersinergi dengan baik. Sebagai contoh, Buya Syafi'i Ma'arif (PP Muhammadiyah) dan KH Hasyim Muzadi (PB NU) pernah bersama-sama melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menjelaskan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin.* Penjelasan dua tokoh tersebut penting untuk meluruskan pemahaman Barat terhadap Islam yang selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Melihat kiprah Muhammadiyah dan NU dalam sejarah bangsa ini, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keduanya merupakan aset yang sangat berharga.

Tokoh Muhammadiyah dan NU menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Bhinneka. Meski begitu, Indonesia harus tetap Tunggal

Ika. Dengan kata lain, negeri ini harus berdiri tegak di atas prinsip *unity in diversity* (bersatu dalam keragaman). Nilai-nilai itulah yang selalu digelorakan tokoh Muhammadiyah dan NU. Tokoh dua ormas itu juga berkomitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai warisan dari *the founding father* yang bersifat final.

Komitmen keduanya dalam mewujudkan wajah Islam yang moderat dan tegaknya NKRI penting untuk menangkal virus radikalisme. Dengan mendakwahkan Islam yang moderat, inklusif, dan bermazhab tengah (*al-wasath*), keduanya jelas memiliki sumbangsih yang besar bagi negeri ini.

Karena itu, tidak mengherankan jika dunia banyak berharap pada teladan Islam di Nusantara. Itu berarti Indonesia harus menjadi mozaik Islam mazhab tengahan yang moderat dan saling menghargai di tengah keragaman. Persoalan pluralitas tersebut penting menjadi atensi. Sebab, jika diamati, pluralitas bangsa, dilihat dari etnis, budaya, dan agama, sungguh luar biasa. Hebatnya, kondisi plural tidak menghalangi bangsa ini untuk hidup berdampingan.

Dengan demikian, dapat dikatakan, warga bangsa ini telah menerapkan nilai-nilai *agree in disagreement* (bersepakat dalam perbedaan). Jika ditanya mengapa bangsa ini dapat hidup rukun meski faktanya sangat beragam, jawabannya, kondisi itu terjadi berkat dakwah kebudayaan Muhammadiyah dan NU sehingga melahirkan wajah Islam moderat di tanah air.

Ibarat sayap, dua ormas tersebut harus terus mengembang. Tidak boleh ada salah satu sayap yang patah. Rasanya tidak terbayang jika dua gerakan kebudayaan itu tidak lahir dari rahim negeri tercinta. Jika keduanya tidak ada, barangkali kita akan menyaksikan negeri ini mengalami kehancuran peradaban layaknya Irak, Syria, Mesir, Libya, Nigeria, dan Yaman. Negara-negara tersebut kini terus membara karena gagal mengatasi persoalan kemajemukan.

JAWA POS, 25/5/2015. Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Wajah Islam Dua Muktamar

M. ALFAN ALFIAN

KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin belum lama ini mengatakan bahwa tema "Islam Berkemajuan" Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang dibuka hari ini adalah elaborasi dari visi Muhammadiyah. Ia juga menegaskan bahwa tema itu melengkapi tema yang diangkat oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamarnya di Jombang dalam waktu yang berimpitan itu yakni "Islam Nusantara". Keterangan Din tersebut melegakan. Sudah selazimnya Muhammadiyah dan NU saling melengkapi dan berbagai tugas dalam merespons soal-soal keumatan dan kebangsaan yang dinamis dan kompleks.

Dalam Pembukaan Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal, pertengahan Juni lalu, Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa model Islam Nusantara merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara, yang dilakukan dengan pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. NU menegaskan Islam Nusantara ialah Islam yang berperadaban, bermartabat, disiplin, dan bersih penampilannya (Detik. com, 29/7/2015).

Mengemukanya dua tema yang saling melengkapi tersebut bisa dipahami, mengingat Muhammadiyah dan NU adalah sesama gerakan Islam yang perlu elaborasi visi masing-masing. Dalam pemahaman inilah, baik Islam Berkemajuan maupun Islam Nusantara tentu tidak dimaksudkan untuk mereduksi makna Islam yang lebih luas, melainkan bentuk ikhtiar

KOSMOPOLITANISME ISLAM BERKEMAJUAN (15.5X23.5) isi set8.indd 49 25/04/2016 10:14:50

dua organisasi dalam mensyiarkan dakwah masing-masing sesuai tradisi pemikiran dan gerakannya.

Kita tahu Muhammadiyah (lahir pada 1912) dan NU (lahir tahun 1926) merupakan dua organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang sudah cukup tua. Keberadaan mereka jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka pun telah memberi warna bagi dinamika kehidupan umat dan bangsa Indonesia hingga dewasa ini.

Mereka, yang sering disebut sebagai "Islam mapan" atau "Islam arus utama" (*mainstream* Islam) di Indonesia ini, kini telah mencapai titik kesetimbangan penting dalam menggerakkan energi umat untuk kemajuan bangsa. Titik kesetimbangan ini, selaras dengan pandangan Din Syamsuddin, menegaskan bahwa antara Muhammadiyah dan NU tidak lagi disibukkan pada perseteruan yang bersifat "khilafiah".

Perbedaan-perbedaan "kecil" dalam peribadatan (fikih) seperti soal jumlah rakaat salat tarawih atau perlu-tidak doa qunut dalam salat subuh telah terlampaui sedemikian rupa. Kalangan Muhammadiyah dan NU pun sudah saling memahami tradisi dan pendekatan masing-masing. Karena itu, tidak ada lagi gerak mundur karena kesadaran bersama itu mengarah ke depan, ke ihwal yang tidak saja bersifat saling memahami (*mutual understanding*), tetapi juga terus bergerak dalam menggarap sektor-sektor penting kehidupan umat. Kendati demikian, masalah persatuan umat tetap harus selalu menjadi fokus perhatian.

Pada momentum Muktamar dua ormas Islam raksasa di Indonesia ini, wajah Islam Indonesia telah jauh berbeda dengan masa-masa ketika ihwal "khilafiah" masih menjadi soal yang menyedot cukup banyak energi umat. Kini keduanya tampak sama-sama menyadari bahwa semakin banyak tantangan yang sama, dan karenanya mereka harus bisa saling melengkapi dan berbagi tugas.

Tantangan itu merentang dari realitas internal keumatan yang terkait dengan dinamika lokal, nasional, regional, dan transnasional. Masalah radikalisme dan terorisme misalnya merupakan masalah bersama. Baik Muhammadiyah maupun NU semakin dituntut untuk mampu mencegah kekerasan-kekerasan atas nama agama.

Kendatipun punya modal sejarah dan sumber daya yang besar dalam perspektif Islam di Indonesia, baik Muhammadiyah maupun NU tidak boleh terjebak pada pendekatan-pendekatan yang eksklusif dan menutup diri. Keduanya harus inklusif, terbuka bagi ragam persoalan umat untuk direspons dan disikapi dengan sebaik-baiknya.

Ke depan keduanya harus lebih proaktif dan lebih konstruktif lagi dalam mengambil peran dalam menggairahkan dinamika kehidupan umat, mengangkat derajat mereka terutama dari sisi kesejahteraan melalui pemberdayaan. Bagaimanapun, masalah penting umat Islam hingga dewasa ini relatif masih tetap sama, bahkan ketika Muhammadiyah didirikan, yakni kemiskinan. Kemiskinan bisa menjadi akar "segala kejahatan", demikian pun radikalisme dan terorisme.

Karena itu, Muktamar dua organisasi itu juga sebagai momentum untuk mempertegas mereka sebagai kekuatan sosiokultural yang lebih luas ketimbang "kekuatan politik". Terkait dengan yang terakhir ini, kita tahu bahwa ia bisa menjadi sumber konflik. Tren konflik yang melanda kelompok-kelompok umat Islam di mana pun, termasuk di Indonesia, salah satunya karena faktor politik.

Ini sesungguhnya sudah sangat disadari oleh masing-masing pendiri organisasi, KH Ahmad Dahlan maupun KH Hasyim Asyari. Makanya, sejak awal mereka berkhidmat lebih ke dunia dakwah sosial dan kultural yang lebih luas. Kendati demikian, keduanya punya kaitan sejarah dengan politik, terutama pada masa pascakemerdekaan, bahkan hingga dewasa ini di mana politik dilakukan secara tidak langsung.

Politik Muhammadiyah dan NU tentu bukanlah ihwal yang merentang di ranah politik praktis, melainkan levelnya ialah ranah keumatan dan kebangsaan yang lebih luas. Mereka harus memosisikan sebagai "pemandu moral" umat, termasuk dalam bidang politik. Karena itu, lazim manakala banyak yang berharap dua organisasi ini juga harus gencar mengampanyekan antipragmatisme transaksional dalam politik di era demokrasi ini.

Keduanya juga bertanggung jawab dalam menumbuhkan budaya demokrasi di tengah-tengah umat. Singkat kata, keduanya sudah semesti-

nya bisa menjadi "kekuatan penentu" dalam dinamika kehidupan umat dan bangsa. Untuk menjadi kekuatan penentu, kata kuncinya ialah kemandirian.

Apabila dua organisasi ini pun mampu tampil sebagai "kekuatan ekonomi" di mana mereka ditopang oleh konstituen yang berdaya dan mandiri secara ekonomi, dalam konteks politik mereka "tidak dapat dibeli" oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang bertendensi politik. Daya pengaruh dua organisasi akan menanjak, manakala kemandirian itu mampu dibuktikan.

Ke depan, di tengah era pasar bebas regional dan internasional, mereka semakin dituntut untuk mampu menyemaikan kebangkitan kelas menengah muslim yang efektif. Dalam hal yang terakhir itu, perlulah kita berkaca dari pengalaman Turki. Terakhir, tentu saja umat senantiasa menunggu ikhtiar-ikhtiar kreatif dua organisasi.

Kemampuan menggerakkan dinamika umat itulah yang penting sehingga keberadaan Muhammadiyah dan NU tidak sekadar formalitas di panggung kehidupan Islam di Indonesia. Selamat berMuktamar!

Koran SINDO, 3 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta

NU dan Muhammadiyah BerMuktamar

FRANZ MAGNIS-SUSENO

KALAU dua organisasi terbesar masyarakat sipil Indonesia berMuktamar, menetapkan kembali kepemimpinan masing-masing dan menggariskan arah perjuangan bagi tahun-tahun mendatang, itu peristiwa yang penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Tulisan ini mencoba menelusuri pentingnya reorientasi dua organisasi raksasa itu.

Pernah dikumandangkan: 'Politik adalah panglima'. Sampai sekarang fokus media selalu terarah ke presiden dengan pemerintahnya, DPR, dan lembaga negara lain. Akan tetapi, faktor yang sebenarnya menentukan stabilitas negara bukan politik, melainkan masyarakat sipil. Ambil tahun 1998. Mengapa Indonesia 1998 tidak mengalami nasib yang sama seperti Mesir 2011-2013? Pada 2011 Presiden Hosni Mubarak digulingkan revolusi demokratik rakyat Mesir.

Namun, selama dua tahun Ikhwanul Muslimin dan para lawan politik mereka tidak berhasil mencapai konsensus tentang Mesir mana yang mereka kehendaki. Akhirnya militer mengambil alih kekuasaan. Jenderal Al-Sisi kemudian dipilih sebagai presiden.

Sekarang Mesir terpecah dua: mereka yang mendukung Al-Sisi dan mereka yang menolaknya, para Ikhwanul Muslimin, sekitar 40% rakyat Mesir, yang hanya dapat ditundukkan dengan kekerasan. Cita-cita

demokrasi Mesir telah menguap. Akan tetapi, pada 1998, sesudah HM Soeharto jatuh, Indonesia tetap bersatu.

Dan yang sangat menarik, yang mengantar Indonesia pasca-Soeharto menjadi demokrasi ialah Islam Indonesia. Dua presiden sesudah HM Soeharto, mantan Ketua ICMI Habibie dan mantan Ketua NU Abdurrahman Wahid, mengantar Indonesia ke alam demokrasi, sedangkan Ketua terpilih MPR Amien Rais, mantan Ketua Muhammadiyah, mengamankan cita-cita reformasi dengan memasukkan jaminan-jaminan demokratis dan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar kita.

Padahal, kita masih ingat kekhawatiran HM Soeharto selama 20 tahun terhadap 'Islam'. Kita ingat kekhawatiran macam-macam sesudah ICMI diizinkan didirikan. Kita ingat anggapan populer di dunia bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa bersama. Akan tetapi, di Indonesia transisi ke demokrasi justru berhasil karena 'Islam' Indonesia (yang sebenarnya tidak begitu mengherankan: selama 15 tahun pertama Republik Masyumi-lah yang paling tegas mendukung Indonesia yang demokratis).

Tidak mustahil bahwa resistensi pelbagai kekuatan politik terhadap pelepasan kekuasaan hanya bisa diatasi karena dukungan Muhammadiyah dan NU terhadap reformasi.

Cobaan paling berat datang dalam dua konflik berdarah teramat serius bernada agama di Indonesia Timur 1999-2002.

Konflik di Maluku dan Poso itu berpotensi menghancurkan Indonesia. Pada saat yang amat tegang dan penuh ranjau-ranjau emosional itu, sikap tenang dan bertanggung jawab Muhammadiyah dan NU menjamin bahwa konflik itu tidak meluas ke wilayah-wilayah lain. Mereka mengintensifkan komunikasi antarumat beragama. Mereka tidak mengizinkan pidato-pidato kebencian dan balas dendam merajalela, dan sesudah konflik berakhir mereka membantu aktif memulihkan hubungan positif antara Kristen dan muslim. Susah sekali membayangkan bagaimana Indonesia di hari ini tanpa NU dan Muhammadiyah.

Dunia Islam internasional sekarang diguncangkan segala macam pergolakan.

Indonesia sampai sekarang bebas dari pergolakan semacam itu juga disebabkan secara tegas menyatakan diri bagian dari NKRI serta menerima Pancasila sebagai realisasi paling optimal nilai-nilai keislaman dalam kondisi budaya Indonesia. Melawankan keislaman dengan keindonesiaan, bagi Muhammadiyah dan NU, tak pernah menjadi masalah karena dua organisasi itu sendiri lahir sebagai bagian dari kebangkitan nasional Indonesia.

Kembali ke Muktamar Dua Organisasi itu.

Baik NU maupun Muhammadiyah sekarang berhadapan dengan fundamentalisme dan puritanisme radikalisme keagamaan. Fundamentalis karena mereka menolak segala keterikatan—misalnya keterikatan kebangsaan—yang tidak mereka temukan ayatnya di kitab suci. Puritan karena mereka tidak mengakui nilai-nilai kemanusiaan selain yang tertulis dalam kitab suci mereka.

Di Indonesia, radikalisme itu barangkali mendapat pelbagai tingkat dukungan tidak lebih dari 10% masyarakat.

Saat berhadapan dengan radikalisme itu, NU melontarkan paham Islam Nusantara.

Suatu paham sangat menarik. NU sebenarnya mengacu kepada cara Islam masuk ke Indonesia: bukan dengan merusak, melainkan dengan meningkatkan nilai-nilai etis dan kultural rakyat yang sudah ada.

Yang saya tangkap: NU mau menunjukkan bahwa Islam tidak memusuhi tradisi-tradisi budaya dan etis bangsa Indonesia, tetapi memelihara dan mengangkatnya. Pendekatan ini inklusif dan secara teologis masuk akal: kalau suatu agama meyakini diri universal, ia mestinya tidak merusak, tetapi melindungi dan meningkatkan segala yang sudah bagus dalam masyarakat, karena apa pun yang bagus dalam masyarakat tak bisa tidak berasal dari Allah Sang Pencipta.

Muhammadiyah mau mengonter ekstremisme dengan konsep Islam Berkemajuan yang menyangkut inspirasi asali Muhammadiyah dari gerakan pembaruan Islam di Mesir akhir abad ke-19. Al-Afghani, Muham-

madah Abduh, dan di India Mohammad Iqbal di satu pihak mau kembali ke sumber-sumber dasar Islam. Di lain pihak, agar Islam dapat keluar dari ketertinggalan, mereka mengajak umat agar mau belajar dari bangsa-bangsa lain (seperlunya 'sampai ke Tiongkok'), khususnya mereka mau membuka Islam pada segala kemajuan teknologis dan bahkan kultural. Yang saya pahami, Muhammadiyah, sesuai dengan keterlibatan tradisional dalam dunia pendidikan, mau menjadi kekuatan intelektual, teknologis, dan kultural terbuka yang memberi sumbangan pada kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Selamat bagi NU dan Muhammadiyah, bangsa Indonesia membutuhkan sumbangan!

MEDIA INDONESIA, 05 Agustus 2015. Penulis adalah budayawan dan guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Muktamar Muhammadiyah dan Kota Makassar

ASWAR HASAN

Jika tidak ada aral melintang, Muktamar ke-47 Muhammadiyah akan dibuka Presiden RI Joko Widodo pada 3 Agustus 2015 di Lapangan Karebosi, Makassar. Selanjutnya, acara penutupan pada 7 Agustus 2015 akan dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Kampus Unismuh Makassar.

Diperkirakan akan ada sekitar 200 ribu penggembira datang dari berbagai pelosok Nusantara yang akan meramaikan hajatan Muktamar Muhammadiyah ini. Selain itu, terdapat sekitar 6 ribu orang berstatus peserta yang nantinya akan aktif menghadiri setiap sidang, baik di komisi maupun di paripurna.

Mereka yang berstatus peserta itu, tentu merupakan manusia pilihan yang diamanahi membawa misi, pemikiran berupa konsep, ide dan gagasan dan aneka problematika Muhammadiyah beserta tawaran solusinya. Hal ini demi memajukan persyarikatan Muhammadiyah pada masa depan.

Jika membayangkan jumlah sekitar 200 ribu lebih manusia dari luar Makassar yang akan terfokus beraktivitas di lokasi Muktamar, maka sungguh luar bisa dampak yang bisa ditimbulkan. Dampak itu, bisa positif, tetapi tidak mustahil juga bisa negatif.

Antara keduanya, akan sangat tergantung bagaimana mengelolanya secara massif, terstruktur dan sistematis dengan cara efektif dan efisien,

terkoordinasi dengan dukungan semua elemen masyarakat. Dalam pada itu, maka faktor kepemimpinan dan manajerial Wali Kota Makassar dan Ketua Panitia Muktamar menjadi penting.

5 Aspek

Selama Muktamar berlangsung, dipastikan akan memunculkan lima aspek penting yang terkait secara langsung dengan keberadaan para muktamirin. Kelima aspek terpenting itu adalah pertama, faktor keamanan yang meliputi keamanan lalu lintas, harta benda dari incaran para pencopet dan penjambret yang dikenal dengan curas (pencurian dengan cara kekerasan-perampasan) yang akhir-akhir ini ramai terjadi pada siang bolong. Bahkan di tengah keramaian sekalipun.

Jumlah para pencopet dan penjambret tersebut, makin marak dan tersebar di berbagai tempat. Seolah kapasitas dan antisipasi aparat keamanan sudah tidak memadai dan tidak efektif. Ulah dan tingkah mereka semakin menjadi-jadi. Karenanya, harus ada antisipasi yang serius dan khusus dari aparat keamanan untuk mengamankan keberadaan dan aktifitas segenap muktamirin.

Kedua, faktor kebersihan. Dengan keberadaan 200 ribu lebih manusia baru yang hadir di Makassar yang sangat boleh jadi belum tahu sama sekali Program MTR (Makassar tidak Rantasa) dan LISA (Lihat Sampah Ambil) tentu sangat rentan menebar sampah jika tidak diantisipasi sedini dan seefektif mungkin.

Bayangkanlah jumlah 200 ribu dengan sampahnya masing-masing. Jika tidak diantisipasi secara benar dan tepat, dipastikan selama Muktamar berlangsung, Makassar akan jadi kota sampah. Di sinilah peranan panitia Muktamar berkoordinasi dengan pihak Pemkot Makassar menjadi urgen (penting dan mendesak).

Muktamirin tentu orang yang faham agama dan mengetahui peringatan hadits bahwa: "Kebersihan adalah bagian dari Iman. Namun pengetahuan mereka itu belum tentu disertai dengan kesadaran. Karena misalnya, ketersediaan tempat pembuangan sampah dan informasi tentang

MTR dan LISA tidak disosialisasikan serta secara kilat kepada segenap muktamirin, baik sebelum tiba di Makassar maupun setelah berdomisili di Makassar.

Namun demikian, jika panitia Muktamar dan Pemkot Makassar berhasil menciptakan lingkungan yang bersih selama Muktamar berlangsung, maka itu akan menjadi preseden baik bagi Sulsel di mata masyarakat nasional. Sudah tentu, kesan positif tentang MTR di mata Muktamirin menjadi promosi efektif di kancah nasional. Jadi ini menjadi pertaruhan MTR di mata nasional.

Ketiga, faktor kenyamanan. Penunjang utama kenyamanan adalah keamanan dan kebersihan. Jika hal itu sudah terdapat, maka pintu kenyamanan akan terbuka bagi masyarakat. Tetapi itu belum cukup. Karena masih harus ditunjang fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, listrik yang tidak padam, akses informasi yang tersedia dan lancar, sarana transformasi feasible dan aksesibel, petugas pelayanan publik yang ramah dan profesional, serta penerimaan masyarakat yang terbuka dan bersahabat.

Salah satu modal penting Kota Makassar yang bisa membuat muktamirin merasa nyaman adalah mewujudkan sikap dan sifat warga Makassar yang *sombere*. *Sombere* menurut Wali Kota Makassar Muh. Ramdhan (Dany) Pomanto adalah sebuah sikap perilaku yang memuat nilai-nilai *hospitality* (keramahan), *humble* (rendah hati/tidak sombong), dan *brotherhod* (persaudaraan).

Jika boleh saya tambah, maka *sombere* memuat dua nilai lagi yaitu *share and care* (peduli dan senang berbagi). Jika sikap dan perilaku *sombere* ini kita tunjukkan sebagai warga Makassar ke segenap muktamirin, maka saya optimistis mereka akan jatuh cinta pada Makassar.

Karenanya, kampanye dan sosialisasi sikap dan perilaku *sombere* harus kencang, masif dan tidak boleh terhenti, hingga membudaya dan menjadi *local wisdom identity*. Keempat, media informasi. Tidak bisa disangkal bahwa sebuah perhelatan nasional semacam Muktamar Muhammadiyah di sebuah kota yang berstandar internasional tanpa dukungan komunikasi

dan informasi dari media dengan segala variannya adalah laksana keramaian atau keriuhan yang diteriakkan oleh katak dalam tempurung.

Karenanya, informasi dari Muktamar untuk Muktamar haruslah gencar secara masif menyentuh semua aspek lini pemangku kepentingan. Muktamirin harus dimudahkan mengakses informasi terkait hal ihwal Muktamar dan Kota Makassar.

Apa yang sedang dan akan terjadi di forum Muktamar dan apa saja yang terdapat di Kota Makassar, seperti kuliner khas, wisata kota, dan suvenir atau cindera mata yang merupakan produk khas dan istimewa Makassar dan Sulsel. Di mana mencarinya dan bagaimana mendapatkannya secara aman dan nyaman, tanpa merasa dirugikan (kasarnya, tertipu).

Peta situasi dan tata cara akses hal ihwal khazanah Kota Makassar penting tersedia setiap saat dan di mana saja. Informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung jembatan kepentingan para pihak. Karenanya, segenap pekerja media dan penggiat informasi baik yang konvensional (cetak elektronik) maupun yang *mainstream* (sosial media) penting menyatukan potensi dan kepentingan dan rela mengalah dan menunda kepentingan yang kontraproduktif lainnya, demi suksesnya Makassar sebagai tuan rumah yang baik bagi muktamirin.

Kelima, proses dan hasil Muktamar. Sebuah Muktamar haruslah menghasilkan setidaknya dua hal penting yaitu: siapa pemimpin baru yang terpilih dan apa program yang dihasilkan/disepakati. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses menghasilkan kedua hal penting itu.

Kedewasaan/kematangan dan kecemerlangan serta kearifan sebagai peserta Muktamar, menjadi prasyarat dasar lahirnya keputusan yang tepat dan benar. Betapa tidak, karena keputusan Muktamar akan sangat ikut memengaruhi atau bahkan menentukan nasib umat Islam Indonesia ke depan, setidaknya, bagi segenap warga perserikatan Muhammadiyah yang konon kini mencapai 134 juta anggota. *Wallahua'lam bishawwabe.* (*)

TRIBUN TIMUR, 29 Juli 2015. Penulis adalah Aktifis Forum Dosen Majelis Tribun Timur

Muktamar Muhammadiyah 1932

Jejak Buya Hamka di Makassar

MUH IHSAN HARAHAP

Muktamar ke-47 Muhammadiyah berlangsung di Kota Makassar, 3-8 Agustus 2015. Pertemuan organisasi Muhammadiyah secara nasional yang dihadiri kurang lebih 300.000 kader dan penggembira ini yang ketiga kalinya digelar di Makassar. Dua Muktamar sebelumnya dilaksanakan pada 1971 (Muktamar ke-38 Muhammadiyah) dan 1932 (Kongres Ke-21 Muhammadiyah).

Kongres tahun 1932 (waktu itu belum disebut "Muktamar") menjadi momentum yang penting bagi perkembangan organisasi pembaharuan (*tajdid*) ini di Sulawesi Selatan. Apalagi melihat kenyataan bahwa ketika itu Indonesia belum merdeka dan masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, masa ini adalah masa yang penting di mana berbagai organisasi pergerakan tumbuh dengan pesat di seluruh wilayah Hindia Belanda. Di tahun 1932 inilah, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar kedatangan seorang ulama muda dari Sumatera Barat bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kelak lebih dikenal sebagai Hamka.

Kongres 1932

Hamka dikirim ke Makassar pada 1932 atas permintaan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar. Hamka punya tugas khusus,

membangkitkan semangat rakyat dalam rangka menghadapi Kongres Muhammadiyah ke-21 yang akan digelar di Makassar. Menurut Dr Mustari Bosra (2008), setiap hari tidak kurang dari 5000 orang yang menonton dari luar arena Kongres, menandakan antusias masyarakat untuk mengenal lebih dekat organisasi ini. Total sebanyak 4 cabang dan 39 grup terbentuk setahun setelah Kongres ini, dimana sebelumnya hanya ada 2 cabang dan 15 grup. Jumlah sekolah dan masjid pun mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar pun memanfaatkan kehadiran ulama muda cemerlang ini. Setelah Kongres terlaksana, kemudian didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Muallimin di Makassar, dan dua tahun kemudian (1934) didirikan MTs di Majene. Untuk sekolah MTs di Makassar, Hamka sendiri bertindak sebagai kepala sekolahnya yang pertama. Menurut laporan Konsul Muhammadiyah Sulawesi pada Konferensi ke-16 tahun 1941 di Sengkang, Muhammadiyah Sulawesi Selatan memiliki 6 cabang dan 76 grup berisi 7000 orang, kurang lebih 30.000 orang simpatisan, masjid dan mushalla 41 buah, Sekolah Diniyah (setingkat sekolah dasar/SD) sebanyak 52 buah, Sekolah HIS sebanyak 4 buah, guru sebanyak 79 orang dan murid kurang lebih 5000 orang.

Legasi Kongres

Kongres Muhammadiyah ke-21 ini menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi otonom kalangan pemuda didirikan. Gerakan ini sebenarnya berasal dari gerakan pemuda terpelajar Siswo Proyo Priyo (SPP) yang berkembang pesat dan kemudian diputuskan oleh Kongres Muhammadiyah ke-21 menjadi organisasi Pemuda Muhammadiyah. Kedua, pada tahun ini Muhammadiyah memutuskan menerbitkan dagblaad atau surat kabar, di mana pengelolaannya dimandatkan kepada Pengurus Muhammadiyah Cabang Solo, yang di kemudian hari dinamakan Adil. Ketiga, kongres ini adalah Kongres terakhir di mana KH Ibrahim menjadi Ketua Umum. Sebelumnya KH Ibrahim memimpin Muhammadiyah dan terpilih sebagai

Ketua Umum sepuluh kali berturut-turut (1923-1932) dalam Kongres yang waktu itu berlangsung setiap tahun.

Novel-Majalah

Ketika kita membaca bab pertama dari novel *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* (TKVDW) karya Hamka dan menyimak bagaimana tragedi cinta Zainuddin dan Hayati, maka kita akan mafhum bahwa semua pengetahuan Hamka tentang tempat, nama dan tradisi Makassar didapatkannya selama masa beliau di Makassar, meskipun nantinya novel ini diterbitkan pada 1938.

Selain novel TKVDW, selama di Makassar beliau juga menerbitkan novel terjemahan berjudul *Laila dan Majnun*, kisah cinta klasik karya sastrawan besar Persia: Nizami Ganjavi. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Balai Poestaka milik pemerintah. Tidak hanya novel, Hamka juga mendirikan dua majalah selama di Makassar, yaitu Majalah Tentera, 4 edisi, dan Majalah Al Mahdi, 9 edisi. Di tahun ini juga Hamka juga menerbitkan sebuah buku berjudul *Arkanul Islam*.

Konflik

Jejak Hamka di Makassar tidak sampai di situ. Selama berada di Makassar (1932-1934), Hamka juga terlibat konflik dan pertentangan melalui media. Ceritanya dimulai pada 1927, ketika Partai Sarekat Islam (PSI) mengeluarkan semua anggota Muhammadiyah dari partai itu. Tahun itu menandai konflik berkepanjangan antara PSI dan Muhammadiyah. Di Sulawesi Selatan, konflik ini diwakili oleh koran *Al-Wafd* milik Sarekat Islam dan koran Tentara Islam milik Muhammadiyah yang dipimpin Mansur Al Yamani, orang yang disebut-sebut sebagai penganjur Muhammadiyah pertama di Sulawesi Selatan.

Melalui *Al-Wafd*, H.A. Mawangkang mengkritik Muhammadiyah yang mengambil jalan kooperatif dengan Belanda, dan menerima subsidi dari Pemerintah kolonial yang 'kafir'. Hamka kemudian membalasnya melalui

koran Tentara Islam dengan mengkritik Yusuf Sammah dan anggota PSI lainnya yang "hanya bisa berkoar" dan "tidak menunjukkan karya nyata". Hamka juga mengkritik adanya lembaga pengacara dalam PSII yang -kata Hamka-hanya mementingkan uang dan "hanya mau bekerja jika dibayar oleh yang berperkara".

Konflik ini berlangsung sampai mengenai hal-hal yang rinci. Tentara Islam mengkritik Al-Wafd yang setelah dipimpin oleh Yusuf Sammah memuat iklan yang dinilai "sangat menjijikkan" dan bersifat pornografi. Kritikan Tentara Islam lainnya adalah persoalan salat wajib lima waktu yang mulai dianggap sepele oleh pemimpin dan anggota PSI.

Epilog

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di Makassar sebentar lagi akan berakhir dan alhamdulillah berjalan dengan aman dan tertib. Perkembangan Muhammadiyah yang sedemikian pesatnya seperti yang terlihat di Sulawesi Selatan hari ini merupakan kerja keras satu abad dari para pendiri, pendakwah, kader dan juga simpatisan Muhammadiyah. Termasuk di dalamnya Buya Hamka yang ketika melaksanakan tugas dakwah di Makassar masih berusia sangat muda, 24 tahun. Semoga dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan lahir pula generasi baru yang akan secemerlang Buya Hamka: seorang ulama, sastrawan, ahli filsafat dan penulis yang dikenang dalam sejarah republik ini.(*)

TRIBUN TIMUR, 7 Agustus 2015. Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Menjaga Marwah Muktamar

BIYANTO

PERHATIAN umat kini pasti tertuju pada dua organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Tanah Air, NU dan Muhammadiyah. Itu karena keduanya sedang menyelenggarakan agenda besar Muktamar.

Penyelenggaraan Muktamar dua ormas ini pun dilaksanakan dalam waktu hampir bersamaan. NU lebih dulu memulai penyelenggaraan Muktamar ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015. Selanjutnya disusul Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar pada 3-7 Agustus 2015. Umat pasti berharap Muktamar kali ini menjadi momentum kebangkitan bagi keduanya.

Harus diakui, ajang Muktamar sekaligus menjadi ujian bagi NU dan Muhammadiyah untuk menunjukkan kemandiriannya di tengah tarik-menarik berbagai kepentingan pihak luar. Termasuk kepentingan pemerintah dan partai-partai politik yang begitu terasa selama perhelatan Muktamar.

Di tengah tarik-menarik kepentingan itulah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan agar ormas keagamaan benar-benar mandiri. Menurut Din, sebagai pilar *civil society*, NU dan Muhammadiyah harus mandiri agar terbebas dari intervensi pihak luar. Sebagai langkah awal, Din mencanangkan program Muktamar mandiri.

Gagasan Muktamar mandiri ini telah bergulir sejak Muhammadiyah menggelar Muktamar satu abad di Yogyakarta, Juli 2010. Muktamar mandiri adalah Muktamar tanpa bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Menurut Din, untuk kebutuhan Muktamar di Makassar, Muhammadiyah berkomitmen tidak mengajukan proposal pada pemerintah.

Jika pemerintah pusat dan daerah memberikan donasi pada panitia Muktamar, itu harus dipahami sebagai penghargaan atas kontribusi Muhammadiyah dalam sejarah pembangunan bangsa. Penyelenggaraan Muktamar mandiri dengan segala konsekuensinya jelas tidak mudah.

Apalagi, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp40 miliar. Itu belum termasuk anggaran pembangunan sarana-prasarana Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai tempat utama perhelatan Muktamar. Padahal, pembangunan sarana prasarana Muktamar mencapai Rp100 miliar. Pasti dibutuhkan kerja keras untuk memobilisasi sumber daya internal organisasi dan kerja sama dengan swasta.

Pernyataan Din dan komitmen Muhammadiyah untuk mewujudkan kemandirian layak diapresiasi. Hingga kini elemen *civil society* pada umumnya belum mampu mandiri jika berhadapan dengan kepentingan negara dan partai politik. Elemen *civil society* masih menunjukkan ketergantungan, terutama bantuan pendanaan.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin elemen *civil society* bersikap kritis terhadap pemerintah dan partai politik jika dalam setiap kegiatan selalu meminta belas kasihan? Padahal, menurut Hikam (1990), elemen *civil society* harus berkarakter kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian, dan ketaatan pada hukum.

Berarti elemen *civil society* harus mewujudkan sikap dan tindakan independen. Spirit kemandirian itu penting karena dalam konteks kehidupan sosial-politik nasional kini jelas membutuhkan kiprah *civil society* sebagai kekuatan *checks and balances*. Karena itu, NU dan Muhammadiyah harus menampilkan diri layaknya *civil society* yang sebenarnya

Pertanyaannya, mampukah dua ormas tersebut merealisasikan semangat kemandirian sehingga Muktamar berlangsung secara terhormat dan bermartabat. Harus diakui, pemerintah dan partai politik pasti selalu memantau jika tidak ikut “bermain” di arena Muktamar. Hasil Muktamar akan sangat bermakna bagi pemerintah.

Termasuk siapa ketua umum terpilih dari NU dan Muhammadiyah. Pemerintah pasti berharap ketua umum terpilih merupakan figur yang lebih “bersahabat” sehingga dapat bekerja sama. Sementara partai-partai politik juga tidak ingin ketinggalan. Mereka pasti bermain untuk mengamankan figur-figur tertentu.

Harapannya, ketua umum dan anggota pimpinan terpilih adalah figur yang dapat diajak membesarkan partainya. Satu lagi pihak yang tidak boleh dilupakan adalah kepentingan korporasi nasional dan internasional. Mereka berkepentingan untuk mengembangkan perusahaannya.

Mereka pun berani menawarkan sponsor yang menggiurkan untuk menyukseskan Muktamar. Karena ada begitu banyak kepentingan, intervensi politik pihak luar dalam Muktamar sulit dihindari. Meski begitu, NU dan Muhammadiyah harus memastikan Muktamar berlangsung bersih dari segala bentuk permainan politik.

Apalagi jika politik uang (*money politics*) turut memainkan peran dalam Muktamar. Rasanya sangat tidak terhormat jika dalam pemilihan pimpinan ormas keagamaan diwarnai praktik politik kotor. Muktamar NU kini tengah memasuki tahapan penting yakni penentuan Rais Am Syuriah PBNU serta tahapan pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PB NU.

Para kiai harus menjaga kehormatan (marwah) Muktamar NU dari permainan politik kotor. Sementara Muktamar Muhammadiyah di Makassar telah menghasilkan 39 orang sebagai Anggota Tetap PP Muhammadiyah periode 2015-2020. Mereka terpilih melalui Sidang Tanwir yang telah berlangsung pada 1-2 Agustus 2015. Dari 39 nama itu akan dipilih 13 orang sebagai tim formatur.

Selanjutnya, 13 orang formatur akan bermusyawarah dan bermufakat untuk memilih ketua umum. Mekanisme pemilihan ketua umum melalui sidang formatur jelas lebih aman dari model pemilihan langsung. Meski

begitu, Muhammadiyah harus tetap mewaspadai kepentingan pemerintah dan korporasi nasional internasional. Karena dalam dua periode kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah sangat kritis.

Bukan saja kritis pada kebijakan pemerintah, Muhammadiyah juga rajin melakukan "jihad konstitusi". Jihad konstitusi Muhammadiyah harus dipahami dalam konteks meluruskan kiblat bangsa. Hingga kini Muhammadiyah sukses mengajukan *judicial review* terhadap UU Migas, UU Ormas, UU Rumah Sakit, dan UU Minerba.

Kiprah Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi jelas menimbulkan ketidaknyamanan pihak-pihak yang dirugikan. Akhirnya, diucapkan selamat berMuktamar bagi keluarga besar NU dan Muhammadiyah.

Muktamar kali ini harus menjadi momentum untuk membuat peta jalan (*roadmap*) kemandirian organisasi sehingga terbebas dari segala intervensi. Semoga elite masing-masing organisasi juga dapat menjaga marwah Muktamar dari praktik politik kotor.

Koran SINDO, 4 Agustus 2015. Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Muktamar ke-47 Menunjukkan Muhammadiyah Berkemajuan

AHMAD NAJIB BURHANI

DIBANDING Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang penuh hiruk pikuk, Muktamar Muhammadiyah tampak berjalan lancar dan tenteram. Semua agenda Muktamar diselesaikan dengan baik. Proses pemilihan ketua umum juga berlangsung tanpa gejolak.

Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana berlangsungnya Muktamar Muhammadiyah dan hasil-hasil dari Muktamar tersebut, redaktur *Madina Online* Warsa Tarsono berkesempatan mewawancarai Ahmad Najib Burhani, tokoh muda Muhammadiyah yang terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan Muktamar tersebut. Berikut adalah petikan wawancara dengan Najib:

Dibandingkan NU, Muktamar Muhammadiyah berjalan lebih lancar, apa perbedaannya?

Saya kira di NU pemilihan pimpinan itu adalah hal yang utama. Tentu saja mereka juga melakukan pembahasan program dan sebagainya tapi itu nomor sekian setelah pemilihan ketua umum. Semua proses itu adanya di Muktamar.

Nah, di Muhammadiyah itu berbeda. Di Muhammadiyah pemilihan pimpinan prosesnya panjang, sudah dimulai sejak Januari. Sejak Januari sudah dimulai pengajuan nama-nama siapa yang layak menjadi pimpinan

Muhammadiyah. Ada beberapa persyaratan untuk diajukan sebagai pimpinan: orang itu harus sudah menjadi anggota selama lima tahun, pernah jadi pengurus, dan diusulkan minimal oleh tiga orang anggota Tanwir.

Di proses usulan terkumpul 200-an nama. Kemudian 200-an orang itu dikirimi formulir untuk memastikan kesediaan mereka untuk dipilih. Dari 200-an nama kemudian terjaring 82 orang, karena ada yang tidak mengembalikan formulir, meninggal sebelum pelaksanaan atau alasan lainnya. Nah, 82 nama tersebut dibawa ke sidang Tanwir.

Di sidang Tanwir, 82 nama itu diseleksi lagi, dipilih oleh anggota Tanwir, dan akhirnya terseleksi menjadi 39 nama. Ke-39 nama ini yang kemudian diajukan ke Muktamar untuk dipilih oleh peserta Muktamar yang berjumlah 2000-an orang. Proses ini memilih 13 orang yang akan jadi pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya, 13 orang ini yang memilih siapa ketua umumnya. Jadi proses pemilihan pimpinan berlangsung cukup lama sehingga tidak menimbulkan gejolak.

Kapan proses seleksi dari 82 nama menjadi 39 nama?

Itu dilakukan sebelum Muktamar. Mereka dipilih oleh anggota Tanwir yang berjumlah 200 orang. Sidang Tanwir adalah pertemuan tertinggi kedua setelah Muktamar. Diadakan dua sampai tiga kali dalam satu periode kepemimpinan. Salah satunya biasanya menjelang Muktamar. Sidang Tanwir kemarin diadakan pada 1 dan 2 Agustus.

Sejak kapan sistem memilih 13 pimpinan dilakukan oleh Muhammadiyah?

Sistem ini sudah berlangsung dari tahun 1990. Sebelumnya, yang dipilih sembilan nama. Sistem sembilan itu berlangsung sejak KH. Ahmad Dahlan. Tepatnya pada 1912, tapi baru dilaksanakan 1925. Tahun 1912-1922 itu otomatis ketuanya KH. Ahmad Dahlan. Jadi, tidak ada pemilihan. Tahun 1922-1925 ketuanya H. Ibrahim. Saat Pak H. Ibrahim menjadi ketua itu dilakukan dengan ditunjuk langsung. Jadi, tidak ada pemilihan. Nah, tahun 1925 dan seterusnya baru pemilihan.

Sebelum tahun 1950 sistemnya pemilihan langsung. Semua warga Muhammadiyah langsung memilih. Setelah tahun 1950 pemilihan dilakukan secara perwakilan.

Di Muktamar NU, keriuhan terjadi dari mulai pembahasan tata tertib. Sementara di Muhammadiyah berjalan lancar dan tidak ada gejolak. Bagaimana menyiasatinya?

Muhammadiyah tidak banyak melakukan pembahasan tata tertib, karena tidak banyak orang yang ingin melakukan perubahan terhadap hal-hal yang sudah selama ini berjalan.

Bisa diceritakan proses Muktamar Muhammadiyah kemarin?

Muktamar Muhammadiyah berjalan selama lima hari. Hari pertama lebih kepada hal-hal yang sifatnya seremoni. Pembukaan oleh presiden dan berbagai pertunjukan.

Hari kedua dan ketiga laporan capaian dan prestasi dari pengurus wilayah dan pimpinan pusat. Apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing organisasi otonom. Pada hari ketiga sebenarnya sudah dilakukan pemilihan pimpinan, tapi belum diumumkan.

Hari keempat membahas isu-isu strategis. Ada empat komisi untuk membahas itu. Yaitu, komisi program, dakwah berjamaah berbasis komunitas, isu-isu strategis, dan *darul ahdi wa syahadah* atau Indonesia sebagai konsep pemahaman kenegaraan.

Dari empat komisi ini kemudian lahir beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang dihasilkan itu, antara lain, bagaimana sikap kita terhadap minoritas, bagaimana kita harus melindungi minoritas, bagaimana konflik Sunni-Syiah itu bisa dihentikan dengan membangun dialog antarkelompok masyarakat. Jangan sampai konflik Sunni-Syiah berlanjut sehingga akan memecah belah umat Islam.

Rekomendasi lain juga terkait dengan isu buruh migran, perlindungan buruh migran, melawan perbudakan, melawan perdagangan manusia, bagaimana kita bersikap terhadap difabel, juga tentang fikih air, bagaimana agar masjid-masjid Muhammadiyah tidak membuang-buang air.

Hari kelima setengah seremoni dan juga penetapan hasil-hasil sidang itu serta dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penutupan.

Menurut Anda, apa yang baru dari hasil Muktamar Muhammadiyah kali ini?

Banyak hal yang baru. Terutama kalau kita lihat dari sikap Muhammadiyah terhadap negara. Misalnya, dalam wujud *darul ahdi wa syahadah*. Ini adalah negara kesepakatan, negara perjanjian. Ini adalah tempat mengimplementasikan, memberi kesaksian dalam rangka mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam.

Hal baru lainnya adalah membantah tuduhan bahwa Muhammadiyah itu dekat dengan Wahabi, tidak peduli dengan minoritas, tidak peduli dengan Syiah atau hanya mengurusi sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Muhammadiyah sekarang mencoba menjadi gerakan yang berkemajuan. Makna berkemajuan artinya adalah kosmopolitan.

Kata kosmopolitan itu berasal dari Yunani. Artinya adalah *citizen of the world*. Bahwa kita ini warga dunia. Kita ini hidup di Indonesia, tapi secara peradaban dan kultural kita tidak boleh menutup diri dari pengaruh kebudayaan dunia. Kita harus berdialog, harus berpikir keluar dari lingkup Indonesia untuk mempromosikan Islam Indonesia itu ke dunia luar. Bukan sekadar menerima pengaruh asing tetapi juga berdialog, *sharing* tentang Indonesia kepada dunia luar.

Sudah tidak saatnya lagi kita bersifat defensif terhadap pemahaman ISIS, Wahabi, dan sebagainya. Kita perlu *attack*, menyerang keluar, mempromosikan Islam Indonesia ke luar.

Selama ini kita mengalami *inferiority complex*. Kita mengalami rasa minder ketika berhadapan dengan bangsa lain. Kita mengalami *majority with minority mentality*. Mayoritas tetapi dengan mental minoritas.

Karena itulah sikap-sikap tidak percaya diri dan sebagainya itu harus diatasi dengan semangat yang kosmopolitan dan semangat berkemajuan. Saya kira, itulah program-program atau misi-misi baru dari Muhammadiyah. Ini bisa kita lihat, misalnya, ketika kami berbicara tentang air, buruh migran, budaya ilmu pengetahuan, tentang difabel, tentang bonus demografi. Itu, saya kira, yang menjadi isu-isu krusial yang harus dibahas oleh masyarakat.

Apa pemicu yang membuat Muktamar Muhammadiyah mengarah pada isu-isu itu?

Kita menyadari bahwa globalisasi itu sudah di depan mata kita, bahkan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran ISIS, Wahabi, pengaruh asing ini menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa menolak lagi globalisasi.

Apa sikap kita? Apakah kita harus menutup diri mencari perlindungan di dalam lingkup Indonesia? Atau kita harus berhadapan dengan dunia luar dan kemudian membuka diri terhadap pengaruh asing, tetapi tidak kehilangan identitas dan jati-diri kita?

Nah, Muhammadiyah memilih untuk berdialog, membuka keluar tapi tidak kehilangan identitas. Globalitas itu adalah tantangan. Kesadaran globalisasi inilah yang kemudian melahirkan sikap Muhammadiyah yang berkemajuan.

Kami kembali ke tahun 1912 sampai 1920-an ketika Ahmad Dahlan mencanangkan Islam Berkemajuan. Ini bagian dari kesadaran adanya pengaruh, adanya budaya asing, adanya kekuatan asing yang mempengaruhi jati-diri kita.

Tadi Anda katakan Islam Indonesia harus attack keluar. Apa sebenarnya makna Islam Indonesia dalam konsepsi Muhammadiyah?

Kami merumuskannya dalam tiga bentuk. Pertama, berkaitan dengan kultur atau budaya. Yang kedua, berkaitan dengan politik. Ketiga, berkaitan dengan fikih. Dalam konteks Islam Indonesia secara politik, konsepsi kami adalah Indonesia itu *darul ahdi wa syahadah.* Kami menerima Pancasila, menerima NKRI. Menerima Indonesia sebagai negara-bangsa adalah bagian dari yang harus diperjuangkan. Muhammadiyah berkontribusi besar terhadap kelahiran negara ini. Karena itu Indonesia harus dipelihara.

Dalam konteks budaya, konsepsi kami budaya kosmopolitan. Oke, kita memiliki kultur Indonesia, tapi kultur dalam masyarakat modern sebetulnya adalah kultur yang *hybrid:* campuran. Kita tidak bisa hanya mengacu kepada budaya Indonesia saja. Makanya di Muhammadiyah, kegiatan musik seperti *drum band* atau biola bukan sesuatu yang ditentang.

Dalam konteks fikih, Muhammadiyah mencanangkan fikih yang kosmopolitan, bukan fikih yang ritual. Ini, misalnya, diwujudkan dalam fikih tentang air, fikih kebencanaan, fikih kebhinekaan, fikih tentang difabel, fikih tentang khilafiyah. Ini adalah isu-isu kosmopolitan yang baru dibahas dalam fikih. Jadi dalam tiga hal inilah identitas Islam Berkemajuan itu dibentuk.

Siapa yang membawa isu-isu ini ke ke Muktamar? Apakah kalangan mudanya?

Ini prosesnya lama. Ada *steering comitte* (SC) yang bertugas mengonsepsikan. Tapi SC ini tidak bekerja sendiri. Mereka mengundang para akademisi dan para pakar untuk melakukan pertemuan berkali-kali dengan didampingi tim asistensi. Tim asistensi ini terdiri dari sekretaris, tim perumus yang kemudian membuat draf dari berbagai hasil pertemuan itu. Di sinilah banyak anak-anak muda yang terlibat. Ini sikap akomodatif dari pimpinan Muhammadiyah untuk memberi ruang kepada anak-anak muda untuk terlibat di dalam proses Muhammadiyah.

Bagaimana dengan regenerasi di Muhammadiyah?

Kalau kita melihat pimpinan Muhammadiyah yang sekarang banyak nama-nama baru. Paling tidak ada empat nama baru di pimpinan 13. Ada Busyro Muqoddas, Suyatno, Anwar Abas, Muhajir Efendi yang menggantikan nama-nama yang lama. Dan dari nama yang 39 itu banyak nama-nama baru dan masih muda. Jadi, menurut saya, proses regenerasi berjalan. Tapi tentu saja tetap perlu dikawal.

Di Muktamar kemarin juga ada beberapa orangtua yang mundur dari pencalonan seperti Malik Fajar, Din Syamsuddin, Buya Syafii Maarif, dan Amin Abdullah. Mereka semua tidak bersedia dipilih lagi dan memberi kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk maju.

Beberapa kalangan menganggap antara Haedar Nashir dan Yunahar Ilyas ada perbedaan cara pandang. Haedar sering disebut dari kalangan yang lebih liberal, semantara Yunahar dari kalangan konservatif. Tanggapan Anda?

Sebetulnya orang yang betul-betul liberal di Muhammadiyah sudah tidak ada lagi, karena mereka itu kemudian keluar karena merasa tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Orang yang betul-betul konservatif juga tidak betah di Muhammadiyah. Mereka yang radikal tidak cocok lagi dengan Muhammadiyah. Jadi orang yang pikirannya ekstrem, baik ke kanan atau ke kiri, tidak ada di Muhammadiyah. Antara Yunahar Ilyas dan Haedar Nasir, menurut saya, lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya.

Ini yang harus kita jaga. Ini adalah *reprensentasi* dari Islam Indonesia: Islam yang moderat. Jangan kemudian dibenturkan satu sama lain. Nanti yang menang adalah kelompok-kelompok Islam yang tidak suka dengan Islam Indonesia.

Saya dengar Haedar Nashir akan melakukan bersih-bersih dari orang-orang PKS yang menguasai amal usaha Muhammadiyah?

Itu sudah selesai pada 2007. Waktu itu memang ada beberapa orang yang berafiliasi dengan PKS yang mengambil alih sekolah Muhammadiyah. Tapi sudah ada keputusan dari Muhammadiyah bahwa orang politik dilarang aktif di Muhammadiyah.

Menurut Anda, bagaimana soal komposisi pengurus Muhammadiyah sekarang?

Saya kira, banyak harapan. Para pimpinannya adalah orang-orang yang mempunyai ideologi yang kuat. Mereka adalah pimpinan yang ideal, menurut saya. Ada manajer, ada ekonom seperti Anwar Abas, ada pakar politik, Hajrianto, ada ideolog, Haedar Nashir, dan ada orang yang bergerak dalam antikorupsi Busyro Muqoddas. Jadi, saya kira, kalau berjalan lancar ini adalah komposisi yang komplit. Sangat ideal bagi Muhammadiyah.[]

---

http://www.madinaonline.id/khazanah/najib-burhani-Muktamar-menunjukkan-muhammadiyah-berkemajuan-dan-bukan-wahabi/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Etika

Yudi Latif

Muktamar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berlangsung di tengah kemarau etika-spiritual yang melanda kehidupan bernegara. Kebebasan demokratis selama 15 tahun terakhir mempercanggih politik sebagai teknik, tetapi memundurkan politik sebagai etik. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa, seperti keadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas, runtuh.

Semua mata menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana Muktamar kedua ormas keagamaan terbesar itu berjalan. Masih adakah sumur keteladanan yang tersisa di tengah dahaga jutaan rakyat yang menanti tetes-tetes air harapan?

Tidak berlebihan jika kita berharap banyak dari NU-Muhammadiyah. Keduanya dapat dikatakan sebagai reservoir etika republik. Keduanya berinvestasi banyak dalam menyemai benih kehidupan etis sebelum republik berdiri. Keduanya juga menempatkan wakilnya dalam perumusan dasar negara dan konstitusi negara pertama.

Wakil dari kedua ormas dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan gigih memperjuangkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu

sila yang harus diutamakan dalam dasar negara. Tentu jadi pertanyaan, mengapa untuk urusan negara modern, prinsip ketuhanan yang bersifat meta-rasional perlu dilibatkan dalam urusan publik yang semestinya bersifat rasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menoleh ke buku *A Study of History* karya sejarawan Inggris, Arnold Toynbee. Lewat buku ini, ia melacak faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar 20 peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Singkat kata, bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan etika-spiritual ibarat bangunan istana pasir.

Studi Toynbee itu mengisyaratkan ada hubungan erat nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kemajuan bangsa dan peradaban. Samuel Huntington dalam *Who Are We?* menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa dibandingkan Uni Soviet. Di AS, urainya, "Agama telah dan masih menjadi sesuatu yang sentral dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika" (*Huntington, 2004:20*). Huntington juga menunjukkan (2006), geografi peradaban yang mampu bertahan adalah yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili ahli yang menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam memengaruhi demokrasi.

Ada faktor budaya yang dipengaruhi agama yang jadi rintangan bagi kemajuan. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan, faktor keyakinan memberi kontribusi penting dalam proses demokrasi. Banyak faktor yang ikut memengaruhi sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana menjadi pendorong kemajuan jadi hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam kaitan itu, hendaklah disadari bahwa agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan yang suci (*sacred*) sedari awal memang mengandung kekuatan yang ambivalen: menakjubkan dan menghancurkan. Kata *sacred*(Latin, *sacer*) itu bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme peribadatan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas, hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual dan moralitas, keberagamaan jadi mandul, kering, dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif. Tanpa penghayatan etika-spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri, dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman ke luar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaan saat agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, keluhuran budi pekerti, kasih sayang, dan perawatan justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan, keserakahan, dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, pragmatisme, permusuhan, dan intoleransi.

Pada titik ini, Muktamar NU-Muhammadiyah merupakan pertaruhan besar tentang jangkar kehidupan etis di negara ini. Kebanggaan tentang wajah Islam Nusantara yang ramah, etis, dan estetis harus dibuktikan agar tidak berhenti sebagai pepesan kosong dan agar bangsa ini masih bisa menanti datangnya hujan di tengah krisis kemarau etika yang berkepanjangan.

Untuk keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga transformasi etika-spiritual. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan Karen Amstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, tetapi pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan agama dan publik.

KOMPAS, 04 Agustus 2015. Penulis adalah Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

2

ISLAM BERKEMAJUAN

Identitas Muhammadiyah

MITSUO NAKAMURA

SELAMA 100 tahun keberadaannya, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, filantropi, dan kesejahteraan sosial. Kontribusi ini tak terbatas pada masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim, seperti terlihat pada adanya sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bersama Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terpenting di negeri ini dan menjadi representasi suara Islam moderat. Di tingkat global, barangkali tak ada organisasi Islam modern yang bisa menandingi amal usaha Muhammadiyah.

Memudar dan Kurang Dinamis

Peran Muhammadiyah pada beberapa dekade belakangan ini seperti agak memudar. Secara eksternal, berbagai kelompok transnasional, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang muncul pasca-tumbangnya Orde Baru, mampu berkompetisi dan menandingi Muhammadiyah. Secara internal, berbagai infiltrasi, seperti dari Partai Keadilan Sejahtera, memengaruhi gerak langkah Muhammadiyah. Di tubuh organisasi ini juga terjadi konflik di antara tiga kubu: kelompok Salafi yang cenderung skriptualis dan konservatif, kelompok moderat yang memadukan puritanisme dan

modernisme, serta kelompok liberal yang menganggap Muhammadiyah terlalu kaku dan menghargai keimanan individu.

Persoalan yang menimpa Muhammadiyah saat ini tak hanya pada tingkat ideologi. Amal usahanya pun menghadapi banyak masalah. Dulu, Muhammadiyah adalah pionir dalam bidang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, kini sebagian dari lembaga pendidikan milik Muhammadiyah terlihat ketinggalan zaman, kalah bersaing dengan sekolah internasional, Sekolah Islam Terpadu, dan sekolah milik kelompok Salafi yang didukung dana dari Timur Tengah.

Dalam bidang filantropi, Muhammadiyah juga agak kalah lincah dan gesit dibandingkan organisasi baru, seperti Dompet Dhuafa dan Pos Keadilan Peduli Ummat. Rumah sakit Muhammadiyah juga tak berbeda dari rumah sakit pada umumnya yang dikelola dengan motif komersial dengan tarif tinggi. Bahkan, beberapa rumah sakit Muhammadiyah kalah kualitasnya dari puskesmas.

Secara organisasi, beberapa pengamat menilai bahwa Muhammadiyah kini kalah dinamis dibandingkan dengan NU dalam ideologi. Organisasi yang dulu diasosiasikan dengan kaum sarungan dan kolot itu kini tampak lebih progresif dan reformis, terutama sejak dipimpin Gus Dur tahun 1980-an.

Beberapa hal itulah yang menjadi tantangan berat bagi Muhammadiyah ketika organisasi ini mencapai umur satu abad yang diperingati pada 18 November tahun ini. Karena itu, ulang tahun kali ini dirasakan tidak cukup dengan dirayakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan di beberapa tempat lain di Indonesia.

Perayaan itu sendiri penting dilakukan sebagai bentuk syukur dan karena ini adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup buat para anggota dan simpatisannya. Kalau nanti Muhammadiyah mampu bertahan hingga 200 tahun, pasti bukan generasi sekarang yang akan menjumpainya.

Namun, yang lebih penting dari perayaan seremonial adalah menemukan kembali (*rediscovery*) dan reformulasi terhadap identitas Muhammadiyah untuk abad kedua. Inilah di antaranya mengapa sejumlah

aktivis-sarjana Muhammadiyah dan pengamatnya dalam negeri bekerja sama dengan beberapa sarjana asing, seperti saya sendiri, MC Ricklefs, James Peacock, Robert Hefner, Hyun-Jun Kim, Jonathan Benthall, Robin Bush, Martin van Bruinessen, Nelly von Doorn Harder, dan sebagainya, menyelenggarakan konferensi-riset internasional tentang Muhammadiyah (*International Research Conference on Muhammadiyah/IRCM*) di Malang, 29 November-2 Desember 2012. Saya juga berterima kasih kepada Ahmad Najib Burhani dari LIPI yang telah membantu saya dalam penyusunan tulisan ini.

Tantangan ke Depan

Dengan kecepatan globalisasi dan teknologi yang luar biasa, masih mampukah Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang progresif (berkemajuan) dan dinamis? Di tengah gelombang Salafisme dan Islamisme, mampukah Muhammadiyah tegak mempertahankan dan merevitalisasikan identitasnya? Di tengah kebangkitan kembali hal-hal tradisional dan lokal sebagian karena desentralisasi, khususnya *revival* kejawen, bagaimanakah organisasi ini mesti bersikap? Inilah beberapa tantangan Muhammadiyah ke depan yang akan dicoba dibahas di konferensi sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang.

Tentunya tantangan besar yang dihadapi Muhammadiyah ke depan tak bisa diselesaikan dengan konferensi atau dalam sebuah konferensi. Meski berupaya membedah berbagai aspek kemuhammadiyahan sejak organisasi ini didirikan 18 November 1912, apa yang dilakukan para sarjana domestik dan asing hanyalah diagnosa dan sebagian dari mereka yang berhaluan "intelektual organik", mungkin dapat memberikan resep obat.

Namun, untuk bisa bangkit kembali, perlu langkah sistematis dari pengurus Muhammadiyah sendiri, kesadaran warga Muhammadiyah, dan barangkali dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah ataupun kelompok masyarakat madani yang lain. Pada tingkat teoretis, langkah itu mungkin bisa dimulai, misalnya, dengan mereformulasi teologi al-Ma'un yang selama ini menjadi prinsip gerak dan darah amal usaha

Muhammadiyah dalam usaha membantu para orang-orang yang miskin, lemah, dan tertinggal.

Semangat ”*kembali ke Al-Qur'an dan Sunah*” dan semboyan *amar ma›ruf nahi mungkar* yang menjadi ruh reformasi keagamaan di Muhammadiyah juga perlu mendapat reformulasi pada dimensi epistemologi ataupun proyek kegiatan yang konkret. Cita-citanya yang dituntut ”*masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*” dan ”*peradaban unggul*” juga perlu dioperasionalisasikan dengan ukuran empiris. Dan, khususnya dalam lingkungan plural, konsep *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan) juga mungkin perlu mendapat suntikan lagi dengan darah baru dan diperluas tak sekadar kompetisi sesama warga Muhammadiyah, tetapi juga kompetisi dan kerja sama dengan masyarakat beragama lain sebagai sesama manusia yang hidup berdampingan dalam *global village* pada dunia kekinian.

KOMPAS, 23 November 2012. Penulis adalah Profesor Emeritus Chiba University, Jepang; Wakil Ketua Steering Committee for the International Research Conference on Muhammadiyah

Muhammadiyah, Seabad Perubahan

MARTIN VAN BRUINESSEN

Buku klasik Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree*, merupakan kajian antropologi penting dan rujukan wajib bagi setiap peneliti yang ingin memahami fenomena Muhammadiyah.

Tahun ini, Profesor Nakamura meluncurkan edisi perbaikan buku lama yang dilengkapi dengan pengamatan dan analisisnya tentang perkembangan Muhammadiyah di Kota Gede selama empat dasawarsa pasca-penelitian aslinya. Tambahan tersebut sebetulnya setebal buku awal dan layak dianggap sebagai *The Crescent* jilid kedua, apalagi isinya juga tak kalah menarik.

Sebagai pengamat setia Muhammadiyah paling senior—bekerja sama dengan para cendekiawan muda Muhammadiyah—Prof Nakamura juga memelopori konferensi ilmiah tentang ormas yang telah berumur satu abad di Malang. Tulisan sederhana ini adalah tanggapan terhadap tulisan Prof Nakamura di Kompas (23/11).

Berubah Komposisi

Pengamatan Nakamura bahwa Muhammadiyah telah memudar dan kurang dinamis dibanding dulu agaknya tak terlepas dari perubahan mendasar dalam komposisi keanggotaannya. Sampai setengah abad lalu, orang

Muhammadiyah pada umumnya dikenal sebagai wiraswasta dan pekerja keras. Para pengusaha batik Yogyakarta dan Pekajangan (Pekalongan), juga para perajin dan saudagar Kota Gede adalah ikon Muhammadiyah. Ungkapan Jawa *"sepi ing pamrih rame ing gawe"* sangat tepat untuk menggambarkan etos kerja kaum Muhammadiyah ketika itu.

Berbagai pengamat asing menyebutkan, sikap dan perilaku kaum Muslim modernis itu mirip kaum Kalvinis yang menurut Weber cocok dengan perkembangan ekonomi kapitalisme. Dari semua golongan pribumi, kaum santri modern berpotensi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi politik.

Mulai tahun 1970-an kita bisa melihat keanggotaan Muhammadiyah yang semakin diwarnai oleh pegawai negeri dan birokrat daripada kaum wiraswasta. Hal itu tak berarti bahwa Muhammadiyah mulai menggarap golongan lain, tetapi lebih mencerminkan perubahan internal Muhammadiyah.

Selama Indonesia masih dijajahi Belanda, orang Islam kebanyakan enggan bekerja untuk pemerintah yang kafir dan menilai pekerjaan sebagai wiraswasta lebih mulia. Pasca-kemerdekaan, sikap terhadap negara dan pemerintah berubah. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendidikan massal pada Orde Baru juga membuat lapangan kerja di jajaran birokrasi dan dunia pendidikan sangat meluas.

Anak-anak dari para pengusaha yang telah membesarkan Muhammadiyah rata-rata meninggalkan usaha orangtua mereka dan memilih karier di birokrasi atau lembaga pendidikan. Maka, ikon Muhammadiyah lama, yakni para pengusaha batik dan perak di Yogyakarta, Pekajangan, dan Kota Gede, tinggal nama.

Generasi muda keluarga perajin dan saudagar itu sebagian besar beralih profesi menjadi pegawai negeri, guru/dosen, dokter, pengacara, dan sebagainya. Muhammadiyah telah menjadi organisasi kelas menengah birokrat terbesar di Indonesia. Maka pandangan kemasyarakatan Muhammadiyah mencerminkan sikap dan pandangan golongan yang dominan di dalamnya.

Pasca-Reformasi, ada persepsi bahwa Muhammadiyah terancam infiltrasi gerakan Islam radikal bersifat transnasional, seperti Tarbiyah/PKS dan Salafi. Mungkin lebih baik kita melihat fenomena itu sebagai pergumulan atau pergeseran antargenerasi, tak jauh berbeda dengan pergeseran dari wiraswasta ke pegawai negeri.

Pengetahuan saya memang terbatas dan parsial, tetapi aktivis Tarbiyah atau Salafi dalam Muhammadiyah yang saya kenal—langsung atau tidak langsung—tidak berasal dari luar Muhammadiyah, tetapi lahir dan dibesarkan di dalamnya.

Pembaruan Internal

Mereka merupakan bagian dari proses regenerasi dan reformasi (pembaruan, pemurnian) internal yang tak pernah berhenti. Selain mereka, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang juga mencari cara untuk mengaktualisasi (tajdid) dan menerapkan nilai-nilai Islam.

Di mata banyak anak muda, organisasi Muhammadiyah sudah terlalu mapan. Kegiatan sosial dilakukan rutin tanpa semangat menciptakan dunia yang lebih adil. Wacana keagamaannya pun tak lagi sanggup memenuhi kebutuhan generasi muda akan spiritualitas dan relevansi sosial. Tak sulit dimengerti kalau sebagian mereka tertarik pada paham dan aksi Ikhwan, Hizbut Tahrir atau Salafi, dan sebagian lain tertarik pada intelektualisme Islam yang (oleh penentangnya) dicap "liberal".

Walaupun mereka diilhami gerakan dan pemikir di luar Muhammadiyah (dan di luar Indonesia), tidak tepatlah kalau kita melihat pergumulan pemikiran itu sebagai ancaman dari luar. Dalam proses globalisasi, masyarakat seperti Indonesia dan organisasi seperti Muhammadiyah bukan obyek yang pasif menerima pengaruh dari luar, melainkan orang Indonesia dan anggota Muhammadiyah juga memainkan peran aktif dalam proses itu: merekalah yang memilih yang dianggap cocok dan perlu.

Penyusupan paham dan gaya aksi gerakan Islam transnasional ke dalam Muhammadiyah merupakan bagian dari perkembangan yang lebih umum, yaitu memudarnya batas negara-bangsa. Sebagai akibat kebijakan

ekonomi neoliberal dan perkembangan teknologi komunikasi (internet dan telepon seluler), peranan negara bangsa memudar dan berbagai aktor nonpemerintah, sebagiannya transnasional, yang mengambil peranan.

Manusia, barang, uang, pemikiran dan unsur budaya lainnya lebih mudah melintasi batas antarnegara. Di Indonesia, proses globalisasi makin cepat pada era reformasi. Banyak orang Indonesia hidup bertahun-tahun di luar negeri untuk studi atau kerja; lebih banyak lagi yang telah berkunjung ke negara lain dalam rangka ibadah atau wisata (atau, kalau anggota DPR, studi perbandingan). Wawasan orang Indonesia tidak lagi terbatas pada daerah dan negara bangsa, tetapi mencakup bagian dunia lainnya.

Muhammadiyah selama ini merupakan ormas Islam kebangsaan dengan anggota dan cabang di seluruh Indonesia. Walaupun ada beberapa cabang luar negeri, anggotanya orang Indonesia juga; tak ada orang Muhammadiyah yang bukan warga negara Indonesia. Muhammadiyah, seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU), memainkan peran penting dalam proses *nation-building* (pembentukan bangsa) Indonesia.

Muhammadiyah lahir di Yogyakarta dan lama diwarnai nilai-nilai budaya Jawa. Namun, sebagai ormas, Muhammadiyah mencakup seluruh Indonesia dengan struktur organisasi identik dengan struktur pemerintahan negara.

Akan tetapi, wawasan dan ambisi sebagian generasi muda sudah melintas batas negara bangsa. Cita-cita, nalar, dan perjuangan mereka diilhami oleh ide-ide, tokoh-tokoh, atau gerakan-gerakan di bagian dunia lainnya. Dari paham Salafi sampai hermeneutika, dari gerakan antiglobalisasi sampai perennialisme, dari perekonomian Islam sampai teologi pembebasan. Tantangan rumit bagi Muhammadiyah adalah bagaimana tetap menjadi rumah bagi mereka, tempat di mana mereka bisa tukar-menukar pemikiran dan berdebat bebas tentang implikasi pemikiran untuk aksi, serta wadah untuk aktivitas sosial dan keagamaan tanpa mengorbankan identitas Muhammadiyah.

KOMPAS, 07 Desember 2012. Penulis adalah Profesor Emeritus Universitas Utrecht (Belanda), Peneliti Senior Asia Research Institute (Singapura)

Rahasia Satu Abad Muhammadiyah

KIM HYUNG-JUN

UMUMNYA, orang asing berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang kurang demokratis. Kekuasaan Soeharto menjadi alasan utama yang melahirkan pandangan tersebut. Walaupun Orde Baru sudah diganti, pandangan itu sulit diubah karena masih maraknya unsur-unsur yang tidak sejalan dengan dasar demokrasi.

Politik uang, korupsi, kolusi, penyelewengan oleh pemimpin pemerintah, kurang adanya sistem yang merepresentasikan aspirasi rakyat, dan lain-lain menguatkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia lebih mengarah ke prosedural, sementara demokrasi praktis (riil) belum dapat tercapai.

Kesan itu kemudian membawa pertanyaan yang rumit, yaitu apakah demokrasi pernah dijalankan di Indonesia selama ini? Jika memikirkan soal itu, maka kemudian muncullah pertanyaan yang bersifat kolonial: apakah kultur dan sifat masyarakat Indonesia memang kurang cocok dengan demokrasi? Jawabannya "jelas tidak" meskipun sulit dibantah bahwa bukti nyata yang menunjukkan adanya demokrasi riil susah ditemukan di buku-buku sejarah ataupun buku-buku sosial-politik.

Seandainya saya memilih organisasi keagamaan lain sebagai obyek penelitian, citra buruk tentang demokrasi Indonesia belum berubah. Akan tetapi, saya sempat melakukan penelitian tentang Muhammadiyah dan

pengalaman ini mengubah pandangan secara drastis, yang dapat disebut *paradigm shift*: ternyata di Indonesia ada tradisi demokrasi yang praktis dan riil.

Tradisi demokrasi selama berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas Muhammadiyah, saya menemukan tradisi demokrasi yang berjalan sehari-hari. Secara lebih rinci, saya menyaksikan adanya tradisi berdiskusi secara terbuka dan sopan, tradisi memperdebatkan isu-isu berdasarkan rasionalitas, tradisi menghargai pendapat orang lain, tradisi tidak mengasingkan dan memusuhi orang yang berpendapat lain, tradisi mencari jalan keluar dengan cara damai dan yang dapat disetujui oleh semua pihak, dan tradisi menerima apa yang sudah diputuskan oleh musyawarah.

Pertama-tama saya tidak begitu rela menerima hasil pengamatan di atas sebab menurut pikiran saya, Muhammadiyah merupakan bagian dari Indonesia sehingga kurang wajarlah bahwa warga Muhammadiyah mampu menjalankan praktik-praktik demokrasi. Saya pernah mencurigai adanya unsur "sandiwara", yaitu aktivis Muhammadiyah pura-pura melakukan tindakan demokratis untuk memberi kesan baik kepada peneliti asing. Akan tetapi, bukankah kepura-puraan tidak dapat diteruskan selama beberapa minggu, apalagi beberapa bulan? Akhirnya, saya mulai menerima apa yang saya saksikan. Agaknya, saya menemukan satu pola, *democracy at the grass-root level* yang dicari oleh aktivis-aktivis yang berkiprah pada *empowerment of the people.*

Kemudian, muncul pertanyaan, bagaimana Muhammadiyah mampu membangun dan memelihara tradisi demokrasi di dalam suasana politik nasional yang kurang kondusif? Ada beberapa alasan yang saya temui dan dua alasan yang menonjol, yaitu egalitarianisme dan otonomi.

Islam mengajarkan bahwa derajat manusia sama meskipun ajaran itu sulit dijalankan. Sering terjadi seseorang dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga ia harus dihormati dan "disakralkan". Akan tetapi, praktik semacam itu tidak dianjurkan, malah dikritik keras oleh Muhammadiyah. Hal itu dapat dibuktikan dengan sikap Muhammadiyah terhadap pendirinya, KHA Dahlan. Suatu saat ketika rapat berlangsung,

sesudah wafatnya beliau, ketua yang baru saja dilantik mengemukakan bahwa warga Muhammadiyah harus lebih dari beliau dan menjalankan programnya bukan demi beliau, melainkan demi Allah. Generasi berikutnya menghargai amal perjuangan KHA Dahlan, tetapi tidak pernah mengultuskannya.

Dengan adanya egalitarianisme, tidak sulit menyaksikan pimpinan dan anggota duduk berdampingan, bergurau, makan, dan berdebat bersama. Pendapat yang sering dikemukakan oleh pimpinan juga memperlihatkan sikap serupa. Mereka berpendapat bahwa anggota Muhammadiyah cukup pintar sehingga tidak usah dibina secara langsung dan intensif. Tugas pimpinan adalah mengarahkan dan mengoordinasikan programnya, sementara soal pelaksanaannya diserahkan kepada setiap anggota. Sikap seperti itu kemudian melahirkan dan memperkuat suasana yang kondusif untuk mempraktikkan riil demokrasi.

Otonomi, alasan kedua yang memperkuatkan demokrasi di Muhammadiyah adalah otonomi. Pimpinan di tingkat wilayah sampai ranting mempunyai wewenang untuk menerjemahkan apa yang digarisbawahi oleh pimpinan pusat. Organisasi otonom seperti Aisyiyah dapat menjalankan programnya sendiri-sendiri sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar. Amal usaha diberi otorita untuk mengatur kegiatannya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Efek penting dari otonomi adalah bahwa kekuatan organisasi susah disentralisasi pada sekelompok pemimpin. Hal itu dapat terbukti dengan adanya jargon yang kadang dilontarkan oleh aktivisnya, yaitu bahwa ”tanpa pimpinan pusat pun Muhammadiyah tetap berjalan”. Otonomi seperti ini juga mengakibatkan fenomena yang cukup aneh bagi orang luar, yaitu ”atasannya” meminta bantuan kepada ”bawahannya” untuk mencukupi keperluan operasional organisasi. Tanpa adanya pimpinan yang dapat memonopoli sumber daya manusia ataupun sumber finansial dan ideologi, suasana yang kondusif untuk berjalannya demokrasi tetap dijaga.

Otonomi juga mempunyai efek yang penting, yaitu kegiatan Muhammadiyah dilaksanakan sesuai dengan konteks di masing-masing tempat sehingga kemajemukan dapat dilindungi. Hal itu membawa

dampak positif terhadap demokrasi karena keberadaan perbedaan dapat diakui dan dihargai.

Menjelang Muktamar, banyak orang menanyakan rahasia yang memungkinkan eksisnya Muhammadiyah selama seratus tahun. Bagi saya, rahasia itu adalah demokrasi berdasarkan egalitarianisme dan otonomi. Ketika menyampaikan kesimpulan seperti ini, agaknya muncul rasa yang kurang puas dan mantap karena uraian tersebut tidak menggunakan konsep atau teori yang canggih dan fashionable. Semua orang mudah mengatakan bahwa demokrasi itu penting bagi segala bentuk organisasi modern. Akan tetapi, hal yang unik di Muhammadiyah adalah bahwa prinsip dasar tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan tinjauan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada rahasia yang susah dipahami di balik satu abad Muhammadiyah. Apa yang berada di baliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egalitarianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.

KOMPAS, 5 Juli 2010. Penulis adalah Profesor Antropologi Budaya Kangwon National University, Korea Selatan

Islam Indonesia Berkelanjutan

AZYUMARDI AZRA

ISLAM Indonesia dipandang kian banyak kalangan mancanegara lebih memberikan harapan agaknya semakin sulit terbantahkan. Berbeda dengan Islam Arab atau Islam Asia Selatan yang terus bergolak dalam konflik, kekerasan dan perang, Islam Indonesia tetap damai. Ekstremisme dan radikalisme yang terus meruyak di berbagai kawasan dunia Muslim lain tidak menjadi gejala signifikan di Indonesia.

Tidak heran jika hal ini menjadi pemikiran Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dalam kunjungan ke Jakarta, berdialog dengan lima figur Islam Indonesia (Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh NU Alwi Shihab, Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, Ketua Pengurus Masjid Sunda Kelapa Aksa Mahmud, dan penulis artikel ini), Cameron menyatakan ingin mempelajari kenapa Islam Indonesia menolak ekstremisme dan radikalisme.

PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). "Sementara Inggris yang memiliki hanya sekitar 2,5 juta Muslim, lebih dari 1.000 orang bergabung dengan NIIS. Apa kunci keberhasilan Indonesia mengatasi paham (dan gerakan) radikalisme; meredam meluasnya pengaruh dan keterlibatan warga Indonesia dengan paham NIIS?" (*Kompas, 29/7/2015*).

Islam Nusantara, Islam Indonesia

Tak ragu lagi, salah satu kunci utama keberhasilan itu adalah eksistensi dan hegemoni ormas-ormas Islam wasathiyah (”jalan tengah”) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dua ormas Islam Indonesia terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini sedang melaksanakan hajatan besar; NU dengan Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur (1/8/2015), dan Muhammadiyah dengan Muktamar ke-47 di Makassar (3/8/2015). Muktamar NU dan Muhammadiyah tak lain merupakan momentum penguatan Islam wasathiyah untuk Islam Berkemajuan dengan peradaban Islam *rahmatan lil 'alamin*—rahmat bagi alam semesta.

Islam wasathiyah yang jadi paradigma dan praksis pokok Muhammadiyah dan NU telah menjadi tradisi panjang Islam Nusantara. Istilah ”Islam Nusantara” dalam dunia akademis mengacu kepada ”Southeast Asian Islam” yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand selatan), dan Mindanau (Filipina selatan).

Wilayah Islam Nusantara dalam literatur prakolonial disebut ”negeri bawah angin” (*lands below the wind*). Lebih spesifik dalam literatur Arab sejak akhir abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut ”bilad al-Jawi”, negeri ”Muslim Jawi”—yaitu Asia Tenggara. Umat Muslimin Nusantara biasa disebut sebagai ”ashab al-Jawiyyin” atau ”jama'ah al-Jawiyyin”.

Wilayah Islam Nusantara atau bilad al-Jawiyyin adalah salah satu dari delapan ranah religio-cultural Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran, Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan Dunia Barat. Meski memegangi prinsip pokok dan ajaran yang sama dalam akidah dan ibadah, setiap ranah memiliki karakter keagamaan dan budayanya sendiri.

Validitas Islam Nusantara tidak hanya secara geografis-kultural. Keabsahannya juga pada ortodoksi Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy'ariyah, fikih Syafi'i, dan tasawuf Al-Ghazali. Kepaduan ketiga unsur ortodoksi ini membuat Islam Nusantara jadi wasathiyah; teologi Asy'ariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu dan akal, fikih Syafi'i

bergandengan dengan tasawuf amali/akhlaqi membuat ekspresi Islam jadi inklusif dan toleran.

Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga unsur tersebut terbentuk menjadi tradisi yang terkonsolidasi, mapan dan dominan sejak abad ke-17, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal-jamaah (Sunni). Meski praktis hampir seluruh Muslim Indonesia adalah pengikut *ahlus sunnah wal-jamaah*, terdapat perbedaan tekanan. NU dengan penekanan pada tradisi ulama menyebut diri pengikut ”Aswaja”; istilah ini kemudian jadi brand name NU. Sementara Muhammadiyah sebagai pengikut *ahlus sunnah wal-jamaah* lebih menekankan pada aspek modernisme-reformisme dan ijtihad.

Pasca Perang Dunia II, baik secara istilah maupun substansi, Islam Nusantara agaknya hanya valid untuk Indonesia. Islam Nusantara kini harus dipahami sebagai Islam Indonesia. Perbedaan posisi dan hubungan Islam dengan negara dan politik membuat ekspresi Islam di negara-negara Asia Tenggara menjadi berbeda; apakah tetap inklusif atau malah menjadi eksklusif, misalnya.

Dalam konteks itu, Islam tidak menjadi agama resmi atau agama negara di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Indonesia bukan menjadi bagian dari politik dan kekuasaan. Sementara di Malaysia, Islam menjadi agama resmi negara dan karena itu ia menjadi bagian integral kekuasaan.

Karena itu, di Malaysia, hanya Islam yang boleh disiarkan di ranah publik dan bahkan nama ”Allah” hanya boleh digunakan kaum Muslim. Sementara di Indonesia semua agama dapat tampil di ranah publik dan, selain kaum Muslimin, umat Kristiani juga memakai ”Allah” untuk menyebut Tuhan.

Berkemajuan bagi Peradaban

Islam Indonesia, seperti diwakili antara lain oleh NU dan Muhammadiyah, memiliki hampir seluruh potensi untuk berkemajuan guna mewujudkan peradaban *rahmatan lil alamin*. Modal terbesar untuk berkemajuan adalah sifat dan karakter ormas-ormas Islam yang independen

vis-a-vis negara dan kekuasaan. Mereka punya tradisi tak tergantung pada—apalagi menjadi—alat kekuasaan dengan membiayai dan mengatur diri sendiri.

Modal besar lain adalah kekayaan dan keragaman lembaga yang dimiliki NU dan Muhammadiyah mulai dari masjid dan mushala, sekolah, madrasah, pesantren, perguruantinggi, rumah sakit dan klinik, panti penyantunan sosial, koperasi, hingga usaha ekonomi lain. Tak ada bagian dunia Muslim lain yang memiliki ormas dengan karakter dan kekayaan lembaga seperti Muhammadiyah dan NU.

Banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman, Guru Besar Universitas Chicago, AS, melihat potensi besar Islam Indonesia untuk berdiri terdepan memajukan peradaban Islam global. Dengan peradaban Islam wasathiyah, Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia lebih damai dan harmonis.

Harapan semacam itu pada Islam Indonesia kian meningkat di tengah berlanjutnya konflik di negara-negara Muslim di dunia Arab, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika. Untuk itu, NU dan Muhammadiyah beserta ormas-omas Islam wasathiyah lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran dan amal usaha di dalam negeri, tetapi juga mesti lebih ekspansif menyebarkan Islam wasathiyah ke mancanegara. Dengan begitu, Islam Indonesia dapat berdiri paling depan dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

KOMPAS, 03 Agustus 2015. Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bangkok, Thailand

ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM BERKEMAJUAN

AZAKI KHOIRUDIN

WACANA Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan semakin menarik untuk diperbincangkan di negeri ini. Akhir-akhir ini, "Islam Nusantara" menjadi istilah khas Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan "Islam Berkemajuan" menjadi idiom khas Muhammadiyah.

Kedua wacana ini muncul saat dua organisasi kemasyarakatan (ormas) besar Islam ini akan menggelar hajatan Muktamar. Gagasan Islam Nusantara menemukan momentumnya saat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan tema Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.

Tema itu selengkapnya berbunyi "Meneguhkan Islam Nusantara sebagai Peradaban Indonesia dan Dunia". Gaung "Islam Berkemajuan" juga menemukan relevansinya dengan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makasar, Sulawesi Selatan, 3-8 Agustus *2015*.

Muhammadiyah mengusung tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Kedua tema ini menarik untuk ditelaah dan diperbandingkan kekhasannya masing-masing, terutama relevansinya dengan kondisi Islam Indonesia, bahkan dunia.

Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, dan inklusif. Islam Nusantara disebut pula sebagai mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara.

Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima bumi Nusantara, tetapi juga mewarnai dan bersifat akomodatif terhadap budaya Nusantara, yakni *rahmatan lil 'alamin*.

Abdul Mun'im D.Z. (2010) menandaskan Islam Nusantara adalah paham keislaman yang berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara melalui proses seleksi, akulturasi, dan adaptasi.

Sebenarnya istilah "Islam Nusantara" pada dasarnya tidaklah baru. Menurut Azyumardi Azra (2015), istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (Nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan Indonesia, tetapi juga wilayah muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (Kampuchea).

Menurut Azra, Islam Nusantara adalah Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia.

Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf Al-Ghazali) menumbuhkan karakter *wasathiyah* yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam (*Islamic legacy*) menjadi harapan *renaisans* peradaban Islam global.

Islam Nusantara bukan "Islam lokal". Ahmad Baso (2015) menegaskan Islam Nusantara sebagai cara bermazhab secara *qauli* dan *manhaji* dalam ber-*istimbath* tentang Islam dari dalil-dalilnya yang disesuaikan dengan teritorial, kondisi alam, dan cara pengamalan penduduk Nusantara.

Islam Nusantara itu sejajar dengan kajian Islam India, Islam Turki, Islam Yaman, dan sebagainya. Islam Nusantara merupakan proses berkelanjutan, bentuk paradigma dan etika Islam yang selalu senada dengan gerak sejarah.

Islam Berkemajuan

”Islam Berkemajuan” *ala* Muhammadiyah telah mengemuka sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan mengembalikan umat pada sumber ajaran Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW yang otentik.

Ini sebagaimana risalah Nabi Muhammad SAW yang membawa pencerahan untuk bangsa Arab yang jahiliah menjadi bangsa yang tercerahkan sehingga terwujud Al-Madinah Al-Munawwarah sebagai kota peradaban yang cerah dan mencerahkan titik peradaban “al-munawwarah”.

Kala itu dunia Barat kala itu masih teridur lelap di era kegelapan. Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.

Muhammadiyah bukan gerakan yang mendewakan masa lampau, bukan gerapan yang mengusung konsep masa lalu sebagai konsep ideal (romantisisme), misalnya *khilafah islamiah* (negara Islam).

Cita-cita ideal Muhammadiyah adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam Berkemajuan membawa spirit ”teologi berkemajuan”. Hakikat Islam adalah agama kemajuan (*dinul hadlarah*).

Teologi berkemajuan ala Muhammadiyah selalu berorientasi ke masa depan. Meminjam istilah Din Syamsuddin (2015), berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan perkembangan, sebagai usaha yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning)*.

Paling tidak, dalam melakukan transformasi Islam Berkemajuan di abad kedua, Muhammadiyah harus melakukan berbagai hal. *Pertama*, menyekolahkan generasi muda ke berbagai negara maju dan berkemajuan. *Kedua,* pemberdayaan ekonomi. Tanpa gerakan ekonomi yang kuat, Muhammadiyah tak akan mampu menjalankan gerakan Al-Maun. Pendidikan Muhammadiyah harus inklusif yang mampu menampung kaum lemah. Jangan hanya orang-orang kaya yang mampu bersekolah di Muhammadiyah. *Ketiga,* kekuatan Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil sangat penting bagi pembangunan kemandirian masyarakat.

Islam Tengahan

Dikotomi antara Islam Tradisionalis dan Islam Modernis ketika dikaitkan dengan wacana Islam Nusantara ala NU dan Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah tampak semakin melemah.

NU yang tradisional dan Muhammadiyah yang modern adalah pandangan yang sudah umum. Tradisional karena dalam praktik keagamaan NU banyak praktik ritual yang campur aduk dengan budaya-budaya yang Nusantara.

Muhammadiyah dikenal modern karena golongan ini mencoba membawa Islam agar sesuai tuntutan dan keadaan zaman. Kenyataan membuktikan untuk konteks sekarang ternyata NU semakin tradisionalis, terutama dalam hal merawat tadisi dan budaya.

Di NU memang sudah banya lompatan, misalnya dengan muncul istilah pemaknaan ulang *ahlus sunnah waljamaah* dan pemaknaan ulang konsep bermazhab, tetapi kemunculan Islam Nusantara Islam khas ala Indonesia, serta integrasi nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di negeri ini menjadi paradoks. Islam tradisionalis itulah Islam Nusantara.

Kedua arus Islam ini, baik "Nusantara" atau pun "berkemajuan" harus bersama-sama menjadi kekuatan Islam moderat (tengah) di Indonesia. Dalam konteks wajah Islam di dunia saat ini, Islam Nusantara adalah Islam yang mengedepankan jalan tengah dengan *tawasut* (moderat), tidak ekstrem, inklusif, toleran, dan damai, serta menerima demokrasi.

Islam Nusantara jika ingin menjadi alternatif peradaban dunia Islam tidak cukup hanya mengembangkan tradisi lokal. Islam Nusantara dengan mengembangkan Islam yang damai itu tidak cukup karena Islam adalah agama peradaban.

Selain ramah, santun, dan toleran, Islam Nusantara juga harus berkemajuan dan berkeunggulan di segala bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan budaya di level lokal dan global.

Islam Berkemajuan bersifat kosmopolitan. Muhammadiyah dapat menjadi teologi tengah dengan karakteristik mengakui kebinekaan

(*diversity),* menjadi masyarakat madani (*civil society*), memiliki perguruan tinggi Islam, dan menjunjung tinggi konstitusi negara.

Dalam konteks tersebut, tolok ukur atau indikatornya paling tidak Muhammadiyah harus fokus dan menjadikan isu-isu berikut sebagai agenda besar, yakni pendidikan yang selalu mengembangkan paradigma baru; penghormatan kepada hak asasi manusia (*al-karomah al-insaniyah*) dengan bertumpu pada *maqasid syari'ah*, bukan sekadar syariat; membangun relasi harmonis antarumat beragama; dan mengedepankan kesetaraan gender serta perlindungan anak-anak.

Baik NU maupun Muhammadiyah harus bersama-sama menghadirkan Islam sebagai yang bersikap tengah (*wasithiyah*). NU dan Muhammadiyah harus bersatu mengamalkan nilai-nilai Islam yang ramah dan berporos pada jalan tengah atau *aqidah washatiyah:* saling menghargai sebagai Islam *rahmatan lil alamin* untuk kesejahteraan seluruh alam semesta.

SOLOPOS, Rabu 8 Juli 2015. Penulis adalah Koordinator Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Solo dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPM

Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara

BIYANTO

AKHIR-AKHIR ini umat dihadapkan pada dua narasi besar tentang Islam Indonesia. Dua narasi besar itu adalah Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara.

Narasi Islam Berkemajuan sangat lekat dengan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah telah menjadikan kata ”berkemajuan” sebagai tagline tema Muktamar ke-47 di Makassar, 3-7 Agustus 2015. Tema yang diusung Muhammadiyah dalam Muktamar kali ini adalah Dakwah Pencerahan menuju Indonesia Berkemajuan. Melalui tema ini Muhammadiyah ingin mewujudkan Islam masa depan yang modern, universal, dan mendunia.

Muhammadiyah sejak awal memang telah mengenalkan diri sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa Islam merupakan agama berkemajuan. Ungkapan Islam Berkemajuan juga pernah dikemukakan Presiden Pertama RI, Soekarno. Senada dengan Kiai Dahlan, Soekarno juga menentang kekolotan, kejumudan, takhayul, dan kemusyrikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pandangan Sukarno ini merupakan buah dari interaksinya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, terutama Kiai Dahlan dan KH Mas Mansur. Saat masih tinggal di Surabaya, Sukarno tergolong rajin mengikuti

pengajian Kiai Dahlan. Dalam amatan Kiai Dahlan, umat saat itu sudah jauh tertinggal dan enggan mengejar ketertinggalan karena maraknya budaya takhayul, bidah, dan churafat (TBC).

Dampaknya, umat sulit membedakan antara praktik budaya yang menghambat kemajuan dengan ajaran agama yang sebenarnya. Kiai Dahlan menyadari betul bahwa mewujudkan Islam Berkemajuan merupakan suatu keniscayaan. Spirit membumikan Islam Berkemajuan pun terus digelorakan Kiai Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah generasi awal. Di tengah masyarakat yang belum memiliki kesadaran membayar zakat, Muhammadiyah membentuk panitia zakat (amil).

Di tengah masyarakat yang masih mengandalkan dukun untuk menyembuhkan penyakit, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Di tengah masyarakat yang masih mengabaikan nasib anak yatim, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan. Di tengah masyarakat yang fanatik berpedoman pada kalender *urfi* warisan Sultan Agung, Muhammadiyah menawarkan ilmu hisab astronomi.

Saat banyak kalangan muslim memperdebatkan apakah sekolah modern kafir atau tidak, Muhammadiyah terus membangun sekolah-sekolah modern. Bahkan sebelum Muhammadiyah lahir, Kiai Dahlan telah mendirikan madrasah diniyah sebagai cikal bakal sekolah modern. Modernisasi pendidikan yang diprakarsai Kiai Dahlan merupakan terobosan penting pada masanya.

Bagi Muhammadiyah, pendidikan modern merupakan metode yang jitu untuk memajukan umat. Saat pendidikan masih diberikan secara terbatas pada elite priyayi, Muhammadiyah membuka kesempatan kepada anak-anak dari masyarakat luas untuk belajar. Kiai Dahlan juga merumuskan tujuan pendidikan yang begitu ideal, yakni melahirkan individu yang tampil sebagai ulama-intelek atau intelek-ulama.

Profil lulusan pendidikan ala Kiai Dahlan menunjukkan semangat mewujudkan Islam Berkemajuan. Lulusan pendidikan diharapkan memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas serta kuat jasmani dan rohani. Pembaruan Muhammadiyah di segala bidang itu menunjukkan dengan jelas visi Islam Berkemajuan.

***

Sementara itu, wacana Islam Nusantara sangat populer di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Diskursus Islam Nusantara juga dibicarakan dalam berbagai forum ilmiah. Bahkan dalam banyak kegiatan pengajian tidak jarang kiai-kiai NU menekankan pentingnya Islam yang berwajah Nusantara. Wacana Islam Nusantara menemukan momentum yang tepat, yakni jelang Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus 2015.

Muktamar NU juga mengusung tema Meneguhkan Islam Nusantara, Merawat Indonesia untuk Membangun Peradaban Dunia . Melalui tema ini NU ingin menjadi gerakan Islam yang ramah terhadap berbagai budaya di Nusantara. Pendiri dan ideolog NU, KH Hasyim Asyari, dikenal luas sebagai ulama yang sangat akomodatif terhadap berbagai budaya agama populer (*popular religion*).

Hal itu dilakukan Kiai Hasyim untuk menjaga kekhasan Islam di Nusantara. Sementara ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, meniscayakan Islam Indonesia harus mencerminkan perilaku sosial budaya yang moderat (*tawassuth*), seimbang (*tawazun*), dan toleran (*tasamuh*). Menurut Kiai Said, tiga prinsip ini sekaligus menjadi solusi warga nahdliyin dalam menghadapi tantangan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, serta radikalisme bernuansa agama yang kian marak.

Konsepsi Islam Nusantara seakan menjadi narasi besar NU untuk membumikan ajaran Islam di Indonesia dan negara tetangga. Wacana Islam Nusantara kian populer setelah Presiden Jokowi turut memberikan dukungan. Saat hadir di tengah-tengah warga nahdliyin, Jokowi mengatakan bahwa Islam kita adalah Islam Nusantara, yakni Islam yang ramah dan moderat. Pernyataan Presiden dikemukakan untuk membandingkan wajah Islam Indonesia dengan nasib Islam di Suriah, Irak, dan Libya, yang hingga kini terus membara akibat konflik berkepanjangan.

***

Pertanyaannya, bagaimana menyandingkan narasi agung Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara? Idealnya dua narasi Islam Indonesia

ini tidak dipahami secara binaris sehingga terkesan berhadap-hadapan. Keduanya harus dipahami secara utuh sehingga bisa saling melengkapi. Membumikan ajaran Islam di Nusantara dengan tetap mengakomodasi budaya sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) terasa sangat penting. Tetapi harus tetap dibedakan ajaran agama yang sebenarnya dan budaya agama.

Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ajaran Islam, budaya agama termasuk dalam kategori boleh (*ibahah*). Jika budaya agama itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka harus dikoreksi. Narasi Islam Nusantara juga harus dimodernisasi agar sesuai dengan konteks kekinian. Islam Nusantara tidak boleh berwajah sinkretis, berpandangan romantis, dan antiperubahan.

Islam Nusantara harus menampilkan wajah yang modern, mendunia, dan berpandangan futuristik. Pada konteks inilah Muhammadiyah dan NU harus bersinergi untuk mendakwahkan Islam di Nusantara yang berkemajuan dengan penuh optimistik. Dengan meminjam kata-kata bijak di dunia pesantren, dua ormas terbesar di Tanah Air itu harus mengamalkan ajaran *al-muhafadhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik).

Dengan cara tersebut rasanya proses membumikan Islam dalam bingkai budaya Nusantara yang maju dan modern akan menjadi kenyataan. Jika kondisi ini terjadi, maka wajah Islam di Nusantara akan menjadi laboratorium dunia. Islam Indonesia juga akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam.

Koran SINDO, 6 Juli 2015. Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Islam Nusantara vs Berkemajuan

AHMAD NAJIB BURHANI

MUHAMMADIYAH dan Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan Muktamar pada waktu yang berdekatan yakni minggu pertama Agustus 2015. Tema yang diangkat sekilas mirip: Muhammadiyah "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan" dan NU "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia". Meski terlihat bersinggungan, "Islam Berkemajuan" dan "Islam Nusantara" adalah respons yang berbeda terhadap fenomena yang sama yaitu globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan, baik dalam bentuk arabisasi ataupun westernisasi.

Globalisasi sering dipahami sebagai proses penyatuan dunia di mana waktu, jarak, dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi yaitu barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahan empat halter sebut dari satu negara ke negara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala.

Namun, perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang. Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah

mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global.

Ketika *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mendeklarasikan kekhilafahan di bawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan ada sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ketika konflik Suni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti-Syiah seperti dalam bentuk Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS).

Globalisasi juga menyebabkan *trans-national capitalist network* (TNC) masuk dalam kehidupan masyarakat dan menyedot kekayaan yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Bekerja sama dengan "komprador", para kapitalis global itu menciptakan jurang yang begitu lebar antara mereka yang kaya dan miskin seperti terjadi di daerah penambangan Freeport di Papua.

Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Maka itu, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini misalnya terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan arabisasi.

Islam Nusantara

Homogenisasi ini tentu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Respons balik atau resistensi terhadap homogenisasi ini di antaranya dalam bentuk indigenization. Islam Nusantara yang dipopulerkan anak-anak NU dan menjadi tema Muktamar NU Ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus nanti adalah satu bentuk respons terhadap globalisasi dengan melakukan indigenisasi.

Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu pada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara,

tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan "pribumisasi Islam" yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini di antaranya dalam Jurnal *Tashwirul Afkar* Edisi No 26 Tahun 2008.

Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai "paradoks globalisasi". Dalam istilah TH Erikson (2007, 14), "Semakin orang mengglobal sering kali dia menjadi semakin terobsesi dengan keunikan budaya asalnya." Dalam kalimat ilmuwan lain, "Ketika dunia semakin global, perbedaan-perbedaan kecil antarumat manusia itu semakin ditonjolkan" (Ang 2014).

Banyak yang menduga bahwa semakin kita mengenal dunia luar dan kelompok yang berbeda, kita menjadi semakin terbuka. Namun, sering kali yang terjadi tidak sejalan dengan logika itu. Di tengah globalisasi banyak orang yang semakin fanatik dan tidak menerima perbedaan serta pluralitas. Ini misalnya terjadi dalam beberapa pilkada yang "mengharuskan" putra daerah yang dipilih.

Dalam konteks dunia, justru di era globalisasi ini hampir setiap tahun kita melihat kemunculan negara baru dalam keanggotaan PBB. Tentu saja respons terhadap globalisasi dalam bentuk "Islam Nusantara" adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan penolakan total atau penerimaan total.

Dalam merespons terhadap globalisasi, terutama yang datang dari Barat, beberapa kelompok agama justru mencari perlindungan dalam homogenitas dan eksklusivitas kelompoknya. Sepertinya kedamaian itu bisa terjadi dengan menolak keragaman atau sesuatu yang asing. Di tengah globalisasi, banyak orang yang mencoba menutup diri dan menghalangi orang yang berbeda hadir di tengah masyarakat.

Fenomena kemunculan perumahan atau kluster perumahan eksklusif untuk komunitas agama tertentu adalah misal. Kuburan/ pemakaman dan rumah kos pun kadang dibuat untuk pengikut agama tertentu. Respons terhadap globalisasi yang lebih buruk lagi tentu saja seperti dalam bentuk radikalisme dan terorisme. Islam Nusantara bisa menjadi respons yang

sangat baik terhadap globalisasi jika ia tidak mengarah pada parokhialisme dan sektarianisme.

Islam Berkemajuan

Respons lain terhadap globalisasi ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan "Islam Berkemajuan". Sebelum 2009 slogan ini jarang terdengar bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini di antaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah.

Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah "Islam berkemajuan". Pada Muktamar di Yogyakarta 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam Berkemajuan itu sering dimaknai sebagai "Islam kosmopolitan" yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki "rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional" (*Tanfidz Muhammadiyah 2010*, 18).

Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur Tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana untuk dialog antar peradaban.

Ringkasnya, kelahiran dari slogan "Islam Nusantara" dan "Islam Berkemajuan" memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada 1920-an.

Ketika itu, sebagai respons terhadap berbagai peristiwa di Arab dan Turki (Comite Chilafat dan Comite Hijaz), lahirlah NU.

Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam *deja vu*.

Koran SINDO, 3 Juli 2015. Penulis adalah Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

ISLAM BERKEMAJUAN DAN ISLAM NUSANTARA

BENNI SETIAWAN

WACANA Islam di tanah air kembali menarik perhatian. Setidaknya hal itu tergambar dari munculnya dua istilah yang diusung oleh Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah mengusung tema Islam Berkemajuan, sedangkan NU dengan Islam Nusantara. Dua ormas terbesar di tanah air ini seakan ingin menguatkan gagasan Islam khas Indonesia.

Dua gagasan itu pada dasarnya ingin terus mengusahakan keadaban dan keadilan sosial bagi semua. Dua gagasan besar itu pun menegaskan bahwa Islam senantiasa membawa gerak pembaruan. Gerak pembaruan itu termanifestasi dengan budaya progresif.

Budaya Progresif

Simuh dalam *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (2003), menyebut ajaran Islam yang orisinal (asli) itu pasti mengembangkan pola budaya progresif. Pasalnya, ilmu (teori) dan ekonomi merupakan nilai yang amat tinggi. Jika nilai agama menjadi dasar bagi pola budaya individu dan masyarakat, nilai agama itu tentu akan mewarnai tingkah laku seseorang atau masyarakat. Contohnya, adalah pola budaya masyarakat bersahaja dari suku bangsa Jawa sebelum dipengaruhi oleh budaya India. Demikian pula, budaya-budaya asli Indonesia pada umumnya. Hanya saja penghayatan

individu atau masyarakat terhadap agama mereka juga bertingkat-tingkat. Karena itu, konsep beragama yang ideal adalah jika agama mereka berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang lain. Kalau belum tercapai, berarti penghayatan agama belum utuh, atau belum sungguh-sungguh mengakar.

Melalui kajian Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara, dua penjaga moral bangsa ingin melakukan upaya penghayatan kehidupan umat beragama secara mendalam. Islam Berkemajuan menapaki takdir pembelaan terhadap kaum mustad'afin (lemah). Sebagaimana Kiai Sudja' mengimplementasikan pesan Kiai Dahlan dalam membangun Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO, kini PKU).

Kiai Sudja' dengan kesungguhan hati membaca pesan zaman agar umat tak tersesat oleh kemusyrikan karena beban sosial dan penyakit yang mereka derita. Melalui PKO Muhammadiyah mengajak berpikir rasional bahwa segala penyakit ada obatnya, kecuali kematian.

Budaya progresif berpikir maju ini telah disemai oleh Muhammadiyah sejak seabad silam. Kini memasuki abad kedua, Muhammadiyah terus dihadapkan pada berbagai persoalan keumatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, tafsir sosial dan gerak keumatan Muhammadiyah dituntut untuk semakin menyentuh persoalan keumatan kekinian. Berbekal semangat tajdid yang menjadi ciri khasnya, meminjam istilah Haedar Nashir, Muhammadiyah akan tetap dan terus eksis di abad kedua.

Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah pun kini dituntut untuk dapat melahirkan "tafsir baru" dari ayat-ayat al-Qur'an. Jika seabad silam Kiai Dahlan berbekal 17 kelompok ayat telah mampu melalukan lompatan besar untuk keadaban umat, kini Persyarikatan dituntut untuk melahirkan hal baru dengan melalukan tafsir revolusioner untuk dunia yang terus bergerak.

Jati Diri

Pada bagian lain, sayap Islam Nusantara kembali meneguhkan cita pembangunan sosial melalui kelembagaan masyarakat desa. Pembinaan masyarakat desa oleh NU kini mendapat tantangan cukup serius dari

Islam Transnasional. Pasalnya, kini sudah cukup banyak pesantren bercorak Islam Transnasional yang semakin merangsek dalam kehidupan masyarakat. Konon pesantren tersebut tak dapat berkompromi dengan kekhasan masyarakat. Maka tidak aneh jika sering kali terjadi gesekan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, pesantren NU perlu terus membuktikan diri sebagai bagian dari penjaga tradisi Nusantara di tengah semakin gandrungnya masyarakat dengan ideologi impor. Salah satu pembuktian itu adalah dengan pengembangan model pesantren agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri ke-NU-an.

Dua ormas Islam Indonesia kini sedang menghadapi tantangan masing-masing. Semoga perhelatan, Muktamar Muhammadiyah di Makassar, 3-7 Agustus dan Muktamar NU di Jombang, 1-5 Agustus, menghasilkan kekhasan masing-masing. Sehingga Islam *rahmatan lil alamin* dalam frasa Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara terus menjadi pilar pemersatu, penjaga, dan pembangkit bangsa dan negara Indonesia serta dunia.

KEDAULATAN RAKYAT, 22 Juli 2015. Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.

Ihwal Gerakan Islam Berkemajuan

MOHAMAD ALI

DISKURSUS Islam Berkemajuan *ala* Muhammadiyah terus bergulir, bersanding dengan wacana Islam Nusantara yang dikumandangkan Nahdlatul Ulama (NU). Terlebih setelah Muhammadiyah merilis tema Muktamar ke-47 yang diselenggarakan di Makassar pada 3-7 Agustus 2015, yakni tentang "Gerakan Pencerahan menuju Indonesia Berkemajuan.

Sekalipun wacana Islam Berkemajuan sudah berembus sejak lima tahun silam, diperkaya dan dipertajam melalui serangkaian seminar praMuktamar, tetapi pemahaman publik maupun warga persyarikatan [Muhammadiyah] atas hal ihwal gerakan Islam Berkemajuan masih mengambang.

Ketika istilah "berkemajuan" semakin lengket dengan Muhammadiyah, untuk menggantikan kata "modern" yang lebih dulu tersemat kuat pada gerakan ini, sejatinya bukan untuk gagah-gagahan atau sekadar ganti baju lama dengan baju baru. Di balik perubahan itu terselip sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu penemuan kembali hakikat, esensi, hal ihwal, sumber, dan akar gerakan Muhammadiyah.

Kesadaran akan esensi dan ihwal gerakan sungguh penting karena dapat mengubah persepsi dan cara pandang secara mendasar. Pencandraan atau sebutan "Islam Modern" mulai populer pada dekade 1970-an. Yang

mengonstruksi dan memopulerkannya adalah kalangan peneliti, analis sosial, maupun pengkaji gerakan sosial-keagamaan sebagai timbangan dari ”Islam Tradisional”.

Berlainan dengan hal itu, penamaan ”Islam Berkemajuan” muncul dan tumbuh dari dalam diri sendiri sehingga terasa lebih otentik dan orisinil. Ungkapan berkemajuan adalah langsung dari perkataan K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri dan arsitek Muhammadiyah.

Salah satu murid Kiai Dahlan, Umnijah A. Wardi, yang diwawancarai Amir Hamzah Wirjosukarto (1962: 58), menuturkan sang pendiri Muhammadiyah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar menjadi kiai yang berkemajuan.

Kuntowijoyo (1998: xv-xxxi) mengutip dokumen awal Muhammadiyah yang menyatakan: *awit miturut paugeraning agami kita Islam, sarta cocok kaliyan pikajenganipun jaman kemajengan*.

Dari dua kutipan itu dapat diketahui bahwa Kiai Dahlan mencita-citakan Islam yang senapas dengan kemajuan zaman dan mengedepankan semangat ijtihad, bukan pemahaman Islam kolot dan terbelakang yang begitu populer saat itu.

Sementara itu, Amin Abdullah (2011) berpandangan dalam diskursus keagamaan kontemporer, Islam Berkemajuan lebih tepat disejajarkan dengan, dan dapat dipertajam melalui, konsep Islam Progresif.

Usulan Amin Abdullah masih bisa diperdebatkan, tetapi di sini bukan ruang yang tepat untuk memperdebatkannya. Esai singkat ini dimaksudkan melihat dari dekat ihwal gerakan Islam Berkemajuan melalui penelusuran sosiohistoris.

Para pengkaji gerakan sosial keagamaan seperti Benda (1980), Peacock (1978), dan Nakamura (1993) begitu terkesima dengan besarnya amal usaha mulai dari pendidikan, kesehatan hingga panti asuhan, sehingga mereka berpendapat Muhammadiyah merupakan organisasi swasta keagamaan terbesar di muka bumi ini.

Pendapat ini sulit dibantah dan telah berkembang sedemikian rupa hingga menjadi persepsi publik. Realitas sosiologis semakin menguatkannya

karena orang lebih gampang menjumpai papan nama amal usaha ketimbang papan nama kantor pimpinan (pengurus) Muhammadiyah.

Sekalipun amal usaha Muhammadiyah berjibun dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara, tetapi itu bukan esensi gerakannya. Ihwal Islam Berkemajuan yang sesungguhnya adalah gerakan pemikiran.

Kaitan antara pemikiran dan amal dalam konteks Islam Berkemajuan ibarat bebek dan telurnya. Publik lebih mudah melihat telur yang dihasilkan bebek, orang lebih gampang melihat amal usaha yang dihasilkan kreativitas pemikiran.

Dari optik sejarah diketahui ihwal berdirinya Muhammadiyah adalah gerakan pemikiran yang mengusung tesis-tesis baru sebagai antitesis sekaligus jurus baru memecah kebuntuan umat Islam, membebaskan kaum pribumi. Tesis baru inilah yang belakangan diformulasi menjadi Islam Berkemajuan.

Dengan demikian, Islam Berkemajuan dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan, pemikiran, ide-ide, aksi, dan praksis Islam yang diformat senapas dengan kemajuan.

Dengan demikian dapat digunakan sebagai peranti (instrumen) untuk memajukan dan membebaskan penduduk pribumi (masyarakat pinggiran) yang terisolasi dan tenggelam dalam cengkeraman keterbelakangan, kemelaratan, dan kekolotan.

Dari pengertian di atas, gambaran tentang arah Islam Berkemajuan belum begitu jelas dan masih tampak abstrak. Untuk mengonkretkan gambaran Islam Berkemajuan diperlukan tinjauan dan refleksi historis atas periode formatif, masa-masa awal pembentukan Muhammadiyah.

Proses awal pembentukannya berjalan lambat, tapi melangkah maju setahap berkelanjutan, *step by step on going process*, melalui beberapa kali perubahan formasi (metamorfosis) gerakan.

Masa awal pembentukan, atau periode formatif Muhammadiyah, secara singkat dapat dirumuskan melalui 4P, yaitu: (1) pemikiran, (2) peng(k)ajian, (3) pengajaran, dan (4) persyarikatan.

Progresif

Keempat tahapan ini bersifat progresif (maju setahap) dan merupakan satu kesatuan organik yang tidak terpisahkan. Misalnya, tahap pengajaran merupakan penerjemahan dan elaborasi lebih lanjut dari tahap pencarian pemikiran dan pengkajian.

Ciri sebelumnya sebagai gerakan pemikiran dan pengkajian terus berlangsung, tetap melekat dan justru menjadi ciri khas pengajaran (pendidikan) Muhammadiyah. Proses pencarian dataran pemikiran baru mulai berlangsung sejak kepulangan Kiai Dahlan dari di Tanah Suci dan menemukan formulasinya ketika diangkat menjadi khatib Masjid Besar Kauman pada 1896.

Isu sentral tahapan pemikiran adalah upaya menerapkan ilmu pengetahuan modern untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan, seperti geografi untuk membetulkan arah kiblat salat dan astronomi untuk menghitung (hisab) kalender Hijriah.

Meskipun mendapat perlawanan sengit dari kiai-kiai kolot (birokrat keagamaan kraton), tapi berhasil menarik minat sejumlah pemuda untuk bergabung dan menjadi santri Kiai Dahlan.

Untuk menggembleng mereka, Langgar Kidul dijadikan sekolah pemikiran (*school of thought*) sebagai arena mempertajam dan mendeseminasikan pemikiran pembaruan. Di tempat inilah berlangsung diskusi bebas dalam mempersoalkan masalah-masalah agama maupun kehidupan yang saat itu dianggap tabu. Langgar Kidul menjadi arena dialog bebas dan peng(k)ajian pemikiran Islam yang menandai metamorfosis dari tahap pemikiran ke tahap peng(k)ajian.

Penghancuran Langgar Kidul oleh birokrat keagamaan bukan sekadar masalah kiblat, tapi lebih dari itu karena mereka ketakutan sekolah pemikiran (bebas) ini dapat merusak agama Islam. Setelah pembakaran Langgar Kidul, gerakan pembaruan memasuki masa jeda beberapa saat (1903-1905) karena Kiai Dahlan pergi memperdalam ilmu agama untuk kedua kalinya ke Tanah Suci.

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengelaborasi intisari pemikiran Muhammad Abduh (1845-1905), terutama tentang perlunya pengajaran agama sekaligus ilmu modern. Tema inilah yang menjadi agenda utama Kiai Dahlan ketika pulang ke Tanah Air.

Awal 1909 dia menceburkan diri dalam gerakan Budi Utomo, yang membuka kesempatan untuk mengajar di Sekolah Guru dan Sekolah Pamong Praja milik Belanda. Kristalisasi gagasan integrasi pengajaran agama dan ilmu modern, diperkaya pengalaman keorganisasian di Budi Utomo, dan pengalaman mengajar di sekolah pemerintah Belanda, akhirnya membulatkan tekad Kiai Dahlan untuk merintis sekolah agama modern bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada Desember 1911.

Berdirinya sekolah agama modern menandai munculnya tahapan ketiga: pengajaran. Sampai di sini sudah berlangsung tiga pergeseran bentuk; bermula dari pemikiran, disusul gerakan peng(k)ajian, dan pengajaran. Belum sampai setahun, kebutuhan untuk merawat dan menjamin keberlanjutan pemikiran-pemikiran baru, pola-pola peng(k)ajian baru, model pengajaran baru semakin tidak terbendung.

Pada 18 November 1912 berdirilah persyarikatan bernama Muhammadiyah. Ide dasar yang mendorong berdirinya persyarikatan adalah kesadaran bahwa untuk merealisasikan pemikiran, pengkajian, dan pengajaran harus dikerjakan secara kolektif-berjamaah.

Secara teologis, ini mengandung makna kesalehan pribadi harus melebur dan menjadi instrumen kesalehan sosial. Nilai agama secara pribadi harus menggembirakan dan secara sosial harus mampu mendorong kemajuan kehidupan masyarakat.

Refleksi historis masa awal Muhammadiyah berhasil menemukan kembali elan vital, ihwal, ataupun api pembaruan yang menjadi roh gerakan Islam Berkemajuan. Sekalipun amal usaha Muhammadiyah melimpah, itu bukan esensi gerakannya.

Esensi, ihwal, dan akar gerakan Islam Berkemajuan adalah eksperimental pemikiran, sedangkan amal usaha adalah buahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa orang yang terkesima (membanggakan) amal usaha,

sebenarnya baru menginjakkan kakinya di halaman rumah, belum masuk di dalam rumah Muhammadiyah. Tidak terkecuali para aktivis maupun pemimpin organisasi ini yang merasa dirinya sudah ber-Muhammadiyah.

Sebagai catatan penutup, perlu ditegaskan kembali bahwa kesadaran tentang ihwal berdirinya Muhammadiyah sebagai suatu eksperimental pemikiran baru adalah temuan yang sungguh berharga.

Belakangan ini muncul sinyal yang mengabarkan bahwa jabatan-jabatan pemimpin Muhammadiyah banyak dihuni orang-orang yang alergi terhadap eksperimental pemikiran baru. Semoga sinyal itu keliru.

SOLOPOS, 2 Juli 2015. Penulis adalah Direktur Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, Solo.

Islam Berkemajuan ala Bung Karno

HISKI DARMAYANA

SEPERTI yang kita ketahui bersama, Soekarno adalah seorang Muslim. Namun, ternyata Soekarno bukanlah lahir dari keluarga yang kental nuansa Islamnya. Sang ayahanda, Raden Sukemi Sosrodihardjo, lebih dikenal sebagai penganut kepercayaan teosofi Jawa atau Kejawen, meskipun secara formal beragama Islam. Sementara ibunda Soekarno, Idayu, bukan penganut Islam. Ibunda Bung Karno adalah seorang pemeluk agama Hindu-Bali.

Jadi, bila merujuk pada kategorisasi umat Islam Indonesia yang digagas oleh Antropolog Amerika Clifford Geertz, dapat dikatakan bahwasanya Soekarno berasal dari kalangan "Islam abangan". Penganut Islam abangan sendiri memiliki arti secara identitas-formal menganut Islam, namun dalam praktiknya masih melakukan hal-hal maupun ritual yang bukan berasal dari agama Islam atau lebih tepatnya dari tradisi pra-Islam. Berdasarkan latar belakang keluarga seperti itu, maka bisa disimpulkan bila Islam yang dianut Soekarno merupakan Islam akulturatif, atau Islam yang telah berakulturasi dengan kultur lokal (Jawa).

Pro-Pluralisme dan Anti-Taqlidisme

Seiring dengan waktu, pemahaman Soekarno terhadap Islam secara lebih mendalam pun muncul tatkala Soekarno menginjak usia remaja dan

tinggal di kediaman H.O.S Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam (SI), di Surabaya. Melalui berbagai diskusi dan bacaan, Soekarno mulai mengenal Islam secara intensif ketika itu. Kesadaran diri sebagai seorang Muslim datang beriringan dengan kesadaran anti kolonialisme dalam diri Soekarno di masa remajanya.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam kegiatan pergerakan yang diselenggarakan SI sebagai organisasi bergaris massa yang paling maju tendensi anti kolonialnya pada masa itu. Sehingga Islam yang berkembang dalam diri Soekarno adalah Islam yang anti penindasan dan anti penjajahan.

Tetapi, tetap saja cakrawala berpikir Soekarno tidak terbatas pada satu paradigma religiusitas ke-Islam-an saja. Ia juga menyerap ajaran-ajaran teologis lainnya yang hidup dalam alam pikiran masyarakat nusantara, dan itu makin memperkaya keyakinannya akan Sang Khalik.

Dalam buku "*Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*" (1966), Soekarno berujar:

> " Tahun 1926 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama,"

Dari pernyataannya ini, tampak jelas pengakuan Soekarno akan eksistensi ajaran teologis dari agama selain Islam yang hidup dalam masyarakat nusantara sejak lama. Selain itu, Soekarno juga telah mengakui adanya kemerdekaan beragama sebagai bagian dari kemerdekaan individu. Dalam pengertian lain, Soekarno telah menghargai pluralisme beragama sejak ia muda.

Upaya Soekarno mengkaji ajaran Islam makin intens ketika putra 'sang fajar' itu dibuang ke Ende, Flores oleh penguasa kolonial pada tahun

1933. Pada saat yang sama pula, Soekarno mulai menyatakan berbagai pemikirannya tentang Islam kepada para sahabatnya, salah satunya A. Hassan dari organisasi Persatuan Islam (Persis).

Ketika itu, beliau sering melakukan komunikasi via surat dengan para sahabatnya itu. Dalam surat-surat tersebut yang di kemudian hari dikenal sebagai "Surat-Surat Islam Dari Ende"—menjadi bagian dari buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) Jilid I, Soekarno mengutarakan pandangannya mengenai Islam serta korelasinya dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu pandangannya yang menarik adalah mengenai hukum syariat dan era kekhalifahan yang banyak diklaim kalangan Islamis sebagai masa 'keemasan' Islam. Berikut pandangan Soekarno mengenai hal itu seperti yang tertulis dalam Surat-Surat Islam Dari Ende (DBR Jilid I, 1964):

> "Islam harus berani mengejar jaman, bukan seratus tahun, tetapi seribu tahun Islam ketinggalan jaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar seribu tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Bukan kembali pada Islam glory yang dulu, bukan kembali pada 'zaman chalifah', tetapi lari ke muka, lari mengejar jaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa toch kita selamanya dapat ajaran, bahwa kita harus mengopi 'zaman chalifah' yang dulu-dulu? Sekarang toch tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900?
>
> Mengapa kita musti kembali ke zaman 'kebesaran Islam' yang dulu-dulu? Hukum Syariat? Lupakah kita, bahwa hukum Syariat itu bukan hanya haram, makruh, sunah, dan fardlu saja? Lupakah kita, bahwa masih ada juga barang 'mubah' atau 'jaiz'? Alangkah baiknya, kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jaiz ini! Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa ia di dalam urusan dunia, di dalam urusan *statemanship,* 'boleh berkias, boleh berbid'ah, boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh per-*hyper-hyper* modern', asal tidak nyata di hukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul! Adalah suatu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni berjuang menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat-

> kilat mengejar zaman yang seribu tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoksi ke belakang, mengejar jaman ke muka, perjuangan inilah yang Kemal Attaturk maksudkan, tatkala ia berkata, bawa 'Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam mesjid memutarkan tasbih, tetapi' Islam adalah perjuangan.' *Islam is progress*: Islam itu kemajuan!"

Soekarno secara tegas menolak pandangan sebagian kalangan Islam yang memandang 'kembali ke era khalifah' sebagai tolok ukur kemajuan Islam. Ia juga menolak interpretasi hukum syariat secara kaku karena hal itu akan menyebabkan umat Islam menentang modernitas.

Terkait hal tersebut, Soekarno memang seorang Muslim yang modernis dan rasionalis. Ia secara tegas menganjurkan umat Islam untuk menyerap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK) meskipun bukan produk peradaban Islam. Oleh karena itu pula Soekarno sangat menentang kultur taklid dalam umat Islam. Taklid merupakan pola pengajaran agama Islam tanpa referensi yang logis dan mudah dipahami.

> "Taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, di situlah kemunduran Islam cepat sekali. Tak heran! Di mana genius dirantai, di mana akal pikiran di terungku, di situlah datang kematian. …. Saya sendiri, sebagai seorang terpelajar, barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam, sesudah saya mendapat membaca buku-buku Islam modern dan *scientific*. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar, ialah oleh karena Islam tak mau membarengi jaman, karena salahnya orang-orang yang mempropagandakan Islam: mereka kolot, mereka ortodoks, mereka anti-pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan, takhayul, jumud, menyuruh orang bertaklid saja, menyuruh orang percaya saja, mesum mbahnya mesum!
>
> Bagi saya anti-taklidisme itu berarti: bukan saja 'kembali' kepada Qur'an dan Hadits, tetapi 'kembali kepada Qur'an dan Hadits dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum."
>
> **—Soekarno dalam Surat Ende 1936 (DBR Jilid I, 1964).**

Pandangan Soekarno tersebut mencerminkan sikap Soekarno yang tidak 'mengharamkan' produk kebudayaan modern seperti IPTEK yang notabene 'lahir' dari masyarakat non-Islam atau yang sering disebut sebagian umat Islam sebagai masyarakat 'kafir'. Soekarno berpandangan bila hal itu baik bagi kemajuan umat Islam, maka tak ada salahnya diadopsi, meskipun tanpa menanggalkan sikap kritis umat Islam tentunya.

Api Islam

Soekarno sendiri tidak senang dengan sebagian kalangan Islam yang gemar sekali melontarkan kata-kata atau tudingan 'kafir' sebagai refleksi ketidaksenangannya terhadap kaum non-Islam. Padahal realitasnya hal itu justru menggambarkan sikap mereka yang terbelakang dan anti-kemajuan. Dalam Surat Ende 1936, Soekarno menegaskan:

> "Kita royal sekali dengan perkataan 'kafir'. Pengetahuan Barat-kafir; radio dan kedokteran –kafir; pantolan dan dasi dan topi-kafir; sendok dan garpu dan kursi-kafir; tulisan Latin-kafir; ya pergaluan dengan bangsa yang bukan Islam pun-kafir! Padahal apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan api Islam yang menyala-nyala, bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa dan kurma dan jubah dan celak mata! Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar-dia, dialah yang kita namakan Islam. Astagafirullah! Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini? Yang mengafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengafirkan radio dan listrik, mengafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an? Yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, yang terbelakang saja, tinggal 'naik onta' dan 'makan zonder sendok' saja 'seperti di jaman Nabi dan Khalifahnya'? Yang menjadi marah dan murka kalau mendengar kabar tentang aturan-aturan baru di Turki atau di Iran atau di Mesir atau di lain-lain negeri Islam di tanah Barat?"

Soekarno sangat tidak sepakat dengan kecenderungan sebagian orang Islam kala itu (bahkan hingga kini) yang terlalu gegabah menolak

segala hal berbau modern sebagai produk kafir yang haram digunakan umat Islam. Dalam hal ini, watak progresif dalam keberagamaan Soekarno tampak dengan jelas melampaui zamannya.

Progresifitas Soekarno juga terlihat ketika ia menanggapi adanya pemikiran sebagian orang islam yang hanya memperhatikan hal-hal yang tidak substansial dalam agama. Terhadap kaum Islam yang semacam ini, Soekarno menjuluki mereka sebagai Islam Sontoloyo. Ia pun menuliskan pandangannya mengenai Islam Sontoloyo itu dalam sebuah artikel berjudul sama yang dimuat media *Pandji Islam* (1940):

> "Islam melarang kita memakan babi. Islam juga melarang kita menghina kepada si miskin, memakan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, menyekutukan Tuhan yang Esa itu. Malahan yang belakangan ini dikatakan dosa yang terberat, dosa datuknya dosa. Tetapi apa yang kita lihat? Coba tuan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik di dalam tuan punya pikiran dan perbuatan, maka tidak banyak orang yang menunjuk kepada tuan dengan jari seraya berkata: tuan menyalahi Islam. Tetapi coba tuan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun dan seluruh dunia akan mengatakan tuan orang kafir! Inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini: terlalu mementingkan kulit saja, tidak mementingkan isi."

Jadi, menurut Soekarno, seorang Muslim yang sejati haruslah paham substansi dari ajaran Islam. Karena bila tidak ada pemahaman semacam itu, maka yang terjadi adalah penyempitan makna islam hanya sebatas 'pengharaman babi' atau 'penutupan aurat' belaka.

Ada juga tindakan dan pemikiran Soekarno lainnya yang menentang diskriminasi terhadap kaum perempuan yang acap kali berlangsung atas nama Islam. Di awal tahun 1939, Soekarno telah membuat suatu 'kehebohan' di kalangan Islam. Kehebohan itu berawal ketika Ia dengan sikap tegas meninggalkan rapat umum organisasi Islam Muhammadiyah sebagai wujud protesnya terhadap pemasangan tabir antara laki-laki dan perempuan oleh panitia rapat.

Kekesalan itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang muncul di Pandji Islam pada tahun yang sama. Tulisan itu ia beri judul 'Tabir adalah

Lambang Perbudakan'. Berikut uraian pendapat Soekarno mengenai tabir dalam tulisan tersebut:

> "Saya anggap tabir itu sebagai suatu simbol. Simbolnya perbudakan perempuan. Keyakinan saya ialah, bahwa Islam tidak mewajibkan tabir itu. Islam memang tidak mau memperbudakkan perempuan. Sebaliknya Islam mau mengangkat derajat perempuan. Tabir adalah salah satu contoh dari hal yang tidak diperintahkan oleh Islam, tetapi diadakan umat Islam."

Bayangkan, tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan yang memang lazim digunakan dalam acara-acara yang diselenggarakan organisasi Islam pada masa itu (termasuk organisasi yang mengklaim diri modernis seperti Muhammadiyah), justru ditentang oleh Soekarno. Ia bahkan dengan tegas menyebut hal semacam itu sebagai simbol perbudakan perempuan. Sebuah sikap yang sangat progresif dan revolusioner, terutama dalam konteks zaman itu.

Demikianlah sebagian pemikiran Soekarno yang dapat dikatakan merepresentasikan pemikirannya secara keseluruhan terhadap Islam. Islam yang modernis, rasional, progresif, pluralis, humanis dan substansial. Paradigma ke-Islam-an semacam itulah yang dibutuhkan umat Islam Indonesia kini. Paradigma yang berbasiskan pada api Islam, bukan abunya.

BerdikariOnline.com, 15 Maret 2012. Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang

Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan

ANDI TAUFAN TIRO

Muhammadiyah menggelar Muktamar ke-47 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 3-7 Agustus 2015. Tema Muktamar kali ini mengangkat jargon "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan."

Jargon tersebut sangat relevan. Gagasan ini berkaitan dengan gagasan Islam Berkemajuan yang sudah digelorakan sejak Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau lebih dikenal KH Ahmad Dahlan. Bahkan Islam Berkemajuan juga pernah dilontarkan Bung Karno sebagai interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang berpedoman pada kemajuan.

"Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat-kilat mengejar zaman yang seribu tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoksi ke belakang, mengejar jaman ke muka, perjuangan inilah yang Kemal Attaturk maksudkan, tatkala ia berkata bahwa 'Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam mesjid memutarkan tasbih, tetapi Islam adalah perjuangan. *Islam is progress*: Islam itu kemajuan!" (dalam Surat-Surat Islam Dari Ende (DBR Jilid I, 1964): Islam yang berkemajuan adalah Islam yang berlari mengejar zaman. Islam yang kontekstual dengan zaman. Islam yang melawan kekolotan, kejahiliyaan, keterbelakangan, dan kebodohan. Islam

yang membangun peradaban mulai, Islam yang hadir sebagai rahmat bagi semesta alam, *rahmatan lil alamin*.

Dalam konteks gerakan, Muhammadiyah dipandang sebagai ormas Islam yang melakukan penyadaran dan bergerak memajukan umat dari keterbelakangan. Bentuk penyadaran tersebut dimulai dari perang terhadap TBC. Di mana TBC adalah kepanjangan dari tahayul, bidah, dan churafat (khurafat) yang menghegemoni umat dan masyarakat.

Fokus gerakan kemajuan diaplikasikan melalui lembaga-lembaga amal yang bergerak dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan santunan pada anak yatim (spirit Al-Maun). Dalam tiga sektor ini, Muhammadiyah terbilang sangat unggul dan menonjol. Lembaga-lembaga pendidikan, rumah-rumah sakit dan panti-panti asuhan termanajemen dengan sangat rapi dan baik.

Spirit dari gerakan kemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah bertujuan agar masyarakat berkeadaban, maju dan sejahtera. Kemajuan dengan demikian ditempatkan sebagai etos yang menjiwai pergerakan. Karakter gerakan tersebut menempatkan ilmu dan pengetahuan sebagai bandul dalam melangkah, bertindak dan berbuat. Spirit gerakan kemajuan lalu dibingkai dengan etos-etos kemajuan seperti profesionalitas, kerja keras, kerja cerdas, berbekal ilmu, serta keikhlasan untuk berlomba-lomba berbuat baik bagi sesama sebagai manifestasi amar makruf nahi munkar.

Sejatinya setiap perjalanan memiliki tujuan ke depan untuk lebih baik. Demikian pula perjalanan Muhammadiyah untuk bangsa adalah gerak maju ke depan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Gerakan progresif yang terencana matang, terukur, kontinyu dan berlandaskan pengetahuan, bukan sebuah gerakan perubahan yang tradisionalis, apalagi reaksioner dan asal-asalan (al-Isra' [17]:36).

Ilmu pengetahuan menjadi alat bagi manusia untuk mengurai berbagai permasalahan dengan tujuan mencapai kebaikan. Ilmu pengetahuan dengan demikain menjadi prasyarat mutlak bagi amal saleh. Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (QS Mujadalah [58]: 11).

Panji Islam

Muhammadiyah untuk "Indonesia Berkemajuan" dengan demikian menempatkan ilmu dan pengetahuan sebagai ujung tombak dari perubahan. Panji-panji kebesaran Islam harus didorong untuk melahirkan ilmuwan, ekonom, politisi, pendidikan muslim yang memiliki jiwa dan spirit membangun peradaban Islam yang bermartabat.

Dalam konteks inilah, gerakan pencerahan untuk kemajuan tidak hanya sebatas slogan tetapi langkah taktis untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia yang *notabene* Muslim. Pemberdayaan melalui pendidikan harus dilakukan Muhammadiyah dengan tidak lagi tersekat baju ormas, tetapi kesadaran sebagai sebuah bangsa. Muhammadiyah dibutuhkan bangsa untuk mendorong peningkatan kualitas penduduk Indonesia yang masih tergolong rendah.

Rangking IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia masih sama dengan IPM Afrika Selatan, yakni 121 dari 187 negara (UNDP, 2013). Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina peringkat Indonesia masih di bawah. Negara-negara tetangga yang pada akhir 2015 akan bersaing secara terbuka dengan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean.

Buruknya IPM juga menjadi salah satu dasar laporan World Competitiveness Report 2013-2014 dari World Economic Forum (WEF), tentang Indonesia yang masih rendah. WEF (2013)melaporkan peringkat Indonesia di posisi 38 dunia hanya bertaut satu tingkat dari Thailand yang menempati posisi 37 dunia. Namun dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, peringkat Indonesia jauh di bawah ketiga negara tersebut. WEF melaporkan peringkat tiga negara ASEAN itu masing-masing berada di posisi 2, 24, dan 26 dunia.

Dalam konteks ini, gerakan kemajuan di Muhammadiyah harus digagas kawah candra di muka lahirnya manusia-manusia Indonesia unggul. Muslim intelektual progresif, cerdas, kritis, kreatif, inovatif,

disiplin, mandiri, tanggung jawab, yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa.

Muhammadiyah telah teruji dengan lahirnya sistem dan lembaga-lembaga pendidikan yang unggul. Pencapaian ini tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan, lebih-lebih jika Muhammadiyah juga dapat mendorong lahirnya ilmuwan-ilmuwan dan teknokrat kelas dunia. Muhammadiyah memiliki kesempatan dan peluang besar mengembangkan amal usaha yang demikian. Lompatan besar harus dilakukan, gerakan pencerahan juga harus mentradisikan lahirnya gagasan besar yang berkaki. Gerakan yang menjadi inspirasi bagi perubahan dan kemajuan.

Terakhir, siapa pun yang akan memimpin nanti, umat Islam butuh respons cepat membawa kemajuan bangsa Indonesia. Kebesaran dan pengabdian Muhammadiyah selama ini kita harapkan bisa membawa Indonesia lebih maju dan jaya. Selamat berMuktamar menuju Indonesia yang berkemajuan.

Tribun Timur, 3 Agustus 2015. Penulis adalah Anggota DPR RI dan Ketua DPP PAN

Transnasionalisasi Islam Berkemajuan

TATANG MUTTAQIN

SEIRING dengan perhelatan Muktamar dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Tanah Air, menggelinding dua gagasan keagamaan. Pertama, Islam Berkemajuan yang ditawarkan Muhammadiyah, persyarikatan yang telah melampaui usia satu abad. Kedua, Islam Nusantara yang disodorkan Nahdlatul Ulama (NU), jam'iyyah yang hampir berusia 90 tahun.

Para penyokong gagasan keagamaan ini tak hanya memperkokoh wajah dan *wijhah* tradisi Islam di Tanah Air, tapi juga berambisi menyebarluaskannya dalam fora internasional karena ekspresi Islam di Indonesia dinilai mampu menyinergikan etik Islam dengan modernitas, secara khusus demokratisasi politik yang elegan.

Di Muhammadiyah, keinginan melakukan transnasionalisasi atau internasionalisasi Islam Berkemajuan ini sudah mengemuka sebelum hajat lima tahunannya di Kota Makassar digelar. Transnasionalisasi menjadi tema seminar pra-Muktamar Muhammadiyah pada 14 April 2015 di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) atau lebih dari tiga bulan sebelum Muktamar ke-47 Muhammadiyah digelar (Azra, Republika, 16 April 2015). Keinginan ini menyiratkan semangat sekaligus wujud kepercayaan diri para pegiat Muhammadiyah untuk menyebarkan Islam Berkemajuan di arena yang lebih luas.

Tentu saja, kepercayaan diri ini tak lepas dari capaian gerakan sosial persyarikatan yang cukup mengagumkan. Misalnya dalam bidang pendidikan, hingga 2010 saja tercatat ada 172 perguruan tinggi, 40 di antaranya universitas, bahkan sejak pendidikan anak usia dini, Muhammadiyah mengelola hampir 10.500 TK, PAUD, dan sejenisnya.

Merujuk laman resminya, Muhammadiyah memiliki 1.137 sekolah dasar dan 1.079 madrasah ibtidayiah; 1.178 SMP dan 507 madrasah tsanawiyah; 589 SMA, 165 madrasah aliyah dan muallimin, 399 SMK, termasuk sekolah menengah farmasi dan 101 pondok pesantren serta 15 sekolah luar biasa.

Di bidang kesehatan, Muhammadiyah mengelola 71 rumah sakit umum, 49 rumah bersalin, 117 balai kesehatan ibu dan anak, serta 47 layanan kesehatan lainnya. Muhammadiyah juga menggarap layanan kesejahteraan sosial dengan mengelola 421 panti asuhan yatim, 9 panti jompo, 78 panti asuhan keluarga, 1 panti cacat netra, 38 lembaga santunan kematian, serta 15 BPKM. Di samping mengelola zakat, infak, dan sedekah lewat Lazismu, Muhammadiyah juga bergerak di sektor ekonomi dengan mengelola 8 BPR, 256 baitul mal, dan 303 koperasi.

Dengan semangat pembaruan yang menjadi elan vital gerakan Muhammadiyah yang didukung sumber daya manusia yang terus mengalami perkembangan cukup pesat serta infrastruktur organisasi yang mapan dan modern, mampukah Muhammadiyah mengepakkan sayapnya ke berbagai belahan dunia, setidaknya di Asia Tenggara sebagaimana dimimpikan dengan hasrat transnasionalisasi.

Keinginan melakukan transnasionalisasi membutuhkan kesiapan dan juga tradisi dan pengalaman sehingga tak ada salahnya jika melihat pengalaman gerakan Islam lainnya. Seiring banyaknya pelajar yang belajar di Timur Tengah, persentuhan dengan transnasionalisasi gerakan Islam lebih banyak didominasi oleh gerakan Islam dari Timur Tengah, semisal Salafi yang disokong Pemerintah Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin yang memiliki akar kuat dalam tradisi Mesir, tapi tak terlalu melimpah dengan pengalaman transnasionalisasi yang dilakukan gerakan Islam yang bermula dari Turki.

Berbeda dengan transnasionalisasi gerakan Islam dari Timur Tengah yang lebih menekankan aspek purifikasi ajaran Islam, gerakan Islam berbasis tradisi Turki memiliki banyak kemiripan dengan Muhammadiyah. Sebagai contoh, Greg Barton (2014) menyandingkan NU, Muhammadiyah, dan Gulen Hizmet yang berkesimpulan, dalam konteks gerakan kultural melayani masyarakat. Gulen Hizmet lebih mirip Muhammadiyah, tapi dalam tradisi keagamaan lebih dekat dengan NU.

Gulen Hizmet didirikan oleh Fethullan Gullen, seorang pemikir yang juga aktivis di Izmir, Turki, pada 1970. Sebagaimana Nurcholish Madjid, Gullen banyak diilhami pemikiran Fazlur Rahman yang berpandangan progresif. Sebagai guru (*Hocaefendi*), gerakannya mengilhami ratusan ribu aktivis untuk bergerak di Turki dan juga di luar Turki lewat pendirian sekitar 1.200 sekolah swasta yang tersebar di Asia Tengah, Amerika Utara, Afrika, Australia, Asia Tenggara, termasuk Indonesia lewat *the Society for Social and Economic Solidarity with Pacific Countries* (Pasiad).

Di samping sekolah dan universitas, Hizmet juga menerbitkan harian Zaman yang mampu tersebar di berbagai belahan dunia dari Australia, Eropa, Asia Tengah, dan AS yang juga dilengkapi majalah mingguan *Aksiyon*, *Samanyolu* TV, dan jejaring radio Burc FM serta mendukung pengembangan pebisnis di banyak negara dan lintas agama (Barton, 2014).

Hizmet juga mengembangkan jejaring wartawan, penulis, serta aktivis LSM global untuk menyebarkan gagasannya yang kemudian juga disebarkan dalam majalah yang didirikan Hizmet yang berbasis di AS, tapi diedit di Istanbul.

Di samping Hizmet, transnasionalisasi Islam corak Turki juga dilakukan pesaing Hizmet, Milli Gorus. Berbeda dengan Hizmet yang lebih menekankan corak Islam berbasis budaya, Milli Gorus yang bermakna "Visi Nasional" lebih bersifat struktural atau setidaknya bersimpati pada partai berbasis Islam.

Dalam konteks gerakannya, Milli Gorus juga memiliki kemiripan dengan Muhammadiyah yang melakukan beragam layanan sosial, termasuk pendidikan, bimbingan dan layanan keagamaan, semisal zakat, infak,

sedekah, umrah dan haji, serta pendirian masjid yang tersebar tak hanya di Turki, tapi juga di sebagian besar negara Eropa Barat.

Dalam melakukan transnasionalisasinya, Milli Gorus memiliki basis cukup kuat di pusatnya di luar Turki, seperti Jerman dan Prancis serta Belanda dan Belgia. Gerakan Milli Gorus sangat didukung dengan tradisi migrasi dan kewirausahaan warga keturunan Turki yang berdiaspora di Eropa Barat.

Fenomena migrasi dan perdagangan ini tak jauh berbeda dengan penyebaran Islam secara damai ke berbagai belahan dunia. Para pedagang yang umumnya berjiwa progresif, mandiri, dan maju mampu menjadi *role model* kelompok yang diwakilinya sehingga mampu menyampaikan ajaran Islam lewat perilaku keseharian. Kuatnya tradisi perdagangan di sebagian besar migran Turki menjadikan mereka memiliki daya pikat dan daya tawar ketika berhadapan dengan penduduk lokal yang lebih maju pendidikannya, semisal di Jerman, Prancis, Belgia, dan Belanda.

Salah satu tema film komedi *Kebab Connection*, yang memperlihatkan kemampuan bersaing dalam berwirausaha sehingga mampu melakukan penetrasi di pasar Eropa. Dengan begitu, dalam batas tertentu, resto kebab atau *donner* mampu bersaing ketat dengan *resto* cepat saji Amerika ketika melayani pelanggan selama 24 jam.

Berkaca dari pengalaman gerakan keagamaan berbasis masyarakat dan kesukarelaan sebagaimana ditunjukkan Hizmet dan Milli Gorus, membutuhkan dua tipe aktor penting, yaitu yang kuat secara gagasan dan mobilisasi gerakan serta memasyarakatnya tradisi kewirausahaan. Dalam konteks memperkuat gagasan dan mobilisasi gerakan, Muhammadiyah sudah memadai untuk masuk fora internasional. Tantangan selanjutnya, bagaimana menumbuh-suburkan tradisi kewirausahaan yang mampu menyebar secara masif, setidaknya di tingkat Asia Tenggara.

REPUBLIKA, 01 September 2015. Penulis sedang Menekuni Kajian Pendidikan di The Inter-university Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) The Netherlands
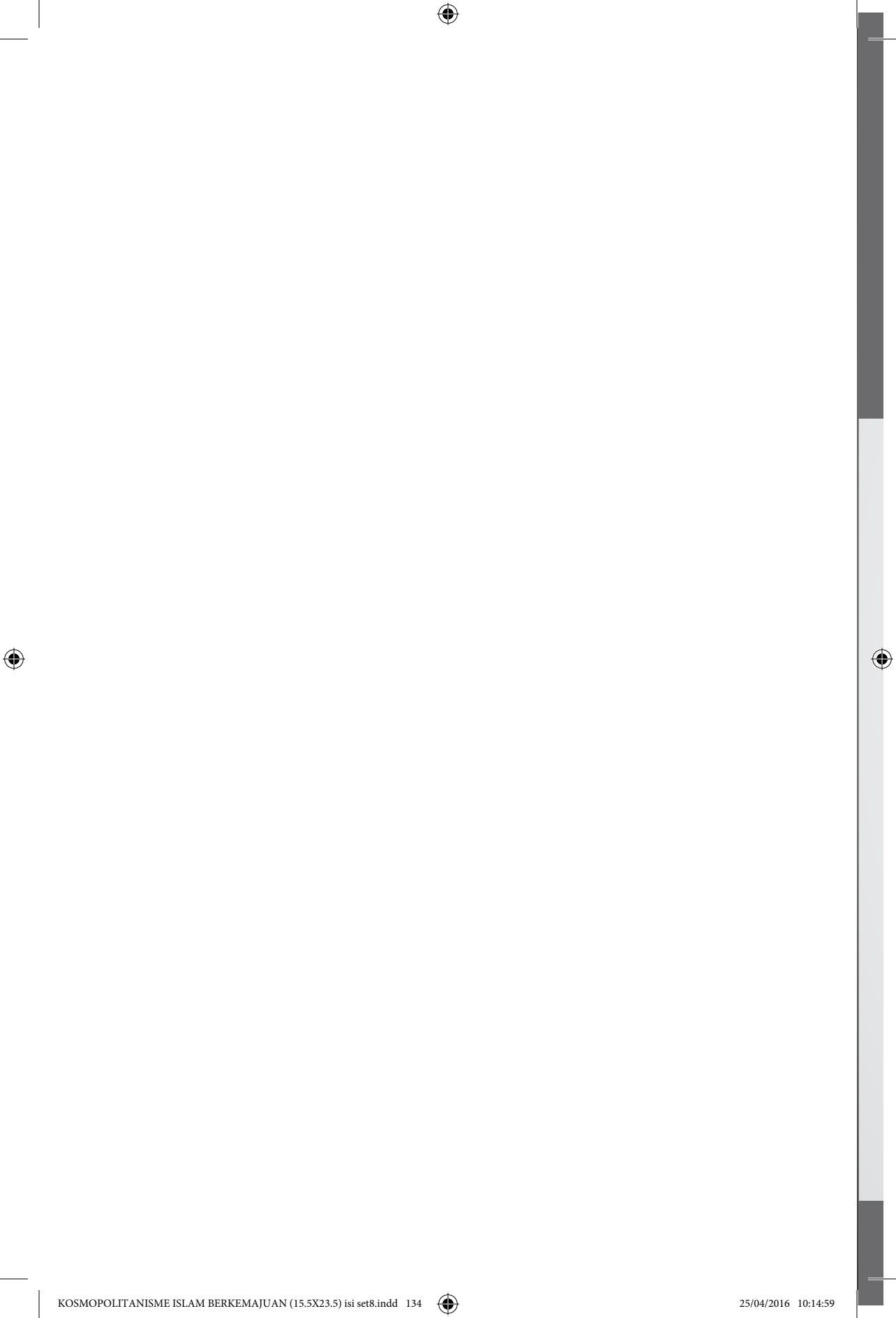
3

JIHAD KONSTITUSI

NEGARA PANCASILA NEGARA SYARIAH

ZAKIYUDDIN BAIDHAWY

SULIT dipungkiri bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sedang mengalami krisis kepercayaan. Umat Islam sebagai mayoritas sebagian masih bercita-cita mengembalikan tujuh kata pada sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Sebagian lain berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Sebagian lagi menolak bukan hanya Pancasila, tetapi bahkan hendak menggantikan NKRI dengan khilafah Islamiyah dan negara Islam.

Meski tokoh muslim lain seperti M Amien Rais dan Hadimulyo berpendapat bahwa Pancasila sesungguhnya adalah suatu ideologi Islam atau doktrin kenegaraan Islam versi Indonesia dan empat pilar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus kebangsaan yang final, isu mengenai negara Islam terus menguat.

Kehadiran wacana dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) menimbulkan kesan bahwa kontroversi gagasan negara Islam versus negara Pancasila belum selesai. Secara normatif dalam Islam tidak ditemukan suatu konsep yang merujuk langsung pada "negara". Menurut Al-Faruqi dan Al-Faruqi (2001), secara historis kita mendapatkan konsep dan praktik *khilafah* (negara) dan *imamah* (pemerintahan).

Secara internal *khilafah* merupakan pelaksanaan syariat guna mewujudkan keadilan baik secara individual maupun institusional. Secara eksternal *khilafah* bertanggung jawab atas kesejahteraan dan ketenteraman umat serta menegakkan tatanan dunia yang adil dan damai.

Visi negara sepanjang ditemukan dalam sejarah Islam meliputi: kemanusiaan universal dan egalitarianisme, totalisme moral dalam seluruh aktivitas kehidupan bersama, kemerdekaan, melaksanakan pendidikan untuk semua dan seumur hidup, pluralisme yang mengakui perbedaan dan keragaman, dan menegakkan aturan hukum.

Sementara itu praktik negara dan pemerintahan dalam sejarah Islam sangat plural. Perdebatan masalah negara juga terkait dengan penafsiran mengenai ummah. Dalam sejarah Islam, penggunaan kata ”ummah ” kali pertama dapat dijumpai pada Piagam Madinah.

Al-Quran mempergunakan kata ini untuk orang beriman sekaligus orang kafir. Konsep ummah sudah muncul di Mekkah dan kemudian berkembang di Madinah. Nazeer Kakakhel menjelaskan ummah sebagai kesatuan, integrasi dan solidaritas seperti yang telah dilakukan pada periode Mekkah dan Madinah.

Menurutnya, ummah mencakup beberapa kategori integrasi spiritual, ekonomi, sosial dan politik. Dengan kerangka ini, negara Pancasila akan kita dudukkan dan analisis untuk melihat signifikansi dan relevansinya dengan nilai-nilai syariat Islam.

Integrasi Spiritual

Ummah sebagai integrasi spiritual telah muncul di Mekkah sejak awal abad 7 M. Islam datang dengan doktrin keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Hakikat kesatuan muslim bersifat ideologis, melampaui semua ras, warna kulit, klan, bahasa, dsb.

Anggota dari ummah berdasarkan keimanan sehingga mereka menjadi satu keluarga Allah tanpa mengenal status sosial mereka. Negara berasaskan Pancasila secara eksplisit mengakui ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ini merefleksikan bangsa Indonesia sebagai masyarakat religius. Religiusitas ini tumbuh karena ladang agama-agama dipelihara oleh pemerintah dan masyarakatnya. Para penganutnya bebas mengembangkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila ketuhanan merupakan kearifan dalam merengkuh keanekaragaman agama-agama. Islam sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak beragama/ berkepercayaan, menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama/ kepercayaannya.

Ketika demokrasi beragama mengalami stagnasi, kemerdekaan menjadi taruhannya. Para pemeluk agama merasa dibatasi kebebasannya dalam beribadah, menjalankan ajaran-ajaran agamanya dan mendakwahkan agamanya tanpa paksaan.

Kasus-kasus perusakan, pemusnahan, pembakaran rumah ibadah, pelarangan penyelenggaraan ibadah di Bandung, Bekasi, Solo. Cikeusik, Temanggung, dan Tolikara merupakan contoh betapa amanat UUD 1945 mulai dikoyak-koyak kepentingan dan sentimen sektarian.

Jadi sila ketuhanan merupakan pantulan kecerdasan spiritual bangsa ini yang sudah tumbuh subur sejak zaman para leluhur. Zaman boleh berganti, agama-agama besar maupun kecil tumbuh dan datang silih berganti, saling menyapa dan berinteraksi.

Bangsa Indonesia tetaplah setia kepada kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa meski rumusan pemahaman dan ajaran mereka berbedabeda. Itulah spiritualitas dan religiusitas yang menyatukan bangsa ini.

Integrasi Ekonomi

Ayat-ayat Makkiyah mengindikasikan eksploitasi atas kaum miskin oleh orang kaya, melarang penipuan takaran dan timbangan. Eksploitasi ekonomi adalah penyebab disintegrasi ketika kesejahteraan umum diabaikan dan orang-orang kaya memperoleh kemajuan kapital dan kekuasaan secara berlebih.

Islam mengeliminasi eksploitasi ini dengan mewajibkan berinfak melarang riba, monopoli, dan manipulasi. Zakat, sedekah, hibah, dan wakaf ditekankan dengan maksud redistribusi atas surplus kelompok kaya. Inilah jaminan sosial yang dapat mempererat integrasi ekonomi antara kaya dan miskin.

Sila ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah manifesto keadilan. Maka ketidakadilan distributif, komutatif dan legal harus diluruskan. Frase ”bagi seluruh” menyatakan bahwa keadilan sosial harus dapat dirasakan seluruh warga. Pemenuhannya menjadi kewajiban negara.

Peran negara sebagai redistributor kekayaan memastikan agar dalam proses distribusi tidak satu pun dari faktor-faktor produksi ditekan pembagiannya dan mengeksploitasi faktor lainnya.

Peran ini juga mengandaikan negara menekankan regulasi terhadap pasar. Prinsip ini menawarkan suatu alternatif bagi ”etisasi” pasar untuk menghindarkan praktik-praktik spekulatif dan manipulatif. Memang negara Indonesia masih menghadapi problem penegakan keadilan sosial.

Praktik pembangunan cenderung neoliberal dan sistem ekonomi ”kekeluargaan” disesatkan oleh paham nepotisme kesejahteraan. Namun setidaknya secara nilai negara Pancasila sudah menggarisbawahi ideologi ”keadilan sosial” sebagai landasan teori dan praktik keadilan di negeri ini.

Integrasi Sosial

Al-Quran menjelaskan perlunya membangun masyarakat manusia atas moralitas. Ketika Nabi berdakwah, banyak orang dengan beragam status sosial mengitarinya. Ia segera berupaya untuk memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan di antara mereka melalui ajaran ajaran Islam.

Sila ”kemanusiaan” menyatakan prinsip ”kesatuan kemanusiaan”. Negara Pancasila mengajarkan bahwa semua manusia adalah bersaudara. Ikatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa meski suku-suku bangsa sangat beragam, tetapi mereka berasal dari Satu Pencipta dan nenek moyang Adam dan Hawa.

Maka ”kemanusiaan yang adil” mengejawantahkan diri dalam bentuk kesamaan kedudukan dan perlakuan seluruh warga negara di atas hukum, undang-undang dan pemerintahan.

Kemanusiaan yang adil bersifat komutatif yang menghendaki penghargaan atas martabat dan hak-hak asasi manusia. Karena itu negara Pancasila menegaskan prinsip egalitarianisme. Setiap warga negara yang hidup di negeri ini berhak atas persamaan kemanusiaan dan relasi dalam kesetaraan.

Negara Pancasila tidak mengenal sistem kasta, karena kasta adalah sistem sosial eksploitatif yang dilanggengkan atas nama agama. Negara Pancasila juga menolak etnosentrisme.

Pancasila menyatakan bahwa semua umat manusia menuju cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu pun orang atau kelompok atau bangsa dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan.

Integrasi Politik

Secara umum diyakini bahwa integrasi politik baru terjadi setelah hijrah ke Madinah. Solidaritas ummah secara logika menghendaki basis politik. Para anggota ummah tidak mengakui ikatan berdasarkan tribalisme, tetapi lebih bersandar kepada keyakinan akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad.

Semua anggota ummah yang berasal dari suku-suku dan klan-klan bersatu di bawah panji Islam, loyalitas mereka bukan lagi kepada suku atau klan namun kepada ideal-ideal Islam. Negara Pancasila menyatakan secara tersurat integrasi politik dalam sila ”persatuan Indonesia” dan sila ”kerakyatan”.

Sila persatuan mengejawantahkan spirit ”integrasi dan kesatuan” seluruh tingkat kebinekaan bangsa baik multiagama, multikultur, dan multietnik dalam ketunggalan sebagai bangsa; dan sekaligus integral dalam keanekaragaman, yang ditegaskan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Sila ini tegas menolak chauvinisme etnik karena berpotensi melahirkan konflik serta memperparah situasi ketegangan yang sudah ada. Sila kerakyatan memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat bersanding erat dengan ”kepemimpinan” dan mensyaratkan tanggung jawab.

Kedaulatan rakyat sejati menyatakan bahwa rakyat dapat membuat kontrak politik untuk memilih dan mengangkat pemimpin; pemimpin merupakan daulat rakyat yang bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Pemimpin/wakil rakyat adalah mereka yang memiliki bobot ”hikmah” dalam menyerap dan memerhatikan aspirasi rakyat.

Syura atau permusyawaratan merupakan instrumen untuk mendeliberasi kepentingan-kepentingan rakyat dan cara mewujudkannya. Pada akhirnya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pemimpin/wakil rakyat atas mandat yang telah diberikan kepadanya.

Koran SINDO, 10 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen dan Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga E-mail: zbaidhawy@gmail.com

Politik Kebangsaan Muhammadiyah

Abdul Mu'ti

Dalam pidato iftitah Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Prof Din Syamsuddin menawarkan tiga opsi politik bagi persyarikatan. Pertama, bersikap netral dengan membangun kedekatan yang sama dengan partai politik. Muhammadiyah tidak terpengaruh dan tidak terlibat dalam hiruk-pikuk kekuasaan. Kedua, mendirikan partai politik sebagai amal usaha di mana Muhammadiyah menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Atau, Muhammadiyah berafiliasi dengan partai politik tertentu sebagai partai utama.

Partai tetap independen dalam hal kepemimpinan dan kebijakan. Hubungan Muhammadiyah dengan partai bersifat aspiratif, bukan simbolis. Ketiga, tetap menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik, namun dalam situasi tertentu mendukung calon eksekutif dan legislatif. Orientasi politik Muhammadiyah bersifat *adhoc* dan rasional dengan melihat individu dan partai yang akan dipilih. Ketiga pilihan tersebut dilaksanakan dengan tetap mempertahankan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural dan politik adiluhung untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadaban, dan kemaslahatan. Muktamar ke-47 memilih alternatif pertama. Merujuk Khittah Ujung Pandang (1971), Surabaya (1978), dan Denpasar (2002),

Muhammadiyah menegaskan tetap dalam koridor dakwah dan menjaga netralitas politik. Netralitas politik merupakan pilihan dan strategi agar Muhammadiyah tetap independen, berwibawa, dan mampu memelihara persatuan warganya. Menjadi partai politik justru mengecilkan, mereduksi, dan merusak wibawa Muhammadiyah.

Citra politik sekarang ini begitu buruk. Partai politik sangat identik dengan korupsi, kemunafikan, dan rakus kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, tak segelintir pun organisasi dakwah yang bermetamorfosis menjadi partai politik sukses mengemban misi politik keumatan dan akhlakul karimah. Berafiliasi dengan partai politik tertentu akan mengekslusi warga Muhammadiyah karena berafiliasi kepada partai politik yang berbeda-beda.

Pluralitas politik merupakan kekuatan yang memungkinkan Muhammadiyah memainkan peran politik kebangsaan. Aspirasi politik Muhammadiyah disalurkan melalui para kader yang tersebar dalam berbagai partai politik. Netralitas Muhammadiyah dibangun di atas pluralitas politik anggotanya. Muhammadiyah adalah rumah besar yang di dalamnya semua politikus merasa *at home*. Apa pun partai politiknya, semua kader adalah ahlul bait, anak kandung, bukan anak angkat atau anak tiri. Pengalaman berafiliasi dengan Masyumi dan Parmusi menjadi pelajaran penting bagaimana Muhammadiyah seharusnya memainkan peran politiknya. Netralitas tidak berarti apolitik atau antipolitik.

Muhammadiyah tidak boleh berpangku tangan melihat kekisruhan dan kerusakan negara karena kegagalan partai politik dalam melahirkan negarawan dan pemimpin bangsa. Masa depan Indonesia ditentukan oleh para politikus dan elite partai. Muhammadiyah seharusnya mempersiapkan dan mendukung kader politiknya yang mengabdi kepada bangsa melalui partai politik. Pilihan politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan kepartaian. Politik dimaknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat mengambil tiga peran. Pertama, *opinion maker*. Muhammadiyah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kenegaraan. Dengan kekuatan SDM dan kekayaan intelektualnya,

Muhammadiyah aktif memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan penyelenggara negara melalui opini media massa, kajian kebijakan, atau forum-forum resmi. Muhammadiyah menerbitkan buku *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa* (2009) dan *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna* (2014), yang berisi gagasan dan *road ma*p untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kedua, *political lobbist*. Dengan posisinya yang netral, Muhammadiyah dapat melakukan komunikasi politik lintas partai dan menyampaikan aspirasi secara leluasa kepada semua kekuatan politik. Pada umumnya partai politik dan pengambil kebijakan lebih apresiatif terhadap ide dan pemikiran yang disampaikan langsung secara tertutup. Kritik terbuka melalui media massa, selain menimbulkan polemik berkepanjangan dan kegaduhan politik, juga kontraproduktif.

Dengan wibawa para pimpinannya, Muhammadiyah mampu berperan sebagai pelobi politik yang berpengaruh. Ketiga, *pressure group*. Sejarah mencatat bagaimana Muhammadiyah melalui para tokoh dan kekuatan jaringannya tampil sebagai *pressure group* yang berpengaruh. Tekanan politik Muhammadiyah melalui Prof Amien Rais dengan gerakan reformasi memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Jihad konstitusi yang dimotori Din Syamsuddin "memaksa" pemerintah menyusun undang-undang migas dan sumber daya air yang baru. Sebagai konsekuensi *judicial review* UU Migas oleh Muhammadiyah, BP Migas tinggal sejarah dan para mantan pimpinannya mendekam di penjara. Tanpa harus menjadi partai politik atau berafiliasi kepada partai politik tertentu, Muhammadiyah tetap dapat menjadi kekuatan politik yang kuat. Muhammadiyah dapat memainkan peran politik kebangsaan sebagai punggawa dan penjaga moral bangsa. (10)

Suara Merdeka, 19 Agustus 2015. Penulis adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MUAZIN DARI MAKKAH DARAT

FAJAR RIZA UL HAQ

AHMAD Syafii Maarif genap berumur 80 tahun pada 31 Mei lalu. Bersyukur beliau masih dikaruniai kesehatan dan energi kecendekiaan yang prima.

Tidak banyak warga senior bangsa, seperti Buya Syafii, begitu panggilan akrab untuknya, di negeri ini: fisik segar-bugar dan tetap produktif menulis; masih rutin melakukan perjalanan menggunakan pesawat sendirian rute Yogyakarta-Jakarta; tak jarang terbang memenuhi undangan ke kota-kota di luar Jawa, bahkan ke luar negeri, yang sebenarnya sangat melelahkan untuk orang seusianya. Mau tahu makanan favorit putra kelahiran Sumpur Kudus, "Makkah Darat" ini? Tengkleng dan sate kambing!Beliau nyaris tidak pernah memberikan kesempatan orang lain membawakan tasnya. "Memang Anda pikir saya sudah tidak mampu bawa sendiri?" sergahnya saat ada yang coba-coba membantu membawakannya.

Salah satu ungkapan syukur atas karunia usia panjangnya itu adalah sumbangan tulisan belasan intelektual yang bermuara pada penerbitan buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Ahmad Syafii Maarif, (Serambi & Maarif, Juni 2015). Biografi intelektual ini merupakan apresiasi dan dukungan para kontributor terhadap pemikiran-pemikiran Buya Syafii dalam bentuk ulasan, pendalaman, kritik, bahkan pengembangan topik-topik yang belum banyak disentuhnya.

Buku ini mengurai relevansi gagasan-gagasan solutif maupun kritis mantan Ketua PP Muhammadiyah ini ketika dihadapkan pada problematika kebangsaan dan kenegaraan. Sosok Buya Syafii, menurut Noorhaidi Hasan, adalah seorang intelektual Muslim Indonesia *par exellence* yang menekankan semangat moral Islam dalam bernegara.

Mengikuti lika-liku perjalanan hidupnya hingga saat ini, guru besar (*emiritus*) sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta ini telah mengalami transformasi radikal, utamanya dari sisi spektrum pemikiran dan radius pergaulan. Mulai dari seorang puritan pengagum Al Maududi yang memimpikan negara Islam, pendukung fanatik Partai Masyumi, dan mencurigai proyek "salibisasi" di balik upaya-upaya penghancuran umat Islam; hingga akhirnya meyakini tidak ada kewajiban mendirikan negara agama dan menjadi penganjur setia Negara Pancasila yang senapas dengan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

"Kalau aku mengatakan bahwa Islam merupakan pilihanku yang terbaik dan terakhir, hak sama harus pula diberikan secara penuh kepada siapa saja yang mempunyai keyakinan selain itu," tulisnya dalam *Memoar Seorang Anak Kampung* (2013).

Jihad kebangsaan

Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan cita-cita keadilan sosial segera terwujud tanpa pilih kasih. Sudah sejak merdeka, sila ke-5 Pancasila itu jadi yatim piatu. Kegelisahan Buya Syafii ini mendeterminasi dirinya sangat keras menentang praktik-praktik korupsi, mafia pengadilan, mafia pangan, dan realitas kesenjangan pendapatan yang kian dalam. Faktanya, kemiskinan terus mencengkeram sebagian besar anak bangsa. Ketidakadilan ekonomi makin menggurita.

Namun, Buya Syafii tak lelah melakukan jihad kebangsaan, meski harus berhadapan dengan tembok kepentingan-kepentingan elite politik, oligarki partai, bahkan para pemburu *rente*. Ia pun tak jenuh mengingatkan masyarakat Muslim agar terus berbenah meningkatkan kualitasnya

ketimbang terobsesi dengan penambahan kuantitas karena bisa seperti buih di lautan.

Pembelaannya terhadap agenda pemberantasan korupsi sangat terang-benderang. Korupsi hulu dari kemiskinan. Saat mencuat pro-kontra pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, Buya Syafii salah satu tokoh yang paling vokal menolak. Banyak pihak mempertanyakan bahkan mencibir sikapnya yang cenderung membela Presiden Joko Widodo ketika bersikukuh bahwa Budi Gunawan tidak akan dilantik sesuai pembicaraannya dengan Jokowi via telepon. Suara-suara yang tidak setuju menyayangkan posisi Buya Syafii yang seolah-olah bertindak sebagai "bemper" pemerintah.

Kekecewaan sebagian besar warga Muhammadiyah terhadap Jokowi-JK yang tidak mengakomodasi kader Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja tidak memengaruhi kejernihan seorang Buya Syafii di tengah gejolak polemik Polri-KPK. Dalam satu kesempatan, penulis menanyakan persoalan ini kepada Buya. "Ini semata-mata demi KPK, satu-satunya lembaga yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi", ujarnya.

Figur Buya Syafii sudah tak terpisahkan lagi dari arus gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadaban publik dan pelembagaan prinsip-prinsip keadilan dalam tata pemerintahan. Mungkin agak berlebihan, beragam kalangan mendaulatnya sebagai simbol dari jangkar moralitas publik. Oleh karena itu, guru besar etika Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Alois A Nugroho, menyebut sosok Buya Syafii sebagai seorang "muazin moralitas bangsa" (Juni, 2015). Mengapa? Itu karena Buya Syafii tak lelah berseru-seru kepada politisi dan birokrat negara agar menjauhi mentalitas "thugocracy"(maling/pancilok dalam bahasa Minang).

Secara harfiah, muazin adalah sang pengingat. Ia berseru-seru tiada lelah mengingatkan orang-orang untuk menunaikan shalat dan menggapai kebahagiaan. Jika diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa, muazin dapat dimaknai sebagai seseorang yang konsisten menyuarakan nilai-nilai moralitas dan keadaban publik serta mengingatkan penguasa dan segenap warga negara untuk terhindar dari perilaku-perilaku mungkar (buruk) yang destruktif, yang jauh dari rasa keadilan.

Menurut hemat penulis, ada titik temu-bahkan saling bersenyawa-antara spirit seorang muazin dan pesan historis dari "Makkah Darat", julukan kampung kelahiran Buya Syafii di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Frasa "Makkah Darat" sendiri berasal dari sejarah Minangkabau era Islam yang sudah tertimbun debu sejarah selama ratusan tahun. Makkah Darat, ungkap Buya dalam otobiografinya, merepresentasikan simbol pusat Islam di pedalaman Minang yang memiliki sejarah panjang dalam proses pergumulan Islam dengan kultur Hindu-Buddhis.

Istilah ini melambangkan gerak perlawanan terhadap budaya hitam yang dikuasai para parewa (preman), yang masih berlangsung hingga era Islam, bahkan sampai sekarang. Spirit Makkah Darat adalah budaya perlawanan terhadap pelbagai budaya yang mendegradasikan martabat manusia dan mengorupsi rasa keadilan.

Saat bertemu Gubernur DKI Jokowi pada 1 Agustus 2013 di Maarif Institute, secara khusus Buya menanyakan pandangan sang tamu terkait budaya mafia di kalangan birokrasi yang berkroni dengan politisi busuk dan pengusaha-pengusaha hitam. Seingat penulis, jawaban Jokowi cukup standar. Praktik kotor semacam itu harus diberantas. Dan kini kita semua tahu, Presiden Jokowi berulang-ulang mendeklarasikan komitmennya perang melawan mafia bisnis, tetapi masih belum terlihat kebijakan-kebijakan radikal yang terukur. Lazimnya seorang muazin yang tak peduli siapa pun imamnya, Buya Syafii akan selalu tetap menyuarakan hal-hal yang diyakininya benar. Tidak akan pernah berkompromi terhadap kemungkaran politik dan praktik-praktik kumuh bernegara yang sudah terbukti memunggungi nilai-nilai luhur Pancasila. Menyaksikan Tanah Air-nya disinari keadilan dan dinaungi kesejahteraan akan menjadi kado terindah Buya Syafii di usia magribnya. Semoga.

Kompas, 3 Juli 2015. Penulis adalah Direktur Eksekutif *Maarif Institute*

Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Benni Setiawan

Abad kedua Muhammadiyah telah membentang. Tantangan dakwah abad ini tentu akan semakin kompleks jika dibandingkan abad pertama. Abad pertama, Kiai Dahlan menghadapi kejahilan masyarakat. Yaitu, kebodohon dan kemiskinan serta jauhnya umat dari nilai-nilai Islam. Pendidikan masih menjadi barang langka, sehingga banyak tindakan yang dilakukan jauh dari spirit kemanusiaan. Ketimpangan pun mengakibatkan kemiskinan yang cukup akut.

Berbekal tafsiran Surat al-Maun, Kiai Dahlan mendirikan Roemah Miskin, Penolong Kesengsaraan Oemoem (kini PKU), dan Balai Pendidikan. Tafsir nyata Kiai Dahlan tersebut semata-mata diperuntukkan bagi terciptanya tatanan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Namun, setelah lebih dari seabad, ternyata kondisi keumatan tidak jauh berbeda. Bangsa ini masih buta politik. Meminjam istilah Buya Syafii, politik rabun ayam. Masyarakat sering kali dibutakan oleh realitas semu yang sering kali dipertontonkan oleh media. Masyarakat pun menjadi semakin tidak kritis.

Proses bersolek ini terkadang menimbulkan kegaduhan yang mengarah pada kebangkrutan bangsa. Pasalnya, para pemimpin kurang memiliki visi

kebangsaan. Mereka seakan tersekat oleh belenggu primordial partai dan juga orang-orang yang telah mendukung kesuksesannya selama ini.

Kebangkrutan bangsa menjadi ancaman yang kian nyata. Saat semua seakan tiarap menyelamatkan diri sendiri dan golongan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan dan pembaruan (*tajdid*) berperan dalam masalah ini?

Trilogi Ideologi

Haedar Nashir (2011) menyebut Muhammadiyah akan tetap bertahan di tengah tantangan yang semakin kompleks. Hal ini didasarkan pada fondasi ideologi reformis, moderat, pandangan Islam yang berkemajuan, potensi sumber daya manusia, amal usaha, dan jaringan yang dimiliki.

Menilik hal di atas, pertama yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah adalah meneguhkan ideologi reformis, moderat, dan Islam Berkemajuan. Trilogi ideologi inilah yang akan mampu mengurai dan memberi tafsiran terhadap realitas kebangsaan.

Ideologi itu yang akan mampu mampu menyapa persoalan sosial secara jernih dan bijak; menghapus sekat-sekat primordial dan mampu berpikir global tanpa harus tercerabut dari akar budaya Nusantara tampaknya menjadi agenda bersama. Ideologi itu pun yang akan terus mendorong masyarakat berpikir kritis. Masyarakat tak akan terjebak dalam keagamaan yang saling mendaku paling benar (*truth claim*).

Pengakuan kebenaran kelompok dan menafikan keberadaan orang lain hanya akan menjadi masalah baru bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan keragaman dan keberagamaan yang universal sudah selayaknya bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan ini sudah selayaknya didukung (*sengkuyung*) oleh proses kreatif kaum agamawan dalam menafsir "ayat" guna kemaslahatan umat.

Maka dari itu, sebagaimana pemaknaan atas spirit Muhammadiyah sebagai organisasi yang umurnya lebih tua daripada Republik (lebih dari satu abad) sudah selayaknya berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan

tersebut. Spirit dakwah pencerahan menuju "Indonesia Berkemajuan" selayaknya mewujud dalam menyelesaikan persoalan keagamaan tersebut.

Dakwah pencerahan Muhammadiyah mewujud dalam berbagai bidang seperti semakin mengefektifkan pendidikan sebagai basis pencerdasan bangsa, gerakan sosial-ekonomi guna memperkuat jejaring ketahanan nasional, dan keberagamaan sebagai penyatuan gerak langkah. Semua itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan sinergi guna mencegah kebangkrutan bangsa.

Muhammadiyah pun terus menjadi garda terdepan dalam menyemai perdamaian, toleransi dan multikulturalisme antarumat beragama. Sebagaimana telah dikerjakan dan diwujudkan oleh Profesor Din Syamsuddin sebagai *co-President Religions for Peace* dan forum-forum internasional lainnya.

Lebih lanjut, mewujudkan keberagamaan yang sehat dengan terus menggali kearifan teks Al-Quran dan Sunah merupakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Indonesia Berkemajuan. Tanpa hal yang demikian, Muhammadiyah dapat terjebak dalam sekat primordialisme yang semakin memperkeruh keberagamaan itu sendiri.

Berhadapan dengan Korporasi

Kedua, pengoptimalan potensi sumber daya manusia, amal usaha, dan jaringan yang dimiliki. Tiga hal ini kini mewujud dalam langkah Muhammadiyah mengembangkan jihad konstitusi.

Jihad konstitusi dipilih Muhammadiyah sebagai ormas dan mengukuhkan Persyarikatan bukanlah partai politik. Melalui jihad konstitusi Muhammadiyah dapat terus mengawal kebangsaan. Muhammadiyah pun melakukan kerja sosial, agar masyarakat tak terjangkiti penyakit rabun politik. Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergiat menyelamatkan perahu Republik agar tetap lurus dan kuat mengarungi samudra luas peradaban.

Jihad konstitusi akan semakin kuat saat tiga kekuatan tersebut mampu bersinergi. Sumber daya manusia, amal usaha, dan jaringan nasional/

internasional perlu terus menyuarakan hal-hal yang telah "dimenangkan" Muhammadiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, tentang dikukuhkannya sumber daya alam (air) milik bangsa. Putusan ini tentu berseberangan dengan kepentingan korporasi yang telah menguasai air. Privatisasi air perlu disadari akan menggerus keutuhan bangsa. Pasalnya, menurut Maude Barlow dan Tony Clarke (2005), perang di masa depan dipicu oleh persoalan sumber daya air. Para pemangku kepentingan pun layak sadar terkait hal itu. Bangsa ini tak boleh tercabik oleh peperangan atas nama apapun termasuk oleh permasalahan kelangkaan air.

Inilah tantangan sekaligus peluang Muhammadiyah di abad kedua. Muhammadiyah akan berhadapan dengan korporasi yang bisa saja menghancurkan Republik. Muhammadiyah telah mengawal melalui jihad konstitusi. Usaha preventif (pencegahan) Persyarikatan ini sebagai usaha sadar dan terencana agar bangsa dan negara tetap tegak, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negeri manca. *Wallahu a'lam*.

Jawa Pos, 10 Juni 2015. Penulis adalah Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.

Muhammadiyah dan Kegelisahan Kader Muda

ABD ROHIM GHAZALI

Menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-47, 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, alumni organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) melakukan konsolidasi internal di organisasinya masing-masing. Bahkan IMM, melalui Forum Keluarga Alumni (FOKAL), menggelar Silaturahim Nasional yang selain menghasilkan kepengurusan baru, juga antara lain mengeluarkan rekomendasi untuk bergerak secara independen di luar struktur Muhammadiyah.

Kalau dicermati, geliat alumni AMM ini bukan semata karena menjelang Muktamar. Lebih dari itu, karena ada kegelisahan yang merata di kalangan aktivis muda Muhammadiyah, pertama, kegelisahan tentang eksistensi dan peranan Muhammadiyah yang semakin dianggap kurang diperhitungkan di pentas nasional. Anggapan sumir yang masih bisa diperdebatkan, walaupun nyata benar jika parameternya dilihat dari tingkat keterpengaruhan politik di pentas nasional.

Gerakan jihad konstitusi yang digerakkan Muhammadiyah belakangan ini, satu sisi menunjukkan peranan yang sangat konstruktif bagi Muhammadiyah di arena politik kebangsaan. Akan tetapi di sisi lain, bisa

menjadi bukti otentik bahwa Muhammadiyah semakin ditinggalkan dalam proses penyusunan dan penetapan undang-undang (legislasi). Banyaknya undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi Muhammadiyah membuktikan bahwa organisasi Islam yang memiliki ratusan lembaga pendidikan dan rumah sakit ini aspirasinya terabaikan dalam proses legislasi.

Kedua, kegelisahan yang disebabkan karena sulitnya kader-kader muda Muhammadiyah melakukan mobilisasi gerakan struktural untuk mengisi lembaga-lembaga negara dan atau jabatan-jabatan strategis di birokrasi pemerintahan. Kesulitan ini, antara lain disebabkan karena secara kelembagaan Muhammadiyah tidak ikut ambil bagian secara sistematis dalam mengalokasikan kader-kadernya untuk duduk di lembaga-lembaga strategis sesuai keinginan dan kemampuannya. Sebagai contoh, alih-alih memberikan dorongan, Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kader-kadernya yang terjun di dunia politik.

Jadi, kalau pun ada beberapa kader Muhammadiyah yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis, lebih disebabkan karena kegigihan usahanya sendiri secara individual untuk meraih jabatan itu ketimbang sebagai upaya sistematis dari Muhammadiyah secara kelembagaan untuk mentransformasikan kader-kader potensialnya di arena kebangsaan.

Ketiga, kegelisahan disebabkan karena tidak adanya program yang terencana dan terukur dari Muhammadiyah untuk melakukan kaderisasi di berbagai bidang. Program kaderisasi yang dilakukan Majelis Pendidikan Kader misalnya, lebih diorientasikan untuk penambahan ilmu dan wawasan layaknya pelajaran ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Sedangkan program kaderisasi seperti penyediaan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi dan berkualitas tampaknya belum ada. Seperti dalam meraih jabatan-jabatan strategis, kalaupun ada aktivis AMM yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, lebih disebabkan karena usaha sendiri.

Kegelisahan-kegelisahan inilah yang mendorong AMM melakukan konsolidasi untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Persoalan-persoalan yang terkait mobilitas struktural yang

seyogianya bisa dicarikan jalan keluar oleh Muhammadiyah yang secara kelembagaan cukup punya kapasitas untuk melakukan itu, pada akhirnya harus dilakukan oleh para aktivis AMM sendiri.

Sejumlah agenda strategis dirancang oleh para alumni AMM untuk berkiprah secara maksimal di arena kebangsaan. Tekadnya, tanpa menunggu uluran tangan Muhammadiyah, mereka akan bergerak mengembangkan dan menyalurkan potensi dan kemampuannya untuk mengisi ruang-ruang artikulasi politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain, di arena yang jauh lebih luas ketimbang harus berebutan mengisi jabatan-jabatan di amal usaha Muhammadiyah.

Langkah alumni AMM ini jika benar-benar mampu direalisasikan akan menimbulkan dampak positif, di samping (mungkin saja) negatif. Positif karena tumbuh kesadaran baru bahwa untuk bisa sukses meraih jabatan-jabatan strategis, sudah waktunya bagi para alumni AMM untuk bergerak bersama-sama, bahu membahu, saling menopang satu sama lain. Ekspresi dan aspirasi politiknya bisa saja berbeda satu sama lain, tetapi kesamaan kepentingan dan kesamaan warna jaket di masa lalu akan menjadi perekat yang bisa menyatukan langkah seraya mengesampingkan ego sektoralnya masing-masing.

Namun, jika kekuatan dan soliditas alumni AMM sudah terbangun, dan mereka berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai lini kehidupan, maka akan terjadi eksodus kader-kader potensial Muhammadiyah. Mungkin ada yang berpikir ini bagus karena otak-otak besar Muhammadiyah akan mengisi berbagai lini kehidupan. Dakwah Muhammadiyah akan tersebar di segala penjuru. Tapi, bayangkan jika ini terus-menerus terjadi lantas yang akan berkiprah di Muhammadiyah, di "rumah sendiri" hanyalah kader-kader kelas dua yang tidak diterima di luar, atau yang kalah "berperang" di arena terbuka. Inilah yang saya sebut negatif!

Untuk menjaga tidak terjadinya kemungkinan negatif, keseimbangan mutlak harus dijaga. Di antara kader-kader terbaik Muhammadiyah seyogianya tetap ada yang mau berkiprah (memimpin) untuk mengabdi,

dan–meminjam istilah yang dipesankan KH Ahmad Dahlan—menghidup-hidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup dalam Muhammadiyah.

Untuk menjaga keseimbangan aktualisasi peran para alumni AMM dibutuhkan kebijakan-kebijakan kaderisasi yang kondusif untuk melahirkan kader-kader muda Muhammadiyah yang siap terjun di berbagai lini kehidupan di arena kebangsaan. seraya masih bersedia mengabdi untuk memajukan Muhammadiyah. *Wallahu a'lam*!

Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina; Wakil Ketua Umum Kornas FOKAL IMM

MUHAMMADIYAH KAWAL KONSTITUSI

PRAMUDITO

MUNGKIN sudah banyak yang lupa, salah satu proklamator kemerdekaan kita, Bung Hatta, pernah "menyelamatkan" Muhammadiyah? Lebih dari 50 tahun lalu, tepatnya ketika Indonesia lepas dari bencana upaya kudeta G-30-S/PKI, rakyat larut dalam euforia kemenangan, termasuk juga kalangan umat Islam.

Beberapa tokoh eks pimpinan Partai Islam Masyumi mencoba memanfaatkan momentum runtuhnya komunis di Indonesia itu dengan berupaya merehabilitasi kembali Partai Masyumi yang dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960. Karena waktu itu yang berkuasa dalam pemerintahan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, kepada Presiden Soeharto-lah permohonan rehabilitasi Masyumi itu diajukan.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Presiden Soeharto menolak merehabilitasi Masyumi, tapi memberikan peluang bagi sebagian eks anggota Masyumi untuk membentuk partai baru.

Di kalangan beberapa tokoh Muhammadiyah juga ada keinginan agar Muhammadiyah menjadi partai politik sebagai akibat buntunya upaya untuk merehabilitasi Masyumi. Tampaknya, keinginan sebagian tokoh Muhammadiyah itu terdengar oleh Bung Hatta.

Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Muhammadiyah dan proklamator itu mendesak agar Muhammadiyah jangan sampai menjadi partai politik. Bung Hatta menginginkan agar Muhammadiyah tetap menjadi organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di lapangan pendidikan dan sosial.

Organisasi Muhammadiyah yang bakal melaksanakan Muktamar ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar, sedikit banyak mendapat sorotan dari para pengamat, selain juga terhadap NU yang akan menyelenggarakan Muktamarnya di Jombang, Jawa Timur, hampir bersamaan, yakni pada 1-5 Agustus 2015.

Berkenaan keterkaitan Muhammadiyah dengan dunia politik juga menjadi objek sorotan. Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan beberapa tokoh lain sejak semula memaksudkan pendiriannya sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan. KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya kesalehan sosial bahwa ilmu agama itu harus diamalkan dalam bentuk kegiatan nyata dalam masyarakat. Sejak semula, boleh dikatakan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan *in action* dan anti-NATO (*no action talk only*).

Dikisahkan, Muhammadiyah mulai akrab dengan dunia politik sejak dilahirkannya Partai Masyumi yang pada 1945 ditetapkan sebagai satu-satunya parpol Islam di Indonesia oleh segenap organisasi Islam masa itu. Masyumi memuat ketentuan keanggotaannya terdiri atas perorangan maupun organisasi.

Dalam hubungan ini, Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi, di samping ormas-ormas Islam lainnya kala itu. Tak sedikit, tokoh Masyumi yang juga kader atau tokoh Muhammadiyah.

Namun, dalam struktur kepengurusan tak banyak terjadi rangkap jabatan antara Masyumi dan Muhammadiyah. Memang, perlu diakui, sebelum menjadi bagian dari Masyumi pada zaman kolonial, tak sedikit kader Muhammadiyah yang terjun pula sebagai pemimpin politik. Tapi, mereka tampil sebagai pribadi dan tidak mewakili Muhammadiyah secara institusional.

Selanjutnya, kegiatan kemasyarakatan Muhammadiyah terus berkembang menjalani misinya yang utama di tengah-tengah hiruk pikuk dan pasang surut kehidupan politik di Tanah Air.

Demikianlah, ketika Masyumi dibubarkan pada 1960, Muhammadiyah dengan sepenuhnya dapat terus menjalankan misi dan kiprahnya. Organisasi ini dalam sejarahnya selalu mengambil jarak yang proporsional dengan penguasa, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, sejak masa kekuasaan Presiden Sukarno hingga zaman Reformasi saat ini.

Adakalanya, Muhammadiyah melontarkan sikap kritis, tetapi tidak sampai membuat merah kuping penguasa. Muhammadiyah tetap berkembang secara independen meskipun tak memperoleh bantuan atau fasilitas apa pun dari pemerintah, apalagi dianakemaskan.

Posisi Muhammadiyah yang independen ini menjadi agak terguncang dalam dunia politik ketika merespons perkembangan tercetusnya Reformasi 1998. Beberapa tokohnya mendirikan parpol baru, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Meskipun lebih bercorak kebangsaan, tak dapat dimungkiri bahwa PAN merupakan perwujudan dari penyaluran aspirasi politik kalangan Muhammadiyah yang merasa tidak puas dengan parpol lain yang sudah ada. Kalangan NU pun mendirikan parpol baru, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemunculan PAN ternyata tidak mengganggu kegiatan Muhammadiyah sehari-hari. Pengurus Muhammadiyah sejauh ini tidak secara eksplisit merangkap jabatan dalam parpol, demikian pula sebaliknya.

Sikap Muhammadiyah ini ditegaskan kembali oleh pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin pada 2014 bahwa "Muhammadiyah tidak melarang kader-kadernya untuk berpolitik praktis atau politik kepartaian. Muhammadiyah hanya membatasi kadernya yang menjadi pengurus harian, tidak rangkap jabatan dalam partai politik."

Dengan uraian singkat ini, Muhammadiyah telah mengalami pasang surut dalam persentuhannya dengan dunia politik. Pada kurun 1945-1960 menjadi bagian dari Partai Masyumi. Namun, sejak masa Reformasi menjadi lebih "tinggi" statusnya karena secara tak langsung ikut mensponsori lahirnya PAN.

Jihad Konstitusi

Suatu hal yang menarik dari Muhammadiyah belakangan ini adalah gerak langkah organisasi itu melakukan "aksi-aksi" yang oleh Ketua Umumnya disebut sebagai jihad konstitusi. Sebagaimana halnya NU dan ormas-ormas Islam lain, bagi Muhammadiyah masalah dasar negara sudah selesai. Dasar negara adalah Pancasila yang tak bisa diganggu gugat lagi.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, semua parpol Islam, yakni Masyumi, NU, PSII, Perti, dan lainnya menerima dekrit tersebut maka Pancasila sudah diterima semua pihak, termasuk Muhammadiyah yang waktu itu merupakan bagian dari Masyumi. Namun, bagi Muhammadiyah, pelaksanaan konstitusi dalam hal ini UUD 1945, termasuk di dalamnya Pancasila, belum dan bahkan tidak akan pernah selesai.

Muhammadiyah memandang, salah satu hambatan terwujudnya cita-cita kemerdekaan adalah banyak kebijakan dan perilaku aparat negara yang menyimpang dari konstitusi. Itulah yang melatarbelakangi Muhammadiyah melontarkan jihad konstitusi. Dan, hal itu secara konsisten juga dilakukan dalam tindak nyata melalui jalur konstitusi.

Muhammadiyah banyak menaruh perhatian pada sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal itu juga mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Sejauh ini, Muhammadiyah telah menginventarisasi 115 undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi dan telah diajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Empat di antaranya sudah dikabulkan majelis hakim Mahkamah Konsitusi, yakni UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.

Suatu hal yang patut dicatat, meskipun Muhammadiyah sudah punya andalan berupa parpol bernama PAN, tapi dalam mengawal konstitusi,

Muhammadiyah tetap mandiri. Tak hanya mengandalkan parpol yang tidak jarang menjauhi aspirasi rakyat yang akhir-akhir ini cenderung berkurang drastis kepercayaan mereka pada kalangan politikus.

Saya kira, sikap Muhammadiyah yang tetap menjaga jarak dengan dunia politik, tapi dengan caranya sendiri mengawal konstitusi (jihad konstitusi) merupakan sikap yang tepat, sebagai salah satu cara mewujudkan Islam dan negara yang berkemajuan. Selamat berMuktamar!

Republika, 29 Juli 2015. Penulis Mantan Diplomat, Pemerhati Politik

Muhammadiyah dan Aktivisme Kebangsaan

NAFI' MUTHOHIRIN

TEMA Muktamar ke-47 Muhammadiyah, 3-7 Agustus 2015, di Makassar adalah "Gerakan Pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan". Tema ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bagi warga Muhammadiyah untuk semakin berperan serta dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Berbagai persoalan sosial yang terus mengemuka di Tanah Air membutuhkan campur tangan semua elemen *civil society* seperti Muhammadiyah, khususnya dengan cara-cara yang modern dan mencerahkan.

Tema besar Muktamar dengan mengambil tajuk "Indonesia Berkemajuan" sebagai gagasan agung bukanlah tanpa pendiskusian yang mendalam. Tema ini sengaja dipakai karena memiliki maksud untuk meneguhkan visi keislaman dan kebangsaan, di mana fakta sosial saat ini menunjukkan bahwa kemiskinan, ketidakadilan, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia masih menggurita.

Sebagai gerakan Islam yang menjadikan dakwah dan tajdid sebagai peran dan fungsi utamanya, Muhammadiyah sejak awal berdirinya merupakan gerakan Islam yang berkemajuan. Jadi, ideologi Muhammadiyah itu adalah ideologi gerakan yang berkemajuan. Memasuki abad kedua dari pendiriannya, Muhammadiyah tidak hanya perlu merevitalisasi konsep "Islam Berkemajuan" (Islam Progresif) dalam formulasi dan

aktualisasinya yang lebih mapan dan holistik, melainkan juga perlu mentransformasikannya ke dalam kehidupan "Indonesia Berkemajuan".

Kita meyakini bahwa Islam yang kita anut ini adalah agama yang unggul atau berkemajuan dan tidak tertandingi keunggulannya (*al-Islamu ya'lu walaa yu'la alaih*), namun perilaku umatnya tidak selalu mencerminkan keunggulan dan kemajuan Islam. Islam itu agama rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*), namun tidak semua pengikutnya memahami dimensi dan aktualisasinya dalam kehidupan nyata. Islam ideal clan Islam faktual tidak selalu berbanding lurus karena Islam itu memang "terhalangi/terhambat" oleh orang Islam itu sendiri (*al-Islamu mahjubun bil muslimin*).

Karena itu, dalam kaca mata Muhammadiyah, tema Muktamar ini menegaskan supaya visi Islam Berkemajuan bisa terejawantahkan dan menjelma sebagai faktor pendorong bagi terwujudnya Islam Berkemajuan.

Meski tak dapat dipungkiri bahwa dalam satu abad perjalanan Muhammadiyah telah banyak kontribusinya bagi bangsa, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial, namun era kekinian menuntut organisasi masyarakat Islam ini ambil bagian dalam penyelesaian berbagai masalah sosial yang lebih besar, bahkan yang menjadi urusan masyarakat global.

Penanganan kasus HAM, pemanasan global, korupsi, diskriminasi, perdamaian dunia, hingga ancaman terhadap ekstrimis keagamaan adalah beberapa isu yang perlu mendapat tanggapan serius dari Muhammadiyah. Selain itu, yang tak kalah penting adalah memberi perhatian pada berbagai permasalahan hukum di Indonesia yang semakin pelik. Kondisi penegakan hukum yang terjadi sekarang ini sudah lumpuh, cacat, dan tak punya ketegasan apa-apa. Hukum kita sekarang hanya tegas untuk masyarakat berekonomi bawah, sementara tak punya nyali jika menghadapi borjuasi-borjuasi bisnis dan politik. Jika tidak ada respons dari elemen *civil society* seperti Muhammadiyah, maka tunggulah kehancurannya!

Bagi Muhammadiyah, perhatian terhadap penegakan hukum ini sangat penting sebagai model gerakan Muhammadiyah di abad kontemporer. Model gerakan ini juga sebagai kontribusi riil Persyarikatan untuk me-

mandu perjalanan bangsa ini agar menuju Indonesia yang berkemajuan sebagaimana yang menjadi payung tema Muktamar.

Untuk menghadirkan Indonesia yang berkemajuan, Muhammadiyah penting merumuskan solusi terhadap lemahnya penegakan supremasi hukum dan perilaku koruptif sebagian pejabat. Penegakan hukum kita mengalami situasi yang kritis, karena dari birokrat, politisi, hingga pengacara tersandung korupsi.

Karena itu dengan tema ini, gelaran Muktamar Muhammadiyah memiliki ketertarikan sendiri. Muhammadiyah akan melahirkan rumusan-rumusan baru dalam menanggapi berbagai tantangan nasional dan global di era kekinian seperti saat ini. Dengan begitu, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan akan mudah dicapai.

Pada konteks kekinian tak perlu diragukan lagi bahwa semangat berkemajuan dengan memberikan perhatian cukup besar terhadap problem-problem kebangsaan adalah sangat relevan. Sebab, sudah waktunya bagi Muhammadiyah dalam satu abad perjalanannya ini untuk memperluas agenda gerakan dan pemikirannya. Sehingga, Persyarikatan ini tidak melulu berpijak pada tiga lahan garapan saja, di antaranya: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial.

Apalagi, selama satu abad perjalanannya, telah banyak kontribusi Persyarikatan bagi kesejahteraan dan pencerdasan bangsa. Ribuan amal usaha yang meliputi ketiga sektor tersebut telah kokoh berdiri. Jangan sampai karena besarnya jumlah amal usaha malah warga Persyarikatan disibukkan pada persoalan-persoalan teknis, serta melupakan aspek pengembangan pemikiran dan gerakan untuk berperan serta dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Jika Muhammadiyah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu-isu nasional, maka bukan hal yang tidak mungkin bila dalam beberapa tahun ke depan organisasi Islam *mainstream* ini akan mengalami kejumudan. Stagnasi gerakan akan terlihat pada aktivitas Muhammadiyah beserta seluruh organisasi otonomnya.

Penulis adalah Aktivis Jaringan Intelektual Muhammadiyah (JIMM) dan Penulis Buku "*Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*

Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah

BIYANTO

DALAM perspektif Islam, jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Jihad memiliki akar kata yang sama dengan ijtihad, yakni *jahd*. Hanya, istilah ijtihad berasal dari hadis, sedangkan jihad dari Al-Quran. Meski demikian, substansi jihad dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran (*total endeavor*) sehingga terwujud nilai-nilai yang diridai Allah SWT.

Dalam sejumlah referensi dapat dipahami, jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik. Contohnya, pandangan Buya A.R. Sutan Mansur, ulama besar Sumatera Barat yang menjadi nakhoda Muhammadiyah periode 1952–1957. Beliau memaknai jihad dengan pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas.

Perspektif Buya Sutan Mansur ternyata begitu menginspirasi Muhammadiyah. Ajaran jihad diejawantahkan dalam bentuk berkarya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah terus bergerak guna melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi umat. Dengan memahami ajaran agama sebagai praksis sosial (*a faith with action*), Muhammadiyah terus berkarya dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga perekonomian.

Menariknya, saat memasuki abad kedua dari perjalanan sejarah organisasi ini, sangat tampak keinginan kuat untuk mengembangkan

bidang dakwah dalam konteks kekinian. Salah satu yang patut dicatat adalah keberhasilan Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi. Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berjuang untuk meluruskan sejumlah perundang-undangan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Sejak November 2012 hingga akhir Februari 2015, Muhammadiyah telah empat kali melakukan *judicial review* terhadap perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Empat UU yang di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hebatnya, seluruh jihad konstitusi Muhammadiyah melalui *judicial review* tersebut dikabulkan MK. Kini Muhammadiyah pun bersiap mengajukan *judicial review* terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Prestasi Muhammadiyah saat melakukan *judicial review* terhadap sejumlah UU jelas sangat membanggakan.

Melalui tim pakar dan ahli hukumnya, Muhammadiyah telah mengkaji beberapa UU yang dianggap tidak prorakyat. Usaha itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengajak beberapa tokoh nasional serta ormas untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Meski kedudukan hukum (*legal standing*) dan kompetensinya sebagai pemohon *judicial review* UU Migas sempat dipertanyakan, Muhammadiyah ternyata sukses memenangi gugatan di MK.

Harus diakui, sejauh ini, hampir tidak ada ormas apalagi ormas keagamaan yang berani mengambil peran dalam advokasi kebijakan. Biasanya, advokasi kebijakan hanya diperankan lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dalam maupun luar negeri. Muhammadiyah memahami, pengajuan *judicial review* terhadap UU yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian dari komitmen untuk meluruskan kiblat bangsa.

Bagi Muhammadiyah, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, langkah menggugat beberapa UU yang

kurang berpihak kepada rakyat itu merupakan bagian dari dakwah politik *amar ma'ruf nahi mungkar*. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan agar putusan MK efektif? Inilah pekerjaan rumah Muhammadiyah. Bersama pilar *civil society* lainnya, Muhammadiyah harus mengawal putusan MK.

Publik tentu masih ingat tatkala MK memerintah pemerintah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai konsekuensi pembatalan UU Migas. Saat itu, pemerintah hanya mengganti nama BP Migas dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Padahal, dalam amar putusannya, MK memutus bahwa BP Migas yang diatur dalam UU Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. UU Migas juga berpotensi memicu liberalisasi pengelolaan migas karena intervensi perusahaan asing.

Perubahan *casing* BP Migas menjadi SKK Migas oleh pemerintah jelas tidak menyelesaikan masalah. Sebab, kenyataannya, SKK Migas tetap berpotensi menjadi sarang koruptor. Karena itu, tidak mengherankan jika di kemudian hari kepala SKK Migas ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan dengan tuduhan menerima suap dari perusahaan asing.

Karena itu, kemenangan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi harus benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai amar putusan MK yang memenangkan gugatan Muhammadiyah atas sejumlah UU tersebut tidak dijalankan pemerintah dan DPR. Harus dipastikan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar menaati putusan MK sehingga UU yang dibuat tidak lagi bertentangan dengan semangat nasionalisme.

Semoga jihad konstitusi ala Muhammadiyah menjadi penyemangat bagi organisasi tersebut untuk terus berkiprah. Itu berarti jihad konstitusi juga bisa menjadi salah satu topik yang menarik dibicarakan dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3–7 Agustus 2015. **(*)**

Jawa Pos, 18 Maret 2015. Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel, ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur

Muhammadiyah, Negara, dan Jihad Konstitusi

Chusnul Mar'iyah

PERUBAHAN politik 1998 berdampak terhadap organisasi massa besar di Indonesia, termasuk Muhammadiyah. Dalam usia ke-104 dan Muktamar ke-47, bagaimana peran Muhammadiyah dalam partisipasi politik di era demokratisasi? Dalam berbagai kesempatan, antropolog Hajriyanto Y. Thohari, aktivis Muhammadiyah, menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang lebih cair.

Dengan kata lain, secara budaya, Muhammadiyah kurang memiliki kohesi kuat seperti NU dengan tradisi istigasah, tahlilan, dan yasinan. Tradisi budaya dalam Muhammadiyah untuk membangun kohesi secara antropologis yang masih kuat ialah lewat pengajian. Pandangan tersebut bisa jadi benar. Hal itu dapat dimengerti bahwa organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu memang bercita-cita membangun gerakan yang dapat dikategorikan modern.

Melalui Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan telah memberikan warisan penting dari perkembangan berbangsa dan bernegara dalam rangka mengimplementasikan cita-cita bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.Pertama, telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Gerakan organisasi itu didirikan pada 1912, atau saat

terjadi perubahan politik di Eropa Barat lewat politik etik yang membuka ruang bagi negara-negara terjajah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Kedua, adanya tekad dalam beragama agar dalam mengamalkan ajaran Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ajaran Islam yang menurut KH Ahmad Dahlan itu ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat serta umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan kata lain, Islam yang berkemajuan. Ketiga, melalui Muhammadiyah, KH Dahlan telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan sebagai unsur penting sebagai peran Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, yang sangat signifikan dalam perkembangan demokrasi ialah peran perempuan Muhammadiyah.

Melalui *women wing*, Muhammadiyah telah memelopori kebangkitan perempuan Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Saat ini, Aisyiyah telah memiliki 16 perguruan tinggi dan salah satunya akan menjadi Universitas Aisyiyah. Belum lagi, lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak dan rumah sakit bersalin ibu dan anak serta rumah anak yatim piatu yang sesuai dengan UUD 1945 diurus oleh negara.

Di satu sisi, pandangan tradisi untuk kohesi organisasi dianggap cair. Namun, sebagai organisasi modern perkotaan, gerakan Muhammadiyah memiliki kekuatan sebagai organisasi profesional. Kohesi dari anggota persyarikatan dibangun melalui amal usaha. Dengan demikian, arah organisasi ke depan masih menjadi organisasi yang bersifat perkotaan/urban. Bagaimana dengan ancaman bahwa Muhammadiyah bisa kehilangan tradisi komunitas ala masyarakat perdesaan? Hal itu menjadi kenyataan bagi Muhammadiyah yang memilih gerakan dakwahnya melalui amal usaha. Itulah arah dari tradisi masyarakat perkotaan, bahkan masyarakat kosmopolitan di era globalisasi dan teknologi. Muhammadiyah dan demokrasi Perdebatan di kalangan pengurus Muhammadiyah, baik yang berada di Yogyakarta maupun Jakarta, ialah menyikapi kepentingan

Muhammadiyah sebagai lembaga dan para aktor/aktivis di ranah politik. Sejak era Reformasi 1998, gerakan Muhammadiyah sering dianggap menjadi ancaman atau oposisi rezim yang berkuasa. Akibatnya, Muhammadiyah sering dilihat sebagai kekuatan politik yang harus disingkirkan.

Menurut penulis, anggapan tersebut tidaklah benar. Muhammadiyah memiliki cukup *resources* untuk menghidupi organisasi melalui amal usaha di dunia pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Muhammadiyah bisa lebih independen dalam berhubungan dengan masalah bangsa dan negara. Akibatnya, Muhammadiyah tidak bergantung pada donor asing. Muhammadiyah dapat menjadi organisasi yang merdeka dan berdaulat serta bermartabat.

Itulah yang membedakan dengan perkembangan gerakan *civil society* di Indonesia yang sebagian besar bergantung pada donor asing. Secara kelembagaan, posisi Muhammadiyah dalam kepengurusan 5 tahun terakhir masih didominasi pandangan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung dalam kelembagaan politik negara.

Hal itu menyebabkan perdebatan internal, terutama dari para aktivis atau pengurus Muhammadiyah yang ingin terjun langsung dalam kehidupan politik. Muhammadiyah membutuhkan kode etik yang kuat demi mengatur para aktivis/aktor Muhammadiyah untuk mengimplementasikan cita-cita Ahmad Dahlan dalam bernegara dan berbangsa. Bukankah peran politik Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) sebagai Anggota BPUPKI dan PPKI sangat besar dalam perumusan Pembukaan UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan?

Di era reformasi, posisi Muhammadiyah sejak Pilpres 2004, 2009, dan 2014, dalam rekrutmen jabatan politik baik di legislatif maupun eksekutif, menurun. Itu mungkin disebabkan Muhammadiyah terlalu kritis dan tak bisa *sami'na waatho'na* berhadapan dengan penguasa, atau mungkin pula disebabkan ketidakmengertian penguasa terhadap peran Muhammadiyah dalam membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, rezim penguasa harus dapat membangun komunikasi politik yang lebih baik agar dapat mengoptimalkan kontribusi lembaga dan para aktor Muhammadiyah

di ranah politik. Jihad konstitusi Terminologi jihad konstitusi sering dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Hal itu merujuk kepada sikap kritis Muhammadiyah dalam menyikapi berbagai UU yang dianggap melanggar konstitusi negara. Salah satu yang telah dapat dimenangi Muhammadiyah ialah UU tentang Air.

Muhammadiyah sedang berjihad dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa. Jihad konstitusi juga dapat diartikan secara luas seperti mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dalam rangka menyejahterakan rakyat melalui berbagai kegiatan amal usaha dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia, seperti kasus Moro di Filipina.

Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah kali ini di Makassar menjadi sangat penting dalam pandangan ilmuwan politik, yaitu untuk kembali memilih Ketua PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tidak ada petahana.

Muhammadiyah perlu mengubah model pemilihannya, dari 39 calon kemudian dipilih 13 orang, yang masuk di tim formatur untuk memilih ketua, sepertinya perlu diubah. Pertama, organisasi Muhammadiyah sangatlah besar, tim 39 dapat masuk semua dalam formatur tersebut. Kedua, memerhatikan kuota 30% para aktivis Aisyiyah dalam keanggotaan 39 orang tersebut. Dengan demikian, pesan KH Ahmad Dahlan dalam praktik pemilihan ketua PP Muhammadiyah secara demokratis tersebut menjadi kontekstual. *Wallahua'lam.*

Media Indonesia, 4 Agustus 2015. Penulis adalah Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan dosen pada Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Cita Muhammadiyah tentang "Negara Utama"

SYAMSUL HIDAYAT

Salah satu topik diskusi hangat pada Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar, awal Agustus 2015 ini adalah kajian tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wal-Syahadah*. Makna harfiahnya: negara kesepakatan dan kesaksian (pembuktian). Begitu pentingnya tema ini sehingga diangkat dalam sidang komisi khusus, yaitu Komisi II tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa al-Sayahadah*.

Maknanya, eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa dan bermacam-macam agama. Muhammadiyah sebagai bahagian dari umat Islam telah ikut menyepakati lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian terpenting umat Islam terhadap NKRI dan Pancasila merupakan proses panjang terhadap munculnya berbagai pilihan, baik yang diajukan kelompok nasionalis sekular, kelompok nasionalis muslim, kelompok Islamis, serta kelompok non-muslim, yang menginginkan terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Tokoh Muhammadiyah masa lalu, seperti Prof. Kahar Muzakkir, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh yang

tidak bisa dilupakan peran dan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Utamanya, Ki Bagus yang merupakan kunci terakhir lahirnya kesepakatan akan Pancasila sebagai Dasar Negara RI, yakni dengan rumusan sila I Pancasila yang kita kenal saat ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa "Yang Maha Esa" yang di usulkan oleh Ki Bagus, sebagai pengganti dari tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada saat mengusulkan frasa tersebut Ki Bagus menegaskan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa bermakna tauhid (*tauhidullah*) bagi umat Islam.

Dengan prinsip ini, Muhammadiyah akan menjaga kesepakatan itu selama kesepakatan itu tetap memberi kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam, khususnya di Indonesia. Artinya *Darul Ahdi*, negara kesepakatan ini juga bermakna Darussalam, Negara Kedamaian antara umat Islam dan umat nonmuslim, serta negara yang memberikan kedamaian, keleluasaan dan jaminan bagi tegaknya keyakinan tauhidullah dan pengamalan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Sedangkan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syahadah* adalah Negara kesaksian dan pembuktian bahwa umat Islam harus berperan aktif memberi makna terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang memang antara keduanya tidak ada pertentangan. Penguatan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam merupakan konsekuensi logis dari lahir kesepakatan dan konsensus nasional terlebih-lebih karena amanat Ki Bagus yang menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam.

Kesaksian dan pembuktian yang dilakukan Muhammadiyah di antaranya melalui upaya terhadap penguatan konsep dalam tafsir dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunah, misalnya penguatan konsep tauhidullah, baik tauhid *rububiyyah*, tauhid *asma wa sifat* dan tauhid *uluhiyah*, penerapan syariat Islam, dan toleransi antarumat beragama dalam penjabaran dan pengalaman sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Penguatan konsep akhlak dan keadaban dalam penjabaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab, penguatan konsep ukhuwah dan

kesatuan umat Islam dan persaudaraan insaniyah sebagai pengayaan atas Sila Persatuan Indonesia. Penerapan sistem dan etika politik Islami, pembudayaan musyawarah yang bermartabat, ketaatan kepada pemimpin, serta sikap amanah dari para pemimpin bangsa sebagai penjabaran atas sila ke empat. Juga pengkajian konsep-konsep Al-Quran dan Sunah tentang keadilan sosial, baik dalam dimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dalam wilayah politik .

Dengan penjabaran ini, Muhammadiyah mengenalkan pandangan Islam yang *rahmatan lil alamin* (universal) dan sejalan dengan nilai-nilai bahkan sila-sila dalam Pancasila, sehingga komponen bangsa Indonesia dari kalangan non-Muslim benar-benar me mahami bahwa ajaran Islam dan keberadaan umat Islam tidak mengancam keberadaan mereka, bahkan sebaliknya sangat menghormati keberadaan nonmuslim di lingkungan Muslimin. Diharapkan, pudar kecurigaan antar elemen dan komponen bangsa ini.

Di samping itu, kesaksian dan pembuktian yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dalam bentuk dakwah Islamiyah yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas penguatan akidah dan keimanan umat Islam, penguatan pemahaman dan pengamalan akhlak dan syariat Islam dalam kehidupan muslim, serta dakwah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan seluruh umat manusia. Sebagai contoh, lembaga pendidikan Muhammadiyah, di samping dipersiapkan untuk melahirkan kader-kader penerus Muhammadiyah, juga untuk mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu lembaga pendidikan Muhammadiyah juga membuka peluang dan kesempatan bagi umat non-Muslim untuk menikmati pendidikan di Muhammadiyah. Dan contoh konkret dari ini adalah sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia timur mayoritas peserta didiknya adalah nonmuslim. Langkah Muhammadiyah yang membuka diri untuk komunitas non-Muslim dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah pencerahan dan dakwah pemberdayaan masyarakat.

Muhammadiyah tidak memaksakan pengislaman terhadap mereka, dan mereka pun tidak merasa takut dan khawatir akan diislamkan. Namun

demikian, hidayah Allah tidak dapat ditolak, di antara mereka ada yang dengan suka rela menyatakan ingin disyahadahkan sebagai muslim.

Kesaksian dan pembuktian yang dilakukan Muhammadiyah juga dalam bentuk jihad konstitusi, yakni dengan melakukan koreksi dan *judisial review* terhadap berbagai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi Undang-undang Dasar 1945, yang sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam dan serta melukai rasa keadilan dan menambah penderitaan rakyat. Muhammadiyah didampingi elemen umat dan bangsa lainnya melakukan *yudisial review* atas undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Semua langkah di atas, baik pada tatanan penguatan konsep maupun langkah operasional dengan sistem modern Muhammadiyah menginginkan Indonesia sebagai Indonesia Berkemajuan. Indonesia Berkemajuan diturunkan pandangan Muhammadiyah bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah.

Adapun dakwah dan tajdid bagi Mu hammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang jaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan satu-satunya agama Allah yang haq, yang juga satusatunya agama yang berkemajuan (*din alhadharah*). Kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan, dan umat yang memeluknya menjadi *khaira ummah* (umat terbaik) yang terlahir untuk manusia dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, beriman kepada Allah, serta *ummatan wasathan* (umat pertengahan) yang menjadi saksi (pemimpin) bagi segenap umat manusia.

Dalam berbagai matan keputusan resmi organisasi, seperti dalam (1) Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, (2) Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah, (3) Kepribadian Muhammadiyah, (4) Khittah Perjuangan Muhammadiyah, (5) Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah, *jam'iyyah Islamiyyah* ini memiliki konsep negara ideal

dalam ungkapan sederhana yaitu "masyarakat utama" yang digambarkan sebagai masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu.

Kalau dalam konteks Negara Pancasila berarti pendalaman aqidah tauhid merupakan syarat mutlak untuk memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ini harus menjiwai seluruh sila dalam Pancasila. Artinya negara memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas keagamaan rakyatnya. Negara juga harus kuat untuk menangkal berbagai ideologi dan pemikiran yang bertentangan Pancasila dan ajaran agama yang diakui di Indonesia, seperti komunisme dan ateisme. Negara memberikan perlindungan terhadap umat beragama dari berbagai aliran sesat, dengan menjadikan paham *mainstream* umat beragama sebagai patokan. Misalnya untuk umat Islam melalui MUI, untuk umat Nasrani melalui PGI/KWI, dan sebagainya.

Sehingga ajaran agama benar-benar berperan sebagai ruh kemajuan bangsa, dan terhindar dari konflik horizontal yang mengancam keutuhan NKRI, karena banyaknya aliran sesat yang memecah belah intern dan antar umat beragama.

Di samping itu, ditemukan pula ungkapan penggambaran Negara Ideal menurut Muhammadiyah adalah ungkapan Qurani: "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yang bermakna bahwa negara yang maju dan tata kelola negara modern, dapat menjamin tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dengan senantiasa bersendikan aturan-aturan yang sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Negara ideal bagi Muhammadiyah sangat tergantung pada kualitas umat Islam dalam memahami, menghayati dan menjabar nilai-nilai ajaran Islam, serta mendakwahkannya kepada seluruh masyarakat, sehingga Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat dan barakah bagi umat manusia. Artinya umat Islam yang benar-benar memiliki komitmen terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang harus memiliki peran nyata untuk menentukan dan

mewarnai perjalanan negara, sehingga negara itu benar-benar dalam ridha dan ampunan Allah.

Untuk itulah, Muhammadiyah tetap setia dengan cita-citanya sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasarnya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah negara ideal. Itulah negara berkeadilan. Itulah negara berkemajuan (berperadaban). Cita-cita mulia itu harus diwujudkan dengan keteladanan dan kerja keras seluruh warga Muhammadiyah, dan para pimpinan khususnya. *Wallahu a'lam*.

Republika, 20 Agustus 2015. Penulis adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 2010-2015

Genealogi Jihad Konstitusi

SYAIFUL BAKHRI

MUHAMMADIYAH merupakan organisasi Islam besar di Indonesia yang punya sejarah panjang dalam kehidupan sosial dan politik nasional. Dalam sejarahnya yang sudah lebih dari satu abad di bumi Nusantara, Muhammadiyah sedikit banyak berinteraksi dengan institusi politik formal, baik itu partai politik, pemerintah, parlemen, dan institusi peradilan.

Dalam kaitan berinteraksi dengan institusi negara, Saud El Hujaj membagi dalam tiga model. Pertama, Muhammadiyah tidak ikut campur perpolitikan negara seperti pada masa Hindia Belanda. Muhammadiyah bukan agen negara dan bukan musuh negara. Kedua, Muhammadiyah diposisikan sebagai subordinat kekuasaan yang memaksa sebagaimana pada masa pemerintahan Jepang. Namun, hal itu membawa kepada keselamatan organisasi dan tetap berlangsungnya amal usaha Muhammadiyah dalam *amar makruf nahi munkar*. Ketiga, Muhammadiyah masuk ke dalam wacana negara dan partai politik yang bisa dilihat dari keterlibatan tokoh dan artikulasi kepentingannya melalui partai politik.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik tampak nyata. Meskipun pada Muktamar ke-38 Muhammadiyah yang digelar di Makassar pada 1971 ditegaskan Muhammadiyah tak terlibat politik praktis, perilaku Muhammadiyah melalui tokohnya bersifat akomodatif dalam mengartikulasikan kepentingan melalui partai politik, misalkan pembentukan

Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Partai Masjumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kendati sempat mengambil jarak, sejak masa kepemimpinan Amien Rais, Muhammadiyah kembali tampil dan memainkan peranan penting sebagai kekuatan sosial untuk mengoreksi pemerintah. Upaya ini dilanjutkan Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsuddin. Pada masa Din Syamsuddin, upaya korektif dilakukan melalui jalur formal dengan mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Langkah Muhammadiyah menguji UU yang dipandang bertentangan dengan Islam dan merugikan rakyat kecil menjadikan Muhammadiyah bukan saja organisasi gerakan sosial, tapi juga gerakan pembaruan hukum. Hal ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang mendorong perubahan kebijakan sekaligus kelanjutan kegiatan politik tak langsung (*high politics*) yang diwariskan Amien Rais.

Muhammadiyah tampil berbeda dalam diskursus mengenai konstitusi, khususnya hubungan antara Islam dan negara. Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, diskursus pemikiran ideologis demikian tak begitu mendapat perhatian besar. Sebab, Muhammadiyah sejak awal bersifat kultural dalam membela kaum lemah, seperti mengembangkan pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan. Gerakan kultural itu sedari awal oleh KH Ahmad Dahlan disebut sebagai gerakan Islam nonpolitik, tetapi tidak antipolitik (Syaifullah 2015).

Keterlibatan pertama Muhammadiyah dalam diskursus ketatanegaraan terjadi pada masa perumusan Piagam Jakarta. Salah satu anggota Panitia 9 yang merumuskan adalah kader Muhammadiyah, Prof KH Abdoel Kahar Moezakir. Namun, keterlibatan Prof Abdoel Kahar Moezakir di Panitia 9 tidak dapat disimpulkan sebagai sikap politik Muhammadiyah.

Sejak saat itu, pandangan Muhammadiyah terhadap hubungan Islam dan negara lebih bersifat substansial daripada formal. Menurut Masdar F Mas'udi, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memang tidak ditulis dengan bahasa agama, tetapi nilai-nilainya sejalan dengan ajaran Islam.

Agenda utama umat Islam Indonesia bukanlah memperjuangkan formalisasi negara Islam, tapi merealisasikan nilai dan aturan konstitusi yang Islami itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sungguh-sungguh. Ajaran Islam yang dimaksud bukan bersifat detail (*juz'iyat* dan *tafshiliyat*), tapi fundamental (*muhkamat*) dan mendasar (*ushuliyat*) sebagai garis pemisah antara yang sejati (*haqq*) dari yang palsu (*bathil*), antara yang terpuji (*mahmudah*) dari yang tercela (*madzmumah*). Pada titik inilah kita melihat bertemunya pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hubungan antara Islam dan negara, yaitu dalam pandangan melihat similaritas antara ajaran Islam dan norma konstitusi.

Hal itu sejalan dengan pandangan Sukarno mengenai negara Islam. Menurutnya, Islam adalah api yang menyinari kehidupan, bukan abunya. Sukarno menghendaki ajaran Islam yang menjadi penerang dan yang membuat semangat berkobar-kobar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, Hatta mengambil perumpamaan lain. Bagi Hatta, "Negara Islam" menempatkan Islam sebagai garam kehidupan, tidak terlihat mata, tetapi terasa maknanya; bukan Islam gincu, yang mencolok mata, tapi tidak ada rasa apa-apa.

Muhammadiyah bukanlah partai politik, tapi organisasi yang terkadang dikualifikasikan sebagai organisasi masyarakat, organisasi agama, organisasi sosial, maupun organisasi pendidikan. Syaifullah mengategorikan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang pada umumnya menggunakan empat saluran dalam memperjuangkan aspirasinya, yaitu demonstrasi dan kekerasan, hubungan pribadi, perwakilan langsung (formal-institusional), dan saluran formal instusi lain seperti media massa.

Dalam realitanya, Muhammadiyah menggunakan saluran hubungan pribadi melalui lobi, perwakilan langsung atau institusi formal seperti judicial review UU kepada MK, dan penggunaan media massa. Di antara itu, yang paling dominan penggunaan saluran hubungan pribadi melalui keterampilan lobi dengan pemilik kewenangan. Beberapa tahun terakhir, strategi menggunakan institusi formal melalui judicial review UU yang bermasalah diajukan kepada MK. Din Syamsuddin selaku ketua umum PP Muhammadiyah saat itu menyebut langkah ini sebagai "Jihad Konstitusi".

Jihad berasal dari kata juhada-yujahidu yang secara harfiah berarti sungguh-sungguh atau "berusaha secara sungguh-sungguh mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup yang bersangkutan". (QS al-Ankabut ayat [29]: 69). Lalu bagaimana istilah jihad yang selalu dikaitkan dengan tindakan berlandaskan hukum Islam disandingkan dengan upaya pembelaan konstitusi? Jihad konstitusi atas dasar pandangan bahwa nilai Islam telah tecermin di dalam konstitusi. Penegakan konstitusi secara tidak langsung adalah penegakan ajaran Islam.

Selain itu juga semangat pembelaan terhadap warga yang lemah, bahwa negara sebagai pelindung dan penegak keadilan harus menempatkan warga yang lemah sebagai prioritas agendanya sehingga keadilan (keseimbangan dan kesetaraan) bisa diwujudkan. Mendorong perubahan melalui jalur peradilan konstitusi ini memiliki posisi strategis bagi Muhammadiyah, mengingat perwakilan Muhammadiyah di parlemen yang kurang signifikan. Penelitian Syaifullah menunjukan, rata-rata kader Muhammadiyah di pemerintahan maupun parlemen (DPR dan DPD) berkisar 5-6 persen dari jabatan di DPR, DPD, dan kementerian negara.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan realitas bahwa Muhammadiyah memang tidak representatif kalau harus berjuang di dunia politik. Muhammadiyah juga termasuk "puritan" berpolitik, cenderung lugu dan lugas, tidak mampu "luwes" dan "zigzag" sehingga berpengaruh pada kemampuannya mengalokasikan sumber daya kadernya. Dalam situasi itu, langkah judicial review UU yang merugikan kepentingan rakyat kecil merupakan langkah strategis bagi gerakan Muhammadiyah.

***Republika, Selasa, 27 Oktober 2015.* Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta**

4
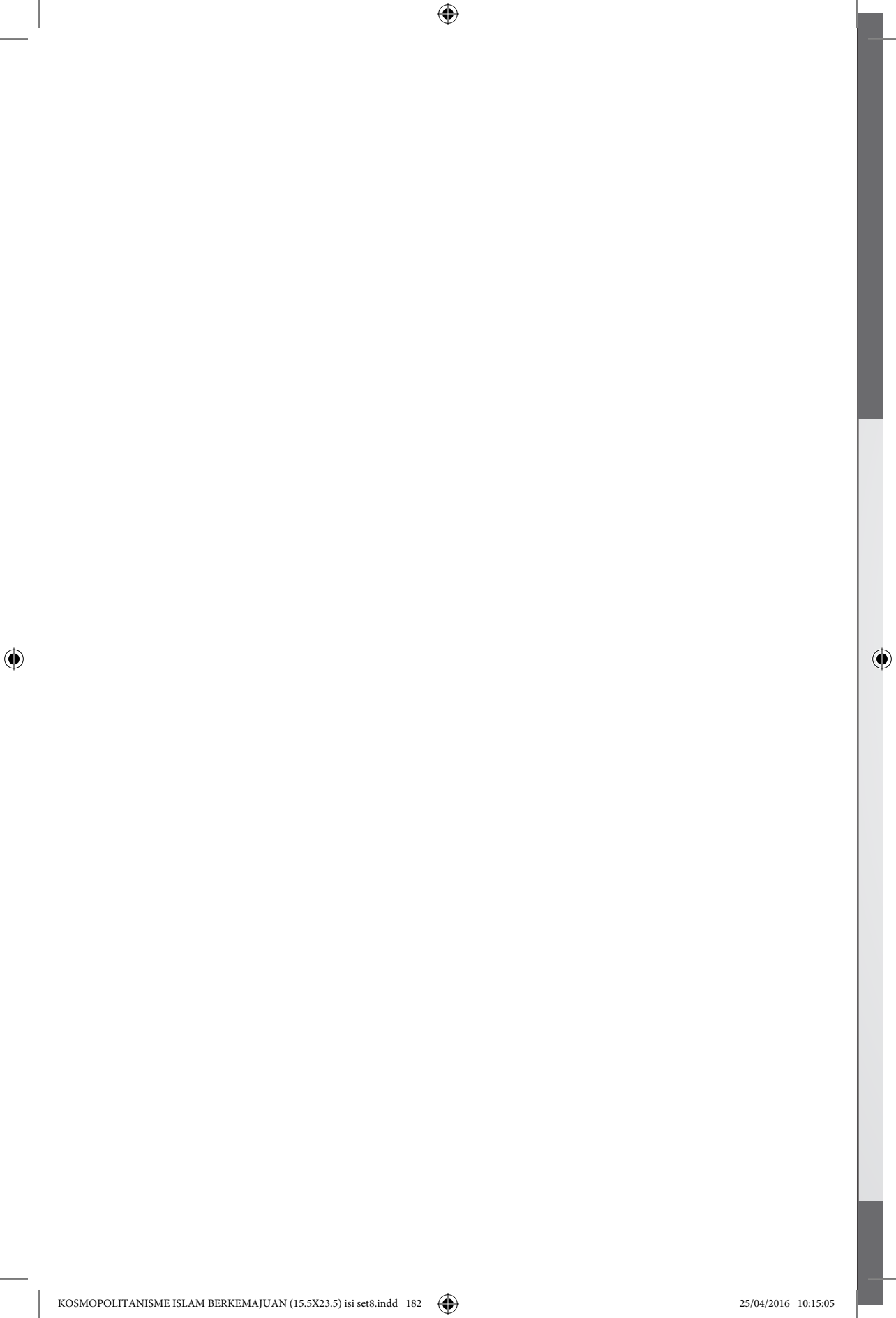
KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH

Kepemimpinan Muhammadiyah

FAJAR RIZA UL HAQ

Din Syamsuddin akan mengakhiri periode kedua kepemimpinannya di Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang diselenggarakan 3-7 Agustus di Makassar. Din kali pertama terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-45 di Malang tahun 2005 dengan perolehan suara terbanyak di formatur 13.

Organisasi ini tidak mengenal pemilihan ketua umum, tetapi pemilihan 13 formatur dan pimpinan puncaknya ditentukan berdasarkan musyawarah para formatur terpilih. Muktamar ke-46 Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta menjadi saksi tokoh kelahiran Sumbawa ini terpilih untuk kedua kalinya menakhodai organisasi Muslim modernis ini.

Kosmopolitan

Pasca Reformasi, Din merupakan satu-satunya ketua umum yang memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun. Sebagai perbandingan, almarhum AR Fachruddin tercatat sebagai sosok yang paling lama memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun sejak 1968 hingga 1990. Amien Rais yang terpilih pada 1995 di Muktamar Aceh tidak sempat menyelesaikan masa baktinya mengingat pilihan ijtihad politiknya mendirikan Partai Amanat Nasional pada 1998.

Teman karibnya, Ahmad Syafii Maarif, melanjutkan periode yang tersisa hingga pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di

Jakarta. Syafii Maarif pun terpilih menjadi ketua umum di tengah transisi demokratisasi dan gejolak sosial-politik yang menguji konsistensi peran kebangsaan dan netralitas Muhammadiyah. Masa-masa sulit itu berhasil dilalui tanpa terperosok pada godaan pragmatisme politik.

Organisasi Muhammadiyah akan sangat beruntung karena perjalanannya pasca Muktamar Makassar akan disaksikan oleh tiga mantan ketua umumnya. Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin merupakan aset persyarikatan yang sangat berharga dengan kekhasan masing-masing personalnya yang membuatnya dicintai, dihormati, dibanggakan oleh semua warga Muhammadiyah.

Ketiga tokoh tersebut akan berbicara bersama pada satu sesi khusus dalam agenda Muktamar. Ini akan menjadi momen penting, semua warga Muhammadiyah bahkan masyarakat umum akan mendengar lontaran pemikiran dari ketiga tokoh bangsa tersebut untuk kemajuan Muhammadiyah dan bangsa. Ini karena Islam Berkemajuan yang menjadi proposal Muhammadiyah memperlakukan Islam dalam kerangka nilai-nilai keadaban publik, bertaut erat dengan kepentingan masyarakat. Gagasan Islam Berkemajuan sebagai formula jawaban organisasi ini atas kompleksitas persoalan kebangsaan dan kemanusiaan hari ini harus dilembagakan dan dibudayakan sehingga menjadi etos, tidak berhenti sebatas logos.

Periode kepemimpinan Muhammadiyah dalam kurun 17 tahun reformasi mencerminkan kepemimpinan dari generasi produk penyerbukan silang antarbudaya—meminjam istilah yang dipopulerkan Eddie Lembong-yang sebenarnya menjadi tonggak kesadaran Muhammadiyah pada awal abad ke-20. Profil dan latar belakang kesarjanaan Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din merepresentasikan generasi Muhammadiyah kosmopolitan di mana "Timur" dan "Barat" bertemu, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari biografi sosio-intelektualnya. Adanya perbedaan karakter dan langgam kepemimpinan ketiganya merupakan sisi lain dari ketidaktunggalan ekspresi kosmopolitanisme itu sendiri.

Sejarawan UGM, Bambang Purwanto (2015), menyebut Muhammadiyah sebagai contoh produk persilangan budaya di dalam keber-

agaman yang melibatkan Islam, Jawa, Minangkabau, dan modernitas Barat. Menurutnya, proses pembentukan kesadaran dan identitas Muhammadiyah ini berlangsung dalam proses modernisasi masyarakat Indonesia abad ke-20. Muhammadiyah generasi awal merupakan produk modernisasi Islam dengan denyut kosmopolitanisme karena tumbuh dalam spektrum keragaman "bangsa-bangsa" yang menjadi cikal bakal Indonesia yang majemuk di kemudian hari. Di sinilah kosmopolitanisme, menurut Vertovec dan Cohen, termanifestasi dalam perilaku yang terbuka dan kompetensi yang unggul dalam interaksi lintas budaya.

Pasca Din

Muhammadiyah pasca Din akan menapaki jalan yang tidak mudah dengan cuaca kebangsaan yang tidak selalu bersahabat. Meminjam bahasa Syafii Maarif yang dipetiknya dari puisi Muhamad Iqbal, karakter kepemimpinan Muhammadiyah haruslah seperti rajawali, bukan burung pipit. Percaya diri, trengginas, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Muhammadiyah dituntut berperan lebih atraktif dan kritis ketika kekuasaan dan parpol-parpol terus-menerus mencederai nilai-nilai keadaban publik.

Tak diragukan lagi, ketiga figur di atas telah membesarkan tenda bangsa Muhammadiyah dalam semangat kosmopolitanisme Islam modernis. Keberhasilan Muhammadiyah menyiasati ketegangan antara dimensi pemurnian dalam ranah tauhid dan pembaruan dalam ranah sosial-kebudayaan merupakan pembeda dirinya dengan gerakan-gerakan pemurnian lainnya. Organisasi yang kini berusia 103 tahun ini membutuhkan pelanjut kepemimpinan kolektif yang tidak hanya mampu merawat kultur keterbukaan, akan juga memiliki kepekaan inovasi dalam mentransformasikan prinsip-prinsip dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Model Muhammadiyah kosmopolitan memaknai cakupan dan ruang aktualisasi dakwah lebih kontekstual. Model kepemimpinan ini tidak akan menyeret Muhammadiyah memasuki gang-gang sempit, bahkan jalan buntu. Sejak awal, Muhammadiyah sudah menggariskan bahwa berdakwah haruslah memajukan dan menggembirakan, seperti terbaca dalam anggaran

dasar tahun 1914. Inti Islam sejati menurut Ahmad Dahlan, seperti ditulis Munir Mulkhan dalam Marhaenis Muhammadiyah (2010), adalah akal dan hati suci sehingga perbedaan kelompok dan bangsa tidak menjadi tembok penghalang melakukan solidaritas memerdekakan manusia dari penderitaan.

Sebagai ikhtiar, Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2003 di Makassar menyetujui konsep dakwah kultural. Keputusan organisasi ini menandai adanya reorientasi visi dan strategi dakwah sesuai realitas kemajemukan budaya dan perbedaan identitas sosial masyarakat. Sebelum itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah mengeluarkan Tafsir Tematik Al-Quran tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama tahun 2000.

Menilik kiprah dakwah Muhammadiyah sepanjang era Reformasi, kepemimpinan baru pasca Muktamar Makassar dituntut memiliki mentalitas, kapasitas, dan jejaring pergaulan yang merepresentasikan Muhammadiyah sebagai tenda bangsa. Kepemimpinan Muhammadiyah yang bersifat kolektif tak bisa memungkiri peran sentral seorang ketua umum sebagai pucuk representasi dalam menentukan arah dan langgam organisasi. Kepemimpinan Muhammadiyah pasca Din lebih tepat diisi figur yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang kosmopolitan sehingga tidak terjadi keterputusan visi dan orientasi yang bisa mengakibatkan kemacetan akselerasi gerakan.

Gerbong Muhammadiyah sudah bergerak menuju proses internasionalisasi gerakan meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Memastikan kesinambungan dan keberlanjutan visi dalam proses pergantian kepemimpinan merupakan kunci wajah Muhammadiyah untuk lima tahun mendatang. Tanggung jawab inilah yang kini berada di pundak ribuan peserta Muktamar. Selamat berMuktamar! Semoga melahirkan keputusan-keputusan yang mencerahkan dan memajukan bangsa.

Kompas, 4 Agustus 2015. Penulis adalah Direktur Eksekutif MAARIF Institute

Politik Pemilihan Pimpinan di Muhammadiyah

PRAMONO U TANTHOWI

JAKARTA—PADA hari Sabtu (1/8/2015) lalu telah dilaksanakan proses pemilihan 39 nama calon anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Sidang Tanwir pra-Muktamar, yang hasilnya diumumkan pada hari berikutnya. Dari 39 nama tersebut, akan dipilih sebanyak 13 anggota PP Muhammadiyah oleh peserta Muktamar.

Bagi sebagian orang, proses pemilihan pimpinan di Muhammadiyah ini dianggap rumit. Namun bagi kalangan internal sendiri, sistem ini dianggap lebih mampu membawa nuansa silaturahmi dan musyawarah, bukan nuansa politik. Tulisan singkat ini akan menjelaskan bagaimana seluk beluk sistem pemilihan ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana implikasi politiknya.

---000---

Sebagaimana di organisasi-organisasi bentuk lain, seperti organisasi bisnis, organisasi paguyuban, organisasi politik, atau bahkan organisasi pemerintahan, seorang pemimpin organisasi sosial keagamaan (seperti Muhammadiyah) menempati posisi sangat sentral. Ia bukan sekedar representasi organisasi itu di ruang publik, namun bagaimana corak dan kebijakan organisasi tersebut ke depan akan banyak ditentukan oleh siapa yang memimpin organisasi tersebut.

Karena peran pemimpin organisasi sangat penting, maka aturan-aturan mengenai pemilihan pimpinan organisasi juga menjadi sangat penting. Karena, sebagaimana dalam pemilu, perbedaan sistem dapat mempengaruhi perbedaan hasil. Misalnya dalam Pilkada DKI tahun 2012 yang lalu.

Jika tidak ada aturan mengenai putaran kedua (sehingga siapa pun yang memperoleh suara terbesar pada putaran pertama akan ditetapkan menjadi pemenang), sebagaimana aturan Pilkada serentak saat ini, maka Jokowi tidak akan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga cerita berikutnya bisa akan sangat berbeda.

Atau contoh lain (di organisasi kepemudaan dan parpol) mengenai batas minimal pengusul bagi seorang calon untuk dapat mengikuti pemilihan tahap berikutnya. Tinggi rendah batas pengusulan akan sangat mempengaruhi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena begitu pentingnya aturan pemilihan tersebut, menjadi penting bagi kita untuk memahami dari mana aturan-aturan tersebut muncul. Dua pertanyaan secara khusus membutuhkan uraian jawaban.

Pertama, seberapa sering perubahan sistem pemilihan tersebut terjadi? Dan kapan perubahan itu dilakukan? Kedua, apa kepentingan atau nilai di balik penentuan sistem tersebut? Apakah penentuan tersebut semata-mata dipengaruhi kepentingan partisan jangka pendek, atau apakah ada nilai-nilai lebih luas bagi masyarakat?

Dalam tulisan ini, yang saya maksud dengan politik pemilihan berkaitan dengan banyak aspek: siapa yang berhak mencalonkan, siapa yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berwenang menyelenggarakan pemilihan, bagaimana preferensi seorang pemilih diekspresikan ke dalam surat suara, dan bagaimana perolehan suara dikaitkan dengan keterpilihan seorang pemimpin.

Karena pentingnya sistem (atau tata tertib) pemilihan tersebut, tidak heran jika selalu muncul upaya untuk mengubah aturan-aturan pemilihan dalam setiap kali kongres, Muktamar, atau musyawarah nasional setiap organisasi. Hal itu disebabkan karena tata tertib pemilihan menjadi instrumen yang paling dapat dimanipulasi, dan bisa didesain untuk mencapai

tujuan-tujuan dan hasil-hasil tertentu. Karenanya, jika ada pihak yang ingin memenangkan calonnya dalam kongres, Muktamar, atau munas, maka tata tertib pemilihan menjadi instrumen yang paling mungkin dan paling efektif untuk direkayasa.

---000---

Dalam organisasi Muhammadiyah, proses pemilihan di tingkat pusat berlangsung rumit dan lama. Proses ini dimulai dengan pembahasan tata tertib pemilihan (dan tata tertib Muktamar) melalui Sidang Tanwir (lembaga permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar) lebih kurang satu tahun sebelumnya. Untuk Muktamar ke-47 ini, tata tertib pemilihan (dan tata tertib Muktamar) telah disahkan sejak Tanwir di Samarinda pada akhir Mei 2014.

Berikutnya mengenai panitia pemilihan (Panlih), yang berwenang menangani proses pencalonan, verifikasi administrasi, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Panitia pemilihan juga ditetapkan melalui Sidang Tanwir di Samarinda tersebut. Panlih terdiri dari wakil-wakil pimpinan wilayah, wakil organisasi otonom (ortom), dan wakil PP Muhammadiyah. Dan bagi sama sekali Panlih tidak ada larangan untuk dicalonkan.

Selanjutnya, terkait dengan sistem pemilihan secara keseluruhan meliputi lima tahap. Pertama, adalah tahap nominasi atau pengusulan calon. Tahap ini dilakukan oleh setiap anggota PP (13 orang dan pengurus PP tambahan), Anggota Tanwir (4 orang dari setiap pimpinan wilayah se-Indonesia), dan 2 orang masing-masing pimpinan ortom. Sekitar 165 orang ini masing-masing mengusulkan 13 nama calon. Proses pencalonan ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dimulai sejak akhir tahun lalu.

Pada Muktamar kali ini, tersaring 108 nama calon. Selain syarat minimal 3 usulan, calon-calon tersebut harus memenuhi syarat minimal keanggotaan selama enam tahun, pernah menjadi pimpinan di ortom tingkat pusat atau majelis/lembaga di tingkat pusat, atau pimpinan di tingkat wilayah atau daerah.

Pada tahap kedua, Panlih menyebarkan formulir kesediaan kepada 108 calon tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 96 formulir yang dikembalikan. Dari 96 formulir yang dikembalikan, sebanyak 83 menyatakan bersedia, dan 13 calon menyatakan tidak bersedia. Dari 83 yang menyatakan bersedia tersebut, satu calon meninggal dunia, sehingga calon pimpinan Muhammadiyah tahun ini tinggal 82 nama.

Pada tahap ketiga, 82 nama calon tersebut dipilih dalam Sidang Tanwir pra-Muktamar, yang dilaksanakan 2 hari sebelum pelaksanaan Muktamar. Dalam Sidang Tanwir ini, 82 nama tersebut dikerucutkan menjadi 39 nama. Pemilihan dilakukan oleh Anggota Tanwir (4 orang dari setiap pimpinan wilayah se-Indonesia), 1 orang wakil dari tiap Pimpinan Wilayah Aisyiyah se-Indonesia, 2 orang pimpinan masing-masing ortom, dan setiap anggota PP (13 orang dan pengurus tambahan). Setiap pemilih berhak memilih 39 nama di antara 82 calon tersebut. 39 nama yang terpilih dalam Sidang Tanwir tersebut lalu diajukan sebagai calon di Muktamar.

Pada tahap keempat, pemilihan di Muktamar akan mengerucutkan 39 nama menjadi 13 nama anggota PP Muhammadiyah. Pemilihan dilakukan oleh seluruh peserta Muktamar, yang terdiri dari pengurus PP Muhammadiyah, Pengurus PW Muhammadiyah, pengurus PD Muhammadiyah, dan ortom, yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 2600 orang. Setiap pemilih, yang dibuktikan dengan surat mandat, berhak memilih 13 nama. Dan 13 nama yang memperoleh suara terbesar itulah yang nantinya disebut anggota PP Muhammadiyah.

Pada tahap kelima, 13 anggota PP Muhammadiyah tersebut lantas melakukan musyawarah tertutup untuk menentukan ketua umum dan sekretaris umum. Biasanya, yang memperoleh suara terbanyak secara konvensional ditetapkan sebagai ketua umum. Hal ini telah dijalankan saat terpilihnya Din Syamsuddin, Syafii Maarif, maupun Amien Rais.

Sistem pemilihan yang rumit dan panjang ini telah lama diadopsi Muhammadiyah. Tepatnya sejak 1990. Sebelumnya, Muhammadiyah menggunakan sistem formatur 9 (sejak 1950). Sebelum 1950, Muhammadiyah menggunakan sistem pemilihan langsung.

---000---

Dari uraian di atas, terlihat beberapa perbedaan sistem pemilihan di Muhammadiyah dengan organisasi politik maupun ormas lain.

Pertama, dalam hal pembahasan tata tertib pemilihan. Di Muhammadiyah, pembahasan dan penetapan tata tertib pemilihan dilakukan sekitar satu tahun sebelum Muktamar. Hal ini berbeda dengan parpol atau ormas lain, di mana pembahasan tata tertib pemilihan dilakukan dalam sidang komisi di forum kongres, Muktamar, atau munas. Hal itu tidak jarang menimbulkan politisasi yang kadang sangat berlebihan, terutama karena pembahasan tata tertib pemilihan telah diarahkan untuk memenangkan atau menggagalkan salah satu calon.

Kedua, dalam hal penentuan Panlih. Penentuan Panlih di Muhammadiyah dapat dikatakan jauh dari nuansa politisasi. Di Kongres, munas, atau Muktamar parpol atau ormas lain, penentuan panlih biasanya merupakan pemanasan untuk melihat peluang kemenangan atau kekalahan salah calon, yang akan dilihat dari paket siapa yang terpilih sebagai panlih. Hal ini karena panlih juga dipilih oleh peserta (biasanya) berdasarkan paket. Sementara di Muhammadiyah, panlih ditetapkan pada Sidang Tanwir tahun sebelumnya, dan biasanya berdasarkan keterwakilan, yang penetapannya berdasarkan musyawarah mufakat.

Ketiga, dalam hal pencalonan. Di parpol atau ormas lain inisiatif pencalonan biasanya berasal dari kandidat, yang lalu diikuti dengan usaha mengumpulkan dukungan menjelang kongres, munas, atau Muktamar. Sementara di Muhammadiyah, pencalonan berlangsung secara *bottom up*, dan sebagian besar dilakukan dari tingkat provinsi, sebelum jelas seorang tokoh bersedia dicalonkan kembali atau tidak.

Keempat, dalam hal bagaimana pemilih mengekspresikan preferensinya. Di Muhammadiyah, setiap pemilih menggunakan hak suaranya untuk memilih sejumlah orang: 39 nama dalam Tanwir, dan 13 nama dalam Muktamar. Peserta Muktamar tidak memilih ketua umum secara langsung. Sementara di parpol atau ormas lain, pemilihan ketum biasanya dilakukan

secara langsung oleh peserta. Sementara untuk memilih formatur, peserta baru diberi keleluasaan untuk memilih sejumlah nama tertentu.

---000---

Uniknya sistem pemilihan dalam Muhammadiyah ini membawa beberapa kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan yang sering diatribusikan pada sistem ini adalah:

(1) kadar demokratisnya sering kali dipertanyakan, karena pemilihan ketum hanya dilakukan oleh 13 orang anggota PP Muhammadiyah saja, tanpa melibatkan seluruh peserta;

(2) pemilih yang diharuskan memilih sejumlah nama (39 dan 13) cenderung mempertahankan *status quo*, karena sulit memunculkan nama-nama baru. Dalam istilah beberapa pihak, pemilihan di Muktamar Muhammadiyah ibarat hanya memperbarui SIM bagi sebagian besar pengurus, karena perubahan biasanya hanya terjadi pada beberapa orang saja.

Namun demikian, sistem pemilihan demikian juga membawa beberapa keuntungan, terutama dari sisi politik. Pertama, sistem pemilihan di Muhammadiyah dapat mencegah kemunculan calon yang tidak punya *track record* di organisasi ini. Dengan sistem pencalonan yang bersifat *bottom up* dan persyaratan yang ketat (terutama pengalaman menjadi pengurus satu periode sebelumnya atau aktif di ortom), akan sulit bagi tokoh manapun yang tidak dikenal secara baik oleh pengurus di tingkat kab/kota dan provinsi untuk diajukan sebagai calon.

Kedua, sistem pemilihan di Muhammadiyah juga membuat Muhammadiyah relatif mampu mengeliminasi munculnya intervensi dari kekuatan politik eksternal. Sebagai sebuah Ormas besar yang memiliki bobot politik sangat besar, organisasi ini tentu menarik minat dari kekuatan-kekuatan politik eksternal untuk ikut "bermain". Terutama mendukung calon yang dianggap "ramah" dengan parpol tersebut, dan/atau tidak mendukung calon yang dianggap "tidak ramah".

Namun dalam sistem pemilihan di Muhammadiyah ini, pemilih tidak dihadapkan pada pilihan antara tokoh A, tokoh B, atau tokoh C. Dengan

memilih 13 nama, muncul kecenderungan bagi pemilih untuk akomodatif terhadap sejumlah nama yang selama ini telah dikenal dengan baik. Karenanya sulit dibayangkan seorang pemilih hanya memilih beberapa nama yang diarahkan oleh parpol tertentu, dengan mengabaikan beberapa nama lain yang selama ini telah lama menjadi pengurus.

Ketiga, sistem pemilihan di Muhammadiyah juga dapat menjaga kontinuitas kepengurusan. Di Muhammadiyah tidak dikenal terjadinya pergantian sepenuhnya sebuah rezim oleh rezim berikutnya, sebagaimana di parpol atau ormas lain. Sebaliknya, dalam sistem ini terjadi kecenderungan bahwa yang akan terpilih dalam 13 besar adalah nama-nama yang telah ada di kepengurusan sebelumnya, dengan pergantian nama tidak lebih dari setengahnya.

Dengan seluruh uraian di atas, maka Muktamar-Muktamar di Muhammadiyah (sebagaimana dapat dilihat saat ini) selalu lebih kecil nuansa politiknya (*less-politicized*), karena pemilih tidak akan terbelah dalam blok-blok (mendukung paket A atau Paket B) secara eksklusif.

Itu pun jika dikatakan bahwa blok itu ada. Bukankah memilih pimpinan Ormas keagamaan seharusnya tidak didasarkan pada banyak-banyakan dukungan, sebagaimana parpol, tetapi lebih karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan ketinggian akhlak? Wallahu a'lam.

---

detik.com, 04 Agustus 2015. Penulis adalah Sekretaris Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, memperoleh gelar MA bidang Ilmu Politik dari University of Hawaii at Manoa.

Dinamika Politik Elit Muhammadiyah

DAVID EFENDI

"...silakan ada perbedaan, ada fragmentasi politik, tapi perlu bersatu dalam isu-isu strategis kebangsaan."
—Din Syamsuddin, 2008

"...warga persyarikatan Muhammadiyah agar berpolitik secara dewasa, tidak sektarian, tetapi inklusif dan beradab sehingga dalam 10-20 tahun mendatang warga Muhammadiyah tidak menjadi politisi rabun ayam dan berpikiran cetek."
—Zuly Qodir, 24 April 2014

DALAM perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan politik. Bahkan pernah, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa pendukung partai Masyumi (1955). Hal ini wajar karena Muhammadiyah 'memberikan kebebasan berpolitik anggota-anggotanya termasuk juga para elit pimpinannya. Hal ini semakin mengental kembali setelah zaman baru demokratisasi dan desentralisasi pasca tumbangnya kekuasaan orde baru 1998. Keterlibatan elit Muhammadiyah dan para pengurusnya serta anggotanya di semua level ini dalam

rangka merespons perubahan sistem politik yaitu dari model pemilu tertutup dan tidak langsung menjadi kompetisi terbuka ala demokrasi liberal (*direct democracy*).

Sampai pada pemilu presiden 2014 yang sangat kompetitif dan keras, sesungguhnya dinamika politik yang ada dalam internal Muhammadiyah menghadapi perpolitikan sebanding dengan dinamika Muhammadiyah mengelola amal usaha Muhammadiyah yang semakin besar dan masif. Lihat saja, amal usaha di bidang pendidikan mencapai ribuan sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, jumlah pesantren, jumlah amal usaha di bidang kesehatan sebanyak rumah sakit, dan juga dalam pelayanan amal sosial berjumlah ratusan panti asuhan (Profil AUM tahun 2015 diterbitkan MPI PP Muhammadiyah). Hanya saja, keberadaan 'ihwal politik' sering kali terasa dimarjinalkan dalam wacana internal Muhammadiyah terutama oleh jamaah Muhammadiyah yang masih 'alergi' dengan politik, apatis, atau justru karena aspirasi politiknya sudah masuk zona nyaman (Tidak ingin Muhammadiyah berafiliasi pada partai tertentu).

Tulisan ini ingin melihat penggalan sejarah Muhammadiyah dan politik terutama pasca reformasi 1998. Terkait hal ini dapat dilihat dari tiga jenis pemilu yang kerap 'menggeret' Muhammadiyah dalam kompetisi politik. Pertama, adalah pemilihan presiden (2004, 2009, dan 2014); Kedua, pemilu legislatif, dan ketiga adalah pemilukada/pilkada. Ketiga jenis pemilu ini selalu ada praktik tarik menarik elit untuk memobilisasi dukungan suara. Dari ketiga pemilu tersebut, pemilu legislatif yang sedikit risiko politiknya bagi Muhammadiyah. Walau demikian, muhammadiyah masih dianggap menghalangi kadernya untuk berkiprah dalam ranah politik sekaligus tetap menjadi aktivis di lingkungan Muhammadiyah (lihat SK PP Muhammadiyah No. 41 Tahun 2014).

Muhammadiyah dan Pilpres

Tanwir Muhammadiyah Denpasar 2002 memberikan legitimasi terhadap peran-peran kebangsaan yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah. Spirit ini sebagai kelanjutan dari agenda reformasi di mana

Muhammadiyah menjadi bagian penting dari peran *high politics* sampai dengan politik praktis kepartaian yang andil membidani PAN. Kelompok *khitois* dan kelompok elit yang alergi politik sampai pada tahun 2002 tidak memperlihatkan karakter oposisi terhadap gelagat 'sahwat' politik dari kubu fundamentalis politik yang percaya bahwa dakwah dan politik adalah satu kesatuan (representasi kubu Amin Rais). Setelah kandas di tahun 2004, kubu *khitois* yang ingin memisahkan Muhammadiyah dari politik praktis mulia menancapkan pengaruhnya melalui beragam wacana bahwa Muhammadiyah bukanlah gerakan politik dan menjaga jarak dari tarikan politik.

Dalam pilpres pasca reformasi, khususnya tahun 2009 dan 2014 menunjukkan preferensi politik elit muhammadiyah pusat mengalami fragmentasi serius. Apa yang menjadi himbauan elit tidak serta merta menjadi pilihan anggota Muhammadiyah. Kecuali tahun 2004 yang memperlihatkan soliditas elit dalam mengusung MAR walau fakta menunjukkan tidak semua warga Muhammadiyah memilih MAR. Hal ini dapat dibenarkan karena tradisi otonom warga Muhammadiyah yang sangat kuat dan tidak monolitik. Banyak survei politik menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah terafiliasi ke dalam parpol yang beragam (Bush, 2012).

Perbedaan pilihan elit pada awalnya lebih disinyalir karena kedekatan emosional dan bukan *by design*. Upaya menyebarkan dukungan untuk menyelamatkan agar Muhammadiyah tetap "aman" siapa pun pemenangnya sebenarnya tidak pernah mendapatkan pembenaran sebab Muhammadiyah tidak biasa "meminta" fasilitas negara; dan juga tidak mudah merasa terancam oleh kekuasaan negara (*the rulling elite*). Jadi, aliran politik Muhammadiyah ini *enteng-entengan* saja.

Muhammadiyah dalam pileg

Pemilihan legislatif (Pileg) merupakan ajang kompetisi politik untuk menjadi anggota dewan di pusat, propinsi, dan kabuputen/kota serta DPD RI. Sejak tahun 2004 pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan langsung.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kader Muhammadiyah yang punya nalar dan kompetisi politik untuk terjun di dalamnya. Persoalannya, SK Muhammadiyah mengharuskan kader pimpinan mundur dari jabatan di persyarikatan jika maju. Tapi kenyataannya beberapa dapat izin dari Pimpinan Pusat, sementara di beberapa daerah sudah terlanjur mundur.

Situasi ini menunjukkan bahwa orientasi politik Muhammadiyah tidak stabil dan bahkan paradoks. Ada kebutuhan menjalin relasi baik dengan negara tapi juga ada ketakutan risiko politis jika organisasi modern ini diurus politisi. Kebimbangan ini sering kali diperbesar oleh kelompok "*khitois*"—kelompok yang menjadikan aturan organisasi sebagai hal yang harus ditaati, untuk meyakinkan anggota Muhammadiyah bahwa politik itu bukan habitat Muhammadiyah. Problem politisi busuk, korupsi parpol, kasus skandal moral dan sebagaianya menjadi pembenar.

Muhammadiyah dan pemilukada

Elit PP Muhammadiyah punya respon yang berbeda dengan PWM atau PDM mengenai pentingnya keterlibatan Muhammadiyah dalam pilkada. Urusan keseharian dalam lembaga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial mensyaratkan hubungan baik dengan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan "suara" besar Muhammadiyah dijadikan *bargaining position* terhadap kekuasaan.

Elit Muhammadiyah lokal mempunyai derajat keberanian sikap politik yang beragam, mulai dari yang fundamentalis, netral aktif, normatif pasif sampai pada sikap otonomi elit untuk mendukung atau tidak. Tidak sedikit yang berani mendukung secara kelembagaan.

Dengan demikian, elit Muhammadiyah di level PP dapat memahami orientasi politik lokal ini sebagai bagian dari kearifan. Politik itu sangat riil di bawah sehingga agenda sistematis dalam politik kebangsaan ala Muhammadiyah harusnya dijalankan dengan strategi yang tepat. Dukungan moral-politik dapat menjadi wahana berdakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* di sektor publik kekuasaan.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas memperlihatkan secara faktual, bahwa Muhammadiyah melalui elit-elitnya tidak pernah benar-benar berada di ruang hampa politik. Meskipun Muhammadiyah dilabeli sebagai "gerakan pembantu" negara (syafii Maarif) Muhammadiyah yang dihuni jenis elit yang beragam spektrum politiknya memperlihatkan ada upaya untuk 'tidak ingin menjadi korban politik' atau setidaknya membangun *bargaining* politik dari kekuasaan. Pemilu presiden 2004 adalah titik ekstrim bagaimana Muhammadiyah ingin menjadi penentu dalam mengelola negara melalui tokoh sentral Amien Rais yang kemudian kandas yang kedua kali menjadi presiden setelah peluang besar tahun 1999 diberikan kepada Abdurrahman Wahid. Peristiwa ini menjadikan trauma tersendiri bagi kubu elit Muhammadiyah yang percaya bahwa dakwah struktural itu penting, juga menjadikan kubu 'apolitis' dan '*khitois*' mendapatkan pembenarannya bahwa gerakan Muhammadiyah sudah final sebagai gerakan sosial keagamaan dan bukan gerakan politik struktural.

Di sisi lain, dari fenomena pilkada dan pemilihan legislatif juga menjadi penjelasan penting, bahwa elit Muhammadiyah di level daerah menganggap 'kekuasaan/jabatan politik perlu untuk menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dan juga untuk melangsungkan amal usaha Muhammadiyah'. Hal ini wajar selama orde baru, Muhammadiyah aktif menjadi bagian dari kelompok yang berperan besar dalam mengembangkan pendidikan dan pelayanan sosial. Salah satu titik lemah Muhammadiyah di daerah, walaupun sudah memenangkan kandidat dukungannya di daerah, adalah tidak adanya *blue print* peran-peran Muhammadiyah dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Sering kali, Muhammadiyah sudah merasa cukup jika calon yang didukung menang. Peran politik minimalis ini menjadikan Muhammadiyah gagal menerapkan nilai-nilai kemajuan yang digadang-gadang karena baik buruk, stabil dan semrawutnya pemerintah nasional/daerah akan berdampak pada Muhammadiyah.

JAWA POS, 4 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; sekretaris LHKP DIY

MUHAMMADIYAH MEMILIH

DAVID EFENDI

DALAM perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah (1912-2015) telah mengalami sebanyak 46 kali pemilihan pengurus dalam bentuk pemilihan formatur. Sependek pengetahuan penulis, Muhammadiyah tidak pernah melakukan pemilihan secara langsung ketua umumnya. Hal ini menjadi pembeda dengan partai politik, atau beberapa ormas lain yang memilih pemimpinnya secara langsung (*by name*) untuk posisi yang *fixed*. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini tidak seperti sistem pemerintahan 'khilafah' yang mempunyai model pemilihan pemimpin dengan cara 'daulat' atau pun menganut sistem pemilihan *ala* "demokrasi liberal" yaitu dengan pemilihan langsung satu orang satu suara. Jadi, dengan demikian Muhammadiyah dalam memilih pemimpinnya mempunyai model 'tengah' atau bisa dikontekstualisasikan dengan 'teologi' *ummatan wasathan*.

Sebagaimana Muktamar sebelumnya, dalam perhetalan Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 yang akan diselenggarakan di Makasar pada tanggal 3-7 Agustus 2015 juga akan memilih (dalam tanwir)masing-masing peserta sebanyak 39 calon dari 82 calon yang bersedia mengembalikan formulir pencalonan. Dari 39 calon terpilih akan dipilih lagi oleh 2,600 pemilik suara yaitu sebanyak 13 anggota formatur yang akan ditugasi menyusun kepengurusan Muhammadiyah periode 2015-2020. Tim formatur akan memilih ketua umum dan jajarannya serta mempunyai

kewenangan menambah kepengurusan Muhammadiyah sebanyak 5 orang (anggota tambahan). Setiap peserta Muktamar mempunyai kewajiban memilih sebanyak 13 nama dalam waktu sekaligus (*multiple* kandidat) Calon sebanyak 82 orang tersebut tidak mencalonkan atas nama pribadi tetapi 'diusulkan' oleh pengurus PP, atau wilayah, dan organisasi otonom.

Model pemilihan formatur ini juga sudah biasa digunakan di lingkungan organisasi otonom Muhammadiyah. Tidak ada klausul yang menyatakan suara terbanyak otomatis menjadi ketua umum. Organisasi otonom Muhammadiyah juga beberapa ada yang menggunakan pemilihan ketua umum secara langsung. Artinya, tidak semua ortom harus mengikuti model pemilihan Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba mendialogkan mengenai beberapa *point* kelebihan dan inheren juga di dalamnya kekurangannya dalam metode pemilihan pemimpin ala Muhammadiyah ini.

Pertama, model pemilihan ini meneguhkan model gerakan kolektif kolegial yang diyakini oleh Muhammadiyah sebagai pilihan strategi merawat gerakan. Tidak bergantung pada salah satu tokoh tetapi kolektifitas pengurus ini diharapkan mampu memperkuat pelembagaan gerakan secara baik, sistematik, masif dengan derajat profesionalisme yang terus diperbaharui. Kelompok profesional ini sangat dominan dalam Muhammadiyah setidaknya hal ini tidak pernah kendur. Wajar saja, karena elit Muhammadiyah merupakan kelas menengah yang terus mengalami pembaharuan dari model kepemimpinan elit saudagar, elit ulama, birokrat, cendekiawan, akademisi, dan sebagainya. Representasi kelompok ini dapat ditemui di semua jenjang level Muhammadiyah. Profesionalisme itu juga telah mewujud dalam tata kelola 'trisula lama' yaitu ada di pengelolaan AUM Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan sosial (*social welfare*). Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa kriteria profesional, inovatif, dedikasi, fokus merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh kandidat yang akan dipilih.

Kelebihan ini menemui titik lemahnya juga yaitu mengenai kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kepemimpinan kharismatik yang terbayang dalam model kepemimpinan politik seperti gaya "*solidarity maker*" sebagaimana

yang digelarkan Herbert Feith (1962) kepada sosok presiden pertama Indonesia, Sukarno atau model 'administrator' pada Muhammad Hatta. Sosok kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menggalang kekuatan besar ummat, menggerakkan jamaah dalam menghadapi gejolak zaman yang mengancam gerakan Muhammadiyah. Kerinduan akan sosok ini sering muncul ketika negara mengalami pelemahan kekuasaan atau pada saat Muhammadiyah diharapkan membangun *bargaining positiion* terhadap kuasa negara dan kuasa global. Model kepemimpinan kolektif Muhammadiyah mencerminkan fragmentasi elit karena masing-masing elit 13 plus tersebut secara sederhana adalah mewakili 'konstituen' yang beragam yang hidup di alam Muhammadiyah.

Kedua, model pemilihan elit ala Muhammadiyah ini dipercaya oleh banyak orang sebagai model yang paling 'tangguh' menghadapi kekuasaan kapital dalam pemilihan pimpinan. Di banyak organisasi, pemilihan langsung ketua menjadikan praktik politik uang subur. Sudah banyak desas desus dalam pemilihan elit ortom di lingkungan Muhammadiyah mulai disinyalir akrab dengan dunia 'uang tiket' sebagai ucapan terima kasih atas dukungan dan sebagainya. Walau isu ini tidak dapat dibuktikan tetapi Muhammadiyah telah berusaha mengantisipasinya. Dalam nalar keagamaan, sudah dibenarkan menghindarkan madorot itu harus didahulukan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat sering memilih, model antisipatif ala Muhammadiyah ini dapat menjadi 'pelajaran' atau semacam '*best practise*' di Indonesia untuk mengatakan 'jalan lain' memilih pemimpin.

Walau demikian, juga terhadap kekurangan yaitu mengenai aspirasi warga Muhammadiyah di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah yang misalnya menghendaki si Fulan atau Fulanan menjadi pemimpin/ketua umumnya tetapi hal ini tidak bisa sesuai karena pola pemilihan paket 13 tersebut. Artinya, keterpilihan seseorang tidak mendapatkan konfirmasi dari warga Muhammadiyah yang diwakili oleh pimpinan di masing-masing strukturnya. Hal ini menang tidak menjadi konsen warga Muhammadiyah, namun preferensi warga itu jelas nyata untuk bersedia dipimpin oleh sosok kader ulama, cendekiawan, akademisi, profesional, dan model kombinasi.

Beberapa bulan lalu juga sempat mencuat 'wacana' kerinduan terhadap sosok "ulama yang merakyat" yang direpresentasikan oleh Pak AR Fachrudin. Hal ini menunjukkan bahwa publik atau warga Muhammadiyah punya ekspektasi besar terhadap ketua umum baru mendatang.

Terakhir adalah bahwa model pemilihan pemimpin ala Muhammadiyah ini sangat berhasil setidaknya sampai usia yang memasuki abad kedua ini, tidak menunjukkan model ini berbuah konflik yang signifikan yang mempengaruhi dinamika organisasi sehingga secara empiris model ini telah mampu menghindarkan dari persoalan *conflict of interest* yang tidak perlu. Tidak pernah terjadi Muktamar tandingan, atau mosi tidak percaya. Semua *legowo* menerima hasil Muktamar kemudian semua pengurus wilayah daerah sampai ranting berusaha menjalankan putusan Muktamar mulai dengan memperbaharui program kegiatan dan pimpinan di level masing-masing. Inilah cara Muhammadiyah memilih pimpinannya. Akhirnya, selamat bergembira warga Muhammadiyah di semua belahan dunia untuk menyambut Muktamar di abad kedua.

Kedaulatan Rakyat, 3 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY; sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DIY

Muhammadiyah Mencari Ketum Baru

RIDHO AL-HAMDI

HAMPIR dipastikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, 3-7 Agustus 2015, organisasi yang telah berusia lebih dari satu abad ini akan memilih ketua umum (ketum) baru beserta jajaran pimpinan lainnya. Din Syamsuddin yang telah memimpin selama dua periode (2005-2015) dipastikan tak bersedia dicalonkan lagi menjadi ketua umum maupun pimpinan di tingkat pusat. Dalam berbagai kesempatan, Din yang kini masih menjabat sebagai ketua umum MUI justru bangga ingin menjadi ketua Ranting Muhammadiyah.

Selama 10 tahun ini setidaknya ada beberapa prestasi yang ditorehkan Din. *Pertama*, keberhasilan dalam internasionalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah. *Kedua*, mampu menjaga jarak dengan kekuasaan dan bersikap kritis terhadap pemerintah.

Ketiga, tampil menjadi mediator berbagai konflik di Tanah Air maupun di berbagai negara. *Keempat*, peremajaan pimpinan organisasi di berbagai sektor baik di internal persyarikatan maupun amal usaha (AUM). Kelima, melahirkan gagasan "trisula baru Muhammadiyah" dengan konsen di bidang penanggulangan bencana (MDMC), gerakan peduli zakat infak sedekah (Lazismu), dan pemberdayaan masyarakat (MPM).

Tentu berbagai masalah harus tetap di evaluasi, seperti kurang tegasnya disiplin organisasi dan ideologi, lemahnya gerakan Muhammadiyah di akar rumput, dan tidak ada sinergi sistem organisasi antarlembaga di Muhammadiyah.

Muktamar pertama setelah satu abad ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah untuk mengonsolidasikan internal organisasi. Panitia Pemilihan Pusat (Panlihpus) telah menetapkan ada 82 bakal calon (balon) anggota formatur PP Muhammadiyah yang lolos verifikasi untuk dipilih dalam Sidang Tanwir menjadi 39 calon tetap. Dari 39 calon, dipilih lagi oleh anggota Muktamar sehingga mengerucut menjadi 13 anggota formatur terpilih. Ketiga belas formatur inilah yang akan memilih ketum dan jajaran PP Muhammadiyah yang baru.

Dari 82 balon, setidaknya ada dua tipe kepemimpinan yang akan menjadi ketum baru Muhammadiyah. Pertama, tipe ulama-intelektual, yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan keagamaan yang menonjol, muncul dari kalangan akademisi. Beberapa di antaranya Yunahar Ilyas, Syafiq A Mugni, Agung Danarto, Abdul Mu'ti, dan Budi Setiawan.

Kedua, tipe intelektual-aktivis adalah pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual memadai di bidang ilmu-ilmu sosial, mayoritas mereka adalah kader yang pernah menjadi aktivis organisasi sejak muda. Beberapa nama di antaranya Haedar Nashir, Dahlan Rais, Busyro Muqoddas, Hajriyanto Y. Tohari, Khoiruddin Bashori, Agus Sukaca, Muhajir Effendi, dan Bambang Setiadji. Jenis kelompok ke dua ini di Muhammadiyah jauh lebih ba nyak daripada jenis kelompok pertama.

Kader-kader muda Muhammadiyah lainnya juga cukup potensial untuk memimpin organisasi ini, seperti Agus Taufiqurrohman, Ahmad-Norma Permata, Jamaluddin Ahmad, dan Hilman Latief. Beberapa calon perempuan juga telah lolos seleksi, seperti Siti Noordjannah Djohantini, Rahmawati Husein, Dyah Siti Nuraini, dan Isnawati Rais. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki segudang kader yang yang siap memimpin organisasi ini.

Tantangan Muhammadiyah dari waktu ke waktu tentu berbeda. Kondisi sosiopolitik sangat memengaruhi model kepemimpinan yang

dicari warga Muhammadiyah. Dari tiga periode ke pemimpinan terakhir, ada perbedaan mencolok antara Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin.

Pertanyaannya, apakah kita akan mencari kriteria ketum baru seperti tiga tokoh itu ataukah malah mundur lagi ke belakang seperti Kiai AR Fachruddin? Tentu semuanya diserahkan pada muktamirin yang memiliki hak suara.

Namun, kondisi Islam di tingkat global maupun domestik serta perkembangan politik kekinian mensyaratkan ketum baru Muhammadiyah harus memiliki kriteria berikut. Pertama, visi internasionalisasi Muhammadiyah. Sebuah riset yang dirilis Pew Research Center pada 2 April 2015 tentang masa depan agama-agama di dunia menunjukkan, Islam adalah agama yang memiliki pertumbuhan sangat pesat dan menjadi agama terbesar kedua di dunia pada 2050, hampir mendekati populasi umat Kristiani.

Dalam konteks ini, ketum baru Muhammadiyah harus memiliki peran untuk mewujudkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin di tengah mencuatnya ekstremisme Islam. Konsekuensinya, kemampuan berbahasa internasional harus dimiliki, setidaknya Inggris dan Arab.

Kedua, pemimpin yang memiliki jiwa ulama. Sebagai ormas Islam modern terbesar di Indonesia, umat membutuhkan figur umara (pemimpin) yang memiliki jiwa ulama dalam arti mampu menghadirkan wajah Islam yang damai dan memberikan pencerahan terhadap persoalan umat yang multikompleks.

Ketiga, organisator yang memiliki kemampuan manajerial. Muhammadiyah memiliki struktur organisasi bertingkat (lebih dari 12 ribu ranting dan hampir 4.000 cabang serta cabang istimewa di berbagai negara) dan ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Besar dan luasnya organisasi ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyatukan berbagai macam perbedaan antarlembaga itu.

Keempat, mampu menjadi penafsir atas spirit ajaran KH A Dahlan untuk menghadapi tantangan Muhammadiyah pada abad kedua. Ide

"Islam Berkemajuan" harus mampu dikontekstualisasikan secara cerdas terhadap realitas saat ini.

Meskipun ketua umum adalah simbol organisasi, Muhammadiyah menganut kepemimpinan kolektif-kolegial. Sistem organisasi diputuskan dan dilaksanakan bersama oleh "13 Dewa" yang terpilih. Karena itu, "13 Dewa" ini harus memiliki unsur-unsur berikut.

Pertama, memenuhi unsur keahlian yang beragam karena Muhammadiyah bergerak hampir di segala sektor. Kedua, kombinasi kepemimpinan tua dan muda (60:40). Ketiga, memiliki kemampuan manajerial yang andal, terutama menghadapi konflik. Keempat, mampu berkomunikasi dengan generasi muda Muhammadiyah sehingga kaderisasi dapat berjalan baik. Kelima, ikhlas dan tidak memperkaya diri dengan mengatasnamakan Muhammadiyah di segala urusan.

Siapa yang akan memimpin organisasi ini tergantung pilihan bijak muktamirin di Makassar. Satu dekade kepemimpinan Din Syamsuddin harus patut kita apresiasi karena berbagai prestasi telah ditorehkannya. Selamat bermusyawarah, selamat memilih pemimpin baru, dan teruslah berkarya untuk "Indonesia Berkemajuan".

REPUBLIKA, 25 Juli 2015. Penulis adalah Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya, Studi S3 Ilmu Politik di TU Dortmund University

Menghidupkan Spirit Kiai Dahlan

ABD ROHIM GHAZALI

MUHAMMADIYAH menggelar perhelatan akbar, Muktamar ke-47, 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain memilih kepengurusan baru, Muktamar juga berupaya mempertegas fungsi Muhammadiyah sebagaimana yang diusung dalam tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan"

Kata "pencerahan" merupakan ciri khas Muhammadiyah. Rapat kerja nasional yang digelar setiap tahun termasuk pada saat menjelang Muktamar disebut sebagai arena "pencerahan" (tanwir). Asal muasal kata pencerahan ini tidak lepas dari upaya menghidupkan spirit KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 silam yang bertujuan untuk menolong kesengsaraan umum.

Untuk memberi pertolongan pada kesengsaraan umum itu didirikanlah sekolah, rumah sakit (balai pengobatan), dan panti asuhan baik untuk anak-anak yatim maupun orang jompo. Gerakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial inilah "Tri Sula" Muhammadiyah. Di bidang pendidikan, hingga saat ini Muhammadiyah memiliki 4623 lembaga pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Pendidikan al-Quran (TPQ); 2604 pendidikan tingkat menengah pertama; 1772 pendidikan tingkat menengah atas; 172 tingkat perguruan tinggi; dan

67 pendidikan pesantren. Untuk bidang kesehatan, Muhammadiyah 457 rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan dan yang sejenisnya. Sedangkan di bidang sosial Muhammadiyah memiliki 318 panti asuhan; 54 panti jompo; 82 panti rehabilitasi; dan 71 sekolah luar biasa (SLB).

Dengan jumlah amal usaha yang sedemikian banyak, keberadaan Muhammadiyah memiliki peran signifikan dalam perjalanan Republik ini. Untuk kalangan yang meragukan signifikansi Muhammadiyah, cobalah membayangkan apa yang akan terjadi jika semua amal usaha itu "mogok" (tidak beroperasi) secara bersamaan dalam satu-dua hari saja.

Secara kuantitatif, peran dan fungsi Muihammadiyah tidak diragukan, tetapi secara kualitatif masih menjadi tanda tanya besar. Dari ribuan lembaga pendidikan itu, misalnya, adakah yang masuk "world class" atau sekadar "terbaik di Indonesia" untuk di setiap jenjangnya? Pertanyaan yang sama bisa juga diajukan untuk kualitas ratusan Rumah Sakit dan Panti Asuhan yang dimiliki Muhammadiyah.

Proses massifikasi secara kuantitas gerakan Muhammadiyah terjadi tidak lepas dari persepsi Muhammadiyah sebagai gerakan "amal" yang digagas dan didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yang dikenal sebagai "*man of action*", bukan "*man of ideas*". Persepsi ini terus dipertahankan dari waktu ke waktu sehingga membentuk semacam "*self-fulfilling prophecy*".

Persepsi ini tidak sepenuhnya tepat. Kiai Dahlan memang tidak memiliki karya dalam bentuk buku melainkan dalam bentuk amal usaha. Tapi gerakan amal itu tidak mungkin bisa terimplemantasi dengan baik tanpa ada pemikiran yang tajam, mendalam, dan tersistematisasi. Karena itu tidak salah jika Charles Kurzman (2001) memasukkan Kiai Dahlan sebagai salah satu tokoh pemikir (Islam) liberal yang melahirkan institusi liberal dalam bentuk sekolah Muhammadiyah di Indonesia.

Di kalangan internal (aktivis) Muhammadiyah sendiri, gerakan Kiai Dahlan kerap dipersempit dalam pemberantasan TBC (*Tachayyul, Bid'ah, dan Churafat*) yang kemudian kerap dipertentangkan dengan gerakan Nahdlatul Ulama (NU) yang lebih akomodatif.

Gagasan Kiai Dahlan yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam beragama, serta mengangkat harkat kemanusiaan dalam kehidupan

sosial, sangat jarang kita temukan. Baru belakangan gagasan-gasan ini dimunculkan melalui tulisan-tulisan Ahmad Syafii Maarif, Abdul Munir Mulkhan, dan M. Amin Abdullah. Sayangnya, tokoh-tokoh ini kerap dituduh sebagai virus "Sipilis" (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme) yang dianggap berbahaya.

Gerakan anti "Sipilis" menguat dalam gerakan Muhammadiyah dan secara nyata muncul saat Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang yang membuat mereka yang diidentifikasi berpikiran liberal seperti Dawam Rahardjodan tokoh-tokoh yang disebut di atas tidak terpilih kembali. Akibatnya, dalam satu dekade terakhir, Muhammadiyah tak jarang menjadi "panggung" para aktivis anti-"Sipilis".

Munculnya aktivis anti-"Sipilis" bertentangan dengan fakta amal usaha Muhammadiyah yang terbuka dan berfungsi secara proporsional. Dalam bahasa Hajriyanto Thohari, orang boleh berdiskusi sampai *dower* dan berbusa-busa soal pluralisme dan toleransi agama, Muhammadiyah sudah menjalankannya. Sebagai contoh, Universitas Muhammadiyah Kupang dan Universitas Muhammadiyah Sorong, memiliki lebih dari 80 persen mahasiswa, dosen, dan karyawan non-Muslim.

Sejak era Kiai Dahlan, amal usaha Muhammadiyah terbuka bagi siapa pun, tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Karenanya, siapa pun yang ingin memanfaatkan (panggung) Muhammadiyah untuk menentang atau bahkan mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, bertentangan dengan spirit Kiai Dahlan yang menerapkan sistem pendidikan *ala* Barat yang sekuler dan terbuka. Begitu pun dalam mengelola balai kesehatan (Rumah Sakit) dan panti asuhan.

Mampukah Muktamar Makassar melahirkan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang mampu menghidupkan spirit Kiai Dahlan? *Wait and See*!

REPUBLIKA, 25 Juli 2015. Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina; Wakil Ketua Umum Kornas FOKAL IMM

Kepemimpinan Ulama, Intelektual dan Manajer

MUTOHHARUN JINAN

DUA ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menggelar hajatan besar dalam waktu yang hampir bersamaan. Tangggal 1-5 Agustus, NU akan menggelar Muktamar ke-33 di "ibu kota NU" sekaligus tempat paling bersejarah, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Tanggal 3-7 Agustus, Muhammadiyah menggelar Muktamar ke-47 di salah satu kampus terbesar yang dimiliki, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan.

Dua tempat tersebut seolah mengisyaratkan area terbaik untuk memantapkan langkah kedua ormas ini guna tinggal landas melampaui batas-batas teritori.

Muhammadiyah memancang internasionalisasi Islam Berkemajuan, sementara NU hendak menawarkan Islam Nusantara kepada khalayak internasional. Karena itu, kedua organisasi ini perlu merancang kepemimpinan yang tepat agar dapat tinggal landas tanpa beban-beban yang memberatkan.

Salah satu beban berat yang harus diurai oleh dua ormas Islam ini adalah lemahnya kepemimpinan manajerial. Baik di Muhammadiyah dan

NU mengalami masalah yang sama, yakni kelemahan manajerial, hanya bentuknya yang berbeda.

Pengelolaan Aset

Kelihatannya, konsolidasi secara internal Muhammadiyah relatif mapan dengan tata kelola organisasi modern. Kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah salah satunya dipengaruhi tata kelola yang modern ini. Mitsuo Nakamura, pemerhati Muhammadiyah, menyebutkan sumbangan terbesar Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia adalah mengajak umat berdakwah dengan pola organisasi modern.

Kemahiran pengelolaan organisasi modern ditandai dengan pelembagaan aset yang nyaris sempurna. Semua aset sudah milik organisasi bukan milik perorangan atau pemimpinnya. Rupanya ketertataan organisasi membuat Muhammadiyah tidak lincah, *rigid*, dan miskin terobosan dalam menjawab persoalan di masyarakat. Pendek kata, perlu pengelolaan berbasis manajerial yang kuat.

Sementara di NU, potensi dan sumber daya berlimpah, jutaan pengikut tersebar dari kota hingga pelosok desa, kyai/ulama di setiap desa tersedia dan siap menjadi pialang budaya –demikian istilah Geertz-antara umat dan modernisasi. Namun ada kelemahan manajerial dalam penataan keorganisasian.

Aset yang besar itu, baik yang berupa sekolah maupun pondok pesantren, masih berserakan, berjalan sendiri-sendiri, belum menjadi aset organisasi NU tetapi masih milik pribadi atau keluarga kyai. Imbasnya, kultur NU sulit menerima mekanisme pengawasan publik untuk menjaga *trust* dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, NU perlu pengelolaan dengan pola manajerial yang kuat.

Beban tersebut tampak sudah sekian lama dirasakan oleh aktivis dua ormas ini. Kunci pemecahannya ada pada model kepemimpinan. Di daerah-daerah di mana Muhammadiyah dan NU bergerak dinamis hampir pasti ditopang kepemimpinan tipe manajer, bukan kepemimpinan model ulama dan intelektual.

Model kepemimpinan ulama dan intelektual yang selama ini menjadi pilar utama ormas Islam sudah sampai titik stagnan, tidak cukup berhasil melepas beban-beban bawaan organisasi, yang modern sekalipun, yaitu lamban, kaku, dan involutif. Begitu juga, kasus di NU, kepemimpinan ulama tidak membawanya beranjak dari keberserakan potensi dan tidak terkelolanya sumber daya. Terlebih dalam dua ormas ini masih terbayangi beban-beban turunan akibat *grontokrasi*—meminjam istilah Azyumardi Azra, untuk menyebut kepemimpinan yang didominasi kaum tua.

Ormas Islam yang beringsut menjadi modern berarti dalam waktu yang sama juga harus meletakkan fungsi kepemimpinan ke dalam fungsi-fungsi manajerial.Kepemimpinan kedepan bukan bertipe keulamaan, yang mengedepankan kemampuan memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Bukan pula model kepemimpinan intelektual, yang menggugah kesadaran berwacana namun lambat dalam menggerakkan amal usaha.

Kepemimpinan Manajer

Kepemimpinan ormas Islam harus didorong lebih difungsikan sebagai manajer. Kepemimpinan manajerial memiliki sekurang-kurangnya tiga karakter utama, yaitu memberdayakan, melakukan terobosan atau improvisasi, dan perluasan jaringan.

Ormas Islam perlu mengutamakan memberdayakan potensi sebagai satu kekuatan yang kokoh dan terorganisir. Keterlibatan NU dalam kepemimpinan politik nasional pada saat ini akan turut mempercepat akselerasi masyarakat asalkan pemimpinnya mendorong akselerasi ketertiban organisasi, mengakselerasi pengelolaan organisasi berbasis mentalitas komunal ke mentalitas publik.

Mengingat semakin luasnya peranan yang hendak dijangkau dalam menjawab tantangan dan berkontribusi kepada umat, bangsa dan kemanusiaan juga sangat diperlukan kemampuan menerobos dengan ide-ide kreatif yang kadang-kadang melampaui batas-batas rutinitas organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan Muhammadiyah di semua level perlu berbenah untuk menumbuhkan mentalitas kreatif dan kemandirian.

Kemampuan memperluas jaringan menjadi kata kunci utama bagi kedua ormas ini, yang telah menasbihkan diri menjadi kampiun Islam di dunia internasional. Proyek ambisius internasionalisasi Muhammadiyah dan peran global NU harus dibarengi dengan model kepemimpinan manajerial yang bergerak lincah membangun jejaring internasional.

Harapan banyak pihak, hajatan besar ini mampu menempatkan kepemimpinan manajerial sebagai modalitas untuk mengepakkan "dua sayap garuda", demikian Nurcholis Madjid menyebut dua ormas Islam Muhammadiyah dan NU. Dua sayap besar untuk menerbangkan Garuda (Indonesia) agar mampu menjangkau peran yang lebih luas di tingkat global.

Suara Merdeka, 5 juli 2015. Penulis adalah Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anggota MPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015

Ketakwaan Liberatif Pemimpin

ZULY QODIR

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah final."
—Din Syamsuddin, Ketua Umum MUI, 5 Februari 2015

MENDASARKAN pada pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada seminar Pra-Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, 9-11 Februari 2015, itu, sebenarnya kita tinggal mengisi negara ini dengan pelbagai aktivitas menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan merdeka. Perdebatan tentang penggantian dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain dapat dikatakan hanya menghabiskan energi yang kadang tidak produktif. Oleh karena itu, akan lebih baik jika energi bangsa ini ditujukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang ketimbang berdebat tentang perubahan dasar negara.

Sebagai masyarakat religius, Indonesia pun mengakui berbagai agama. Agama-agama "resmi" negara, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Di luar itu, masih banyak aliran baru dalam ranah kehidupan keagamaan di Indonesia, termasuk agama-agama suku yang sering disebut agama suku asli (*indigenous religions*).

Terlepas dari apa yang dinamakan ”agama resmi” dan ”agama suku”, semua memiliki ajaran kesalehan yang jadi substansi agama-agama di muka bumi. Ajaran kesalehan inilah yang sebenarnya perlu perhatian dari semua penganut agama di Indonesia mengingat betapa banyak persoalan di depan hidung umat agama-agama.

Jujur, adil, dan membebaskan

Tiga hal inilah—jujur, adil, dan membebaskan—yang hemat saya menjadi substansi dari ajaran agama-agama yang merupakan aktualisasi dari ketundukan kepada Tuhan sang khalik, yang tidak butuh pembelaan dari manusia sebagai ciptaan-Nya.

Manusia yang beriman pada Tuhan harus memiliki kesalehan total pada sang khalik. Bukti kesalehan total tersebut adalah ketundukan yang sempurna hanya pada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya tanpa kecuali. Manusia beriman harus berusaha, tetapi Tuhan tetap dipercaya sebagai pemberi mukjizat atas segala sesuatu yang diusahakan.

Dengan demikian, manusia beriman tidak akan sombong atas apa yang diraihnya. Manusia beriman dan saleh tidak akan rakus, zalim, menghina, membenci atau mengusir orang lain hanya karena berbeda agama atau berbeda etnis. Manusia yang beriman dan saleh berupaya mengaktualkan apa yang jadi ajaran substansial agama yang dia yakini.

Masyarakat religius dan saleh tak akan berbohong ketika jadi saksi atas perkara-perkara hukum di pengadilan sebab Tuhan maha hadir dan mengetahui atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Tentu saja dengan pengawasan yang sempurna. Di muka bumi kita boleh berkilah dan bersilat lidah atas nama Tuhan, rasul dan orangtua, sekalipun semua merupakan kesaksian bohong. Tapi, di hadapan Tuhan tak satu pun yang dapat menyembunyikan kebohongan tersebut.

Karena itu, ciri kaum beriman dan saleh yang paling utama adalah jujur dalam berkata-kata, dalam berfatwa (berhujah), dalam bersaksi di pengadilan, dalam percakapan, dan benar dalam tindakan. Inilah

sebenarnya ajaran pokok semua agama—apa pun namanya—karena percaya terhadap Tuhan yang maha hadir.

Selain jujur, seorang yang takwa mengaktualkan ketakwaan dalam berbagai aktivitas politik yang dijalani. Aktivitas politik adalah seni mengelola negara, bukan menghancurkan semua lawan politik serta membuat bodoh dan menimbulkan kemarahan rakyat. Politisi yang takwa (saleh) adalah politisi yang berani berkata salah jika memang salah. Berani mundur jika berbuat yang melanggar aturan negara dan aturan agama. Korupsi, misalnya, merupakan pelanggaran pada negara sekaligus terhadap agama, apa pun agamanya. Oleh sebab itu, siapa saja pejabat negara, elite politik, elite partai, dan bahkan anggota masyarakat biasa yang korupsi maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya harus mengaku salah, memohon ampunan, dan mundur sebagai pejabat atau aparat negara.

Orang yang takwa dalam berpolitik bersedia mendengarkan nasihat dari sesama umat Tuhan. Manusia takwa dalam beragama juga tidak akan menzalimi orang lain dengan berbagai macam tuduhan keji, menipu orang lain karena ingin berkuasa, mempraperadilankan pihak lain karena ingin berkuasa, serta tuduhan lain yang intinya hanya ingin menjatuhkan martabat dan harkat lawan politiknya. Orang yang takwa kepada Tuhan juga tak akan serta-merta melakukan tuduhan-tuduhan keji dan memfitnah orang lain di depan publik sehingga seakan-akan menjadi pahlawan pada kelompoknya dengan menjadikan orang lain sebagai pesakitan.

Semua itu tidak akan dilakukan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan bahwa segala ucapan dan perbuatan akan dibalas Tuhan kelak nanti. Manusia takwa dengan demikian tidak membenci sesama sekalipun kalah dalam persaingan, tidak menzalimi lawan politik sekalipun sakit hati dan tidak memfitnah lawan politik dengan tuduhan-tuduhan keji dan kotor karena kemurkaan dan ambisi semata.

Di tengah karut-marut bangsa ini dalam bidang politik, ekonomi, dan etika, orang yang beriman dan saleh tidak akan berlaku tidak adil secara ekonomi atas orang yang berbeda agama dan berbeda etnis. Kasus yang sekarang terjadi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri

seharusnya tidak akan terjadi jika setiap orang yang mengaku beriman dan bertakwa tersebut benar-benar hendak mengaktualkan ajaran agama yang dianut dan dipercayainya.

Kesalehan liberatif

Tontonan keangkuhan Polri dan ketakberdayaan KPK dalam menegakkan pemberantasan korupsi tidak perlu berlarut-larut jika kita juga memiliki pemimpin yang merdeka, jujur, adil serta tegas dalam mengambil keputusan. Salah satu ciri orang takwa kepada Tuhan adalah berani berbuat karena kebenaran, bukan takut bertindak karena takut kepada sesama manusia yang dianggapnya lebih berkuasa daripada Tuhan.

Orang yang takwa dengan demikian harus memiliki pikiran merdeka, tegas dalam bertindak, dan tidak berperilaku zalim atas orang lain. Orang takwa, oleh karena itu, harus mampu berperilaku liberatif, yakni terbebas dari kerangkeng keangkuhan, kebencian, ambisi, dan bebas dari kerangkeng puji-pujian sesama manusia. Sebab pujian akan datang dan diberikan oleh Tuhan atas perkataan dan perilaku yang dikerjakan.

Semoga pemimpin dan para elite bangsa ini segera siuman sehingga karut-marut bangsa ini segera berakhir. Kesengsaraan rakyat segera beranjak menjadi kesejahteraan. Ketidakadilan berubah jadi keadilan dan kebohongan beranjak menjadi kejujuran. Umat Islam Indonesia secara khusus sebagai jamaah terbesar harus dapat menunjukkan betapa ketakwaan itu sangat penting diaktualkan dalam politik, dalam perilaku ekonomi dan etika pergaulan. Ketakwaan itulah sumber liberasi atas keangkuhan, kebencian, dan ketakadilan karena Tuhan membenci kezaliman dan kesombongan umat-Nya.

Kompas, 13 Februari 2015. Peneliti Senior Maarif Institute, Jakarta

5

INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN

Internasionalisasi Pendidikan Muhammadiyah

ABDUL MU'TI

Muhammadiyah adalah gerakan yang identik dengan pendidikan. KH. Ahmad Dahlan memulai gerakan pembaharuan Islam melalui pendidikan. *Pertama*, KH. Ahmad Dahlan meletakkan model pendidikan agama nonformal dengan memberikan ceramah agama sebelum rapat resmi Budi Utomo. *Kedua*, mengajarkan Islam sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler Sekolah Guru Yogyakarta dan Sekolah Pamong Praja (OSVIA) Magelang. Selain siswa muslim, para siswa nonmuslim juga tertarik mengikuti studi Islam (Sudja, 2010). Ketiga, mendirikan Madrasah Qismul Arqa di teras rumahnya di Kauman, Yogyakarta.

Madrasah ini mengajarkan studi agama dan sains modern. Pendidikan merupakan sarana perubahan sosial yang strategis. Prihatin melihat segregasi sosial dan *split personality* yang kronis, KH. Ahmad Dahlan mengambil solusi konstruktif melalui pendidikan. Menurut KH. Ahmad Dahlan, pendidikan yang dikotomis baik secara kurikuler maupun kelembagaan berkontribusi terhadap lahirnya sekat-sekat sosial (Arifin, 1987). Sekolah *ala* Belanda tidak mengajarkan agama sehingga alumninya awam, bahkan antiagama.

Pendidikan model pesantren yang mengharamkan sains modern melahirkan ulama yang konservatif dan anti pada kemodernan. Secara

kurikuler, KH. Ahmad Dahlan telah meletakkan dasar pendidikan dialogis, tidak memisahkan studi agama dengan sains. Madrasah Qismul Arqa merupakan institusi pendidikan baru yang menggabungkan sistem sekolah dan pesantren.

Mengajarkan agama di Budi Utomo, Kweekschool dan OSVIA merupakan strategi kultural-struktural yang tepat. Mereka adalah kaum elite yang dihormati dan berpengaruh dalam menggerakkan kaum alit.

Spirit dan Strategi Pembaharuan

Hal yang perlu dipetik oleh insan dan *stakeholder* pendidikan adalah spirit pelayanan dan pembaharuan KH. Ahmad Dahlan, bukan formatnya. Dalam banyak hal, Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem pendidikan Muhammadiyah dalam sistem pendidikan nasional. Kementerian Agama mendirikan madrasah yang di dalamnya diajarkan studi Islam dan sains modern.

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan agama bersifat *confessional* yang tidak hanya untuk mengajarkan pengetahuan agama (*learning about religion*), tetapi untuk menanamkan iman dan membentuk manusia yang bertakwa (*learning to be*). Dikotomi kelembagaan antara sekolah dan madrasah juga sudah terjadi ketika organisasi Islam mendirikan sekolah Islam.

Secara administratif, sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara kurikuler muatan kurikulumnya sama dengan madrasah di bawah Kementerian Agama. Karena itu Muhammadiyah harus berusaha menghidupkan spirit pembaharuan pendidikan.

Muhammadiyah dapat terjebak dalam *tragedy of the common* (Senge: 2012): pendidikan Muhammadiyah ciri khas dan tidak memiliki keunggulan di atas yang lainnya. Dalam realitas pendidikan sekarang ini Muhammadiyah masih menjadi institusi pendidikan yang terbesar setelah pemerintah, tetapi tidak lagi menjadi yang terdepan dan terbaik. Realitas

tersebut harus menjadi kesadaran kolektif bagi para punggawa pendidikan Muhammadiyah untuk terus melakukan pembaharuan pendidikan.

Agar tetap bisa menjadi kiblat pembaharuan, *fardhu ain* bagi para pakar dan praktisi pendidikan Muhammadiyah untuk terus-menerus mengembangkan model dan sistem pendidikan yang khas dan *genuine*. Pengembangan pendidikan holistis sebagai amanat Muktamar ke-46 yang belum terumuskan dan terlaksana perlu diagendakan secara khusus.

Internasionalisasi Pendidikan

Agenda lain yang perlu dilakukan adalah internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah. Banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang bertaraf, memiliki reputasi, dan jaringan internasional. Dalam lima tahun terakhir Muhammadiyah telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 250 mahasiswa dari Thailand selatan untuk belajar di beberapa PTM.

Selain program beasiswa, banyak mahasiswa asing yang menuntut ilmu di PTM. Para alumni PTM dapat menjadi pionir berdirinya Muhammadiyah di luar negeri, juru bicara, atau agen pembaruan Muhammadiyah. Program internasionalisasi dapat ditingkatkan di level pendidikan menengah dan pesantren. Langkah internasionalisasi yang kedua adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri.

Beberapa universitas Muhammadiyah terkemuka khususnya Malang, Yogyakarta, dan Surakarta memiliki *joint program* dan *double degree* dengan perguruan tinggi ternama di USA, Australia, Inggris, Selandia Baru, dan sebagainya. Sebagai PTM Pembina, UMS, UMM dan UMY bisa membuka jalan bagi PTM lain. Terkait dengan internasionalisasi *manhaj*, model gerakan dan kultur pembaharuannya, perlu dibuka Muhammadiyah *corner* di perguruan tinggi ternama di negara-negara Barat dan Timur Tengah.

Pertama, menugaskan dosen dan intelektual Muhammadiyah untuk mengajar di luar negeri. Kedua, menjadi sponsor para dosen dan peneliti luar negeri untuk meneliti dan menulis buku tentang Muhammadiyah.

Selain James L Peacocok, Mitsuo Nakamura, Eunsook Jung, dan Greg Fealy belum banyak ahli Muhammadiyah di level internasional.

Muhammadiyah telah menuliskan nama indah Islam dan Indonesia melalui kegiatan kemanusiaan dan perdamaian. Islam dan Indonesia semakin berkibar apabila Muhammadiyah mengepakkan sayap pendidikan di kancah internasional.

Koran Sindo, 31 Juli 2015. Penulis adalah Sekretaris PP. Muhammadiyah; Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penguatan Kaderisasi Ulama

SYAMSUL HIDAYAT

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, memerlukan kaderisasi berkesinambungan, khususnya kaderisasi ulama yang mumpuni. Sejak kepemimpinan AR Fakhruddin, keprihatinan akan krisis ulama di lingkungan Muhammadiyah hingga kini masih hangat dibicarakan.

Keprihatinan akan krisis ulama yang mumpuni (*tafaqquh*) dalam ilmu-ilmu keislaman pertama kali dibahas pada "Seminar Nasional Muhammadiyah di Pengujung Abad 20" (1985) sebelum Muktamar 41 di Surakarta. Pada seminar ini, A Malik Fadjar (waktu itu rektor UM Malang) dan KH Sjahlan Rosyidi (ketua PWM Jawa Tengah sekaligus ketua MUI Jawa Tengah) mengemukakan perlunya dibentuk laboratorium ulama di Muhammadiyah.

Dalam seminar yang sama, KH Ahmad Azhar Basyir, ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1980-1990, mengatakan, ulama yang dibutuhkan Muhammadiyah tak sekadar cerdik cendekia dalam ilmu keislaman, ulama adalah Rijaluddin, yakni ahli ilmu agama yang sekaligus mujahid dakwah dan pembimbing umat.

Keprihatinan ini perlu dituangkan dalam konsep yang kemudian disusun dalam program kerja organisasi dengan terukur dan sistematis. Muhammadiyah mulai memetakan lembaga pendidikan Muhammadiyah

untuk menjadi *pilot project* pusat pengaderan ulama mujtahid dan mujahid dakwah Muhammadiyah.

Dimulailah pusat pengaderan ulama Muhammadiyah melalui Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di Yogyakarta. Kini, disusul lahirnya beberapa pondok pesantren Muhammadiyah dan pesantren formula baru yang dikenal dengan Muhammadiyah Boarding School (MBS) di tingat pendidikan menengah (SLTP-SLTA) yang menjamur mulai Sabang sampai Merauke, yang jumlahnya 130 pesantren lebih.

Lahir pula beberapa Ma'had Aly Muhammadiyah yang dikelola sendiri oleh Muhammadiyah, seperti di Lampung, Surabaya, Malang, Makassar, dan Jakarta, juga yang bekerja sama dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF), yang kini menjamur di berbagai kota di Indonesia, yang menyediakan pendidikan bahasa Arab dan Studi Islam, serta Tahfidz al-Quran tingkat perguruan tinggi, yang jumlahnya 50 ma'had aly lebih.

Menjamurnya pondok pesantren dan ma'had aly itu mendorong terbentuknya Perhimpunan Pondok Pesantren Muhammadiyah (*Ittihadul Ma'ahid al-Muhammadiyah*) atau ITMAM. Dalam Silaturrahim Nasional (Silatnas) I ITMAM, 8-10 Mei 2015, di Pondok Pesantren Imam Syuhodo, yang dihadiri pimpinan pondok pesantren dan ma'had aly Muhammadiyah seluruh Indonesia, yang kini berjumlah 180 pondok pesantren, MBS, dan ma'had aly, dengan jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi tidak tepat lagi untuk dibina oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah karena majelis ini hanya kompatibel untuk menangani sekolah dan madrasah tingkat dasar dan menengah.

Silatnas ITMAM merekomendasikan agar Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar dapat memutuskan dibentuknya Majelis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pendi-Pontren), akan mengoordinasikan dan membina pengembangan pendidikan diniyah (madrasah diniyah, TPA-TPQ), pondok pesantren (termasuk MBS) dan ma'had aly di lingkungan Muhammadiyah, yang jumlahnya 200 unit lebih.

Terbentuk pula Majelis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Muhammadiyah dapat mulai membangun komunikasi dengan lembaga pendidikan tinggi Islam di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, seperti Universitas Islam Madinah, Univertas Ummul Qura Makkah, Universitas Imam Ibnu Saud Riyadh, Universitas Al-Azhar Kairo, dan beberapa perguruan tinggi di Sudan, Libya, Maroko, dan lainnya.

Muhammadiyah memerlukan kader ulama hasil pendidikan tinggi Timur Tengah yang mendapat pendidikan langsung dari Kibarul Ulama, yang keilmuannya diakui dunia Islam. Tentu, komunikasi dan jaringan yang selama ini sudah dirintis secara terprogram dan terlembagakan dengan pusat-pusat pendidikan tinggi di Barat, khususnya untuk studi sains dan teknologi terus dilanjutkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang).

Untuk menampilkan peran Muhammadiyah sebagai agen perubahan Islami untuk Islam dan Indonesia Berkemajuan, dengan cara menggenjot kaderisasi ulama mujtahid dan mujahid dakwah dengan menyeimbangkan, mengelola, dan memadukan produk-produk kader ulama lulusan pusat pendidikan tinggi di dunia Islam (khususnya Timur Tengah) dan produk kader ulama cendekiawan dan teknolog hasil pendidikan tinggi di dunia Barat.

Keseimbangan dan keterpaduan ilmu dan peradaban Timur dan Barat, yang dikendalikan dengan nilai ajaran Islam akan menghasilkan peradaban mulia yang dalam istilah Muhammadiyah dikenal dengan peradaban utama, sebagai ciri "Islam Berkemajuan", yang selanjutnya akan menjadi kontribusi utama bagi terwujudnya Indonesia Berkemajuan.

Keseimbangan dan keterpaduan peradaban Timur dan Barat, yang dikemudikan oleh nilai-nilai keislaman itu ditegaskan Al-Quran. "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS al-Baqarah: 115).

Muhammadiyah yang memiliki misi mengembangkan Islam Berkemajuan, yakni mengembangkan dakwah Islam untuk melahirkan peradaban yang maju dan utama berlandaskan Al-Quran dan sunah,

harus membangun dialog antarperadaban dunia, dengan mencari titik temu peradaban Timur dan Barat sebagaimana pesan Al-Quran. Dan, ke manapun orientasi hidup ini harus diarahkan kepada wajah Allah. Artinya, peradaban Islam adalah peradaban yang menyeimbangkan dan memadukan adab dan budaya Barat dan Timur yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran dan sunah untuk mengabdi kepada Allah. *Nasrun minallah*.

Republika, 30 Juli 2015. Penulis adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Dosen Unmuh Surakarta

MUHAMMADIYAH DAN PESANTREN

AZAKI KHOIRUDIN

PERHELATAN akbar lima tahunan Muktamar ke-47 Makasar sudah selesai kemarin. Pada Muktamar kali ini Muhammadiyah membawa ide "Islam Berkemajuan" dan tegaskan dirinya sebagai "Gerakan Pencerahan". Artinya, jati diri Muhammadiyah lekat sekali antara "Islam" dan "kemajuan". Tema ini begitu berat, sangat relevan dengan kondisi bangsa, bahkan dunia saat ini. Untuk mematangkan gagasan tersebut, Prof Din Syamsuddin mengadakan "Silatul Fikri" di Puncak Bogor, 24-26 Juli2015. Kegiatan diikuti 60 intelektual Muhammadiyah dari berbagai bidang keilmuan.

Dalam pembahasan "Islam Berkemajuan", yang menjadi tolok ukur utama adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Tetapi, berbasis pada pemahaman Islam. Pertanyaannya, mampukah pendidikan Muhammadiyah menjawab tantangan tersebut? Tampaknya, gerakan dari warga dan aktivis Muhammadiyah pada Muktamar Makasar ingin menyukseskan Lembaga Pengembangan Pesantren.

Padahal, kita tahu semua selama ini Muhammadiyah bergelut di dunia pendidikan, terutama sekolah dan universitas. Hal ini disinyalir gejala krisis ulama di tubuh Muhammadiyah. Makanya, Muhammadiyah mulai melirik pesantren dan perlu penguatan kaderisasi ulama.

Ijtihad Pesantren Muhammadiyah

Sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah yang fokus di dunia pendidikan, terutama sekolah. Selama ini pesantren Muhammadiyah yang terkenal adalah Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pesantren ini merupakan pesantren awal yang dimiliki Muhammadiyah.

Dalam kaderisasi ulama, Muhammadiyah memiliki Pondok Hj Nuriyah Shabran di Surakarta, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta dan Malang. Seabad berselang, Muhammadiyah berijtihad kembali di dunia pesantren. Jelang seabad, Muhammadiyah berijtihad mendirikan Muhammadiyah Boarding School (MBS) di Prambanan, Sleman.

Memasuki abad kedua, Muhammadiyah kini melahirkan Trensains sebagai revolusi pesantren berkemajuan. Trensains adalah kependekan dari "Pesantren Sains" yang merupakan sintetis dari pesantren dan sekolah umum. Trensains merupakan lembaga pendidikan setingkat SMA. Proyek baru di Indonesia, bahkan mungkin di dunia Islam. Pesantren yang fokus mengkaji dan meneliti ayat-ayat semesta Al-Quran.

Kata Trensains bermakna mengetrenkan pesantren ke masyarakat, juga berarti sains menjadi tren masyarakat hari ini. Kreator lahirnya Trensains adalah Agus Purwanto D.Sc. (Saintis Fisika Teori alumnus Universitas Hirosima Jepang). Program Trensains pertama telah berdiri di Sragen, Jawa Tengah dengan nama SMA Trensains DIMSA (Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen) yang di-*launching* pada 1 Muharam 1435 H/ 5 November 2013 oleh PP Muhammadiyah.

Kini Trensains menjadi mega proyek Muhammadiyah abad kedua. Uniknya, program ini juga dibuka di Pesantren Tebuireng Jombang yang notabene milik NU atas pemintaan Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Ini menandakan bahwa Muhammadiyah sangat terbuka melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, dan pengembangan pendidikan bersifat *rahmatan lil `alamin.*

Trensains hadir di tengah keadaan umat dan para ulama yang terlalu banyak menyita waktu untuk membahas persoalan fikih. Umat lalai atas

fenomena alam. Abai terhadap ayat kauniah yang jumlahnya lima kali lipat dari ayat kauliah. Sains seolah-olah tidak terkait dan tidak mengantar orang Islam ke surga.

Tanpa sains dan teknologi umat Islam akan jatuh dan tersungkur ke buritan peradaban. Trensains berbeda dengan "pondok pesantren modern". Trensains tidak menggabungkan materi pesantren dan ilmu umum sebagaimana "ponpes modern". Materi khas Trensains dan tidak ada dalam ponpes modern.

Trensains memiliki visi, "Lahirnya generasi yang memegang teguh Al-Quran dan Sunah, mencintai dan mengembangkan sains, dan mempunyai kedalaman filosofis serta keluhuran akhlak." Di sini pula spirit Islam Berkemajuan abad kedua dan pentingnya pesantren ala Muhammadiyah.

Urgensi Lembaga Pesantren

Setelah sukses dengan pembukaan di Lapangan Karebosi, yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Muktamar dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban kepemimpinan selama satu periode (2010-2015) dan dilanjutkan sidang komisi.

Dalam sidang komisi inilah mulai dibahas pemikiran-pemikiran besar dan program-program Muhammadiyah ke depan. Setiap ide dan gagasan, tanpa lembaga, tak akan bisa direalisasikan dengan baik. Perlahan akan menguap, dan hilang ditelan zaman. Begitu pula pelbagai model pesantren Muhammadiyah.

Perkembangan model-model pesantren Muhammadiyah harus diatur dalam lembaga khusus. Karena mengurus sekolah, perguruan tinggi itu, berbeda dengan mengurus pesantren. Pondok pesantren Muhammadiyah menjamur di seluruh Nusantara mendorong solidaritas terbentuknya Perhimpunan Pondok Pesantren Muhammadiyah (Ittihadul MaIttihadul Maahid al-Muhammadiyah) disingkat dengan ITMAM.

Muhammadiyah harus turut ikut memikirkan nasib pesantren Nusantara serta bagaimana cara pesantren yang melahirkan ulama berkemajuan. Merujuk pada Karel A Steenbrink bahwa sistem pesantren

tradisional selama ini terdiri lima elemen pokok yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab-kitab klasik.

Akan tetapi, kelemahan pesantren hari ini terletak pada segi metodologi tradisional, terlalu menekankan fikih, dan minim ilmu umum. Dari segi manajemen pesantren banyak kelemahan. Zamahkhsyari Dhofier menyebut pesantren seperti kerajaan kecil. Kiai merupakan sumber mutlak, kekuasaan dan kewenangan kehidupan pesantren, termasuk ke mana arah, visi, dan tujuan.

Padahal, kiai memiliki keterbatasan dan kekurangan. Metode yang digunakan pesantren yang digunakan kiai telah abai pada aspek kognitif. Selain itu, aspek kurikulum pesantren juga mengalami penyempitan, pelajaran agama masih dominan di lingkungan pesantren. Tasawuf sebagai inti keagamaan terabaikan. Padahal, di era masyarakat modern, religiusitas sangat dibutuhkan.

Di sinilah Muhammadiyah harus ambil bagian. Atas dasar itu, dalam Silaturahim Nasional (Silatnas ITMAM), 8-10 Mei 2015 di Pondok Pesantren Imam Suhodo, ternyata Muhammadiyah memiliki 180 pondok pesantren. Silatnas ITMAM merekomendasikan agar Muktamar ke-47 di Makassar dapat memutuskan berdirinya Majelis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dikdintren).

Tampaknya persiapan pendirian Majelis Pesantren semakin matang pada Muktamar kali ini. Sebagai ormas dakwah, pendidikan Muhammadiyah harus kembangkan pondok pesantren. Jika tidak, Muhammadiyah akan kehilangan elan vital-nya sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid.

Dengan kata lain, lembaga pendidikan pondok pesantren bisa diandalkan untuk memecahkan masalah krisis ulama dan ilmuwan Muhammadiyah. Maka, pendirian Lembaga Pengembangan Pesantren adalah sebuah keniscayaan sejarah.

Koran SINDO, 8 Agustus 2015. Penulis adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPM, Alumni Pendidikan Kader Ulama Pondok Pesantren Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran UMS

Konvergensi Muhammadiyah-NU?

PRADANA BOY ZTF

PADA awal Agustus ini, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, akan menghelat Muktamar. Masing-masing di Makassar dan Jombang. Perhelatan ini penting bukan hanya karena ini merupakan forum di mana pemimpin baru dua ormas Islam itu akan terpilih, tetapi juga karena di dalamnya akan terpetakan dinamika baru di dua organisasi ini.

Salah satu perkembangan yang bisa diidentifikasi berkaitan dengan pergeseran arah pendidikan dua organisasi ini. Selama ini, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modernis yang memberikan titik tekan pada pendidikan "sekolahan". Sementara NU dikenal luas sebagai organisasi dengan kecenderungan tradisional yang sangat populer dengan pendidikan "pesantren". Namun, belakangan kategori seperti itu barangkali tidak sepenuhnya operasional. Nyatanya, setidaknya kurang lebih satu dasawarsa ini, keduanya menunjukkan arah yang berkebalikan meskipun tidak berseberangan.

Tegasnya, Muhammadiyah kini banyak memberikan perhatian pada pendidikan pesantren dalam konteks sistem pendidikan, sementara dalam diri NU kini tumbuh berbagai pendidikan tinggi (universitas) bermodel "sekolahan".

Dalam konteks Muhammadiyah, perhatian pada pendidikan pesantren melalui pendirian berbagai pondok pesantren Muhammadiyah yang dikenal dengan sebutan Muhammadiyah Boarding School (MBS), salah satunya, didasari oleh kesadaran akan menipisnya lapisan generasi ulama di tubuh organisasi ini, terutama jika yang dimaknai sebagai ulama adalah ulama fikih.

Mengapa penekanan ulama fikih diperlukan? Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah saat ini, sering melontarkan pemikiran bahwa jika yang dimaksudkan dengan ulama adalah ahli fikih atau ilmu-ilmu agama sejenisnya, barangkali sinyalemen kelangkaan ulama di kalangan Muhammadiyah ini benar. Namun, Din menawarkan pemahaman baru tentang makna ulama. Hendaknya, ulama tidak dimaknai secara terbatas sebagai ahli agama, tetapi juga ahli-ahli dalam bidang keilmuan yang lain.

Jika ulama dimaknai secara khusus sebagai ahli dalam ilmu-ilmu keislaman, barangkali sinyalemen ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Hanya, tumbuhnya MBS yang belakangan menjadi tren pendidikan di Muhammadiyah secara tidak langsung merupakan respons terhadap sebuah situasi.

Di sisi lain, sangat mungkin lahirnya pendidikan-pendidikan tinggi di lingkungan NU belakangan ini juga dimotivasi oleh sebuah kesadaran akan minimnya perhatian pada pendidikan "sekolahan." Selain itu, sangat mungkin perkembangan baru ini juga didorong oleh perubahan sosial yang begitu deras dalam masyarakat Indonesia. Sehingga pendidikan harus selalu mengalami penyesuaian.

Karena itu, tumbuhnya pendidikan-pendidikan tinggi model sekolahan di kalangan NU ini sangat mungkin justru dimaksudkan sebagai pelengkap pendidikan pesantren yang selama ini telah demikian lekat pada organisasi ini. Kemungkinan lainnya adalah bahwa dalam diri NU kini mulai tumbuh lapisan-lapisan terdidik baru yang mengalami pendidikan pesantren di satu sisi dan lalu melengkapi pengalamannya itu dengan pendidikan-pendidikan modern. Bukan hanya di tanah air, tetapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk dunia Barat. Sehingga lapisan baru ini perlu memperoleh lahan ekspresi yang memadai.

Meskipun belum ada angka pasti yang bisa disebut, secara umum jumlah generasi muda Muhammadiyah dan NU yang mengenyam pendidikan modern di Barat boleh dibilang seimbang. Disadari atau tidak, fakta inilah yang lalu melahirkan transformasi pola dan arah pendidikan dalam konteks NU.

Maka, pada masa-masa mendatang, kenyataan ini bisa dibaca sebagai sebuah tren menuju konvergensi. Bahwa Muhammadiyah yang selama ini cenderung ”abai” dengan pendidikan pesantren mulai memberikan perhatian, sementara NU yang selama ini terkesan ”cuek” dengan pendidikan tinggi model sekolahan juga mulai bergerak ke sana. Artinya, jika pergerakan ini berjalan sebagaimana yang dicita-citakan, jarak epistemologis antara Muhammadiyah dan NU yang antara lain disebabkan oleh perbedaan model pendidikan pelan-pelan akan semakin menyempit.

Tentu saja konvergensi dalam konteks semacam itu sangat baik dan bisa memperkaya pemahaman dan corak ekspresi Islam moderat di Indonesia. Namun, ada satu hal yang perlu memperoleh penegasan: apakah benar orientasi baru Muhammadiyah ke arah pendidikan pesantren ini dibarengi dengan kemampuan Muhammadiyah untuk mengelolanya? Demikian pula, apakah benar bahwa orientasi NU ke pendidikan tinggi model sekolahan ini juga dilengkapi perangkat pengelolaan pendidikan tinggi yang memadai?

Membangun pesantren dan pendidikan tinggi ala sekolahan tidak hanya membangun gedung dan asrama, tetapi juga membangun sistem dan tradisi. Maka, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah dua organisasi ini sudah cukup memiliki tradisi dan sistem untuk mendukung orientasi barunya ini? Jangan-jangan, Muhammadiyah berhasil membangun gedung pesantren, tetapi kemudian pesantren itu dikelola dengan cara sekolahan dan minus tradisi pesantren karena Muhammadiyah terlampau lama bermain dengan sistem sekolahan. Sementara itu, meski berhasil membangun pendidikan tinggi di berbagai tempat, NU mengelola pendidikan tinggi ala sekolahan itu dengan pola tradisi dan sistem pesantren karena tradisi dan sistem ini telah lama mengakar dalam kehidupan mereka.

Muktamar masing-masing organisasi tahun ini akan menjadi salah satu tonggak penting untuk memperoleh jawaban tersebut di masa mendatang.

JAWA POS, 27 Juli 2015. Penulis adalah Dosen FAI-UMM; Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

PRODI MUHAMMADIYAH STUDIES

BENNI SETIAWAN

KEPEMIMPINAN baru Muhammadiyah telah terpilih melalui Muktamar ke-47 di Makassar yang mengamanatkan kepada Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti untuk memimpin persyarikatan lima tahun ke depan. Pelaksanaan forum itu yang berlangsung teduh dan berkemajuan pun membuncahkan harapan Muhammadiyah tetap menjadi garda depan pencerahan dan gerakan pembaruan.

Harapan itu tak terlepas dari kiprah organisasi yang dirintis sejak lebih seabad silam oleh KH Ahmad Dahlan yang meletakkan dasar pijakan bermuhammadiyah dalam praksis sosial. Hyung-Jun Kim (2010), menyebut otoritas keagamaan Kiai Dahlan diakui dari pandangan keagamaannya yang berbasis sisi praksis. Baginya, memahami kitab suci tak bisa hanya dengan menghafal dan menafsirkan.

Lebih penting dari itu semua adalah aksi nyata, mempraktikkan ajaran. Inilah yang kemudian membuat Kiai Dahlan disebut *man of action* (manusia bertindak). Ia tak hanya mendedah persoalan teks namun mencoba memahami teks yang disesuaikan dengan kehidupan sosial.

Bahkan, tak jarang ia lebih dulu membaca realitas sosial sebelum membenarkannya dalam artikulasi teks suci. Sebagaimana dikisahkan, Kiai Dahlan muda tak bosan mengajarkan Surah Al-Maun kepada murid-

muridnya. Sampai suatu saat, murid merasa bosan dengan pelajaran itu. Suatu ketika, Kiai Dahlan bertanya, "Apakah kamu sudah mengamalkan ayat itu? Sudah berapa anak yatim kamu santuni?"

Seketika para murid terdiam, dan bergegas meninggalkan majelis untuk mencari anak yatim guna mereka santuni. Dalam tafsir terkini, Muhammadiyah berupaya menyelamatkan kekayaan dan aset bangsa melalui jihad konstitusi. Perjuangannya dalam uji materi perlu terus dipacu, ditambah mengembangkan jejaring pengusaha Muhammadiyah. Pengusaha persyarikatan ini penting mengingat di abad awal Muhammadiyah dipenuhi para pedagang.

Jiwa dagang inilah yang dengan cepat menyebarkan paham Muhammadiyah ke seantero negeri tanpa terbatas waktu. Kini Muhammadiyah dipenuhi banyak pegawai, yang memungkinkan geraknya melambat. Pasalnya, jam pegawai telah diatur sehingga kerap waktu untuk bermuhammadiyah tinggal sisa-sisa jam kantor.

Muhammadiyah Studies

Pengusaha Muhammadiyah sudah selayaknya kembali menjadi spirit dakwah. Melalui bidang ini, Muhammadiyah bisa menjadi saka perekonomian bangsa. Muhammadiyah akan menguatkan kebangsaan di tengah kemembanjiran produk asing di era MEA dan AFTA. Kelahiran jejaring pengusaha Muhammadiyah ini tak lepas dari tafsir Surah Al-Ashr (103) yang sering diajarkan Kiai Dahlan.

Surah ini setidaknya mengandung empat pilar utama, yaitu iman (paradigma tauhid), dipahami dari penggalan ayat *amanu*; ilmu dan teknologi, yang dipahami dari penggalan ayat *wa tawa shau bil haq*; kerja keras, produkif, mendapat pengakuan dari sesama manusia ataupun rida Allah, dipahami dari penggalan ayat *wa 'amilus shalihat*; moralitas atau akhlak, dipahami dari penggalan ayat w*a tawa shau bi al-shabr*. *Shabr* atau kesabaran merupakan simbol tertinggi moralitas.

Empat pilar tersebut akan menjadi sebuah ''laku" bila dilakukan berjamaah. Pasalnya, Surah Al-Ashr menggunakan bentuk jamak dalam

meningkatkan kualitas hidup manusia, sebagaimana penyebutan *amanu*, *amilu*, dan *tawa shau*. Melalui pemaknaan itu, Muhammadiyah selaras dengan ancangan Hannah Arendt.

Muhammadiyah telah membuktikan diri berada pada taraf ketiga atau puncak dalam *vita activa*. Muhammadiyah seabad lampau telah melampaui zamannya, bertindak, tak sekadar bekerja dan berkarya. Kini pada abad kedua, Muhammadiyah perlu terus mengasah kemampuan untuk dapat mengurai persoalan keumatan seperti kelangkaan pangan, menyempitnya lahan pertanian, kekeringan, kekurangan pangan, menggejalanya konflik, dan runtuhnya moralitas.

Berbekal visi Islam Berkemajuan, Muhammadiyah akan mampu mengurai masalah itu. Guna mendukung hal itu, kepemimpinan baru selayaknya mengembangkan kajian secara lebih serius dan memadai, melalui penyiapan dan pembukaan studi tentang Muhammadiyah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan tajuk (program studi) Muhammadiyah studies, saya kira banyak orang mau belajar di perguruan tinggi tersebut. Program itu merupakan langkah mudah dalam proses internasionalisasi melalui jalur akademis. (10)

Suara Merdeka, 11 Agustus 2015. Penulis adalah Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dosen Universitas Negeri Yogyakarta

Internasionalisasi Pendidikan Muhammadiyah

Benni Setiawan

SEABAD lebih Muhammadiyah berkiprah di dunia pendidikan. Ribuan lembaga pendidikan telah menjalani jutaan penduduk Indonesia. Setelah terbukti melayani Republik, saatnya pendidikan Muhammadiyah melayani dunia internasional. Pertanyaannya apa yang mau "dijual"?

Pendidikan Muhammadiyah mampu bertahan dan menginspirasi Nusantara karena ia memiliki kekhasan. Kekhasan itu terletak pengkajian Al-Quran sebagai basis sosial. Misalnya kajian terhadap Surat al-Maun (107: 1-7). Dalam beberapa literatur tafsir klasik, Surat al-Maun hanya menjelaskan sifat-sifat manusia yang buruk dan membawa mereka ke dalam kesengsaraan. Namun, di tangan Kiai Dahlan surat ini menjadi sekolahan, rumah sakit, dan panti asuhan.

Tafsir surat al-Maun ini dalam pandangan Abdul Munir Mulkhan (2005) sebagai referensi aksi pemberdayaan kaum tertindas atas pertimbangan pragmatis dan humanis, seperti aksi pemberdayaan kaum perempuan di ruang publik. Gagasan dan aksi sosial Ahmad Dahlan didasari pandangan tentang kesesuaian natural tafsir Al-Quran, pengalaman kemanusiaan universal, dan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Bagi Kiai Dahlan, ukuran kebenaran tafsir Al-Quran dan temuan iptek ialah sejumlah bukti kemanfaatannya bagi penyelesaian problem universal kemanusiaan.

Kajian Kiai Dahlan itu kini setidaknya tercermin dari pengembangan sekolah sains oleh Agus Purwanto, di Sragen Jawa Tengah. Melalui *Ayat-ayat Semesta* dan *Nalar Ayat-ayat Semesta* ia mengajarkan tentang pengkajian teknologi berbasis Al-Quran.

Revolusi Kesadaran

Lebih dari itu, tafsiran geneuin ini merupakan sebuah revolusi kesadaran bagi bangsa Indonesia. Kiai Dahlan tidak menggunakan instrumen kekerasan ataupun politik dalam melakukan transformasi sosial. Dia lebih menekankan bagaimana mengubah kecenderungan saat itu yang masih meminta kesembuhan ke dukun, bodoh, dan dhuafa dengan cara damai melalui media menyediakan sekolah dengan sistem modern, rumah sakit, dan mendirikan panti asuhan.

Dapat dikatakan, Kiai Dahlan mendidik masyarakat melampaui kesadaran kritis. Tidak sekadar mempunyai kecerdasan, pengenalan diri, namun berpihak orang lain (*mustadh'afin*). Proses kreatif yang pernah dipraktikan Kiai Dahlan selayaknya menjadikan pendidikan ala Muhammadiyah diterima di tingkat internasional. Pendidikan ala Muhammadiyah tak sekadar berorientasi nilai dan kerja. Namun, meletakkan posisi manusia pada kemanusiaan, sehingga ia bermanfaat bagi manusia lain. Belajar dari teks menuju pemahaman universal untuk kemanusiaan.

Spirit inilah yang tentu membedakan pendidikan ala Muhammadiyah dibandingkan yang lain. Pendidikan ala Muhammadiyah tak hanya melahirkan masyarakat terdidik. Namun, mereka menjadi pemrakarsa perubahan sosial. Hal ini tampak dari kerja sosial yang dimulai dari basis pendidikan menuju praksis sosial (pelayanan untuk umat).

Sebagaimana catatan Haji Muhammad Syoedja', *Cerita tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja'* (2009), misi PKO adalah merawat orang Islam yang sakit sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabiyullah. Apa yang dikerjakan adalah menyalurkan jariyah untuk menolong orang sakit. Demikian pula dengan panti asuhan. Panti asuhan bukan hanya sarana menghimpun orang-orang miskin, namun

juga memandirikan mereka. Kemandirian orang miskin akan mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan yang layak dan menopong ekonomi bangsa dan negara.

Kemauan

Internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan ala Muhammadiyah telah terbukti bertahan dan berinovasi dalam kehidupan. Satu kata kunci internasionalisasi adalah kemauan Muhammadiyah untuk menularkan kerja nyatanya kepada masyarakat internasional.

Pendidikan ala Muhammadiyah tidak hanya sekadar mendidik. Namun, mengajarkan siswa untuk mengembangkan hasil pendidikan itu menuju pemihakan. Saat semua siswa mampu melakukan itu, maka ketimpangan sosial akan hilang dengan sendirinya.

Pada akhirnya, internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah adalah menjual gagasan pemihakan terhadap kaum mustadhafin berbasis Al-Quran. Pendidikan bukan hanya untuk diri sendiri. Namun, pendidikan selayaknya mampu mengantarkan manusia pada posisi bermanfaat bagi orang lain.

Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 2015. ***Penulis adalah Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta***

KH Ahmad Dahlan dan Sepak Bola

M SUKRIYANTO AR

KETIKA pergi haji yang kedua (1903), KH A Dahlan oleh kemenakannya KH Baqir diperkenalkan dengan para ulama terkenal yang pada waktu itu juga berhaji, antara lain Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Oleh beliau, KH A Dahlan diberi beberapa kitab antara lain kitab Tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad Abduh.

Menurut muridnya KRH Hadjid, dalam tafsir itu ada 37 surah, tetapi yang diulang-ulang oleh KH A Dahlan hanya surah al-Ashr. Mengapa surah al-Ashr itu menarik bagi KH A Dahlan? Karena, kandungan al-Ashr menurut Imam Syafi'i sangat luar biasa sehingga beliau menyatakan, "Seandainya Allah tidak menurunkan surah lain kecuali surah al-Ashr, itu sudah cukup." Pernyataan itu kemudian dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Muhammad Abduh.

Kemudian, beliau mengajarkan dan mendidikkan surah al-Ashr kepada murid-muridnya agar mengamalkannya. Karena begitu pentingnya surah al-Ashr itu, menurut KRH Hadjid (murid termuda), KH A Dahlan mendidikkannya sampai lebih dari tujuh bulan. Bahkan, menurut Kiai Djazuli (guru Madrasah Muallimin Muhammadiyah 1926-1956), sampai sekitar delapan bulan.

Dengan model mendidik seperti itu, murid-muridnya memiliki kebiasaan disiplin waktu, memanfaatkan waktu untuk amal kebaikan (amal saleh), dan memiliki spirit al-Ashr yang luar biasa. Mereka memiliki semangat untuk maju dan menjadi modern dengan melakukan amal kebaikan (amal saleh), semangat belajar, semangat bekerja keras, dan semangat korektif demi kemajuan.

Spirit al-Ashr itu kemudian mendorong pemuda-pemuda Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Farid Makruf (pernah jadi Menteri Muda Urusan Haji, zaman Bung Karno) untuk membangun lapangan olahraga. Dengan spirit al-Ashr itu mereka menggalang warga Muhammadiyah untuk berwakaf lahan guna membangun lapangan olahraga.

Dengan menggelorakan spirit al-Ashr itu, akhirnya banyak warga Muhammadiyah yang berpartisipasi membeli dan mewakafkan lahan untuk membangun lapangan bola itu. Ada yang membeli setengah meter, ada yang satu meter, ada yang 10 meter, ada yang 50 meter, dan ada yang 100 meter. Bahkan, ada yang lebih dari itu.

Akhirnya terbelilah lebih dari dua hektare lahan yang cukup untuk membuat lapangan bola. Di lahan seluas sekitar dua setengah hektare lebih itu kemudian dibangun lapangan sepak bola. Arsitek dan pimpinan pembangunan itu diserahkan kepada Ir. Suratin Sosrosugondo. (RM Ngabehi Sosrosugondo adalah teman dan guru KHA Dahlan). Ir Suratin adalah salah seorang pendiri PSSI (19 April 1930) dan ketua PSSI pertama (1930-1940). Setelah selesai lapangan itu dinamakan Lapangan ASRI (sekarang sebagian untuk kampus UMY lama) dengan harapan agar lapangan itu dijadikan pusat kegiatan anak-anak muda yang memiliki *spirit al-Ashr* (ingin maju). Lapangan itu kemudian dijadikan tempat latihan Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan (PS HW). Karena itu, dulu di lingkungan Muhammadiyah banyak terdapat klub sepak bola, yang dikenal dengan PS HW. Ada PS HW Kota, PS HW Bantul, PS HW Sleman, PS HW Gunung Kidul, PS HW Solo, PS HW Banjarmasin, PS HW Malang, dan lain-lain. Dari sekian banyak klub itu, PS HW pernah melahirkan pemain kelas nasional, seperti Djamiat Dalhar (PS HW Yogya kemudian pindah ke

UMS Jakarta) dan Anjik Alinurdin (PS HW Malang). Sayang, klub-klub PS HW ini sekarang banyak yang kurang terbina bahkan banyak yang mati.

Saat PSSI sedang "sakit", terpuruk, dan banyak dilanda kasus suap ini, kiranya Muhammadiyah perlu menggalakkan kembali PS HW di berbagai daerah untuk berkontribusi, menolong persepakbolaan Indonesia. Diharapkan Muhammadiyah kembali bisa berkontribusi untuk membentuk pengurus dan pemain yang tidak bisa disuap seperti Ir Suratin Sosrosugondo (mantan ketua PSSI), Abdul Hamid BKN (mantan bendahara PSSI), pemain seperti Djamiat Dalhar, Anjik Alinurdin, dan lain-lain. Semoga Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar bisa memasukkan pembinaan kembali PS HW sebagai salah satu program Muhammadiyah.

Republika, 29 Juni 2015. Penulis adalah Ketua PP Muhammadiyah

Momentum Kesadaran Teknokratis Muhammadiyah

M Muchlas Rowi

Dalam belantara diskursus dan pewacanaan kebangsaan, terutama ketika mendekati pemilu atau pun ajang Muktamar, Muhammadiyah kerap diperhadapkan dengan adanya dua desakan, baik berasal dari publik maupun kadernya sendiri.

Desakan agar Muhammadiyah mulai melek secara politik di satu sisi, dan di sisi lain desakan agar Muhammadiyah tetap pada khitahnya dengan berada pada jalur dakwah kultural. Dua hal ini pun terkadang makin ramai diperbincangkan, manakala kader-kader Muhammadiyah harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa kian minimnya jumlah kader persyarikatan yang masuk dalam kontestasi politik dan pemerintahan.

Sementara, bila realitas yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kader-kader persyarikatan berbondong-bondong ikut dalam kontestasi politik dan pemerintahan, maka kondisi tersebut disebut-sebut sebagai pertanda dari "runtuhnya gerakan kultural Muhammadiyah."

Posisi tersebut seakan menjadi badai krisis pemikiran dan kritik paradigmatik yang menerpa dan menghujam Muhammadiyah. Karena menurutnya, sejak awal berdiri Muhammadiyah telah menahbiskan diri sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar.*

Lompatan Kuantum

Secara epistemologi-ontologis, Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan yang lahir dari hasil penalaran wahyu dan realitas lokal sejak Ahmad Dahlan, yang lahir sebagai sedimentasi pengetahuan yang bercikal bakal pada lontaran pertanyaan nalar kritis atas tradisi lokal yang *despotic* dan *chaos*.

Oleh karena itu, dalam belantara diskursus dan pewacanaan kebangsaan, Muhammadiyah harus tetap pada khitahnya dengan berada pada jalur dakwah kultural. Mengabdi untuk kepentingan bangsa dengan mengayomi semua partai politik dengan posisi yang sama selama bertujuan untuk mendorong amar maruf nahi munkar ke arah gerakan politik.

Kritikan ini untuk sementara bisa diterima terutama dengan alasan godaan politik memang akan menimbulkan lompatan kuantum dalam Muhammadiyah; dari kesadaran hermeneutis menuju kesadaran teknokratis. Dari penciptaan makna secara kultural menuju penciptaan makna secara teknis.

Namun perlu diingat, satu hal dengan perubahan ini bukan berarti Muhammadiyah akan kehilangan makna dan memunculkan kefanaan muatan-muatan tradisi dakwah kultural. Sebaliknya perubahan ini akan membawa Muhammadiyah menjadi semakin dekat kepada tujuan *dakwah amar maruf nahi munkar*. Sebagai produk modernitas Muhammadiyah seharusnya dipandang sebagai lembaga/ ormas yang tidak bebas nilai dan final.

Karena walau bagaimanapun, Muhammadiyah yang berakar dari proyek geneologinya KH Ahmad Dahlan, hanyalah sebagai daur ulang klaim-klaim revivalisme Islam yang dimamahbiakkan Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afghani puluhan tahun silam yang merujuk pada klaim *Ar-ruju ila al-Quran wa as-Sunnah.*

Klaim-klaim yang diperkenalkan pada masa pencerahan yang tentu saja agar mudah diatur, diadministrasi dan mudah dikontrol oleh kekuatan asing. Klaim keislaman yang dihegemoni menjadi sebuah wajah yang tetap eksotis, spiritual, mistis, kultural dan lemah.

Sang Timur (baca: Islam) yang dikehendaki *the other* adalah Islam yang baik, tetap mistis, moderat, kultural dan tentu saja dalam bahasa subversif adalah bodoh atau apa yang dikenal dalam bahasa Lacan sebagai Islam yang dipaksa untuk melakukan identifikasi diri, subjektivikasi dan becermin dalam cermin eksistensi (*the mirror stage*), identifikasi diri menuju Islam yang sebenarnya, menuju Islam yang kultural dan Islam yang moderat dan lemah.

Identifikasi diri yang memudahkan barat untuk mengontrol Sang Timur. Identifikasi diri memunculkan multikulturalisme pragmatis, purifikasi Islam, pencerahan islam ataupun arabisasi Islam. Bahasa purifikasi, pemurnian Islam adalah bahasa yang paling disukai *the other* karena Islam hasil purifikasi meniscayakan muslim yang baik; bebas dari takhayul, bidah dan khurafat tapi lemah spirit perlawanannya.

Karena itu, hasil purifikasi yang mengarah pada fundamentalisme tentu saja tidak dikehendaki, karena mengancam alih-alih yang mengarah pada radikalisme dan bahkan terorisme Dalam iklim demokrasi, kekuatan Islam politik merupakan yang paling ditakuti oleh siapa pun dalam dunia ini, maka tak heran bila Samuel P Huntington dalam bukunya *Who Are We?*

Mengatakan, *"Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice"* Bahwa hanya Islamlah yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan peradaban Barat. Tengoklah bagaimana partai FIZ di Aljazair, Hizbullah di Palestina, partai keadilan di Turki, atau bahkan partai-partai Islam di negeri kita sendiri harus mengalami perlakuan yang sangat tidak demokratis atau bahkan anarkistis hanya untuk menggagalkan kemenangan partai-partai Islam dalam proses demokrasi.

Penggerak Kemajuan Zaman

Di era kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah sebetulnya telah mulai bermetamorfosa menjadi sebuah gerakan Islam yang meskipun menghendaki adanya purifikasi Islam (*al-tajrid*) namun juga menghendaki

adanya gerakan pembaharuan (*al-Tajdid*), seperti keberhasilan dalam melakukan jihad konstitusi berupa gugatan terhadap UU Migas dan UU Sumber Daya Air.

Dalam konteks kebangsaan, persyarikatan Muhammadiyah jelas telah melakukan lompatan kuantum yang tentu saja belum mampu dilakukan oleh gerakan Islam lainnya. Pada dasarnya, ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan syariat Islam dus juga tujuan Muhammadiyah. Pertama adalah prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivikasi.

Muhammadiyah sejak awal tentunya sudah melakukan itu. Kedua, kontekstualisasi budaya dan masyarakat, ini pun telah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak asing dan telah dilewati oleh Muhammadiyah. Ketiga, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, tentu diperlukan perjuangan politik dan pembuktian-pembuktian secara empiris dan teknis.

Berpolitik hanyalah sebuah alat, substansinya adalah tujuan *baldatun toyyibathun warobbun ghafur.* Munculnya kesadaran teknokratis memang bukanlah ide baru dalam Muhammadiyah tapi tetap harus dihadapi secara arif dan bijaksana. Kemunculannya bisa saja melahirkan kader-kader baru yang akan menjadi pendulum dan pendobrak peradaban atau melahirkan generasi-generasi Muhammadiyah dan Islam yang malah melemahkan diri sendiri.

Karena walau bagaimanapun, kesadaran politis akan memaksa dirinya untuk melakukan identifikasi kultural yang meniscayakan multikulturalisme, karena akan lebih banyak bersentuhan dengan golongan-golongan lain yang juga memiliki kesadaran yang sama. Problem identitas dan ideologi tentu saja harus segera diselesaikan Muhammadiyah, karena bila tidak kesadaran politis hanya akan mengarah pada pragmatisme.

Sementara, bila pragmatisme menjadi motivasi utama, maka tentu saja Muhammadiyah bukan saja kehilangan makna tapi juga kehilangan legitimasi dan eksistensi. Dan oleh karena itu, sebagaimana kata Robert Spencer, "Kemajuan spiritual dan material terikat secara dialektis, dan

bahwa interaksi seperti itu menjadi penggerak kemajuan peradaban" atau Islam Berkemajuan dalam bahasa Muhammadiyah saat ini.

Kesadaran politis, kesadaran ilmiah dan kesadaran historis harus menjadi semacam triumvirat kesadaran; satu sisi saja hilang dari ide gerakan Muhammadiyah maka praktis tidak lagi menjadi triumvirat; alih-alih perubahan yang terbentuk malah kehancuran yang di ambang mata.

Koran SINDO, 1 Agustus 2015. Penulis adalah Aktivis Muhammadiyah

Aktualisasi Pendidikan Profetik

MUHBIB ABDUL WAHAB

SALAH satu isu yang mengemuka dalam rapat kerja PP Muhammadiyah di Yogyakarta, 21-22 November 2015, adalah bagaimana Muhammadiyah yang memiliki jargon "Islam berkemajuan" itu mampu mengembangkan pendidikan berkemajuan yang integratif holistik. Salah satu pekerjaan rumah yang belum tuntas, baik oleh perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) atau perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), adalah formulasi model integrasi keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan.

Model pendidikan Islam yang dikembangkan juga perlu mendapat penajaman dan penguatan, termasuk menjadi model pendidikan Islam berkemajuan yang dapat mengisi kekurangan sistem pendidikan nasional. Diakui bahwa pendidikan nasional kita masih jauh dari harapan, baik dari mutu layanan, sarana dan prasarana yang disediakan, maupun lulusan yang dihasilkan.

Meskipun sudah diterbitkan PP No 19 Tahun 2005 tentang delapan standar nasional pendidikan, wajah dunia pendidikan kita masih banyak belum memenuhi standar. Daya saing lulusan pendidikan kita masih rendah. Salah satu kritik adalah rendahnya profesionalitas guru dan mutu lulusan. Masih banyak guru belum berpendidikan strata satu (S-1). Tidak

sedikit guru mengajar bidang studi yang bukan keahliannya. Setelah disertifikasi, baik melalui portofolio maupun PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), kinerjanya cenderung tidak meningkat.

Secara umum, pendidikan tinggi di Tanah Air masih "melahirkan" sebagian lulusan yang korup. Fakta menunjukkan, hampir semua koruptor yang kasusnya ditangani KPK adalah lulusan perguruan tinggi ternama. Hal ini menunjukkan, lulusan perguruan tinggi di negeri ini masih belum memiliki integritas tinggi, masih mudah tergoda kekuasaan dan kemewahan duniawi, dan masih gampang terjerat sistem birokrasi dan perpolitikan yang korup daripada mengubah dan membenahi sistem dengan menjadi bersih dan bebas korupsi. Pada level sekolah menengah pertama dan atas, tidak sedikit peserta didik kita menjadi pengguna narkoba dan miras, terlibat tawuran, pergaulan bebas, gemar berpesta dan menonton film porno, dan sebagainya. Padahal, mereka adalah remaja harapan bangsa yang seharusnya belajar menjadi pemimpin masa depan, bukan merusak diri dan menjadi calon generasi yang hilang.

Apa yang masih kurang dari sistem pendidikan nasional kita, yang sering ditandai dengan adagium "setiap ganti menteri ganti kurikulum"? Tampaknya dari segi sistem, pendidikan kita relatif sudah baik. Yang belum sepenuhnya baik adalah manusianya: pemimpin pendidikan, pendidik, dan lulusannya. Membangun sistem pendidikan yang baik tidak cukup efektif untuk mewujudkan visi-misi pendidikan nasional tanpa membangun integritas dan membentuk karakter manusianya, karena sistem itu bisa berjalan baik jika manusia yang menjalankan sistem itu juga baik moralnya.

Di antara yang kurang dari sistem pendidikan nasional adalah figur pemimpin, negara maupun lembaga pendidikan, dan pendidik profetik. Pemimpin kita belum mampu menghadirkan kepemimpinan dengan cinta dan kasih sayang. Pemimpin kita masih cenderung bergaya transaksional, mementingkan partai politiknya daripada rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan nasional belum mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik.

Mengapa pendidikan profetik (*prophetic education*) perlu diaktualisasikan dalam konteks pendidikan Islam dewasa ini? Sejarah menunjukkan,

Nabi Muhammad SAW sukses mendidik para sahabatnya. Padahal, semula dimusuhi oleh masyarakatnya dan dihadapkan pada aneka keterbatasan fasilitas yang menunjang proses pendidikan. Nabi SAW berhasil melakukan transformasi edukasi bukan karena sistem pendidikan yang ada sudah mapan, melainkan karena kepribadian dan keteladanannya dalam mendidik. Beliau mendidik umatnya dengan cinta sepenuh hati, kata dan perbuatan nyata terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan profetik yang diteladankan Nabi SAW merupakan model pendidikan paling ideal yang tetap relevan untuk diaktualisasikan di zaman sekarang. Pendidikan profetik dibangun berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (akidah tauhid yang benar), nilai-nilai kemanusiaan (simpati, peduli, menghargai perbedaan, menghormati kebinekaan), dan nilai-nilai akhlak mulia (jujur, amanah, sabar, baik hati, ikhlas berbagi).

Pendidikan profetik diintegrasikan dengan "ikatan suci dan etos jamaah", yaitu masjid sebagai basis pemersatunya. Lembaga pendidikan kita, termasuk UIN, tampaknya masih mengalami kegersangan spiritual. Pengembangan nalar akademis-kognitif masih lebih dominan daripada penanaman afeksi cinta kasih humanis. Transfer pengetahuan masih menjadi mata ujian paling menentukan kelulusan daripada perilaku moral keseharian yang baik dari para peserta didik.

Idealnya, pendidikan Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dan lainnya bisa mengembangkan model pendidikan profetik. Karena itu, pendidikan profetik yang dikembangkan harus bervisi pemajuan peradaban rahmatan lil 'alamin, sementara visi pendidikan nasional baru sebatas mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 Sisdiknas). Pendidikan profetik tidak hanya membentuk peserta didik yang memiliki integritas moral yang kuat, tapi juga berorientasi membangun peradaban umat.

Sesungguhnya pendidikan profetik tidak hanya didasari empat pilar ala UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar

untuk mewujudkan jati diri, dan belajar untuk hidup dalam kebersamaan, tapi juga spirit ibadah sebagai tujuan hidup, membumikan *maqashid as-syari'ah* (tujuan syariah: menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama, akal, jiwa, kehormatan, properti, lingkungan, dan kemanusiaan), dan mewujudkan peradaban dunia yang adil, makmur, dan berkemajuan.

Pendidikan profetik yang diteladankan Nabi SAW bukan terletak pada formalisme administrasi dan birokrasi yang membatasi dan menghambat tumbuhnya kreativitas, tapi terletak pada figur teladan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam mewujudkan sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, moral, dan sistem lainnya yang terintegrasi dan terkoneksi dengan muraqabatullah (merasa diawasi oleh Allah langsung) sekaligus taqarrub ila Allah (pendekatan diri kepada Allah).

Dalam konteks ini, model pendidikan Islam harus bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dirinya dan membangun peradaban bangsa yang berkarakter kuat dan konstruktif, menyiapkan lulusan yang shalih dan mushlih (pembangun peradaban). Model pendidikan profetik yang berpusat pada keteladanan insan-insan pendidikan (pemimpin, pengelola, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan) layak dijadikan salah satu katalisator dalam membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan nasional ke depan.

Krisis keteladanan dalam insan pendidikan nasional perlu diatasi dengan mengambil spirit pendidikan profetik, dengan menempatkan akhlak mulia (integritas moral dan kedalaman spiritual) sebagai penciri utama lulusan pendidikan Islam, di samping cerdas berilmu, terampil berbahasa dan berkarya, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi bangsa dan umat manusia. *Wallahu a'lam bi as-shawab*!

Republika, Senin, 23 November 2015. Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah.
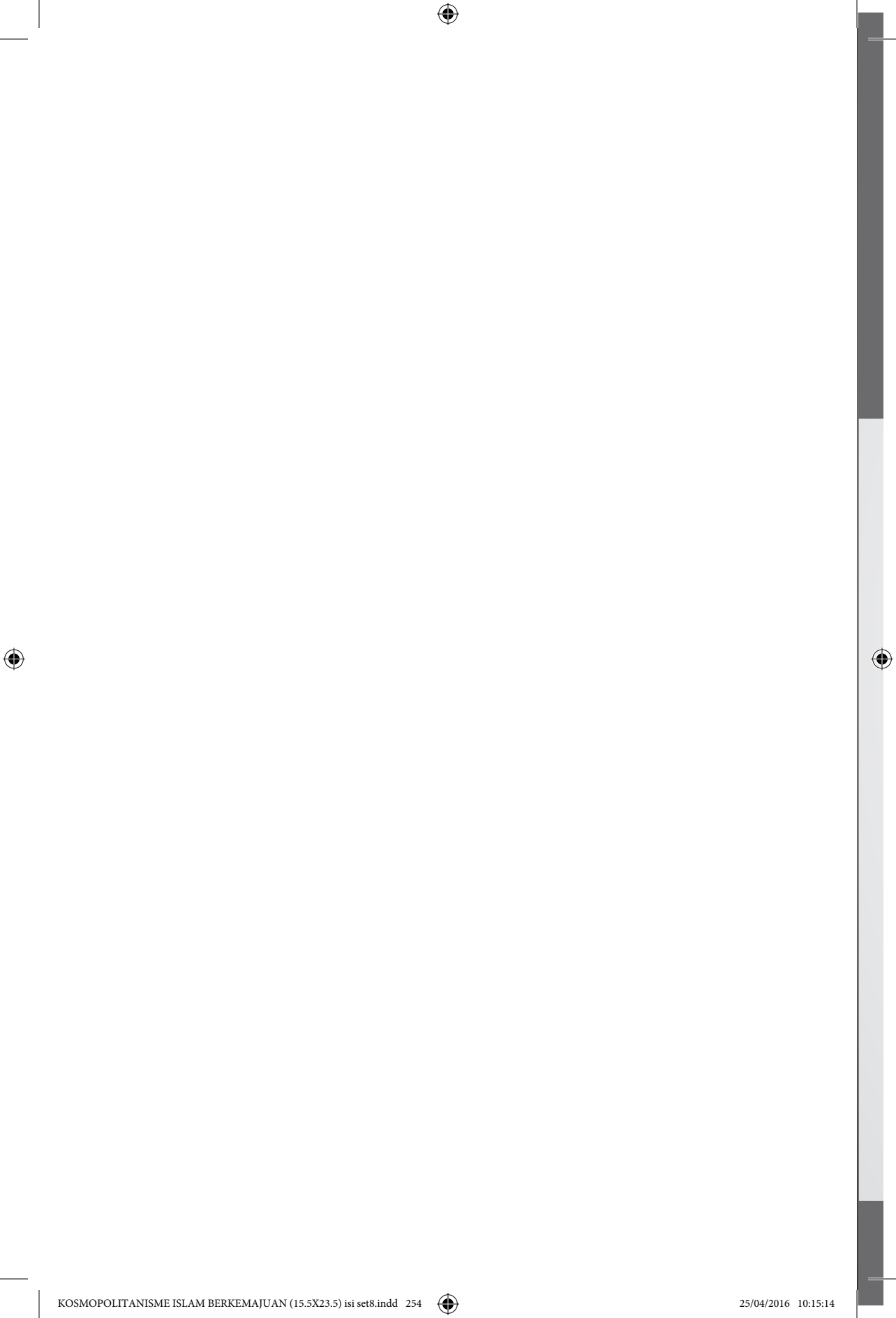
6

IJTIHAD POLITIK

Amal Usaha Politik Muhammadiyah

ZULY QODIR

"Muhammadiyah tidak melarang kader-kadernya untuk berpolitik praktis atau politik kepartaian.... Muhammadiyah hanya membatasi kadernya yang menjadi pengurus harian tidak rangkap jabatan dalam partai politik."
—Din Syamsuddin, 2014

MUHAMMADIYAH akan melaksanakan Muktamar ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar ini memiliki momentum politik dan kultural yang kuat.

Secara politik, Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia yang tak terlibat secara resmi dalam perhelatan politik kepartaian. Sementara secara kultural, Muhammadiyah telah mendedikasikan sebagai gerakan pencerahan dan pembaruan dengan pelbagai amal usaha yang dilakukan.

Memiliki dan Dimiliki

Pernyataan ketua umum PP Muhammadiyah yang dikutip di awal tulisan ini secara tegas memberikan kebebasan pada kader Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam politik praktis atau politik kepartaian. Namun,

sering kali pernyataan di atas banyak disalahpahami sehingga seakan-akan Muhammadiyah melarang kadernya berpolitik, sehingga ada banyak kader Muhammadiyah yang ketakutan untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan beberapa amal usaha Muhammadiyah secara tegas kemudian membuat surat edaran atau surat keputusan tentang larangan warganya terlibat di politik praktis jika tetap berada di amal usaha Muhammadiyah.

Sekarang Muhammadiyah telah "keluar dari politik praktis", yakni mendirikan partai politik atau menjadi bagian resmi partai politik. Tetapi, perubahan struktur sosial politik Indonesia terus berubah dan semakin membutuhkan kontribusi dari ormas Islam, seperti Muhammadiyah. Terutama ketika kondisi bangsa sedang karut-marut karena persoalan ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, serta korupsi yang menggila.

Belum lagi persoalan politik berbiaya tinggi dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pilkada. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah akan berdiam diri melihat kondisi semacam itu? Tentu Muhammadiyah tidak sepatutnya berdiam diri melihat bangsa ini kocar-kacir akibat berbagai persoalan yang terus menghadang di depan hidungnya.

Memerhatikan kondisi sosial politik yang terus berubah semacam itu, Muhammadiyah harus berkontribusi konkret dalam dunia politik praktis. Politik praktis tidak bisa hanya ditunggu untuk kemudian dihadiahkan kepada Muhammadiyah atau Muhammadiyah meminta hadiah kepada para pemegang kursi kekuasaan karena telah memenangi pertarungan dalam berbagai pemilu. Muhammadiyah dalam berpolitik praktis "harus berkeringat" atau turut berkorban atau dalam bahasa Jawa sering dikatakan *jer basuki mawa bea*. Segala sesuatu harus ada ongkos atau usaha, tak asal menunggu pemberian/hadiah.

Oleh sebab itu, Muhammadiyah memasuki abad keduanya ini, hemat saya, harus memikirkan secara serius bahwa amal usaha politik praktis merupakan amal usaha yang sama mulianya dengan amal usaha pendidikan, pendirian rumah sakit, pendirian panti asuhan yatim piatu serta pendirian usaha ekonomi. Amal usaha politik agaknya memang harus benar-benar dipikirkan agar Muhammadiyah menjadi bagian dari "politik praktis Indonesia". Oleh karena itu, Muhammadiyah harus memikirkan agar "memiliki atau dimiliki" oleh partai politik di negeri ini.

Untuk menuju pada amal usaha politik Muhammadiyah, hal ini bisa dilakukan melalui sidang-sidang atau diskusi-diskusi serius menjelang Muktamar di Makassar, kemudian dimatangkan dalam sidang-sidang komisi, sidang tanwir dan kemudian ditanfidz sebagai keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar bahwa amal usaha politik merupakan amal usaha Muhammadiyah. Jika hal ini berhasil, maka ini sekaligus menepis anggapan salah paham yang selama ini berkembang bahwa Muhammadiyah melarang kader-kadernya untuk berpolitik praktis atau berpolitik kepartaian.

Reorientasi Gerakan Politik

Dalam pernyataan pemikiran Muktamar Satu Abad Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta, dikatakan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan keislaman yang berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan bagi kehidupan warga persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Berdasarkan pada pernyataan pemikiran tersebut, secara implisit ataupun eksplisit memberikan kerangka pemikiran dan arah kerja Muhammadiyah yang ditujukan untuk kemajuan bangsa, negara, dan kemanusiaan tanpa pandang derajat, kelas sosial, suku, agama, dan etnis tertentu.

Kehendak untuk berkemajuan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk berkemajuan dalam pemikiran keislaman, adalah untuk menjadikan Islam Indonesia yang mampu menjadi pengayom, penyelamat, serta menghargai umat lain sebagai bagian dari dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang berlandaskan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Kehendak tersebut sebenarnya telah dituangkan pula secara tegas dalam pernyataan pemikiran tersebut bahwa Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang bersifat moderat (*tawasuth*), bukan ekstrem kanan atau ekstrem kiri, serta menjadikan NKRI sebagai negara yang telah selesai sebagai hasil konsensus nasional yang telah final. Oleh sebab itu, Muhammadiyah secara resmi telah menjadikan NKRI sebagai negara yang final, bukan bentuk negara yang lain.

Berkaitan dengan hal itu, maka yang perlu diperhatikan dan dikerjakan Muhammadiyah untuk 5-10 tahun mendatang, bahkan mungkin pula seterusnya, adalah terus mendorong dan menjadikan Islam Indonesia sebagai kekuatan memakmurkan negeri, memerdekakan, serta membuat keadilan tanpa adanya diskriminasi oleh kelompok-kelompok kecil yang sering kali "membajak Islam" dengan pandangan bahwa Indonesia tidak sesuai dengan Islam serta bertentangan dengan jumlah mayoritas umat Islam yang menjadi penghuni republik ini dengan dasar Pancasila.

Memasuki abad keduanya, Muhammadiyah-bersama ormas Islam lainnya-harus benar-benar didorong sebagai ormas Islam yang *mainstream* di Indonesia terus mencita-citakan adanya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan seluruh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal.

Jika Muhammadiyah mampu mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkeadaban, serta berkemajuan dalam pemikiran politik, maka Muhammadiyah ke depan akan benar-benar menjadi salah satu kampiun dalam menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai basis filosofis berbangsa dan bernegara. Hal ini pula telah sesuai dengan pernyataan pemikiran Muhammadiyah pada abad keduanya, yakni membangun Indonesian Islam, serta *Islamic Society*, bukan *Islamic State* atau pun *Religious State* sebagaimana dicita-cita oleh sebagian kecil ormas Islam di Indonesia.

Di luar itu, sekalipun tidak menjadi partai politik, Muhammadiyah tetap harus memikirkan dan mengupayakan agar Muhammadiyah "menjadi bagian dari politik praktis". Atau menjadi bagian dari partai politik sehingga Muhammadiyah akan benar-benar mampu memberikan kontribusi pada negara ini, baik kadernya di parlemen, di birokrasi maupun di posisi strategis lainnya. Inilah yang saya maksud dengan "amal usaha politik" Muhammadiyah yang sangat mulia itu sebagaimana amal usaha lainnya.

Kompas, 20 Juli 2015. Penulis adalah Sosiolog UMY dan Peneliti Senior Maarif Institute Jakarta

Politik sebagai Amal Usaha

DAVID EFENDI

DARI arena Muktamar muhammadiyah ke-47 di Makasar yang akan berakhir pekan ini mengemuka beragam gagasan berkemajuan. Selain trisula baru Muhammadiyah (MDMC, Lazismu, dan MPM) yang digagas oleh Hajriyanto Y. Thohari dan diamini mayoritas intelektual muda Muhammadiyah, juga muncul ke permukaan mengenai beragam kemungkinan format baru bentuk bentuk keterlibatan politik (*political angagement*) yang dapat dilakoni oleh persyarikatan yang telah memasuki abad kedua ini. Orientasi berkemajuan Muhammadiyah ternyata tidak hanya dibatasi oleh peran-peran sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melainkan juga masuk pada dimensi politik yang selama ini dilabeli 'kurang sedap' oleh sebagian kalangan di internal Muhammadiyah.

Trisula baru menegaskan garis perjuangan persyarikatan untuk memenuhi panggilan solidaritas kemanusiaan sebagaimana yang pernah diamanatkan banyak begawan Muhammadiyah bahwa kader Muhammadiyah adalah kader kemanusiaan, kader bangsa, dan baru kader persyarikatan. Hal ini memperlihatkan spirit Muhammadiyah yang terus menerus berusaha melampau sektarian dan orientasi golongan. Di dalam trisula baru memberikan peluang besar untuk menjadikan Muhammadiyah diperhitungkan dalam panggung dunia. Adalah satu tentangan bagi ormas

islam modern terbesar ini untuk menunjukkan bahwa hasil survei Kompas 5 Agustus 2015 yang memberikan angka 69,6% urusan keberpihakan kader ormas untuk urusan eksternal. Amal amal sosial keagamaan yang telah dirawat selama satu abad oleh Muhammadiyah haruslah diperhitungkan sebagai identitas utama.

Identitas gerakan politik tak bisa dilekatkan pada Muhammadiyah itu adalah fakta. Namun, ada kepentingan yang sangat mendasar mengenai urusan politik untuk menjaga nilai-nilai dan karya nyata Muhammadiyah. Walau argumentasi 'lemahnya dan kacaunya negara akan berdampak buruk pada Muhammadiyah' tidak sepenuhnya dibenarkan namun adalah fakta bahwa Muhammadiyah adalah bagian pilar penting bangsa yang tak terpisahkan. Karenanya, wajar opsi dan wacana reposisi Muhammadiyah dan politik kembali menguat di forum Muktamar.

Ketua umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin memberikan gagasan yang bagus dan *optional* untuk kembali memikirkan hubungan Muhammadiyah dengan politik-kenegaraan, atau politik kekuasaan. Di sini penulis ingin mendiskusikan tiga opsi yang ditawarkan Din yaitu Muhammadiyah perlu mendirikan partai politik, membangun hubungan khusus dengan partai tertentu, mendukung kandidat/politisi yang aspiratif, dan yang terakhir adalah memosisikan Muhammadiyah seperti sekarang dengan menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik (Fajar Makasar, 5/9/2015).

Jika kita membaca detail sepak terjang Muhammadiyah merespons bagaimana sistem politik dan praktik demokrasi prosedural di republik ini, opsi kedua, ketiga, dan keempat itu adalah opsi yang sudah dijalani secara sporadis oleh aktivis dan atau elit Muhammadiyah di berbagai struktur organisasi. Opsi keempat merupakan opsi diplomatis yang sangat 'cerdas' yang diwariskan oleh kepemimpinan organisasi ini satu dekade terakhir dibawa komando Din Syamsuddin. Opsi keempat ini secara politis telah memberikan 'rasa aman' bagi warga Muhammadiyah yang mayoritas 'berjarak' dengan politik praktis dan adapun anggotanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mitsuo Nakamura (1984) bahwa urusan politik adalah urusan sampingan sehari-hari.' Melihat peta anggota Muhammadiyah hari

ini memang sangat belum memungkinkan untuk mendirikan partai politik yang menjadi amal usaha Muhammadiyah. Pendeknya, suara mayoritas Muktamirin masih sepakat menganggap bahwa Muhammadiyah bukanlah gerakan politik dan lahir didesain bukan untuk mengurus negara. Berkaca dari 'kegagalan' Muhammadiyah di masa lalu, Haidar Nashir (2015) adalah salah satu elite Muhammadiyah yang dengan tegas menyatakan bahwa organisasi Islam ini tidak representatif untuk berjuang di dunia politik kekuasaan.

Opsi pendirian partai politik juga akan mempunyai dampak psikologis yang tidak ringan bagi kader-kader yang sudah tersebar di berbagai partai politik seperti elit Muhammadiyah dan elit organisasi otonom Muhammadiyah yang sudah menentukan jalan politiknya di PAN, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Gerindra, Perindo di tingkat pusat. Di level daerah tersebar juga ratusan kader 'elit' ortom dan Muhammadiyah di berbagai partai seperti PPP, Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PDIP, dan sebagainya. Pendirian partai sebagai amal usaha Muhammadiyah akan mengundang konflik yang sangat serius di tengah 'sentralisme' rezim elektoral hari ini. Jalan paling aman, adalah revitalisasi tiga opsi lain tersebut di atas untuk menancapkan nilai-nilai yang diyakini oleh Muhammadiyah yaitu visi kemanusiaan, pembaharuan sosial untuk keadilan, pembangunan pendidikan, dan juga model demokrasi bermartabat sebagaimana yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Nalar kemajuan Muhammadiyah ini harus juga menjadi upaya negara untuk bekerja keras mewujudkannya.

Kesulitan Muhammadiyah memasuki wilayah *real politics* (sebagai kekuatan partai) telah dibuktikan sendiri bagaimana Muhammadiyah pernah menempuh jalan politik struktural (1945, 1957-1959) dan juga pasca itu ditempuh jalan kultural (2002-sampai hari ini). Sangat menarik membaca buku Syaifullah (2015) yang diberikan judul *Pergeseran Politik Muhammadiyah* karena di buku dari disertasi ini dibuktikan dengan data yang lengkap bagaimana kedua jalan tersebut telah memberikan implikasi bagi persyarikatan. Penulis tersebut menyimpulkan bahwa baik jalan politik praktis maupun kultural ternyata capaian Muhammadiyah dalam komposisi kader dalam lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)

tidak jauh berbeda yaitu berkisar antara 5-6%. Artinya Muhammadiyah telah mengalami dua model pengalaman hidup bersama atau berdampingan dengan politik-kekuasaan.

Walau hasilnya 'tidak menggembirakan' dan bahkan dianggap gagal mengelola 'politik' di balik sukses besar mengelola amal usaha Muhammadiyah, sejarah itu tidak serta merta menjatuhkan takdir bahwa jalan kultural adalah jalan yang final untuk Muhammadiyah. Justru, pengalaman itu dapat menjadi guru untuk melakukan inovasi atas sikap dan strategi baru menghadapi sistem kekuasaan yang juga ternyata penting bagi keberlangsungan peran-peran kebangsaan persyarikatan. Berlangsung pilkada serentak tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi pekerjaan rumah organisasi islam ini karena anggota Muhammadiyah adalah juga bagian dari *zoon politicon* yang dekat dengan politik.

Situasi negara yang lintang pukang negara yang dibebalkan oleh langgengnya praktik korupsi, jual beli kasus, pelanggaran HAM, mafia pajak, jual beli suara, dan praktik pembangunan yang tidak manusiawi, kejahatan lingkungan, dan sebagainya . Keadaan yang terus membusuk ini harusnya mengubah *mindset* kader dan juga elit Muhammadiyah untuk juga memaknai 'berkemajuan' dalam ranah politik praktis yaitu dengan memberikan warna 'nilai-nilai adiluhung' dalam praktik tata kelola pemerintahan. Setidaknya, empat opsi—opsi 'cerdas' di atas terus menerus dicarikan cara agar benar-benar dapat menjaga kepentingan dakwah Muhammadiyah baik dalam kerangkah edukatif, *advokatif* dan juga *kontributif* untuk urusan-urusan rakyat. Inilah kira-kira yang disebut politik sebagai amal usaha.

Tribun Timur Makasar, 6 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DIY

Muhammadiyah Berpolitik

HAJRIYANTO Y THOHARI

APAKAH Muhammadiyah berpolitik? Pasti! Tetapi, tentu saja, berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan berpolitiknya partai politik. Sebagaimana diatur dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah; Khittah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, serta Keputusan-Keputusan Muktamar dan Tanwir-nya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan *amar ma'ruf nahiy munkar* yang bersifat nonpolitik.

Muhammadiyah bukan parpol dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Lantas bagaimana berpolitiknya Muhammadiyah selama ini?

Dr. Alfian dalam *Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942 (1989)* menemukan bahwa karena Muhammadiyah merupakan gerakan nonpolitik, keterlibatannya berbeda dengan organisasi lain yang menjadikan politik sebagai profesinya. Sebagai organisasi nonpolitik, Muhammadiyah bila dimungkinkan berupaya memainkan peran politik tidak secara langsung dan terbuka, seperti misalnya dulu menyerahkannya pada SI, PII (Partai Islam Indonesia), Masyumi, dan Parmusi, sesuai situasi politik nasional. Tipe-tipe logika situasional inilah yang menentukan modus *operandi* dan modus *vivendi* politik Muhammadiyah.

Hanya saja, sebagai kelompok kepentingan dengan tujuan keagamaan dan sosialnya, Muhammadiyah memperlihatkan melalui berbagai cara yang terkadang secara langsung dan terbuka terlibat politik. Karena itu, Muhammadiyah selama ini tampak memiliki peranan ketiga sebagai salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan setiap penguasa yang datang silih berganti.

Mungkin baru akhir-akhir ini saja terutama setelah satu dasawarsa reformasi, Muhammadiyah terpuruk dalam politik di negeri ini. Apalagi jika politik didefinisikan secara definitif dengan kekuasaan. Dalam definisi yang sempit ini "matahari terbit memang sedang tenggelam" dalam jagat perpolitikan nasional mutakhir.

Tak mengherankan jika bukan hanya orang Muhammadiyah yang *masygul* menyaksikan fenomena tidak diakomodasinya Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi-JK, melainkan juga beberapa aktivis dan Indonesianis ikut bertanya-tanya: apa yang sebenarnya terjadi?

Diyakini semua pihak bahwa Muhammadiyah adalah salah satu pilar dan jangkar NKRI. Akomodasi politik bagi kekuatan Islam modernis dan moderat ini dianggap konvensi atau keniscayaan politik. Tetapi, alih-alih diakomodasi, Muhammadiyah malah dinafikan. Dan ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpolitikan negeri ini.

Meski belakangan disyukuri, banyak analisis untuk menjelaskan fenomena pengabaian Muhammadiyah yang notabene keluar dari kelaziman tradisi politik Indonesia itu. Dua tokoh cendekiawan muda Muhammadiyah yang sejak awal di lingkaran pertama pasangan capres yang memenangi Pilpres 2014, salah seorang di antaranya tetap setia di sana, dengan penuh bahagia memberikan analisis terperinci dalam enam poin yang kesemuanya sangat masuk akal. Tetapi intinya, menurut saya, di atas segalanya, wajah politik Muhammadiyah masih diwakili sepenuhnya oleh Prof. Amien Rais (dengan PAN-nya). Dan semua orang tahu tokoh ini berada di mana dalam Pilpres 2014.

Maka, lihat saja, meski ada banyak tokoh kelas satu Muhammadiyah yang mendukung capres Jokowi-JK, termasuk Buya Syafii Maarif dan Sutrisno Bachir, bahkan ada di antaranya menjadi tim sukses, tetapi

kontribusi politik mereka tidak mendapatkan konsesi politik di kabinet. Mungkin karena dukungan politik itu terlalu individual, lugu, dan ikhlas-ikhlasan saja, atau juga fatsun politik di negeri ini sudah berubah di luar kelaziman.

Walhasil, keberadaan tokoh berpengaruh Muhammadiyah, termasuk Relawan Matahari Indonesia (RMI), di sisi politik sebelah sana hanya dianggap bunga-bunga. Secara politik mereka ini dianggap tidak bisa mengimbangi dominasi *political leverage* dan *political magnitude* ketokohan Prof Amien Rais yang di belakangnya ada gerbong parpol.

Dalam konteks dan perspektif ini maka nyata sekali—suka atau tidak—parpol telah menjadi wahana yang bukan hanya sangat instrumental tapi menentukan perpolitikan nasional saat ini. Berdasarkan pengalaman politik terakhir ini, saya sampai pada kesimpulan Muhammadiyah perlu "memiliki" parpol. Saya sengaja mencantumkan tanda kutip sebab pengertian "memiliki" ini harus dielaborasi dan dirumuskan lebih lanjut.

Bagi Muhammadiyah memiliki parpol bukannya tanpa preseden, apalagi ahistoris. Muhammadiyah pernah "memiliki" Masyumi dalam modus anggota istimewa (secara institusional), PII (secara organisasional), Parmusi (secara eksponensial), Sekber Golkar (secara eksponensial), dan PAN—dengan segala romantika dan problematikanya. Bagaimana format "memiliki"-nya dan bagaimana "hubungan" Muhammadiyah dengan partai politik ini adalah termasuk krusial yang harus dipikirkan mendalam dan sungguh-sungguh. Pasti upaya pencarian rumusan ini tidak mudah, tapi bukannya tidak bisa.

Muhammadiyah mempunyai banyak pengalaman panjang yang dapat dijadikan preseden dan inspirasi bagaimana berpolitik secara kontekstual. Muhammadiyah harus mengkaji manfaat dan mudaratnya "memiliki" parpol. Ijtihad politik di masa lalu terbuka untuk dievaluasi dan direformulasikan sesuai konteks dan logika situasi yang menyertainya.

Sebagai contoh, Tanwir Tahun 1955 Muhammadiyah mengevaluasi keterlibatannya secara institusional dalam Masyumi sebagai anggota istimewa karena dirasa merugikan dakwah yang menjadi misi utamanya. Padahal, bagi Muhammadiyah, politik itu meski penting hanyalah faktor

komplementer. Maka dari itu, sidang tanwir (1939) memandang wadah politik tersebut harus berada di luar struktur kelembagaan Muhammadiyah. Secara terperinci, rumusannya adalah bagi Muhammadiyah (1) politik itu penting, tetapi (2) tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah.

Jika Muhammadiyah ingin berjuang di bidang politik maka (3) harus dibuat wadah tersendiri yang (4) berada di luar struktur yang (5) tidak berhubungan secara organisasional dengan Muhammadiyah, tetapi (6) keduanya—Muhammadiyah dan parpol "milik"-nya itu—harus bisa bekerja sama secara simbiosis mutualisme untuk dakwah. Dan *last but not least*, (7) dalam mengembangkan parpol ini harus bekerja sama dengan kekuatan bangsa dan umat Islam lainnya.

Mengapa wadah politik itu mesti di luar Muhammadiyah yang tidak berhubungan secara institusional? Jawabnya karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan organisasi politik, bahkan tidak memiliki afiliasi dengan—dan sampai kapan pun tidak akan menjadi—parpol. Tetapi, sangat meyakinkan bahwa untuk mewujudkan cetak biru berdasarkan pandangan dunianya, Muhammadiyah memerlukan bukan hanya strategi kebudayaan, melainkan juga politik.

Bagaimana modus *operandi* berpolitiknya dan seperti apa modus *vivendi*-nya dengan parpol yang dimilikinya itu tentu harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Sebagai gerakan (*movement* atau harakah) dakwah yang selalu mengharuskan adanya mobilisasi sistematis dan sistematisasi yang dinamis, Muhammadiyah kadang-kadang memerlukan parpol. Percayalah.

Republika, 07 Mei 2015. Penulis adalah Kader Muhammadiyah, Mantan Wakil Ketua MPR

Dilema Politik Muhammadiyah

MA'MUN MUROD AL-BARBASY

Menarik tulisan Mas Hajri (Hajriyanto Y Thohari), "Muhammadiyah 'Pasti' Berpolitik" di *Republika* (11/5/2015) yang berisi "kegelisahan" terkait relasi Muhammadiyah dan politik. Sebagai gerakan dakwah, menurut Mas Hajri, Muhammadiyah memerlukan bukan hanya strategi kebudayaan, tapi juga politik yang kadang-kadang memerlukan parpol. Tulisan ini mendapat tanggapan Sutia Budi yang menulis, "Muhammadiyah tak Perlu Parpol" (13/5/2015). Dari judulnya saja terbaca tulisan Sutia ini mencoba memosisikan berbeda dengan Mas Hajri soal perlunya "Partai Muhammadiyah" yang di luar institusi Muhammadiyah.

Tulisan Mas Hajri sangat rasional dan realistis bila mencermati perkembangan politik pasca-Orde Baru yang bergerak begitu liberal dan telah menabrak "kelaziman politik". Sementara tulisan Sutia mencoba memosisikan Muhammadiyah secara ideal sesuai Khittah 1912 yang tidak "mengimpitkan" diri dengan partai mana pun. Mas Hajri bicara apa yang "senyatanya" berdasarkan realitas politik yang dinamis, sementara Sutia bicara apa yang "seharusnya".

"Senyatanya" dan "seharusnya" adalah dua wajah yang tidak perlu diperhadapkan dan bahkan akan terjalin apik bila "senyatanya" bergerak ke arah "seharusnya". Namun, ketika yang "senyatanya", jangankan mendekat,

tapi justru mengambil posisi berhadapan, tentu menjadi problem. Dan yang terjadi kini realitas yang menggambarkan bertolak belakangnya antara "seharusnya" dan "senyatanya". Karena itu, menjadi sulit ketika "senyatanya" mencoba dilihat dengan kacamata "seharusnya" atau sebaliknya. Realitas seperti ini dilema bagi Muhammadiyah. Satu sisi mencoba istikamah dengan Khittah 1912, tapi realitas menghendaki lain dan menuntut Muhammadiyah bersikap berbeda dan atau setidaknya mereduksi khittah. Inilah dilema Muhammadiyah dalam relasinya dengan politik.

Muhammadiyah lahir tidak dikonstruksi sebagai partai, tapi sebatas "gerakan politik", tentunya selain gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Konstruksi sebagai gerakan politik tergambar dari langkah KH Ahmad Dahlan yang menjalin relasi politik dengan banyak pihak. Dekat dengan Budi Utomo, SI, KH Misbah (komunis), dan termasuk kalangan Ahmadiyah. KH Mas Mansur terlibat pendirian PII. Bersama NU dan PSII, Muhammadiyah mendirikan MIAI pada 1937.

Ketika lahir Masyumi yang difasilitasi Jepang pada 1943, Muhammadiyah pun terlibat. Begitu juga ketika lahir Masyumi yang dibidani umat Islam pada 1945 dan berubah menjadi partai pada 1947, Muhammadiyah bersama NU menjadi anggota istimewa. Keterlibatannya di Masyumi berakhir selepas Muhammadiyah menanggalkan anggota istimewanya pada 1959.

Saat transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, Muhammadiyah dihadapkan pada pilihan sulit: menjadi partai, menghidupkan kembali Masyumi, atau bersama ormas Islam lain membentuk partai. Dilema ini tergambar dari putusan Khittah Ponorogo 1969 dan Khittah Ujungpandang 1971. Putusan Khittah Ponorogo menyebut bahwa Muhammadiyah memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam. Untuk perjuangan politik (praktis) membentuk partai di luar Muhammadiyah. Namun, di antara keduanya tak ada relasi organisatoris, meskipun tetap mempunyai relasi ideologis.

Seakan mengoreksi Khittah Ponorogo, lewat Khittah Ujungpandang Muhammadiyah mencoba menjaga jarak kembali dengan partai, meski masih memandang positif Parmusi dan partai lainnya. Khittah 1971

diputuskan beberapa bulan selepas Pemilu 1971. Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam pendirian Parmusi. Bahkan dua jabatan strategis dijabat kader Muhammadiyah. Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekjen Lukman Harun.

Baru pada Tanwir Surabaya 1978, Muhammadiyah membuat khittah lebih tegas bahwa Muhammadiyah tak mempunyai relasi organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi parpol atau organisasi apa pun (poin 1). Tanwir ini berlangsung selepas Pemilu 1977, saat Parmusi sudah memfusi ke PPP sehingga dapat menjadi pembenar untuk menjauh dari Parmusi dan partai lainnya.

Seiring tumbangnya rezim Orde Baru, saat Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah membuat rekomendasi politik yang salah satu butirnya ditafsir sebagai pembenar bagi berdirinya PAN. Rekomendasi ini mempercepat proses pembentukan PAN. Euforia politik warga Muhammadiyah dilampiaskan ke PAN.

Seakan sejarah terulang, Tanwir Denpasar 2002, Muhammadiyah kembali membuat keputusan normatif terkait posisi nonafiliatifnya. Pada poin 6 disebutkan, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tak mempunyai relasi organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun. Muhammadiyah mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai fungsi *amar ma'ruf nahi mungkar* demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Paparan di atas adalah realitas politik yang kerap memaksa Muhammadiyah untuk bersikap. Sebagai organisasi yang hidup dalam sistem politik, tentu tak mungkin bagi Muhammadiyah berdiam diri. Namun, sikap Muhammadiyah ini terkadang dikritisi dan dibaca sebagai inkonsistensi Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan. Muhammadiyah dinilai kerap di(ter)goda masuk wilayah politik yang tidak seharusnya, yaitu politik yang dominan berorientasi pada kekuasaan dan politik dukung-mendukung pada kandidat tertentu, terlebih saat pemilihan presiden.

Kenapa Muhammadiyah kerap demikian? Setidaknya ada dua hal yang mendasari. *Pertama*, pandangan *mainstream* di lingkup Muhammadiyah

Islam *al-din wa al-dawlah*, Islam adalah agama dan negara, Islam dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini diperkuat realitas historis bahwa Muhammadiyah (termasuk NU) yang lahir jauh sebelum kemerdekaan mempunyai andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab, terlebih dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional, Muhammadiyah merasa perlu ikut *cawe-cawe*. *Kedua*, bangsa ini, terlebih di lingkup pimpinan nasional yang terpilih dalam proses politik, terlebih sejak pasca-Orde Baru, kerap tidak proporsional memosisikan Muhammadiyah (dan juga NU) sebagai ormas keagamaan. Perlakuannya terkadang persis seperti kepada parpol yang untuk memperoleh "kuasa politik"—sebagaimana lazimnya—dituntut terlibat politik dukung-mendukung. Sikap yang tidak proporsional inilah terkadang membawa Muhammadiyah (dan juga NU) pada posisi politik yang terkesan partisan, posisi yang—dalam konteks demokrasi—hanya pantas disandang parpol.

Di sinilah dibutuhkan kesadaran memahami Muhammadiyah (dan NU) secara proporsional. Muhammadiyah (dan juga NU) adalah dua ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Sumbangsihnya juga tak terhingga. Karenanya, posisikan "orang tua" ini selayaknya. Jangan memancing "orang tua" untuk terlibat politik dukung-mendukung atau sekadar mendapatkan jabatan politik. Yakinlah, kalau elite politik negeri ini mampu memosisikan Muhammadiyah (dan NU) secara proporsional, maka Muhammadiyah (dan juga NU) pun akan memosisikan diri secara proporsional semata sebatas sebagai ormas keagamaan yang selalu berorientasi pada politik kebangsaan dan menjauhkan dari orientasi politik partisan. Semoga.

Republika, 26 Mei 2015. Penulis adalah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Partai Muhammadiyah

ANWAR ABUGAZA

Muhammadiyah telah bergerak dan mentransformasikan diri menjadi organisasi Islam modern terbesar di Indonesia. Catatan sejarah panjang yang membentuk ormas ini tidaklah mudah. Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah.

Yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta. Ormas ini terus menempa diri dengan kerasnya perjuangan, sejak perebutan kemerdekaan, masa transisi, reformasi dan sampai masa modern saat ini.

Muhammadiyah tidak serta merta lahir, besar dan diterima luas oleh warga Islam Indonesia, berbagai catatan juga sering mewarnai ormas ini, yang sering terdengar adalah perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari raya idul fitri dengan pemerintah. Perbedaan ini menjadi salah satu simbol ketidakbersatuan umat islam di Indonesia. Kekuatan besar Muhammadiyah terdapat pada sistem kaderisasi yang sangat kuat dan solid, dan gerakan sosial kemasyarakatan yang terstruktur rapi. Sebagai organisasi massa Muhammadiyah memiliki infrakstruktur yang sangat luas.

Dalam catatan devisi pendidikan PP Muhammadiyah, telah terdapat perguruan tinggi yang jumlahnya telah mencapai 177 kampus. Belum lagi rumah sakit, sekolah dan pantai sosial yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Semua ini telah menjadi penegasan akan keberaan dan konstribusi besar muhammadiyah di Indonesia.

Semua ini tentunya belum berhenti dan terus berjalan, namun menjadi satu tanda tanya besar dan sekaligus kegelisahan yang aman mendalam. Sampai hari ini, Muhammadiyah belum mampu melahirkan satu tokoh untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Padahal dalam catatan sejarah politiknya, di setiap perhelatan pemilu Muhammadiyah tidak pernah memilih untuk menjadi golongan putih atau Golput, di titik inilah eksistensi Muhammadiyah terkadang dipertanyakan, dan atau mungkin karena Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik?

Momentum Politik

Momentum Muktamar ke-47 dalam usia yang ke-103 tahun, menjadi kesyukuran dan sekaligus tantangan terutama dalam manisnya panggung politik di Indonesia. Gagasan akan keterlibatan Muhammadiyah dalam panggung politik Indonesia perlu diapresiasi. Ada tiga opsi dalam berpolitik bagi Muhammadiyah seperti yang disampaikan Din Syamsuddin.

Opsi pertama yang ditawarkan adalah Muhammadiyah tetap netral atau tak memihak partai politik manapun. Namun meski netral, Muhammadiyah tetap menjalin hubungan baik, kedua Muhammadiyah berperan aktif dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Muhammadiyah dalam opsi ini secara aktif mendukung calon-calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah dan yang ketiga adalah Muhammadiyah mendirikan partai politik sendiri.

Opsi mendirikan partai politik menjadi lebih menarik dalam konteks kekinian hubungan Muhammadiyah dan negara. Peran besar Muham-madiyah untuk Indonesia tidak lagi bisa hanya menjadi gerakan abu-abu, mengambil bagian dalam mewarnai bangsa, namun harus menjadi

penentu warna, sekaligus menjadi bukti bahwa Muhammadiyah mampu melahirkan seorang presiden. "Kekuasaan akan lebih baik ketika di tangan orang-orang saleh, baik dan profesional."

Abu-abu

Cukuplah sejarah politik abu-abu Muhammadiyah dalam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibentuk Prof Dr Amin Rais atau Partai Matahari Bangsa (PMB) melalui tokoh-tokoh muda Muhammadiyah muncul sebagai kamuplase ketidakberanian Muhammadiyah dalam tampil tegas dalam dalam panggung kekuasaan. Satu sisi ingin berkuasa, satu sisi tidak berani tampil dengan identitas aslinya.

Muhammadiyah harus tampil dengan identitas partai politik yang jelas dan membawa serta mengajarkan masyarakat berpolitik dengan cara dan tuntunan dalam ajaran Islam.

Menjadi catatan besar bagi jumlah umat islam yang mencapai 86% saat ini, tidak mampu terkanalisasi pada wadah besar partai Islam, Pemilu 2014 kemarin total suara partai islam hanya sanggup mencapai 25,94 persen, jumlah tersebut pun tidak bisa diklaim dengan tegas sebagai suara partai islam, karena di antara partai islam yang ada hanyalah partai keadilan sejahtera (PKS) yang berani tampil dengan identitas 100% Islam.

Pilihan untuk menjadi partai politik pastinya bukanlah pilihan mudah, tidak segampang ketika ormas Nasdem bentukan Surya Paloh berubah menjadi partai politik. Dibutuhkan waktu dan serta kesiapan warga Muhammadiyah dalam menerima perubahan pola dan gerakan perjuangan dan juga tentunya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk memilih partai yang berideologi Islam. Ide dan gagasan yang berhembus kencang dalam perhelatan Muktamar ke 47 di kota Anging Mamiri untuk menjadi partai politik harus terus terpelihara dan terjaga, sampai waktunya tiba nanti dan kita semua masih terus menunggu. (*)

Tribun Timur, 6 Agustus 2015. Penulis adalah Direktur WWCOMM Indonesia

Soeharto dan Muhammadiyah

MUHIDIN M. DAHLAN

MUHAMMADIYAH tak pernah lupa akan pengakuan Soeharto sebagai warga Muhammadiyah. Karena itulah di edisi khusus Suara Muhammadiyah (SM) untuk Muktamar ke-47 Makassar diperlukan satu artikel spesial yang mengingatkan hubungan manis itu.

Soeharto pada pembukaan Muktamar di Banda Aceh, pada 1995, membuat pengakuan yang isinya: "Tanpa *tedheng aling-aling,* saya ini bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia; dan alhamdulillah memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia untuk memimpin pembangunan nasional. Semoga apa yang saya lakukan ini tidak mengecewakan warga Muhammadiyah" (SM No. 15, Th 100).

Pengakuan itu tak hanya memiliki sayap tafsiran yang banyak, tapi juga bisa menyiratkan bagaimana tarik-menarik politik praktis dalam tubuh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, pengakuan Soeharto itu menjadi tonggak bahwa Muhammadiyah berada dalam perhatian khusus kekuasaan. Sementara bagi Soeharto, merangkul Muhammadiyah-termasuk kelompok intelektual dan tokoh utama kelas menengah muslim yang tergabung di ICMI-menjadi modal besar untuk pembangunan "tinggal landas".

Proyek penjinakan Muhammadiyah merupakan langkah besar untuk menghalau radikalisme kanan. Sekaligus untuk "menggembosi" suara sengak "muazin" Amien Rais, yang juga Ketua PP. Muhammadiyah, yang berseru-seru tentang pergantian pimpinan nasional (suksesi).

Untuk meyakinkan Muhammadiyah, Soeharto bahkan “tanpa *tedheng aling-aling*” mengatakan bahwa usaha sosialnya membuat musala di ruang-ruang publik, semata karena Muhammadiyah.

Soeharto memang punya urgensi menarik kembali Muhammadiyah dalam pusaran kekuasaan setelah trauma dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Piagam pembentukan Parmusi ini ditandatangani PP Muhammadiyah yang diwakili H Djarnawi Hadikusumo dan M. Daris Tamim pada 8 September 1967.

Bagi Muhammadiyah, pendirian Parmusi adalah “hadiah” dari kekuasaan yang sukses menumbangkan rezim Sukarno dan mengubur PKI. Parmusi, bagi Muhammadiyah, adalah: *“Keputusan Sidang Tanwir th 1966 di Bandung jg setjara tegas menekankan perlunya partai politik Masjumi direhabilitir dan jika belum mungkin sedang keperluan telah mendesak maka dapat dibentuk Partai Islam baru, yang akhir2 ini ternyata dapat direalisir dengan telah selesainya semua persiapan tentang pendirian Partai Muslimin Indonesia…”* (SM No 21-22, Nov 1967).

Seperti halnya di masa Sukarno yang mengaku diri sebagai warga sah Muhammadiyah, persyarikatan yang ikut membidani lahirnya Masyumi ini juga mengalami *bad mood* yang parah. Ketika pada 1960-an Sukarno pada akhirnya “menyakiti” Muhammadiyah saat membubarkan Masyumi, begitu pula Soeharto yang hanya butuh lima tahun untuk melumat Parmusi dengan memaksanya masuk dalam proyek fusi partai 1973 yang melahirkan orpol PPP.

Dua kali disakiti politik oleh presiden yang mengaku diri sebagai warga sah Muhammadiyah itu yang membuat persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini kembali ke langgar mengaji Surat Al-Maun, dan menghabiskan energi yang terluka untuk kerja sosial dan pendidikan.

Seakan belum cukup luka itu, Muhammadiyah kembali lagi membidani lahirnya partai baru pada era baru politik nasional. Dan Anda semua tahu bagaimana kutukan partai itu terus memayungi nasib Muhammadiyah.

Koran Tempo, 05 Agustus 2015

Muhammadiyah Tak Perlu Parpol

SUTIA BUDI

MENARIK, ketika membaca artikel opini Mas Hajri (sapaan akrab Hajriyanto Y. Thohari) yang berjudul "Muhammadiyah Berpolitik" (Republika, 7 Mei 2015). Pada bagian awal, dengan jelas Mas Hajri memaparkan bahwa berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan partai politik. Muhammadiyah sebagai gerakan berasas Islam yang nonpolitik. Warga Muhammadiyah juga memiliki pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sepak terjang Muhammadiyah dalam "berpolitik" diulas Mas Hajri dengan apiknya. Dari berbagai dinamika di masa lalu, hingga perhelatan politik terakhir. Mas Hajri sampai pada titik kesimpulan bahwa Muhammadiyah perlu "memiliki" parpol. Pengertian "memiliki" ini harus dielaborasi dan dirumuskan lebih lanjut.

Lalu, opininya ditutup dengan kalimat, "Bagaimana modus operandi berpolitiknya dan seperti apa *modus Vivendi*-nya dengan parpol yang dimilikinya itu tentu harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Sebagai gerakan dakwah yang selalu mengharuskan adanya mobilisasi sistematis dan sistematisasi yang dinamis, Muhammadiyah kadang-kadang memerlukan parpol. Percayalah."

Kesimpulan dan kalimat penutup itulah yang sedikit mengganggu pikiran penulis. Spontan saya bergumam, "Jangan pernah bermimpi Muhammadiyah memiliki parpol, jika tidak ingin menjadi kerdil atau dikerdilkan". Politik itu penting. Posisi parpol juga sangat strategis, yang turut menentukan arah bangsa ke depan. Namun, berkaca dari pengalaman perjalanan Muhammadiyah hingga hari ini, penulis pun sampai pada titik kesimpulan bahwa Muhammadiyah tidak harus memiliki parpol, bahkan tidak perlu.

Kita bisa bayangkan tatkala kader-kader Muhammadiyah diarahkan untuk masuk pada satu parpol tertentu, maka kegaduhan politik di internal Muhammadiyah akan memasuki babak baru. Pada saat syahwat politik membuncah itulah, bukan hanya diri seorang kader yang menjadi kerdil, tetapi juga akan meredupkan Muhammadiyah, dengan kata lain "menenggelamkan matahari terbit".

Dalam perjalanan Muhammadiyah selama ini, akomodasi politik memang dianggap konvensi politik yang tidak tertulis, tapi bukan berarti Muhammadiyah harus selalu berada dalam kabinet. Sungguh, bukan personal seorang menteri yang diperlukan. Lebih dari itu, kepentingan Muhammadiyah (baca: mewujudkan tujuan Muhammadiyah) dan bangsa Indonesia ke depan jauh lebih utama. Walau diakui bahwa posisi kabinet itu strategis, tetapi bukan segalanya.

Adapun dikatakan bahwa ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, tetapi Mas Hajri pun menyatakan bahwa hal itu belakangan disyukuri. Jika kader Muhammadiyah diakomodasi dalam Kabinet Kerja kala itu, maka bisa jadi "matahari benar-benar tenggelam". Karena fakta hari ini menunjukkan bahwa setelah enam bulan berlalu, ternyata banyak kalangan menilai "tanpa kesan".

Walau wajah politik Muhammadiyah pada pilpres lalu dinilai masih diwakili oleh Prof Amien Rais, jangan lupa posisi Prof Din Syamsuddin (Ketum PP Muhammadiyah dan Ketum MUI) sebagai lokomotif penjaga kesejukan suasana pra dan pascapilpres tentu tidak bisa diabaikan. Belum lagi, posisi Buya Syafii Maarif dan Prof Malik Fadjar sebagai "penasihat" sang

Presiden, tentu memiliki posisi penting dalam memberikan pertimbangan di antara berbagai pilihan pelik.

Tetapi harus dimaklumi juga, tidak semua pertimbangan dipilih Presiden. Jalan politik yang dipilih tokoh-tokoh di atas tentu menjadi referensi penting bagi kader-kader muda Muhammadiyah (khususnya para aktivis politik). Jadi, di posisi mana pun boleh saja, asalkan tujuannya mendorong kebaikan-kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM).

Sekali lagi, Muhammadiyah "tidak perlu partai politik". Karena dalam poin ketiga Khittah Denpasar (2002) dengan tegas dikatakan bahwa Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Masuk area politik praktis tentu dibolehkan. Namun ingat, kepentingan umum yang harus didahulukan. Dalam poin keempat Khittah Denpasar (2002) dinyatakan, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945. Namun, dalam relasi Muhammadiyah dan partai politik, secara tegas dipagari poin keenam dalam Khittah tersebut, yaitu Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi mana pun.

Bagi penulis, pengertian "memiliki parpol" sebagaimana wacana yang dilempar Mas Hajri, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjalankan "diaspora politik". Kader Muhammadiyah terbuka jalannya untuk berkiprah dalam politik praktis: boleh menjadi aktivis parpol apa pun sesuai pilihan nuraninya, sepanjang sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah.

Dengan demikian, warga Muhammadiyah tidak digiring pada satu parpol tertentu. Hal ini secara tegas termaktub dalam khittah pada poin ketujuh, yaitu Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing.

Bagi para aktivis parpol, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Jika kader-kader Muhammadiyah yang menyebar dalam berbagai parpol mampu memaknai dan memegang teguh Khittah Perjuangan tersebut, niscaya tidak akan pernah melakukan perbuatan tidak terpuji (korupsi, misalnya), tak pernah lelah untuk berjuang. Tidak pula kecewa jika absen dari kabinet karena kekuasaan bukanlah tujuan.

Hemat penulis, opini Mas Hajri seyogianya mampu membuka mata kader-kader muda Muhammadiyah untuk serius dan pantang menyerah dalam berpolitik. Bukanlah Muhammadiyah yang harus "memiliki" parpol, melainkan kader-kader Muhammadiyah yang harus "memiliki" dan menyebar pada berbagai parpol.

Tujuannya jelas, untuk menegakkan kebajikan dan kemaslahatan. Kader Muhammadiyah harus ikut andil dalam menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Kader muda harus banyak menimba dari para senior, termasuk dari Mas Hajri. Dengan kepiawaiannya, ia mampu "bergaul" dengan siapa saja, menjadi wakil ketua MPR, dan mencapai posisi puncak di Partai Golkar yang jelas-jelas bukan partainya Muhammadiyah, bukan pula partai Islam.

Diaspora politik kader-kader Muhammadiyah adalah sebuah keharusan. Walau tentu, tidak semua kader mesti masuk area politik praktis. Kader Muhammadiyah di mana pun harus mampu meneladani Kiai Dahlan yang progresif dan inklusif. Karena siapa lagi yang "menghidupkan" Muhammadiyah kalau bukan kader-kader Muhammadiyah. Jika itu bisa dijalankan, maka "Matahari tidak akan pernah tenggelam" dalam dunia perpolitikan Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Percayalah.

Republika, 13 Mei 2015. Penulis Wakil Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Mantan Ketua Bidang Keilmuan DPP IMM

Muhammadiyah, Politik, Kaum Duafa

DAVID KRISNA ALKA

MUKTAMAR Pemikiran Islam di Muhammadiyah ”Kritik Oto-Kritik Muhammadiyah” pertengahan Februari 2008 menuai kritik konstruktif bagi perjalanan gerakan Muhammadiyah di Indonesia.

Gerakan Muhammadiyah seharusnya lebih peduli terhadap persoalan realitas sosial kini dan nanti, bukan cuma persoalan politik. Menjelang Pemilu 2009, politisi di negeri ini mulai bersahut dan tampak kasak-kusuk ingin merebut posisi empuk. Sementara itu, krisis moral dan kepemimpinan bangsa ini sudah memasuki tahap kritis. Dalam konteks ini, umat Muhammadiyah tak bisa mengabaikan pendidikan karakter bangsa yang kian pudar.

Namun, di tengah hiruk-pikuk politik menjelang Pemilu 2009 adalah suatu hal yang sulit bagi kaum cerdik pandai Muhammadiyah untuk tidak larut dalam intrik politik praktis. Ulama, sebagai penjaga moral bangsa, harus menjadi panutan umatnya. Akan tetapi, kecemasan yang timbul adalah posisi tak etis peran ulama dan intelektual Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional, yaitu menghendaki jabatan politik.

Bertrand Russel (1984) pernah menjelaskan, di kalangan politisi orang baik punya kegunaan. Orang baik tak pernah dicurigai bahwa ia akan menggunakan kebaikannya untuk melindungi bajingan. Sifat ini membuat

orang baik-baik amat disenangi dan akhirnya orang baik-baik itu ikut pula menjadi politisi.

Namun, suatu sistem ekonomi politik di mana *the rulling elite* mengalami konservatisasi karena ingin mempertahankan monopolinya pada akses-akses ekonomi dan kekuasaan selalu muncul polarisasi yang merusak solidaritas sosial. Kecenderungan untuk tidak melibatkan agama dalam aneka masalah sosial-politik akan mempercepat timbulnya masyarakat berkelas. Karena itu, sepatutnya dipikirkan adanya sistem politik lain yang mampu mewakili rakyat jelata demi mengimbangi kecenderungan konservatisme dan egosentrisme kelas elite melalui sarana demokrasi.

Panutan

Menurut Kuntowijoyo (1993:42), Muhammadiyah sebagai kelompok yang selalu mendefinisikan dirinya sebagai entitas nun-kelas mempunyai peluang untuk kembali mendefinisikan ideologi sosial dan politiknya berdasar kepentingan rakyat jelata—sebagaimana dicontohkan Syarikat Islam (SI) di masa lalu—dan dirumuskan secara jernih berdasar analisis yang tepat tentang formasi sosial dan sistem ekonomi politik yang ada.

Ini berarti politik agama harus dibumikan pada tingkat obyektif menjadi politik kelas dalam rangka mengakomodasi kepentingan empiris umat dan bangsa. Hanya dengan gerakan agama yang memihak, gerakan sosial Muhammadiyah akan memiliki makna sejati sebagai gerakan untuk pembebasan struktural, seperti dirumuskan Kuntowijoyo terkait tiga misi agama: humanisasi, emansipasi, dan transendensi.

Sebagai panutan moral, kalangan cerdik pandai Muhammadiyah saat terlibat dalam kancah perpolitikan nasional dicemaskan akan lupa kepada rakyat yang masih banyak didera kemiskinan. Ketika hasrat ingin berkuasa dan ingin cepat kaya kian menggoda, politisi cenderung lupa, tetangga yang miskin di kampungnya bingung besok mau makan apa.

Sejatinya, gerakan Muhammadiyah adalah wadah perjuangan umat Islam dalam melaksanakan gerakan dakwah sosial yang memiliki cukup

banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga zakat (lazis). Sayang, institusi sosial Muhammadiyah lebih tampak sekadar tempat untuk meraup keuntungan. Di mana letak kaum duafa di mata Muhammadiyah?

Muktamar pemikiran Islam itu diharapkan mengembalikan spirit awal Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berpihak terhadap realitas sosial yang timpang, kemiskinan, dan ketertindasan. Seperti agama, gerakan dakwah Muhammadiyah harus berpihak kepada kaum papa.

Kaum intelektual muda Muhammadiyah diharapkan tak terjebak dalam rasa sudah tahu segala sesuatu, atau kebencian paranoid. Artinya, elite Muhammadiyah dan anggotanya telah mencapai titik di mana mereka tahu perbedaan antara baik-buruk, mampu menjatuhkan pilihan sendiri, memiliki kemampuan sendiri, keyakinan sendiri, yang bukan sekadar pendapat. Sudah saatnya intelektual muda Muhammadiyah bergerak turun ke bawah. Jangan hanya wacana yang melulu mendunia sehingga mengabaikan kaum duafa.

Kompas, 22 Februari 2008. David Krisna Alka, Deputi Direktur Center for Moderate Muslim; Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, Jakarta

Petisi Muhammadiyah

DAVID EFENDI

PETISI atau seruan moral merupakan tradisi yang muncul sejak lama dalam beragam motivasi di dalamnya baik motiv politik maupun moral-etis. Menurut *Oxford Dictionary,* 'petition' atau petisi diartikan sebagai *'a formal writen request, typically one signed by many people, appealing to authority in respect of a partucular cause'*. Dalam Muhammadiyah sudah tradisi jika di penghujung permusyawaratan dimunculkan rekomendasi internal dan eksternal. rekomendasi juga merupakan kata yang tak berjarak jauh dengan istilah petisi sebagai seruan kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena permusyawaratan ini mempunyai unsur legal-administratif selain mengikat anggota juga diberikan kepada lembaga eksternal yang mempunyai relevansi dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Hal inilah kemudian menjadikan rekomendasi Muktamar tak lain tak bukan adalah sebuah petisi mahabesar.

Seiring berkembangnya media sosial sebagai jejaring netizen, istilah petisi cukup populer hari ini. Salah satu situs yang menampung petisi *online* adalah *change.org* yang sampai hari ini sudah ratusan jumlahnya dengan pemberi tanda-tangan yang sangat besar jumlahnya. Artinya, petisi adalah cara baru publik menyampaikan ekpresi keberpihakan terhadap persoalan aktual atau persoalan serius yang mengancam hajat hidup orang banyak.

Di sela-sela Muktamar Muhamamadiyah ke-47 di Makasar yang telah berakhir dua pekan lalu, Din Syamsuddin mempetisi Presiden Indonesia,

Jokowi dan Ban Ki-Moon, Sekjend PBB berisi desakan menanggapi perubahan iklim dengan menetapkan target energi terbarukan dari 100% pada tahun 2050. Dalam waktu kurang dari satu jam sudah ditandatangani sebanyak 80,000 netizen. Sekarang petisi tersebut telah mencapai 233.778 penandatangan. Luar biasa. Ini adalah kesadaran pemimpin ormas Islam Berkemajuan untuk merespons persoalan global secara online. Din Syamsuddin menyampaikan dalam petisi tersebut perlunya kerjasama global antara organisasi keyakinan (*Faith Based-organization*) dengan pemerintah dan dunia internasional untuk 'menangguhkan' bencana ekologis yang kian mendekat yaitu ekstremnya perubahan iklim terlebih akibat acuhnya negara-negara dan penguasa terhadap degradasi lingkungan global.

Ibarat gayung bersambut, Muhammadiyah mengakhiri perhelatan akbarnya dengan mengeluarkan 13 rekomendasi pokok baik menyangkut revitalisasi organ isasi (internal) maupun kontribusi ke dunia eksternal. Dari 13 rekomendasi atau petisi tersebut ada dua hal yang sangat menarik untuk didiskusikan sebagai petisi penting ormas islam modern terbesar di Indonesia ini. Pertama, petisi yang menyangkut perubahan iklim yaitu dari rekomendasi nomor satu dan kedua adalah seruan jihad konstitusi dalam rekomendasi nomor tujuh. Kedua hal ini mengisi makna 'dakwah pencerahan dan berkemajuan' yang digaungkan oleh Muhammadiyah sebagai *tagline* utama.

Pertama, petisi penyelamatan lingkungan global dari ormas islam belum menjadi mainstream selama ini. Bila dibandingkan teologi ekologi kaum kristen tentu Islam sedikit banyak tertinggal. Hal ini menjadikan momentum Muktamar kali ini menjadi kesempatan terbaik untuk meningkatkan peran islam dalam kancah isu-isu ekologis dunia. Adalah Ibrahim Abdul-Matin yang memulai memaparkan 'fakta' dari praktik-praktik ramah lingkungan yang sehari-hari di kerjakan ummat islam di Amerika. Pertemuan antara praktik dan *discourse* global mengenai perhatian ummat Islam akan kelestarian alam merupakan suatu keniscayaan.

Kedua,jihad konstitusi merupakan ajakan bukan hanya kepada warga atau pimpinan Muhammadiyah melainkan kepada semua anak bangsa

yang mempunyai keprihatinan akan semakin banyaknya perundang-undangan yang tidak berpihak kepada kepentingan jangka panjang ummat. Praktik konstitusi bobrok tersebut telah lama seperti praktik pengelolaan sumber daya air, sumber minyak dan gas bumi, penanaman modal asing, UU sisdiknas, dan masih banyak lainnya. Di antara banyak UU tersebut, sudah ada empat UU yang dibatalkan atas prakarsa persyarikatan Muhammadiyah dalam lima tahun terakhir ini. Ada puluhan lagi UU yang mudhoratnya sedang dikaji oleh Muhammadiyah untuk kembali di lakukan *judicial review*. Dalam konteks lokal, Muhammadiyah juga diajak mengkritisi beragam peraturan daerah dan regulasi pemerintah daerah yang mungkin juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, atau terjadi pertentangan urusan etis: keadilan distributif, keadilan ekologis, dan unsur pertanggungjawaban kolektif (Aditjondro, 2008).

Dua 'petisi' yang membuka abad baru gerakan Muhammadiyah ini memperlihatkan dua orientasi yang sangat penting. Pertama, keberpihakan kepada kepentingan nasional yaitu kepentingan rakyat terbesar di republik ini melalui upaya advokasi terhadap konstitusi yang sedang berlaku atau menghadang regulasi baru yang akan datang. Teologi jihad konstitusi ala Muhammadiyah ini telah mewarnai pelaksanaan tata kelola pemerintahan lima tahun terakhir ini. Loyalitas Muhammadiyah terhadap kepentingan bangsa, dengan demikian, tidak lagi dapat diragukan. Jika ditilik sejarah panjang gerakan sosial keagamaan ini, tentu akan terlihat konsistensi bagaimana perjuangan Muhamamadiyah di bidang pendidikan di era kolonial dan juga pelayanan sosial lainnya terus disemai sampai hari ini. Walau dinamika politik tidak pernah absen dalam tubuh Muhammadiyah, namun gerakan Muhammadiyah tetap lebih tepat dan syah untuk diberikan gelar sebagai sebagai "gerakan etis."

Petisi lainnya yang tidak kalah urgen adalah terkait isu-isu global yang mengancam seluruh penghuni planet Bumi yaitu dengan petisi untuk menyerukan kerja sama global dan koalisi lintas batas peradaban untuk menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global dan perubahan iklim. Orientasi abad kedua jelas adalah selain internasionalisasi faham 'moderasi Islam' juga memberikan kontribusi riil bagi pentingnya

kesadaran global menjaga alam semesta. Karena, ini pun telah lama diajarkan dalam muhammadiyah bahwa Islam Muhammadiyah adalah islam yang membawa rahmat bagi seru sekalian alam (*rahmatan lil alamin*). Globalisasi wacana Muhammadiyah adalah sebuah keniscayaan untuk dapat dipasarkan ke tingkal internasional karena Muhammadiyah telah berhasil mempraktikkan *best practice* dalam tata kelola organisasi dan juga keberhasilan mempraktikkan model demokrasi yang bermartabat.

Hebatnya, karena mesin struktur organisasi di Muhamamadiyah cukup 'sehat' apa pun gagasan atau petisi Muktamar akan dengan mudahnya dapat diterima dan diupayakan oleh struktur di bawahnya juga oleh organisasi otonom atau lembaga pendidikan yang berada di bawah payung persyarikatan. Inilah kelebihan organisasi ini, dan ini juga mungkin salah satu rahasia mengapa Muhammadiyah dapat bertahan sampai memasuki abad kedua. Akhirnya, harus diakui bahwa tantangan ekologis merupakan tantangan besar bagi gerakan Muhammadiyah yang telah berhasil menampilkan Islam madzhab 'wasathiyah' (Azra, 2015) yang modern dan rasional serta menjadi gerakan purifikasi yang diterima secara luas di Nusantara. Tantangan ekologis adalah tanggung jawab kolektif umat beragama untuk memajukan teologi ekologi dalam setiap langkah geraknya.

Tribun Timur 21 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen Fisipol UMY; sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DIY

Sikap Politik Muhammadiyah

ZULY QODIR

"*Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan capres dari partai politik mana pun menjelang Pemilu Presiden 9 Juli mendatang,*" demikian diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (16/5/2014). Pernyataan Din harus dibaca dengan jernih dan cermat menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan yang dapat saya sampaikan terkait dengan sikap politik Muhammadiyah.

Pertama, Muhammadiyah menempatkan posisi semua parpol yang mengusung capres-cawapres sama saja. Mereka tak punya hubungan langsung dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama tersebut. Dengan memosisikan diri netral, Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai *king maker* suara umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar.

Suara Muhammadiyah sendiri, menurut survei Saiful Mujani (2009), mencapai 25 juta penduduk Indonesia. Cukup signifikan menjadi idola kalangan parpol melirik organisasi modernis Islam ini. Dengan posisi seperti itu, Muhammadiyah tak mengeksklusifkan parpol mana pun yang mengusung capres/cawapres meski sebagian orang Muhammadiyah tentu kecewa (karena sebagian politisi dari warga Muhammadiyah berharap

mendukung salah satu parpol pengusung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli).

Rupanya terdapat parpol yang merasa "sangat dekat" bahkan jadi bagian integral Muhammadiyah sehingga selalu berusaha dengan banyak cara mengatakan bahwa inilah partai Muhammadiyah sehingga layak mendapat dukungan resmi Muhammadiyah dalam pileg dan pilpres. Parpol lain dianggap tak punya kedekatan istimewa dengan Muhammadiyah sehingga tak berhak mendapat dukungan dari Muhammadiyah.

Sikap politik seperti itu (dengan membaca secara jernih dan cermat pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah) merupakan perilaku politik berlebihan. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik praktis yang bergerak dalam gerakan dukung mendukung capres-cawapres dalam pilpres yang diselenggarakan di Indonesia sejak era Reformasi. Benar bahwa warga Muhammadiyah, bahkan sebagian elite Muhammadiyah, menjadi pengurus partai tertentu. Itu tak serta-merta menjadikan Muhammadiyah bagian dari parpol yang mencalonkan pasangan capres-cawapresnya.

Hal yang dapat dibenarkan adalah bahwa pilihan politik warga Muhammadiyah diserahkan kepada pribadi-pribadi yang memiliki kedekatan emosional dengan pasangan capres-cawapres tanpa harus menyebutkan bahwa itulah pasangan capres-cawapres resmi dari Muhammadiyah. Kesalahpahaman semacam ini harus disampaikan kepada publik dan warga Muhammadiyah karena jika tidak dilakukan, akan membuat antarsesama warga Muhammadiyah saling menelikung, saling menuduh, memfitnah, dan mendeskreditkan jika tak memilih pasangan calon yang dikehendaki politisi Muhammadiyah yang aktif di parpol tertentu.

Politik tinggi

Kedua, politik tinggi Muhammadiyah, yakni politik kebangsaan. Perilaku politik Muhammadiyah bukanlah perilaku politik dukung mendukung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli. Politik kebangsaan merupakan karakteristik politik Muhammadiyah yang telah dikembangkan sejak berdirinya Muhammadiyah dengan mendirikan amal

usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penyantunan anak yatim dan kaum duafa.

Muhammadiyah memang pernah menjadi ”bagian dari Masyumi”, tetapi segera siuman dan bertobat sehingga tak pernah jadi bagian dari parpol mana pun. Banyaknya warga Muhammadiyah di berbagai parpol menunjukkan kedewasaan politisi warga Muhammadiyah. Politisi yang berlatar Muhammadiyah tak memiliki klaim tunggal sebagai ”putra mahkota” Muhammadiyah yang harus diusung dan didukung secara resmi oleh persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan demikian, kekecewaan sebagian politisi asal Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku politik tidak dewasa. Bahkan, dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku politik sektarian dan eksklusif sehingga merasa harus mendapat dukungan resmi dari persyarikatan Muhammadiyah. Maka, dalam konteks politik tinggi yang beradab, santun, dan bervisi, warga Muhammadiyah tak dibenarkan melakukan kampanye hitam terhadap capres-cawapres yang diusung parpol mana pun, termasuk yang dianggap tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah.

Kita harus memosisikan Muhammadiyah benar-benar sebagai penyangga kekuatan *civil* Islam Indonesia yang harus didorong dan mendukung perkembangan masyarakat Islam yang toleran, humanis, dan inklusif, bukan karakteristik Islam Indonesia yang penuh kekerasan dan ancaman sehingga menakutkan sebagian umat Islam minoritas dan umat agama lain yang jumlahnya juga minoritas. Muhammadiyah harus terus didorong menciptakan dan mengampanyekan Islam moderat sebagai genre Islam Indonesia.

Karena itu, sikap politik Muhammadiyah yang disampaikan Din harus dipahami sebagai bagian penting Muhammadiyah dalam menjaga khitah Muhammadiyah yang sejak awal tak diagendakan jadi ”gerakan politik praktis” dan sebagai parpol. Namun, Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam yang mengemban amanah Islam *rahmatan lil alamin* dan membangun komunitas masyarakat *baldatun thayibatun warabun ghofur*.

Sikap netral yang disampaikan Din sekaligus sebagai ”sikap netral yang politis”. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting

sebagai bagian dari gerakan *civil* Islam Indonesia yang selalu berupaya mengampanyekan perilaku politik beradab. Perilaku politik beradab Muhammadiyah tak hanya mengejar keuntungan material dan kekuasaan, tetapi juga terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku santun beretika dalam menjalankan tindakan politik praktis.

Dengan memperhatikan sikap politik Muhammadiyah seperti disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, maka tidak bisa dibenarkan jika pada suatu saat nanti jajaran elite parpol dengan serta-merta ”memaksakan diri” agar para pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat, mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Yang benar adalah jika ada warga Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Itu sikap pribadi, bukan sikap organisasi (persyarikatan).

Kita harus menjaga perilaku politik Muhammadiyah yang sudah terang benderang sejak era Reformasi, yakni tidak mendukung secara resmi pasangan capres-cawapres sekalipun sebagian warga persyarikatan menjadi aktivis parpol, bahkan tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli.

Kita harus bersikap bijaksana kepada persyarikatan Muhammadiyah yang ”netral” dalam pilpres mendatang karena sikap politik Muhammadiyah tersebut bukan berarti warga persyarikatan Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis dan mendukung pasangan capres-cawapres yang dikehendaki.

Pernyataan sikap politik Muhammadiyah yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah juga dapat kita jadikan pembelajaran bagi warga persyarikatan Muhammadiyah agar berpolitik secara dewasa, tidak sektarian, tetapi inklusif dan beradab sehingga dalam 10-20 tahun mendatang warga Muhammadiyah tidak menjadi politisi rabun ayam dan berpikiran *cetek*.

KOMPAS, 22 Mei 2014. Sosiolog Fisipol UMY; Peneliti Senior Maarif Institute Jakarta

7

TRISULA BARU

Etika Sukarela Muhammadiyah untuk Bangsa

ABDUL MUNIR MULKHAN

DALAM usianya yang memasuki abad kedua, Muhammadiyah terbilang sukses dalam mengembangkan ratusan rumah sakit dan perguruan tinggi, serta ribuan sekolah. Sumber pembiayaan boleh disebut murni swasta dan mandiri. Aset yang dikelola amal usaha Muhammadiyah (AUM) berupa rumah sakit, perguruan tinggi, dan sekolah di seluruh Nusantara bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Pengelolaan AUM secara profesional—namun tanpa sistem penggajian, kecuali pengganti jasa layanan sosial, yang bisa disebut amat rendah jika dibandingkan dengan lembaga modern serupa—ternyata tidak mendorong perilaku korupsi di lingkungan AUM.

Etika sukarela dan kegotongroyongan itulah yang merupakan nilai dasar kemanusiaan yang menjadi kekuatan inti gerakan Muhammadiyah sehingga bisa bertahan hingga satu abad dan terus mengembangkan sayap AUM ke seluruh pelosok Nusantara. Tidak hanya terbatas di komunitas Muslim, bahkan di NTT dan Papua, pengelola dan pengguna jasa AUM adalah warga yang mayoritas beragama selain Islam. Pertanyaan yang kini mengusik setelah memasuki abad keduanya ialah bagaimana atau bisakah gerakan ini Muhammadiyah mengembangkan AUM bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang lebih universal.

Kebersamaan

Muhammadiyah, sejak mula didirikan tahun 1912, konsisten berjuang membangun masyarakat Nusantara berbasis pada nilai kebersamaan (*ta'awwun*) atau gotong-royong dan kesukarelaan. Berdasar kepentingan bersama (jamaah), aktivis dan pengikut gerakan ini mengembangkan AUM. Bentuk-bentuk AUM itu antara lain berupa lembaga pendidikan, rumah sakit dan balai kesehatan, panti asuhan yatim piatu, tempat ibadah (masjid dan mushala), penelitian tentang kehidupan sosial dan privat keseharian menurut syariat, dan dakwah pengembangan masyarakat berbasis jamaah (*community development*).

Sumber pembiayaan AUM tersebut ditanggung bersama oleh aktivis dan pengikut, baik terdaftar sebagai anggota maupun simpatisan, yang terkonsolidasi melalui jamaah. Tahun 1970-an, Muhammadiyah merumuskan pola kegiatan AUM itu ke dalam gagasan yang waktu itu disebut Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Melalui gagasan tersebut, setiap kelompok aktivis bersama pengikut (baik anggota terdaftar maupun bukan) dikonsolidasikan ke dalam suatu jamaah berdasar tempat tinggal, baik di pedesaan maupun perkotaan. Sasaran utama kegiatan jamaah ialah memecahkan problem sosial ekonomi yang dihadapi anggota jamaah atau masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar tempat tinggal jamaah.

Kelompok jamaah tersebut tidak berada dalam jaringan struktur organisasi, tetapi lebih sebagai kelompok sukarela. Ikatan dengan organisasi, seperti ranting atau cabang Muhammadiyah, diletakkan pada aktivis gerakan yang disebut "inti jamaah". Melalui "inti jamaah" itulah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat disampaikan kepada pimpinan resmi, tingkat ranting atau cabang, secara konsultatif untuk dicarikan pemecahannya.

Dari sini sering kali muncul gagasan untuk membangun balai kesehatan, rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, atau tempat ibadah, sebagai salah satu solusi problem sosial-ekonomi yang dihadapi warga jamaah atau luar jamaah.

Sumber dana AUM tersebut di atas berasal dari zakat, infak, sedekah, atau wakaf yang diberikan oleh publik secara sukarela. Demikian pula pengelolaan AUM secara profesional oleh aktivis atau pengikut gerakan ini dilakukan secara sukarela. Mereka bukan menerima gaji, melainkan pengganti jasa kemampuan dan waktu yang diwakafkan bagi AUM tersebut. Karena itu, imbalan jasa direktur rumah sakit Muhammadiyah, kepala sekolah, rektor perguruan tinggi Muhammadiyah atau kepala panti sebatas pengganti layanan jasa yang diberikan, bukan berdasar standar gaji seperti dikenal di lembaga pemerintah atau swasta lain. Pengurus AUM atau pimpinan Muhammadiyah yang membawahkan AUM di Muhammadiyah dikenal dengan majelis atau bagian, juga pimpinan gerakan ini sebagai regulator, yang mengangkat rektor, direktur rumah sakit atau kepala sekolah, tidak memperoleh gaji atau pun honorarium.

Melalui tata kelola seperti itu, Muhammadiyah sampai saat ini telah berhasil membangun lebih dari 600 balai kesehatan dan rumah sakit, 180 perguruan tinggi (berikut yang dikelola Aisyiyah), lebih dari 10.000 sekolah tingkat dasar dan menengah (lihat laporan Kompas, 7 Juli 2015, hlm 5). AUM tersebut tersebar dari Papua hingga Aceh. Jumlah mahasiswa masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) 1.000 hingga 33.000 mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah Makassar, yang menjadi ajang Muktamar 2015, tergolong PTM papan atas dalam hal jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 30.000 orang. Menyusul Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang dengan jumlah mahasiswa di atas 20.000 mahasiswa. Sementara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Palembang, Jakarta (dua PTM), dan Yogyakarta (dua PTM) berjumlah di atas 15.000 mahasiswa.

Profesional Tanpa Pamrih

Pengelolaan secara profesional dengan sistem penggajian berbasis kesukarelaan, bukan mencari kekayaan, merupakan basis nilai yang selama ini berhasil memelihara ikatan jamaah *taawwuni* (kesadaran

kolektif kepentingan bersama). Dari sinilah pengelola AUM diseleksi berdasar komitmen pada nilai kesukarelaan tersebut bersama komitmen pada kepentingan bersama. Penggantian layanan jasa, bukan gaji, yang mungkin terbilang rendah jika dibandingkan lembaga serupa, ternyata tidak mendorong pengelola AUM untuk melakukan korupsi.

Sampai hari ini tidak diketemukan kasus korupsi dalam pengelolaan AUM meskipun rektor, direktur, kepala sekolah tersebut bisa dibilang sebagai "raja tanpa mahkota" karena sebagai penguasa tunggal yang bebas mengelola dana yang terkumpul secara sukarela dan gotong royong yang jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Bagi orang luar mungkin terasa aneh, hubungan kerja antara pimpinan Muhammadiyah dan pengelola AUM. Sementara pengelola AUM, sebagai rektor, kepala sekolah, atau direktur rumah sakit menerima imbalan sebagai balasan atas jasa layanan sosialnya, yang mengangkat rektor, kepala sekolah, dan direktur rumah sakit tersebut justru tidak menerima imbalan atau balas jasa dan honorarium.

Sudah sewajarnya jika yang mengangkat rektor, kepala sekolah, dan direktur rumah sakit itu juga menerima imbalan atas jasa layanan sosial yang diberikan. Usulan untuk memberi imbalan bagi pimpinan gerakan itu pernah muncul tahun 1990-an, tetapi justru ditolak secara aklamasi oleh pimpinan yang akan menerima imbalan tersebut. Salah satu pertimbangan yang muncul ialah jika pimpinan gerakan juga menerima imbalan, dana yang terkumpul secara sukarela dan gotong-royong itu akan habis tanpa sempat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan AUM.

Soalnya kemudian ialah bagaimana memelihara nilai kesukarelaan di tengah gempuran gaya hidup hedonis dan permisif dengan tetap berkomitmen mengembangkan AUM yang berkualitas? Adalah tantangan apakah nilai-nilai etika kesukarelaan dan *taawwun* bisa terus direproduksi gerakan ini bagi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan yang lebih besar dan terbuka.

Muncul pertanyaan berikut, mungkinkah gerakan ini mengembangkan pola kerja profesional berbasis etika sukarela (tanpa pamrih) dan kolektivitas *taawwun* bagi pengelolaan kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan yang

lebih plural? Inilah tantangan kebangsaan bagi Muhammadiyah dalam usia abad keduanya.

KOMPAS, 04 Agustus 2015. Penulis adalah Komisioner Komnas HAM 2007-2012; Wakil Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005; dan Guru Besar Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KONTEKSUALISASI SPIRIT AL-MA'UN

BAMBANG SETIAJI

SYAHDAN KH. Ahmad Dahlan mengajar murid-muridnya di Kauman, Yogyakarta, tentang tafsir Juz 'Amma, setelah al-Fatihah dan surah pendek lainnya, sampailah pada surah al-Ma'un. Setelah sampai surah ini, Kiai Dahlan mengulang beberapa kali, sampai-sampai para murid merasa bosan.

Karena merasa bosan maka seorang murid beliau memberanikan bertanya. "Kiai, mengapa Kiai mengulang-ulang terus surah al-Ma'un?" Kiai Dahlan menjawab, "Apakah kalian sudah paham?" Tentu saja para murid merasa sudah paham karena surah ini pendek, mudah dihafal, dan dimengerti artinya.

Kiai Dahlan akhirnya menjelaskan bahwa yang disebut paham, selain menghapal, mengerti artinya, adalah mengamalkannya. Di sini, para santri Muhammadiyah pertama itu baru mengerti bahwa mereka sebenarnya belum paham. Islam dalam versi Kiai Dahlan tidak cukup atau tidak berhenti kepada mengerti makna kata-kata, tetapi harus bertindak nyata.

Bertindak nyata merupakan ciri khas gerakan Muhammadiyah yang riil terjun di masyarakat. Itulah sebabnya, jumlah sekolah sampai perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti-panti sangat banyak dari kota hingga ke pelosok desa dan daerah tertinggal.

Amal-amal itu disebut Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Karena AUM adalah amal maka ditandai dengan keikhlasan. Sekali suatu sekolah atau rumah sakit dinamakan AUM, maka pemilik atau muwakif sudah tidak bisa memengaruhi lagi. Semua keputusan tentang berjalannya sekolah dan rumah sakit merupakan hasil musyawarah. Pemiliknya adalah masyarakat atau publik.

Di universitas yang maju, bahkan pimpinan Muhammadiyah, para pengelola, misalkan, rektor dan dekan, tidak bisa sekadar memasukkan keluarganya bila tidak lulus tes. Begitulah makna keikhlasan tersebut secara modern berarti tidak bertindak sembarangan, tetapi harus berdasarkan kriteria objektif.

Keikhlasan dalam pengertian tidak lagi memiliki *previlage* kepada AUM yang dikelolanya inilah yang tidak dimiliki lembaga lain di negeri ini. Keikhlasan para pemilik tanah atau pendiri AUM dengan tidak bisa menitipkan keluarganya atau mengarahkan jalannya AUM, bisa menjadi contoh di negeri ini, misalnya, untuk menaati peraturan, tertib hukum.

Memordernisasi keanggotaan

Dengan modal keikhlasan dalam arti menekan *previlage* untuk bertindak di luar ketentuan dalam menjalankan AUM, beberapa AUM sudah memodernisasi surah al-Ma'un dalam wujud baru. Tahukan kamu siapa orang yang menolak agama? Mereka adalah orang yang tidak bertindak nyata untuk memberi si miskin dan si yatim.

Dengan makna bertindak nyata tersebut, para santri Kiai Dahlan kemudian membuat panti-panti yatim. Implementasi pesan Kiai Dahlan ini di negara Barat disebut *welfare state*. Dalam *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab langsung dengan membaut empat program utama, yaitu memberi tunjangan kemiskinan, memberi tunjangan anak, memberi tunjangan seluruh manula (pensiun/jompo), dan memberi pengangguran/ korban PHK (fakir, karena tidak memiliki sumber penghasilan). Untuk mencontoh Barat, bahkan pada level negara pun, kita bangsa Indonesia belum bisa.

Dengan kemampuan yang terbatas, *welfare state* model Kiai Dahlan perlu dimordernisasi. Misalnya, dalam kartu iuran anggota Muhammadiyah perlu dipikirkan santunan tetap setiap bulan kepada yatim, jompo, dan janda sebelum menikah lagi. Dengan daya tarik ini, diharapkan keanggotaan menjadi tertib, pembayaran iuran menjadi rutin, dan makna jamaah menjadi dirasakan.

Dalam bentuk modern, jamaah berwujud dalam taawun, yaitu semua anggota beriuran untuk menanggung anggota yang mengalami musibah. Diam-diam, beberapa AUM, seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, RS Islam Jakarta, dan lembaga Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta sudah menyelenggarakan Dana Pensiun yang intinya melakukan mordernisasi makna surah al-Ma'un dari sistem panti ke sistem santunan tetap.

Kelemahan sistem panti adalah perlu tempat dan pengelolaan, daya tampung terbatas, dan yang terpenting anak yatim kehilangan dua kali, mungkin bulan pertama kehilangan ayahnya, bulan berikut kehilangan ibunya karena harus tinggal di panti. Dengan modernisasi menjadi santunan tetap maka anak yatim dibiarkan tinggal dalam dekapan ibunya, tetapi Muhammadiyah memberi santunan tetap melalui akumulasi iuran anggota.

Untuk memulai santunan yatim, jompo, dan janda, tidak perlu menunggu iuran menjadi besar, bisa dimulai kapan saja dan sesuai kemampuan. Walaupun sebulan hanya Rp 50 ribu bisa dimulai. Namun, secara wajar untuk bisa survive, sekitar Rp 300 ribu sebulan.

Di samping mendapat santunan seperti itu, anak-anak yatim anggota Muhammadiyah yang aktif membayar iuran bisa bersekolah di sekolah Muhammadiyah dan berobat di RS Muhammadiyah. Untuk dua hal terakhir, bisa secara sendiri atau bekerja sama dengan program pemerintah.

Insya Allah, dengan modernisasi seperti itu, masyarakat akan kembali bergairah berbondong-bondong mendaftar menjadi anggota Muhammadiyah karena melihat manfaat dan kebaikan nyata di dalamnya.

Republika, 06 Agustus 2015. Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammadiyah dan Kedermawanan

ZAKIYUDDIN BAIDHAWY

Apa yang membuat Muhammadiyah bertahan lebih dari satu abad? Mengapa pada abad kedua ini Muhammadiyah terus menyinari negeri? Dua pertanyaan sederhana, tapi fundamental terkait survivalitas dan sustainabilitas Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan dakwah Islam.

Jawaban dari pertanyaan sederhana itu tidaklah rumit. Muhammadiyah sejak awal disemangati oleh teologi al-Ma'un dan moralitas ihsan berkemajuan. Teologi al-Ma'un mendorong dan menggerakkan Muhammadiyah untuk "berbuat yang berguna dan bermanfaat" bagi orang lain dan lingkungan. Moralitas ihsan berkemajuan menopang motivasi kedermawanan sebagai bagian dari ajaran dan falsafah kasih sayang.

Moralitas ihsan melukiskan pentingnya seorang hamba berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang layak ditiru manusia. Dua sifat Allah yang termaktub dalam *al-asma' al-husna* yang berhubungan langsung dengan kedermawanan ialah al-Rahman dan al-Rahim. KH Ahmad Dahlan mengistilahkannya dengan teologi "welas asih".

Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang atas semua makhluk-Nya. Seorang hamba yang penuh kasih sayang dan menunjukkan kelembutan

hati terhadap sesama. Kasih sayang adalah tindakan terhormat yang dibawa melalui perbuatan aktif terhadap orang lain.

Perbuatan amal dapat berdampak positif bagi seseorang setelah kematiannya. Kedermawanan dihargai dengan balasan surga. Menurut perspektif deontologis ini, amal mengandung nilai keutamaan yang sejalan dengan norma agama.

Ketika seseorang melanggar norma etika, ini tidak hanya memengaruhi kehidupan kita sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebaliknya, ketika kita bertindak atas dasar norma-norma etika, berarti kita telah berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih baik.

Muhammadiyah melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) merepresentasikan semua ini. Dalam kerangka etika dan budaya kerja amanah, kedermawanan merupakan wujud kasih sayang sesama dan perlu dikelola secara bertanggung jawab dan berdimensi ganda.

Kedermawanan adalah membumikan welas asih Allah SWT bagi kehidupan dunia. Perwujudan welas asih itu akan berdampak eskatologis bagi pelakunya di hari akhir. Karena itu, lembaga amil semacam Lazismu bertanggung jawab memperluas dimensi duniawi dan ukhrawi dari welas asih itu.

Dengan analogi pantulan bola pingpong, Lazismu menerima bola "welas asih kedermawanan" para muzaki, kemudian memantulkannya kepada kaum dhuafa agar bola terarah pada sasaran yang tepat, terencana, terukur, dan efektif bagi pemberdayaan. Bola yang diorganisasi secara terarah itu pada saatnya dapat dipantulkan kembali oleh kaum dhuafa yang telah berubah nasibnya menjadi lebih baik ke arah Lazismu. Dan, Lazismu yang menyambut bola itu akan memantulkannya kembali ke arah lain sehingga memperluas manfaat bagi masyarakat banyak.

Dengan cara ini, pantulan welas asih kedermawanan dapat berbuah secara duniawi berupa peningkatan dan perluasan kesejahteraan, mengubah mustahik menjadi muzaki; dan menghasilkan secara ukhrawi berupa pahala yang terus mengalir.

Jadi, perspektif kedermawanan perlu berasumsi untuk melindungi kepentingan terbaik masyarakat dan juga melindungi manusia dari sinisme profit, konsumerisme egosentris, narsisisme kekayaan untuk diri sendiri, dan diskriminasi atas dasar pendapatan, status sosial, etnis atau faktor diskriminatif lainnya. Dalam tradisi teologi welas asih dan teologi al-Ma'un yang dikembangkan Muhammadiyah, ide kasih sayang tak hanya digambarkan sebagai kebajikan manusiawi, tetapi juga mengandung kualitas nilai-nilai ilahi. Hal ini setidaknya diperjelas oleh kalimat basmalah yang menjadi awal setiap pembacaan surah Al-Quran.

Welas asih ditegakkan di atas kodrat spiritual manusia. Kebajikan ini memungkinkan manusia melampaui sisi duniawi di dalam dirinya. Seseorang yang memperoleh kebajikan ini dianggap mencapai kebebasan batin yang memungkinkan mereka tak lagi diperintah oleh keinginan sendiri, naluri, dan kebutuhan material.

Kasih sayang juga digambarkan sebagai kebajikan yang membantu kita sebagai makhluk sosial untuk menghindarkan dari posisi disfungsional atau destruktif dalam interaksi kita dengan sesama. Idenya adalah bahwa orang tidak boleh fokus pada kepentingan diri sendiri, keuntungan pribadi, atau kelompok dalam hubungan sosial mereka.

Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Lazismu melembagakannya dalam teologi dan praksis al-Ma'un. Kasih sayang direpresentasikan sebagai landasan penting bagi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan filantropi, yakni setiap jenis pekerjaan sukarela tanpa memikirkan balasan dari kekuatan yang lebih tinggi.

Dalam tradisi teologi Islam, amal dan kesukarelawanan dalam kerja kemanusiaan, pengalaman pribadi hidup dalam kesulitan dan penderitaan memiliki tempat sentral. Pengalaman ini dapat meningkatkan derajat motivasi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal maupun kemanusiaan.

Teologi al-Ma'un telah mengembangkan kesadaran dan solidaritas orang beriman untuk beramal saleh guna menyantuni mereka yang papa dan nestapa. Titik berangkatnya bahwa kita merasa memiliki kedekatan

yang lebih besar dengan kenyataan di mana kita berada daripada dengan dunia yang kita amati dari kejauhan.

Al-Ma'un mengajak berempati secara dekat dengan penderitaan dan kelangkaan. Hal ini inheren dalam ajaran Islam tentang berpuasa Ramadhan. Penderitaan haus, lapar, dan kelelahan dalam berpuasa melukiskan kondisi kekurangan yang kita harus jalani untuk mendapatkan pengalaman pribadi tentang kesulitan dan penderitaan. Pada gilirannya kita bisa memahami situasi orang yang menderita sehingga menjadi lebih bersedia membantu mereka.

Kedermawanan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan sukarela menjadi titik awal kebajikan dan kasih sayang. Lazismu memiliki sumber daya amil yang cukup memadai untuk menggerakkan kerja sukarela ini.

Pekerjaan membantu orang lain tak dimaksudkan untuk tetap menjadi kebajikan individu. Selain hubungan individu, kasih sayang harus membentuk dasar untuk membangun jaringan sosial yang berfungsi dalam masyarakat. Kasih sayang dibentuk atas dasar pola pikir kesetaraan. Kaum yang lemah akan meningkat posisinya setara dengan anggota masyarakat lainnya.

Dilihat dari perspektif ini, kasih sayang dan bantuan adalah kebajikan yang menjadi landasan bagi langkah aktif membantu orang-orang yang berada dalam "ketidaksetaraan situasional".

Republika, 30 Juli 2015. Penulis adalah Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga, Anggota Majelis Pendidikan Kader PWM Jawa Tengah

Dakwah Pelayanan Muhammadiyah

Mutohharun Jinan

Dalam hidup ini untuk mencapai usia 100 tahun bukan perkara mudah. Jika ada manusia atau binatang yang mencapai usia satu abad maka ia termasuk hal yang langka dan di luar kebiasaan usia makhluk hidup. Begitu juga bila ada organisasi dakwah, perusahaan, atau perkumpulan yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya hingga mencapai usia satu abad tentu ada hal-hal yang luar biasa di dalamnya, utamanya terkait dengan peran pelayanan dan manfaatnya di masyarakat. Oleh karena itu layak mendapat apresiasi.

Itulah yang telah dicapai oleh Muhammadiyah, organisasi gerakan dakwah Islam, yang pada 18 November 2012, usia Muhammadiyah lebih dari 100 tahun terhitung sejak tahun 1912. Sebuah rentang usia gerakan Islam modern Indonesia yang cukup fenomenal.

Di antara falsafah penting yang mendasari gerak dakwah Muhammadiyah adalah kesediaan melayani yang tiada henti terhadap kebutuhan umat dan kemanusiaan. Melayani merupakan semangat dasar yang tertanam sejak gerakan modern ini berdiri di Yogyakarta.

Sebagai gerakan dakwah, tabligh yang dilakukan Muhammadiyah kepada umat dakwah maupun umat ijabah seperti ceramah, khutbah, dialog, dan pesan-pesan melalui media merupakan kegiatan layanan.

Lebih dari itu, berbagai tindakan yang dilakukan pada amal sosial dan amal kemanusiaan di bidang pendidikan, rumah sakit, dan panti-panti asuhan yang tersebar di seluruh nusantara pada dasarnya adalah tindakan pelayanan kemanusiaan.

Lazimnya sebuah aktivitas layanan (filantropi) mencakup tiga dimensi yaitu pemberian, kebutuhan, dan keikhlasan. Dalam Islam jelas sekali filantropi mempunyai peran utama dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (QS. Al-Baqarah/2: 177). Dalam ayat tersebut dijelaskan beberapa kriteria orang-orang yang beriman dan bertakwa, di antaranya adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang membutuhkan pertolongan.

Sejauh ini semangat filantropi masih melekat kuat dan menjadi landasan gerakan. Antara lain dapat dilihat dari masih terus tumbuhnya lembaga dan amal usaha untuk layanan umat yang diprakarsai oleh aktivis gerakan yang dibentuk oleh Ahmad Dahlan ini. Menariknya, semangat melayani selalu tumbuh dan berakar kuat dari bawah.

Di mana-mana gerakan ini tumbuh dari bawah atas inisiatif para aktivis yang memiliki semangat filantropi tinggi untuk melayani dan memberi sumbangan serta peran sosial di lingkungannya. Sulit dijumpai tumbuh dan berkembangnya aktivitas dakwah Muhammadiyah atas dorongan dari pengurus pusat, semua tumbuh dari bawah dengan maksud pelayanan kemanusiaan.

Kini gerakan pelayanan Muhammadiyah telah menginspirasi masyarakat luas. Sering kali tim relawan dari berbagai negara di dunia langsung merespons dengan cepat, mengirim bantuan makanan, obat-obatan, dan dana ke lokasi di mana terjadi musibah atau bencana alam. Gerak masyarakat sipil sangat cepat untuk melakukan kerja-kerja filantropi. Begitu banyak peran masyarakat sipil dan organisasi sosial-keagamaan Islam yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan di lokasi bencana. Organisasi kemanusiaan itu aktif menggalang dana dan jaringan melalui berbagai bentuk kampanye kemanusiaan, merekrut relawan, dan mengorganisasikan pemberian bantuan sosial.

Perkembangan baru Muhammadiyah dalam bidang layanan sosial adalah adanya lembaga Lazismu, MPM dan MDMC yang disebut dengan trisula baru gerakan filantropi Muhammadiyah. LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu telah memiliki jaringan secara nasional hingga ke tingkat Ranting. Lembaga yang secara resmi berdiri tahun 2002 ini menjadi ujung tombak baru gerakan filantropi Muhammadiyah.

MPM PP Muhammadiyah dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45. MPM mempunyai dua pekerjaan besar. Pertama, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi kepada kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin merupakan kewajiban keagamaan.

Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya ditujukan kepada warga Muhammadiyah saja atau umat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Kemudian periode 2010-2015, misi MPM memberikan prioritas kepada empat hal. Yaitu pertama, *massivikasi* program pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberi perhatian yang lebih serius kepada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan. Ketiga, memberi perhatian serius kepada kaum buruh, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Keempat, memberi perhatian serius kepada kaum difabel melalui berbagai aktivitas pemberdayaan.

MDMC atau *Muhammadiyah Disaster Management Center* yang berjejaring hingga ke kabupaten dan kota di Indonesia. MDMC lebih fokus pada penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Fungsi sosial lembaga ini adalah memberi pertolongan pada masyarakat lemah yang menderita baik itu sakit maupun yang menjadi korban bencana. Layanan darurat bagi korban bencana menjadi layanan sosial yang unik dalam konteks aktivisme sosial organisasi keagamaan. Lembaga ini pun terus melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga dalam perkembangan Muhammadiyah kontemporer.

Sudah barang tentu masih banyak kekurangan dalam gerak langkah pelayanan yang telah dilakukan sepanjang perjalanan melintasi zaman. Namun hal ini justru akan menjadi lecutan untuk perjalanan di abad kedua di mana kompleksitas persoalan kemanusiaan kian menantang.

Penulis adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kemiskinan dan Kepemimpinan Muhammadiyah

Bachtiar Kurniawan

Salah satu persoalan yang masih menghantui kehidupan umat dan bangsa saat ini adalah soal kemiskinan. Meskipun selalu diberitakan menurun, faktanya kemiskinan belum bisa dienyahkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada 2014 adalah 27,73 juta jiwa atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah orang miskin menyebar dari perkotaan dan perdesaan: di wilayah perkotaan mencapai 8 persen, di desa 13,8 persen.

Pada 2015, jumlah orang miskin semakin banyak, yakni 30,25 juta atau 12,5 persen dari total penduduk Indonesia. Ada dua faktor yang turut serta menciptakan kemiskinan. Pertama, faktor eksternal, sistem, dan struktur ekonomi global yang timpang lantaran lebih berpihak pada negara kaya dan kelompok kapitalis. Hal ini ditambah dengan gejolak kelesuan ekonomi global sehingga memengaruhi transaksi berjalan pelaku ekonomi Tanah Air.

Kedua, faktor internal yang didorong oleh kebijakan pemerintah yang cenderung tidak sensitif dengan persoalan orang miskin. Kebijakan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas yang cenderung menyerahkan pada mekanisme pasar semakin memperdalam jurang kemiskinan.

Kesusahan dan ketidakberuntungan ini tecermin dari koefisien gini yang akhir 2014 menembus 0,42 persen, tentu pada 2015 meningkat seiring dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Hanya orang kaya yang diuntungkan dan menikmati paket kebijakan pemerintah dan ekonomi global. Rakyat kelas bawah semakin menjerit dan terjepit.

Muhammadiyah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari republik ini tentu tidak selayaknya tenang dan santai. Muhammadiyah harus meningkatkan peran dan kontribusinya sebagai kekuatan dan gerakan pembebas bagi persoalan umat dan bangsa, khususnya kemiskinan dan penderitaan rakyat.

Gerakan pencerahan

Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar adalah momentum tepat bagi Muhammadiyah dalam meluruskan "shaf" gerakannya. Muktamar kali ini sangat cocok dengan *setting* persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara serta Muhammadiyah sendiri.

Gerakan pencerahan bagi Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan yang memiliki tiga dimensi, yakni gerakan yang berusaha melakukan pembebasan. Pembebasan bagi Muhammadiyah berarti membebaskan manusia dari berbagai macam belenggu yang mengotori dan membengkokkan keyakinan akidah beragama, belenggu sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik.

Muhammadiyah berkiprah dan bergerak sejak awal mencoba melakukan terobosan dan upaya pembebasan manusia pada wilayah ini. Hal ini tecermin dari model dakwah tajdid yang mengupayakan pemurnian tauhid dan pembaruan kehidupan sosial keagamaan di Tanah Air.

Gerakan pencerahan juga bermakna sebagai gerakan pemberdayaan. Setelah melakukan pembebasan, Muhammadiyah harus melakukan tindak lanjut penguatan masyarakat. Upaya penguatan itu bisa dilihat dari bagaimana Muhammadiyah memberdayakan masyarakat sejak berdirinya sampai saat ini. Komitmen pemberdayaan mengalami penguatan dan insti-

tusionalisasi ketika Muhammadiyah mendirikan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).

MPM adalah jawaban Muhammadiyah dalam merespons dan mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya kemiskinan. Muhammadiyah melalui MPM langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan intervensi mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya di akar rumput, miskin, dan marginal.

Langkah konkret pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pendampingan pada kelompok petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, kaum difabel, pelaku usaha mikro, dan kelompok marginal lainnya. Kelompok ini menjadi segmen baru dakwah Muhammadiyah, yakni dakwah bil hal. Problem kemiskinan tak lagi menjadi diskursus hangat di ruang diskusi-seminar, tapi sudah mewujud nyata dalam praksis gerakan pemberdayaan.

Langkah pencerahan Muhammadiyah tak hanya berhenti pada gerakan pemberdayaan, tetapi masuk pada wilayah pemajuan masyarakat. Muhammadiyah ingin dengan gerakan pencerahan ini bisa memajukan kehidupan masyarakat menjadi masyarakat dan bangsa yang berkemajuan. Gerakan pemajuan ini dilakukan dengan semakin menghebatkan langkah Muhammadiyah mengupayakan pencerdasan bagi segenap elemen masyarakat dan bangsa.

Melihat kemiskinan yang masih menjadi masalah besar bangsa, melalui Muktamar yang salah satu agendanya memilih pemimpin baru, harus melahirkan pemimpin yang mempunyai komitmen kuat untuk mengatasi salah satu masalah terberat bangsa.

Keberpihakan kepada kelompok miskin dan marginal sudah menjadi nalar autentik Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, telah mencontohkan bagaimana organisasi ini bekerja. Bisa kita baca dalam lembaran sejarah Muhammadiyah betapa Kiai Dahlan begitu berpihak kepada orang miskin. Al-Ma'un dijadikan landasan normatif operasi penyantunan yang kala itu masih terbelenggu dalam kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan.

Spirit keberpihakan itu telah menjadi ruh sekaligus napas gerakan Muhammadiyah. Praksisme al-Ma'un begitu melegenda dan terpatri dalam setiap relung hati aktivis Muhammadiyah dari dulu hingga kini. Program Muhammadiyah sedikit banyak telah diarahkan pada upaya pembebasan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan marginal.

Saat ini, kondisi masyarakat yang dihadapi Muhammadiyah setelah lebih dari satu abad berdirinya jauh lebih kompleks dan kemiskinan masih menjadi masalah pelik dan akut yang harus mendapat perhatian serius secara organisasi. Upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan menjadi gerakan, bukan hanya aktivitas sporadis.

Sudah selayaknya energi Muhammadiyah sedikit banyak diarahkan pada persoalan ini. Upaya pengentasan kemiskinan yang sebelumnya sudah ada harus dilanjutkan, bahkan diperkuat kembali melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak di persyarikatan. SDM yang melimpah, sumber daya finansial yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang ada, termasuk jaringan persyarikatan harus dioptimalkan semaksimal mungkin untuk gerakan pembebasan, pemberdayaan, dan kemajuan masyarakat.

Saat ini, dibutuhkan figur yang cocok dan memiliki idealisme yang pro terhadap orang miskin untuk membawa gerbong Muhammadiyah ke depan. Al-Ma'un yang telah lama menjadi spirit harus semakin dimasifkan dalam tarikan napas gerakan Muhammadiyah melalui kepemimpinan baru hasil Muktamar. Kepemimpinan baru yang bagaimana? Yang berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur, masif, dan sistematis.

Republika, 07 Agustus 2015. Penulis adalah Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Muhammadiyah Perkuat Modal Pembangunan

MUSLIMIN ANWAR

MUHAMMADIYAH memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menyiapkan modal dasar pembangunan berupa sumber daya manusia berkeahlian (*skilled*) dengan tingkat pendidikan yang memadai.

Peran Muhammadiyah dalam menjamin ketersediaan SDM berkeahlian, baik dalam kuantitas maupun kualitas, sangat penting bagi penguatan fundamental perekonomian. Oleh karena itu, pemimpin PP Muhammadiyah haruslah mereka yang mengerti dan paham betul bagaimana meningkatkan peran Muhammadiyah dalam memperkuat modal dasar pembangunan, di antaranya modal dasar manusia (SDM).

Dari sisi kuantitas, tenaga kerja berkeahlian dan berpendidikan tinggi yang tersedia di pasar tenaga kerja saat ini masih terbatas, termasuk dalam hal ketersediaan tenaga profesional dan pekerja yang berkeahlian teknis. Keterbatasan pasokan, terutama pada modal manusia dengan keahlian di bidang *science*, *technology*, *engineering*, *mathematics*, *and health* (STEM-H) dan terampil berbahasa asing, yang merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi peningkatan daya saing ekspor sektor-sektor industri yang berbasis inovasi dengan muatan teknologi tinggi.

Dari sisi pasokan modal manusia masa depan, terdapat pula kelemahan yang cukup besar pada kualitas modal manusia yang masih berada dalam bangku pendidikan. Berkualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari survei *Program for International Student Assesment* (PISA) anak-anak Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara lain di dunia. Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga tahunan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, khususnya terkait literasi membaca, matematika, dan sains.

Penyelenggaraannya adalah Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) yang berkedudukan di Paris, Prancis. Tujuan dari studi PISA adalah untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, dengan maksud untuk meningkatkan metode pendidikan dan hasil-hasilnya.

Indonesia berada di peringkat ke-64 atau posisi dua terbawah untuk skor matematika dalam survei PISA tahun 2012. Posisi Indonesia ini hanya lebih tinggi satu peringkat dari Peru. Untuk PISA 2012, diikuti oleh lebih dari 510 ribu siswa usia 15 tahun di 65 negara dan wilayah.

Di bidang membaca, Indonesia berada pada ranking60 atau setingkat di bawah Malaysia yang berada pada ranking 59. Sedangkan untuk bidang sains, Indonesia juga berada pada ranking64. Sebelumnya, dalam PISA 2009, posisi Indonesia berada pada urutan ke-57 dari 63 negara dan wilayah.

Padahal, dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk membangun kerja sama penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) guna terus mendorong industrialisasi dan daya saing sektor industri di era global, ketersediaan modal manusia berkeahlian dengan standar internasional, sebagai input faktor produksi yang utama, menjadi sangat mendesak.

Ke depan, Muhammadiyah dapat memainkan perannya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat modal manusia. Peme-

rintah telah menargetkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia lebih dari 15 tahun menjadi 8,8 tahun melalui program wajib belajar 12 tahun.

Langkah pertama untuk melengkapi sasaran ini, Muhammadiyah perlu meningkatkan jumlah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berakreditasi minimal B dan meningkatkan kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Untuk jenjang pendidikan tersier, Muhammadiyah perlu meningkatkan jumlah program studi perguruan tinggi minimal berakreditasi B.

Kedua, berdasarkan hasil survei PISA, Muhammadiyah perlu merumuskan sistem pendidikan yang menekankan pada pemilihan dan pelatihan guru, mendorong siswa bekerja bersama, dan memprioritaskan investasi untuk kualitas guru, bukan hanya ukuran ruang kelas. Motivasi siswa dalam belajar matematika harus dikembangkan agar siswa dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya dan menciptakan situasi sehingga siswa menikmati belajar matematika.

Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan meningkatkan prestasi matematika. Dalam hal kecakapan membaca, proses membaca harus ditingkatkan dari hanya sebagai anjuran di sekolah-sekolah menjadi kewajiban. Proses selanjutnya adalah hasil karya tulis karena karya tulis itulah bukti adanya kecakapan membaca. Muhammadiyah dan orang tua harus dapat bekerja sama agar para siswa terpacu berjuang keras untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Ketiga, untuk meningkatkan kualitas modal manusia, Muhammadiyah dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah dan tinggi (*skill-upgrading*), terutama di bidang pendidikan yang terkait dengan sains, teknologi, *engineering*, matematika, dan kesehatan (STEM-H) dan penguasaan bahasa asing utama. Perusahaan dalam sektor industri dengan produk bernilai tambah tinggi akan memerlukan banyak tenaga terampil berpendidikan (berkeahlian) di bidang-bidang ini untuk mendukung kegiatan.

Keempat, Muhammadiyah dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan penyerapan teknologi. Upaya ini dilakukan, antara lain, melalui penyelenggaraan litbang (riset), layanan

perekayasaan dan teknologi, layanan infrastruktur mutu, layanan pengawasan tenaga nuklir, dan penguatan kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

Kelima, Muhammadiyah harus mengambil peran strategis menjadi mitra utama pemerintah dalam membangun *techno* and *science Park* dan mendorong peningkatan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dalam rangka mendukung daya saing sektor industri. Pembangunan nusantara sebagai sebuah ekosistem inovasi berbasis industri yang terhubung secara mantap ke dalam rantai nilai global perlu didukung pembangunan kawasan-kawasan industri (*industrial zones*) yang terintegrasi dengan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (puspiptek) serta lembaga pendidikan vokasi, politeknik, dan universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Republika, 08 Agustus 2015. Penulis adalah Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (2010-2015)

Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

SYAFRUDIN ANHAR

MUHAMMADIYAH saat ini telah masuk pada masa abad keduanya. Dalam abad pertama, dimulai dari awal kelahirannya, Muhammadiyah sebagai suatu perkumpulan telah menetapkan visinya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang diridhai Allah SWT (baca: masyarakat utama yang sejahtera lahir dan batin).

Untuk mencapai visi ini, Muhammadiyah menegaskan misi utamanya sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilandaskan pada teologi al-Ma'un. Sangat wajar bila sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan dalam mengimplementasikan misi dakwahnya, dan ini berlangsung selama satu abad.

Maka, tidaklah mengherankan bila saat ini Muhammadiyah telah memiliki amal usaha yang demikian banyak, antara lain, 3.370 taman kanak-kanak, 2.899 SD dan MI, 1.761 SMP dan MTs, 941 SMK dan SMA, 67 pondok pesantren, 174 perguruan tinggi, 389 rumah sakit dan balai pengobatan, serta 330 panti asuhan. Lebih dari 100 lembaga ZIS (data tahun 2009).

Dengan amal usaha yang sedemikian banyak, Muhammadiyah merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi rujukan bagi program pembangunan pemerintah.

Pada satu dekade terakhir, gerakan Muhammadiyah tidak lagi menjadi gerakan penting dan dipentingkan meskipun masih memiliki amal usaha yang begitu banyak. Bahkan, gerakan Muhammadiyah sepertinya semakin dijauhi dari visinya sendiri. Lihat saja "masyarakat sejahtera" --dalam perspektif ekonomi--semakin jauh dari kenyataan.

Rakyat miskin semakin bertambah, pengangguran terus meningkat, petani semakin kehilangan lahan dan kebun, dan rasio Gizi Indonesia mencapai 0,43 persen. Sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan Muhammadiyah tidak optimal meningkatkan *human development index* bangsa Indonesia.

Menjauhnya gerakan Muhammadiyah dari visinya sendiri disebabkan pemahaman warga Muhammadiyah terhadap teologi al-Ma'un, yang hanya sebatas pelaksanaan ibadah mahdhah, memberi sedekah, infak, dan menyantuni anak yatim sebagai bentuk pengguguran kewajiban secara personal. Padahal, bila dikaji dan dipahami komprehensif, teologi al-Ma'un mengajarkan kepada umat (khusunya warga Muhammadiyah) pada dua dimensi ibadah sekaligus, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah muamalah (*al-amal al-iqtishadiyah*), ibadah untuk menyejahterakan dan menghilangkan kemiskinan umat.

Ketika membahas kemiskinan dan kesejahteraan, di situ kita mesti membicarakan aktivitas dan gerakan ekonomi dan perekonomian. Aktivitas ekonomi atau perekonomian adalah sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau pembangunan suatu masyarakat atau negara. Dan saat ini, bangsa-bangsa di dunia sedang dalam kondisi globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang menghilangkan batas-batas kultural, geografis, dan ekologis, termasuk aktivitas ekonomi dan perekonomian. Dalam globalisasi ekonomi, batas-

batas negara tidak lagi penting. Yang berlaku adalah instrumen perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Instrumen tersebut, antara lain, investasi, industri, teknologi informasi, dan *individual consumers*. Instrumen ini sangat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan perekonomian suatu negara. Jika tidak memiliki itu semua, negara tersebut hanya sebagai pasar bagi negara lain (Kenichi Ohmahe, 2005).

Muhammadiyah sebagai bagian besar dari negara dan bangsa saat ini berada dalam arus globalisasi itu. Dengan prestasi yang telah dibangun selama satu abad, Muhammadiyah memiliki potensi kuat untuk terus terlibat dan *survive* dalam proses globalisasi ekonomi. Muhammadiyah mempunyai syarat yang kuat bagi tersedianya instrumen pertumbuhan sebagaimana yang dinyatakan Kenichi Ohmahe.

Pada sektor finansial, Muhammadiyah memiliki *cash flow*/ dan aset yang luar biasa besar. Diperkirakan *cash flow* Muhammadiyah mencapai Rp 15 triliun dan aset tidak bergeraknya Rp 80 triliun–Rp 85 triliun. Sumber daya finansial dan aset ini dapat dikonsolidasikan, diintegrasikan dengan sumber daya lain, seperti dengan 174 perguruan tinggi, baitut-tamwil Muhammadiyah atau BPRS milik Muhammadiyah untuk penciptaan, peningkatan, dan pengembangan industri dan teknologi informasi. Sumber daya anggota, kader, dan simpatisannya yang mencapai 30 juta orang merupakan individual *consumers* sebagai *marketable*-nya.

Bila tidak ingin tergulung arus globalisasi ekonomi, dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki, Muhammadiyah harus berani dan mampu menggerakkan aktivitas amal usaha dan organisasinya melalui pemupukan investasi, pembangunan industri sebagai penunjang amal usaha di bidang pendidikan maupun kesehatan, serta membangun sistem ekonomi jamaah sebagai bentuk konsolidasi warga, anggota, kader, dan simpatisan Muhammadiyah.

Upaya ini merupakan bentuk reinterpretasi pengamalan teologi al-Maun dalam dimensi ibadah muamalah sebagai jalan menciptakan kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat kemiskinan sebagaimana

yang menjadi visi Muhammadiyah. Ini harus menjadi agenda dan rencana aktivitas gerakan ekonomi Muhammadiyah dalam menapaki abad kedua.

Dengan demikian, Muhammadiyah akan kembali tampil sebagai kekuatan *civil society* sebagaimana masa awal perkembangannya yang didukung kelas menengah pengusaha dan kekuatan ekonomi organisasi. Dalam catatan sejarahnya, gerakan Muhammadiyah lebih banyak didukung dari kontribusi kelas menengah pengusaha.

Tercatat pada 1916, komposisi keanggotaan Muhammadiyah lebih didominasi oleh para saudagar yang jumlahnya mencapai 47 persen, urutan kedua adalah pegawai atau pamong praja 18,1 persen, diikuti oleh ulama 10,7 persen, kaum buruh 8,7 persen, dan kalangan wartawan 0,7 persen.

Jika pada masa awal didukung oleh kelas menengah pengusaha, pada abad keduanya gerakan Muhammadiyah bukan saja didukung kelas menengah pengusaha secara personal, tapi juga ditopang lembaga atau amal usaha dalam bidang ekonomi, seperti industri keuangan, industri pangan dan pertanian, serta industri transportasi dan otomotif yang didukung oleh teknologi *made in* Indonesia.

Republika, 03 Juli 2015. Penulis adalah Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah 2010–2015

Trisula Baru Muhammadiyah

AZAKI KHOIRUDIN

MUHAMMADIYAH telah menggelar silaturahmi intelektual Muhammadiyah pada Ahad (5/7) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) dalam rangka menyambut gagasan yang akan dibawa pada Muktamar ke-47 di Makasar, 3-7 Agustus 2015 mendatang, yaitu *"Gerakan Pencerahan menuju Indonesia Berkemajuan"*. Forum diikuti oleh lebih dari 150 peserta intelektual Muhammadiyah dari seluruh tana air. Salah satu intelektual Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Thohari melontarkan "Trisula Baru" bagi Muhammadiyah.

Trisula Lama

Selama ini, setidaknya ada tiga ranah utama aktivitas yang dikembangkan dan manjadi *brand* Muhammadiyah, yaitu pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), dan sosial (*feeding*). *Pertama,* bidang pendidikan dilakukan Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah-sekolah modern (*schooling*). Kedua, bidang layanan kesehatan dengan mendirikan banyak rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, dan semacamnya di penjuru tanah air negeri ini. *Ketiga,* bidang santunan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan bantuan karitatif lainnya. Etos amal shaleh (*al-'Ashr)* dan praksisme *al-Maun*

yang dilandasi etika cinta kasih inilah yang menjadikan Muhammadiyah mampu melintasi usia ke-100 tahun dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain.

Melintasi usia abad kedua, selain telah mencetak sejumlah keberhasilan pencapaian amal perjuangan, menjadi sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk mengkaji kembali elan vital peran pembaruan sosialnya. Terlebih-lebih Muhammadiyah dihadapkan pada perkembangan peradaban global yang masih menyisakan ketidakadilan dan kemiskinan. Tentu gerakan Muhammadiyah menghadapi gugatan etos pembaru di tengah kehidupan umat yang miskin. Pertanyaan yang harus dijawab ialah apakah amal usaha itu merupakan cermin etos Muhammadiyah dalam usaha pembangunan peradaban? bagaimana strategi Muhammadiyah untuk menghadapi persoalan kontemporer globalisasi abad 21? Dan, apakah Muhammadiyah hanya berkutat pada "Trisula Lama"nya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial?

Kini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis sedang dan akan berhadapan pada perkembangan masyarakat yang oleh sosiolog Jerman bernama Ulrich Beck disebut dengan masyarakat resiko (*risk society*). Dalam bukunya *Risk Society: Towards a New Modernity*, Ulrich Beck (1992), formasi sosial yang terbentuk mengalami transformasi menuju formasi sosial masyarakat resiko. Kesadaran resiko kemudian mewarnai seluruh proses interaksi sosial masyarakat resiko, termasuk interaksi politik, ekonomi, budaya dan agama.

Dalam kondisi seperti ini, tantangan Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaruan, inovasi) untuk menjawab problem sosial masyarakat kontemporer dan mempertimbangkan resiko-resiko dewasa ini. Di mana pada abad kedua, Muhammadiyah mendeklarasikan diri-nya menjadi "gerakan pencerahan" (*al-harakah at-tanwiriyah*) dan Islam yang berkemajuan sebagai spirit dan etos gerakannya. Maka tidak lah cukup Muhammadiyah hanya bergerak kepada trisula lamanya (pendidikan, kesehatan, dan sosial). Manifestasi gerakan praksis "Islam yang Berkemajuan" harus menyentuh problem-problem aktual dan kongkret yang terjadi di masyarakat.

Trisula Baru

Dengan menyambung gagasan Ulrich Beck tentang masyarakat resiko. Maka interaksi sosial,politik, dan ekonomi adalah resiko. Keselamatan (*safety*) adalah mimpi utopia dalam masyarakat resiko. Gagasan "Trisula Baru Muhammadiyah" yang dilontarkan Hajriyanto Y. Tohari (5/7/2015) penting untuk di sambut. Hajriyanto mengatakan bahwa di Abad Kedua, Muhammadiyah harus memiliki trisula baru, yaitu gerakan peduli bencana, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan filantropi Islam. *Pertama,*MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) atau LPB (Lembaga Penanggulangan Bencana) yang bergerak pada ranah resiko-resiko dan penanggulangan bencana. *Kedua*, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) yang fokus pada pendampingan komunitas marjinal dan pemberdayaan petani, nelayan, tukang becak, pedagang kaki lima dan lain-lain. *Ketiga,* LazisMu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah) yang bergerak pada mobilisasi dana umat.

Muhammadiyah akan menitik beratkan perjuangan pada permasalahan penanggulangan bencana, resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi dana umat. Terlebih-lebih bagaimana melakukan interpretasi, reinterpretasi dan kontekstualisasi dari apa yang disebut dengan *caritas* di abad ini.

Jelang Muktamar ke-47 Makasar, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid banyak mengeluarkan produk intelektual seperti: Fikih Air, Fikih Kebencanaan, Fikih Lingkungan, bahkan Fikih Kebhinnekaan. Artinya, tajdid Muhammadiyah baik secara teologis maupun praksis Muhammadiyah selalu berjalan beriringan. Trisula baru yang dipelopori Muhammadiyah periode Din Syamsuddin ini menjadi tantangan inovasi gerakan yang berkelanjutan di era global.

Kedaulatan Rakyat, 14 Juli 2015. Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah,; Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah,

Trisula Abad Kedua

BENNI SETIAWAN

ABAD kedua penuh tantangan. Tantangan itu masih terkait dengan etos pembaruan yang telah lama menjadi ciri Persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912 ini. Pembaruan Muhammadiyah abad pertama melalui pembangunan basis kesadaran dan kecerdasan melalui sekolah; penyantunan yang lemah melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) dan roemah miskin, telah menjadi milik bangsa.

Bangsa dan gerakan lain telah meniru langkah pembaruan Muhammadiyah itu melalui pembangun sekolah dengan berbagai model, lembaga penyantunan yatim piatu, dan gerakan-gerakan pendampingan terhadap kaum *mustadh'afin* (miskin). Karena telah menjadi milik bangsa, seakan gelombang ijtihad Muhammadiyah telah terhenti. Pasalnya, hampir seluruh yang telah diusahakan oleh Persyarikatan yang kini dipimpin oleh Profesor Din Syamsuddin ini telah ditiru dan dikembangkan oleh orang lain, baik secara individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, kini Muhammadiyah dituntut untuk menemukan model baru. Model baru ini merupakan wilayah Muhammadiyah untuk tetap mempertahankan diri sebagai icon gerakan pembaruan di Indonesia maupun di dunia.

Ide meneguhkan gerakan pembaruan Muhammadiyah itu setidaknya muncul dalam diskusi group WA (*WhatApp*) "Islam Berkemajuan". Adalah Hajriyanto Y. Thohari memantik diskusi dengan menyebut perlunya

gerak bersama tiga lembaga yaitu *Muhammadiyah Disaster Management Center* (Lembaga Penanggulangan Bencana), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah (Lazis). Melalui hal itu Muhammadiyah akan bergerak dan menjadi pilar dalam penanggulangan bencana dan resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat, dan pengumpulan dana umat.

Manajemen Keuangan Masjid

Trisula tersebut saling menopang satu sama lain. Lazismu bergerak dalam bidang pengumpulan dana umat, penyaluran dan pengembangan masyarakat dilakukan oleh MPM, dan penanggulan bencana serta resolusi konflik oleh MDMC.

Pengumpulan dana umat itu bisa dimulai dari perumusan kajian dan aksi penyertaan pendapatan bersama. Hal itu dimulai dari manajemen keuangan masjid satu atap. Infak masjid dapat dikelola dan dikembangkan menjadi dana untuk kesejahteraan umat. Misalnya, dalam satu desa, terdapat 20 masjid. dalam satu bulan pendapatan infak salat Jum'at setiap masjid Rp. 500.000,-, maka jika dikumpulkan ada dana segar Rp. 10.000.000,-per bulan. Dana itu akan dapat menggerakkan sektor produktif setiap desa. Desa pun akan menjadi mandiri dengan dana yang terkumpul dari infak masjid kampung. Masyarakat desa tidak perlu berebut dana desa yang hingga kini belum jelas realisasinya.

Lazismu juga dapat mengumpulkan dana dari para guru, karyawan, dosen yang bekerja di Persyarikatan Muhammadiyah. Pengumpulan dana itu dimulai dari menghimpun dana pensiun. Iuran bulanan dana pensiun dapat menjadi penggerak sektor riil Persyarikatan. Jika kini Persyarikatan mempekerjakan 30 juta orang maka akan mendapat dana segar minimal 300 miliar jika mereka membayar 10.000 per bulan. Dana 300 miliar jika dikelola dengan baik akan mampu menggerakkan sektor publik secara lebih baik. Bangsa Indonesia pun akan terbebas dari krisis melalui dana ketahanan umat tersebut.

Pemihakan Kaum Lemah

Lebih lanjut, saat dana sudah memadai, maka tugas MPM untuk menjadi penggerak sektor produktif. Gerakan MPM hasil rintisan Said Tuhuleley (wafat, Selasa, 9 Juni 2015) telah menorehkan prestasi luar biasa. Banyak daerah telah berhasil dibina dalam bingkai pengangkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Gerakan MPM ala Said terus menjadi bukti bahwa Muhammadiyah terus bergerak bersama kaum lemah (mustadh'afin).

Pak Said melalui MPM pun mengubur anggapan Muhammadiyah elitis dan tak pernah berbicara pada ranah pemihakan terhadap kaum miskin. Muhammadiyah selalu berada di tengah pemberdayaan dan pemandirian kaum miskin. Berbekal Teologi al-Ashr dan al-Ma'un, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan sosial keagamaan yang paling konsen mengurusi masalah itu. Jadi, jika masih ada sebagian kecil pengamat mengatakan Muhammadiyah, jauh dari kaum miskin, dapat dikatakan mereka tidak mengenal gerakan ini.

Said pun dengan falsafah "Selama Rakyat Menderita, Tidak Ada Kata Istirahat" telah menjadi penerjemah gagasan Kiai Dahlan dan Kiai Sudja' dalam proses kreatif menebarkan benih kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memberi untuk Negeri

Pilar ketiga adalah MDMC. MDMC merupakan lembaga baru hasil Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Kiprah MDMC tidak hanya bergerak dalam negeri namun sampai pendampingan korban bencana di Asia Tenggara. Barori Budi Aji, seorang teman dari MDMC pernah bercerita tentang kiprah lembaga ini di Papua. Saat terjadi bencana Wasior, tidak ada satu pun lembaga keagamaan bisa masuk ke sana. Karena MDMC mengusung tema kemanusiaan, maka ia adalah satu-satunya lembaga berbasis agama yang dapat masuk membantu korban bencana Wasior. Karena kiprah yang luar biasa dan tak pernah membawa "embel-embel" agama, pascabencana, Muhammadiyah mendapat tanah wakaf dari warga beberapa hektar. Wakaf

tanah itu pun dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Gerakan MDMC dengan tema "Memberi untuk Negeri" telah membuktikan bahwa kiprah Muhammadiyah sampai saat ini terus menginspirasi dan memberikan yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah tidak pernah minta jabatan politik. Bagi Muhammadiyah memberi yang terbaik untuk negeri merupakan" jihad akbar". Jihad akbar inilah yang terus menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tersubur dan terbesar dalam hal aset. Muhammadiyah pun menjadi *the largest Islamic organization on the world*.

Muhammadiyah pun tidak hanya sekadar organisasi nasional Indonesia. Kiprah Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya dan kerja nyata MDMC, telah mengantarkan Persyarikatan menapaki jejaring internasional. Internasionalisasi pemikiran dan gerak Muhammadiyah pun tinggal menunggu hasil dari kerja peradaban selama seabad silam.

Pada akhirnya, Lazizmu, MPM, dan MDMC merupakan trisula abad ini. Trisula inilah yang akan mewarnai perjalanan Muhammadiyah abad kedua. Abad kedua yang terus menuntut Muhammadiyah sebagai pilar pembaruan Islam.

Koran SINDO, 4 Agustus 2015). Penulis adalah, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity

Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah

HAJRIYANTO Y. THOHARI

MUHAMMADIYAH menyebut dirinya gerakan *(The Muhammadiyah movement, al-harakah al-Muhammadiyah)*, bukan organisasi, apalagi yayasan. Dalam lagu *Sang Surya*, nama atau judul dari Mars Muhammadiyah, ditemukan kata-kata *Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku*. Dalam Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat (1) disebutkan *"Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da'wah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid"*. *Amar ma'ruf nahi mungkar* artinya menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyeru artinya memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring, mencegah artinya merintangi atau menghalangi (terjadinya kemungkaran).

Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan contoh yang kongkret itu lebih kena daripada dengan lisan atau verbal (khutbah). Ada ungkapan dalam bahasa Arab *lisanu 'l-hal afshahu min lisani 'l-maqal*: seruan dengan keteladanan itu lebih kena daripada seruan dengan ucapan verbal. Semboyan Hizbul Wathan, nama kepanduan Muhammadiyah, sejak satu abad yang lalu sampai hari ini tidak berubah berbunyi: "sedikit bicara banyak kerja". Maka Muhammadiyah pada sejatinya tidak memandang penting perdebatan-perdebatan teologi, apalagi sektarianistik, melainkan lebih mementingkan perbuatan. Sebagai gerakan

"iman dalam perbuatan" *(faith in actions),* Muhammadiyah mengutamakan mobilisasi amal yang sistematis sekaligus sistematisasi yang dinamis.

Abad pertama: Trisula lama

Dalam satu abad pertama usianya (1912-2012) titik berat gerakan Muhammadiyah mengambil bentuk Trisula: (1) pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan (3) dialog antaragama dan peradaban untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meski belum sepenuhnya berhasil menjadi pusat-pusat keunggulan *(center of excellence)*, tetapi dalam ketiga bidang ini Muhammadiyah tidak sedang berada pada posisi *taxi* di landasan: alih-alih sudah lepas landas *(take off)* dengan baik dan aman. Bisa saja terjadi goncangan-goncangan akibat cuaca buruk menghadang tetapi perjalanan menuju pelabuhan harapan—meminjam jargon ABRI dulu—stabil, aman dan terkendali.

Dalam perspektif kuantitatif amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan sudah cukup besar. Antusiasme gerakan Muhammadiyah dalam ketiga bidang itu secara numerikal malah sudah sampai pada tingkat harus direm agar bisa fokus membenahi aspek kualitasnya. Pimpinan Muhammadiyah sering kewalahan mengendalikan antusiasme warga Muhammadiyah di daerah dan cabang mendirikan sekolah dan rumah sakit. Beruntung pemerintah sering menghambat, membatasi, atau mempersulit perizinan pendirian rumah sakit dan sekolah/universitas baru, serta pembukaan program-program studi baru di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Jika tidak maka negara ini akan penuh dengan sekolah, universitas, dan rumah sakit Muhammadiyah.

Pada abad kedua usianya ini Muhammadiyah merasa tidak lagi relevan dikaitkan, apalagi dibandingkan, dengan gerakan *Ikhwanul-Muslimin* (MI, Mesir dan Dunia Arab), Wahabisme (Arab Saudi), atau Jama'at Islamiyah (Al-Maududi di Pakistan). Muhammadiyah justru merasa sedang harus berlomba dalam kebaikan *(fastabiqul-khairat)* dengan *The Gülen*

movement (Turki) yang telah berhasil melakukan internasionalisasi diri dan gerakannya melalui pendidikan sebagai ujung tombaknya di seluruh dunia. *The Gülen movement* adalah gerakan keagamaan dan sosial transnasional yang dipimpin oleh pendakwah Turki, Fethullah Gulen, yang berhasil mendirikan ratusan sekolah dan universitas privat di 180 negara di dunia yang menjadi pusat-pusat keunggulan.

Abad kedua: Trisula baru

Kini di awal abad kedua usianya Muhammadiyah memulai mencanangkan apa yang disebut dengan Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah, yaitu: Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (LAZISMU). Ketiganya merupakan pengejawantahan dari jati diri asli gerakan Muhammadiyah yang berdimensi kemanusiaan sejagad yang melintasi golongan, agama, dan sektarianisme yang parokialistik.

MPM dirintis oleh *almarhum* Dr. Muslim Abdurrahman dan *almarhum* Dr. Said Tuhuleley. Keduanya merupakan kekuatan operasional dari gagasan teologi al-ma'un ala Ahmad Dahlan dan sekaligus peletak dasar-dasar gerakan pemberdayaan masyarakat. Said Tuhulely lah yang berhasil secara gemilang melanjutkan, menyempurnakan, dan mengonkretkan langkah-langkah *avant garde* Muslim Abdurrahman. Langkah-langkah keduanya yang sangat fenomenal berhasil mendorong ekspansi dan ekstensifikasi gerakan Muhammadiyah sehingga merambah dunia buruh, tani, dan nelayan, bidang-bidang yang selama ini berada di luar arus utama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang di sepanjang satu abad pertama usianya lebih dikenal menekuni bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, di tangan Putra Ambon dan Lamongan itu mulai merambah dunia petani, buruh dan nelayan.

Adapun MDMC dirintis oleh dr. Sudibyo Markus dan Dr. Rahmawati Husein dengan spirit *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO) yang fenomenal sejak 100 tahun yang lalu itu. Sebagai seorang dokter medis dan aktivis NGO dengan relasi internasional yang sangat luas, Sudibyo Markus

mulai berperan besar dalam resolusi konflik di Filipina Selatan. Rahmawati Husen, seorang aktivis perempuan Muhammadiyah yang meraih Master dari Universitas Cincinnati dan Ph.D dari Texas A&M University dalam *Disaster Management*, menjadikan dirinya doktor perempuan pertama Indonesia dalam bidang ini. Dengan semangat *Hazard Reduction and Recovery Center* (HRRC), ia memimpin tim nasional ke Kathmandu, Nepal, dengan bendera Indonesia (lihat *Kompas*, 25 Mei 2015).

MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional dengan mengembangkan misi pengurangan resiko bencana selaras dengan *Hyogo Framework for Action* (2005) yang dihasilkan dalam *World Conference for Disaster Reduction*, di Kobe, Hyogo, Jepang, 18-22 January 2005 (yang diprakarsai oleh *The United Nations Office for Disaster Risk Reduction,* UNISDR). MDMC juga mengembangkan basis kesiapsiagaan di setiap tingkat komunitas, sekolah, dan rumah sakit sebagai basis gerakan (lihat**:** www.mdmc.or.id).

MPM menunjang kegiatan MDMC dengan bergerak dari sisi pengembangan pusat penanggulangan krisis *(recovery center)* di tingkat regional dan wilayah yang berfungsi sebagai respons cepat dan antisipasi terhadap problem-problem psikososial di masyarakat. Dengan filosofi "mengembangkan cebong yang hanya mampu hidup di dalam kolam kecil menjadi katak yang dapat melompat kemana-mana", MPM melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia *(ecology of human development)* dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi social harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya.

Di belakang MPM dan MDMC adalah LAZISMU yang digagas oleh Dr. Syafii Maarif dan Dr. Din Syamsuddin (2006). Keduanyalah yang meletakkan dasar-dasar ideologis dan teologis pada masa-masa formasi gerakan filantropi Islam ini. Dalam konteks MPM dan MDMC, LAZISMU pada sejatinya merupakan lembaga yang memobilisasi penghimpunan dana dari masyarakat secara profesional untuk mendanai kegiatan-kegiatan

keduanya. Maka kerja sama erat yang tersistem serta kaitan dan saling isi dari tiga lembaga ini telah menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan keagamaan di dunia yang memiliki kemampuan pengelolaan bencana alam sekaligus kesiapan dana yang baik.

Ketiga institusi filantropis yang merupakan manifestasi baru dari semangat *Penolong Kesengsaraan Oemoem* atau PKO *(Muhammadiyah Aid* dan *Muhammadiyah Relief) tempo doeloe* tersebut akan semakin mengokohkan Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan volunterisme *(a voluntary based-organization)* di dunia yang bekerja secara profesional dan modern. Muktamar ke-47 Muhammadiyah 3-7 Agustus 2015, di Makassar, yang *nota bene* merupakan Muktamar pertama di abad kedua usianya, menjadi momentum pengembangan Trisula Baru gerakan kemanusiaan Muhammadiyah. Semoga!

Majalah *Gatra.* Penulis adalah Wakil Ketua MPR RI 2009-2014 dan Ketua Lazismu Muhammadiyah.

Islam Berkemajuan dan Filantropi Baru

ZAKIYUDDIN BAIDHAWY

SEJAK awal Muhammadiyah lahir dengan jati diri sebagai gerakan tajdid, gerakan dakwah amar makruf dan nahi mungkar. Elan vital gerakan ini adalah teologi Al-Maun. Teologi Al-Maun termanifestasi dalam tiga ranah peradaban;*schooling*, *healing,* dan *feeding*. Yang pertama adalah ranah pendidikan yang terus mekar dan tumbuh. Yang kedua mengembangkan layanan kesehatan bagi umat manusia tanpa mengenal batas agama, etnis, dan kultur. Yang terakhir menumbuhkan layanan sosial yang merambah ke seluruh penjuru negeri.

Ketiganya terus menyinari negeri ini. Belum ada tanda-tanda redup. Sinarnya semakin cerah dan mencerahkan. Banyak organisasi dan gerakan keagamaan Islam dan non-Islam meneladani langkah-langkah Muhammadiyah dalam membangun peradaban di tiga ranah ini.

Muhammadiyah sendiri tak akan pernah puas dan berhenti berkarya untuk bangsa. Tajdid merupakan instrumen untuk menggerakkan pembaruan sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu.

Seabad telah berlalu. Abad kedua sudah tiba. Setiap zaman memiliki *episteme* sendiri. Kurun ini membuka ruang baru bagi peran publik dan peran peradaban Muhammadiyah.

Islam Berkemajuan dan peradaban utama yang diusung Muhammadiyah bersinggungan dengan progresivitas dunia kontemporer. Gerakan-gerakan *civil society* global menggeliatkan peran dan fungsi sosial terbarukan. Kecenderungan ini adalah ide dan praksis “filantropi baru”. Dalam satu dasawarsa terakhir, organisasi ini sedang giat merambah tiga ranah pembaruan melengkapi tiga ranah konvensional.

Tiga ranah itu adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).

Tulisan ini hendak menyoroti kreativitas kepemimpinan Lazismu dalam mengawal agenda pencerahan peradaban bangsa. Mengawal dengan Islam Berkemajuan, salah satunya di sektor filantropi.

Muhammadiyah cerdas membaca tanda-tanda zaman terkait publikasi tentang reformasi kesejahteraan dan kewirausahaan sosial sebagai filantropi baru. Beberapa karakteristik filantropi ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Giddens (2000) menunjukkan bahwa pilar gerakan ini adalah progresivitas baru yang berjuang demi kesempatan yang sama, tanggung jawab pribadi, dan aktivisme masyarakat.

Kedua, perspektif baru cenderung melihat bahaya pasar yang mestinya dibatasi oleh pemerintah. Hale menyatakan para pemilih ”jalan ketiga” berupaya untuk memasyarakatkan ”nilai-nilai sosial” daripada nilai-nilai individualis.

Blair, mantan perdana menteri Inggris, menyatakan bahwa ”jalan ketiga” menata kembali sejarah kebijakan ekonomi dan sosial. Pasar yang efektif adalah prasyarat untuk ekonomi modern yang sukses.

Ketiga, Crutchfield (2008) menegaskan tentang kecenderungan organisasi nirlaba untuk menjadi agen katalisator perubahan. *Keempat*, Egger menekankan tentang pemanfaatan pendekatan bisnis untuk menjalankan organisasi nirlaba.

Kelima, Frances (2008) mendefinisikannya sebagai penggunaan nilai pasar secara layak untuk mengidentifikasi masalah, memahami biaya dan manfaat dari solusi.

Keenam, Foster (et. al., 2009) berpendapat para pemimpin organisasi nirlaba bahkan jauh lebih canggih dalam membuat program daripada para pemberi dana organisasi mereka.

Menyambut Fajar Baru

Lazismu lahir pada 2002 sebagai tengara Muhammadiyah siap kembali sebagai mujadid di kurun kedua. Spirit Al-Maun baru dalam Lazismu didasarkan pada keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Lembaga amil ini meramu isu-isu kontemporer yang menjadi problem besar bangsa ini. Kemiskinan, marginalisasi sosial, kemerosotan sumber daya manusia, dan ketidakadilan sosial di tengah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi positif.

Lazismu mengemban misi mereformasi kesejahteraan. Kesejahteraan bukan semata-mata pertumbuhan material, bahkan menciptakan hidup lebih manusiawi, bermartabat, dan layak bagi setiap warga. Reformasi itu berpijak pada kedermawanan dalam masyarakat muslim.

Lembaga amil ini memanfaatkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan donasi filantropi lainnya untuk didayagunakan secara produktif bagi redistribusi kesejahteraan yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara.

Ketika negara kurang hadir di dalam persoalan ini, Lazismu memberikan alternatif. Sesuai analisis Gidden, Lazismu membuka harapan baru bagi pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan ditopang oleh instrumen kewirausahaan sosial. Lazismu membuat terobosan. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bukan lagi untuk aktivitas-aktivitas karitatif *an sich,*bahkan memasuki wilayah produktif dan redistributif.

Program-program pemberdayaan dengan pendekatan kewirausahaan sosial bermaksud agar kedermawanan dapat melahirkan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan luas.

Dengan cara ini, Muhammadiyah dapat terus mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga sipil bermuruah yang terlepas dari intervensi negara yang berisik, bahkan dapat menjadi alternatif bagi ketidakhadiran peran dan fungsi negara dalam meningkatkan martabat dan kesejahteraan warganya.

Gidden menyebut peran semacam ini sebagai *agent of transformation*. Karakteristik filantropi baru dari Lazismu terlihat pada pengabdiannya atas nilai-nilai sosial.

Lazismu adalah instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (*baldah thayyibah*).

Mengemban risalah Islam *rahmatan lil `alamin*, Lazismu mengelola sumber dana dan sumber daya berasaskan amanah. Di satu sisi, amanah adalah menerima tanggung jawab dari Allah SWT untuk mengelola dan menyejahterakan penduduk bumi.

Di sisi lain, Lazismu menerima tanggung jawab atas titipan zakat, infak, dan sedekah para muzaki dan dermawan untuk didistribusikan secara benar dan adil. Harta, uang, kekayaan dan wakaf yang diterima oleh manajemen Lazismu bukan semata untuk didistribusikan kepada mustahik.

Manajemen dituntut menciptakan lembaga amil yang berdaya, *sustainable*, dan mampu memberdayakan "mustahik menjadi muzaki", dan mengembangkan kehidupan masyarakat luas. Lazismu menopang penubuhan nilai "kepercayaan" (*trust*) dari dan kepada Allah dan "kepercayaan" dari dan kepada sesama manusia.

Amanah juga terinternalisasi sebagai budaya kerja dan orientasi para pengelolanya. Mereka profesional dalam pengumpulan, produksi, konsumsi, dan distribusi harta/kekayaan zakat, infak, dan sedekah.

Profesionalisme ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program filantropi secara terukur. Transparansi dalam pengelolaan dana filantropi juga bagian dari amanah.

Pelaporan secara berkala dilakukan. Untuk mewujudkan profesionalisme dan transparansi itu, Lazismu dilengkapi dengan wali amanah, dewan syariat, dewan pengawas, dan badan pengurus.

Tidak cukup sampai di situ, tertib pelaporan dipertanggungjawabkan dalam sidang tanwir dan Muktamar Muhammadiyah. Nilai amanah dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab profesional dan transparansi penggunaan dan pengelolaan dana filantropi.

Sebagai lembaga amil, Lazismu mempunyai hak untuk memanfaatkan dana filantropi sebanyak 20%. Sepanjang lembaga ini beroperasi dalam 13 tahun terakhir, Lazismu hanya memanfaatkan maksimal 12,5% dari total dana yang diterima dari para muzaki dan dermawan.

Persentase 12,5% itu dipergunakan untuk keperluan manajemen dalam mengelola aset hingga terdistribusi secara tepat, benar, dan adil kepada sasaran *asnaf* yang telah didefinisikan melalui survei dan observasi lapangan.

Wajah filantropi baru dari Lazismu dapat diperhatikan dari fakta-fakta kecanggihan lembaga ini dalam membuat program melampaui para muzaki, dermawan, dan bahkan *corporate social responsibility* penyumbang dana. Apa yang dikemukakan Egger di atas memperoleh faktualitasnya dari program-program filantropi yang dikembangkan oleh Lazismu.

Secara garis besar program-program Lazismu mencakup pengembangan pendidikan (*education development*), pemberdayaan pertanian (*agriculture empowerment*), kewirausahaan pemuda, perempuan berdaya, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, dan pemberdayaan dai. Pemberdayaan merupakan salah satu representasi dari teologi Al-Maun, suatu kesadaran dan praksis sosial untuk membuat yang lemah menjadi mandiri dan kokoh di atas kemampuannya sendiri.

Dengan kreasi dan inovasi berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Lazismu telah memerankan diri sebagai agen katalisator perubahan sosial melampaui umat Muhammadiyah dan Islam.

Sejalan dengan tengara Crutchfield, peran semacam ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah adalah agen *proxy* yang menjadi perantara bagi perubahan sosial yang lebih besar, bukan untuk dirinya sendiri namun bagi masyarakat luas di luar sana.

Meminjam Gramsci, Lazismu sedang memainkan fungsi sebagai kekuatan alternatif bagi negara yang pincang dalam pemberdayaan masya-

rakat. Muhammadiyah terus mendorong dan mengarahkan perubahan sosial bagi pemerataan dan distribusi kesejahteraan.

Agenda-agenda dan program-program pemberdayaan yang ditopang oleh filantropi Lazismu adalah ”kritik” atau resistensi atas ketidakhadiran negara dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai kekuatan sipil Islam moderat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Muhammadiyah bersedia mengabdikan dirinya untuk melakukan kontestasi atas negara dalam kerangka *fastabiqul khayrat* untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Solopos, 9 Juli 2015. Penulis adalah Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Muhammadiyah dan Kaum Miskin Kota

David Krisna Alka

Dakwah Islam yang membebaskan dan mencerahkan bagi kaum mustadh'afin, yang sering disuarakan aktivis Muhammadiyah, sedang dipertanyakan praksisnya oleh kaum miskin kota.

Selama ini Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat. Sayang, Muhammadiyah masih kurang peduli (belum memberi manfaat) pada kelompok tertindas seperti petani, buruh, pedagang kecil, dan kaum miskin kota.

Kehidupan kaum miskin kota amat memprihatinkan. Dengan kebutuhan hidup minimum, mereka terpaksa menjadi pemulung, buruh, dan pengamen. Tak jarang, kita lihat ibu-ibu mengamen sambil menggendong anaknya. Semua itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam kota kelas menengah, mestinya lebih dekat dengan kaum miskin. Di bidang pendidikan, misalnya, biaya sekolah dan kuliah di lembaga pendidikan Muhammadiyah tak terjangkau anak-anak miskin kota. Sebagai ormas Islam berbasis kelas menengah, Muhammadiyah seyogianya memberi pendidikan murah bagi anak-anak miskin kota. Banyak anak Indonesia belum bisa menikmati kehidupan layaknya anak, sekolah dan belajar.

Mengambil contoh kehidupan Jakarta, dengan mudah akan ditemui anak-anak usia sekolah mengamen atau mengemis di lampu merah. Tak jarang, mereka ditemukan di bus-bus kota, dikenal sebagai anak jalanan.

Tiadanya kesempatan yang adil dan tidak terpenuhinya kebutuhan papan, pangan, pendapatan, dan pendidikan, membuat warga miskin Jakarta menjadi kelompok pinggiran, hidup di luar jaring keamanan sosial.

Tidak siap

Kuntowijoyo (1991:266) menyatakan, selama ini Muhammadiyah belum mendasarkan program dan strategi kegiatan sosial berdasar elaborasi realitas sosial yang obyektif. Muhammadiyah kurang siap merespons tantangan perubahan sosial di masyarakat atas dasar konsep, teori, strategi, dan aksi yang jelas.

Kegelisahan Kuntowijoyo sudah menjadi kegelisahan generasi muda Muhammadiyah yang sering menyuarakan keberpihakan Muhammadiyah bagi kaum tertindas. Lebih dari sekadar lembaga keagamaan, Muhammadiyah merupakan organisasi nonpemerintah yang mengisi fungsi-fungsi riil di masyarakat yang sering diabaikan negara. Tidak berlebihan jika Muhammadiyah kini dan nanti diharapkan tumbuh sebagai organisasi pelayanan sosial (*social services*) terkemuka di Indonesia melalui berbagai aktivitas amal usaha.

Prof Dr A Syafii Maārif pun galau menanggapi kemiskinan di negeri ini. Di mata seorang warga negara Chad, sebuah negara miskin dan tandus di Afrika, amat takjub menyaksikan hamparan indah Nusantara. Bahkan, menurut Syafii Maārif, mereka menyebut Indonesia sebagai serpihan surga. Namun, serpihan surga itu benar-benar tak pernah menjadi surga bagi warganya.

Berkaca dari kegalauan para tokoh itu, problem kemasyarakatan yang dihadapi Muhammadiyah berubah dari problem kemasyarakatan (dihadapi di saat pendiriannya). Ini menjelaskan, upaya pembaruan (tajdid) gerakan Muhammadiyah mendesak segera diformulasikan.

Maka, wajar dan adil jika menjelang Muktamar Muhammadiyah, 3-8 Juli 2005 di Malang, geliat Muhammadiyah dalam gerakan sosial kemanusiaan di Tanah Air selayaknya ditafsir ulang. Godaan-godaan global yang merasuki gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah harus diperhatikan tanpa tedeng aling-aling.

Selain itu, badan-badan pelayanan sosial Muhammadiyah tak hanya sekadar menjadi coretan-coretan dinding kota yang terpampang di penjuru kota. Sebuah bangku sekolah di Muhammadiyah tak harus dibeli dengan harga mahal. Masih banyak warga Muhammadiyah yang hidup dalam kemiskinan.

Lebih dari itu, agenda yang harus disiapkan Muhammadiyah saat ini adalah keperluan melakukan pembenahan dalam rangka menghadapi gejala metropolitan *super-culture* yang telah menjauhkan masyarakat dari rasa kepedulian terhadap kaum miskin kota.

Kompas, 02 Juli 2006. Penulis adalah Direktur Program Center for Moderate Muslim, Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah

8

KOSMOPOLITANISME PERADABAN

Melampaui Kutub Arab dan Iran

FAJAR RIZA UL HAQ

INDONESIA adalah rujukan bagi Afganistan. Keberhasilan memadukan demokrasi dan Islam melalui proses transisi politik yang damai menjadi alasan utama.

Pengakuan itu dilontarkan seorang aktivis pro demokrasi Afganistan, Kawa Aahangar, kepada penulis saat menjadi pembicara tamu dalam "Workshop Islam dan Demokrasi" di Kolombo, 5-7 Mei 2015. Kawa adalah sepupu dari tokoh Mujahidin Afganistan, Ahmad Shah Massoud, yang tewas dibunuh Al Qaeda pada September 2001.

Massoud merupakan komandan perang yang berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dari "Negeri Mullah" itu. Ia percaya pada demokrasi, salah satu faktor yang membuatnya dimusuhi Taliban dan Al Qaeda.

Workshop yang difasilitasi International Foundation and Electoral System (IFES) dan Search for Common Ground itu diikuti para pegiat pemilu dan demokrasi dengan latar belakang Muslim dari Maladewa dan Sri Lanka. Islam agama resmi negara di Maladewa, nyaris 100 persen penduduknya Muslim.

Adapun Sri Lanka dihuni Etnik Sinhala (82 persen), Sri Lanka-Tamil (4,3 persen), India-Tamil (5,1 persen), dan Sri Lanka-Moro (7,9 persen). Meski dari sisi jumlah, populasi Etnik Sinhala merupakan

mayoritas, distribusi kewilayahan etnisitasnya cukup cair. Negeri mayoritas berpenduduk Buddha ini masih berupaya merekonsiliasi hubungan etnik dan menyelesaikan persoalan HAM pasca konflik berkepanjangan.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan populasi penduduk Muslim-nya mencapai dua pertiga membuat para pegiat demokrasi di kedua negara tersebut terkagum-kagum. Mereka menilai, gambaran kehidupan demokrasi di Indonesia berbeda dari Malaysia yang selama ini dijadikan referensi "negara ideal" untuk pemeluk Islam, di samping negara-negara Timur Tengah. Direktur Search for Common Ground Sri Lanka dan Maladewa Muhamed Nawaz menyebut, komunitas Muslim membayangkan mereka seakan tinggal di negara Islam meskipun hidup di lingkungan mayoritas Sinhala-Buddhis.

Di sisi lain, sentimen anti Islam dari kelompok ekstrem Bodu Bala Sena telah memicu kerusuhan Juni 2014 sehingga membuat ketegangan relasi etnik-keagamaan. Pengalaman Indonesia mengelola perbedaan etnik dan agama dalam bingkai politik kewargaan atas dasar kesetaraan dan kebinekaan dapat menjadi salah satu referensi bagi negara seperti Sri Lanka.

Buku baru

Kajian Islam dan demokrasi di negara-negara berpenduduk Muslim masih didominasi pengalaman dan pengaruh geopolitik di Timur Tengah dan Asia Selatan, seperti terlihat dalam tulisan Olivier Roy dan Gilles Kepel. Namun, belakangan Alfred Stepan (2013) mengamati fenomena kemunculan demokrasi di Indonesia, Senegal, dan Tunisia yang dianggap memiliki kebijakan mendukung kolaborasi negara dan agama di ruang publik. Menurut Stepan, tidak ada satu pun negara berpenduduk mayoritas Muslim melegalisasi syariah sebagai hukum positif negara dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.

Secara historis-sosiologis, Islam yang berkembang di luar kawasan Timur Tengah masih diperlakukan sebagai-memakai bahasa Surin Pitsu-wan-halaman belakang, catatan pinggir dalam sejarah dunia Islam. Keber-adaan dua kota suci Mekkah dan Madinah di Arab Saudi telah dilembagakan

sebagai pusat otoritas keagamaan yang kemudian diberi bingkai politik oleh Pemerintah Arab Saudi.

Revolusi Iran tahun 1979 di bawah komando Ayatullah Khomeini menjelma menjadi ancaman serius terhadap supremasi politik Islam-Arab Saudi, terlebih ada upaya menginternasionalisasikan semangat revolusi itu. Persekutuan Arab Saudi dan Amerika Serikat telah memberikan keleluasaan kepada otoritas Negara Arab, tidak hanya dalam rangka kepentingan memotong pengaruh politik Iran, tetapi juga untuk menyokong kekuatan-kekuatan pro Arab Saudi di Asia Selatan, seperti Pakistan dan Timur Tengah.

Dalam konteks ketegangan kedua kutub politik-keagamaan tersebut, Indonesia menjadi sangat penting untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah. Bahkan, Indonesia punya peluang menjadi rujukan baru bagi tradisi Islam rahmatan lil 'alamin pada abad ke-21. Negeri ini punya modal sosial dan politik yang menjanjikan.

Negara-negara berpenduduk Muslim di dunia mengakui pencapaian luar biasa Indonesia mengatasi krisis politik dengan sukses membangun sistem pemerintahan demokratik tanpa menegasikan Islam.

Potret global Islam hari ini dan esok akan banyak ditentukan oleh perkembangan Islam di negara-negara Asia dan Afrika. Pesatnya pertumbuhan populasi Muslim di kedua kawasan ini sungguh tidak bisa diabaikan, terlebih Asia dihuni kekuatan-kekuatan regional strategis bagi kepentingan keseimbangan geopolitik global; Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Survei Pew Research Project memprediksi, pertambahan populasi Muslim akan lebih cepat dibandingkan dengan pemeluk agama lain hingga tahun 2050. Populasi Muslim di India diperkirakan akan menjadi terbesar dunia menyalip Indonesia.

Menjadi masalah serius ketika berlarutnya konflik politik di kawasan Timur Tengah yang di antaranya dipicu persaingan kutub Arab Saudi dan Iran memengaruhi hubungan antarkelompok sosial-keagamaan di Indonesia. Di satu sisi, hubungan kesejarahan dan arus transmisi intelektualisme

Islam dari Jazirah Arab ke Nusantara telah berjasa besar dalam penyebaran dan pertumbuhan tradisi Islam di Indonesia hingga hari ini.

Islam Indonesia

Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, dua tokoh kunci yang melahirkan dua garda organisasi moderat Muhammadiyah dan NU, menimba ilmu di Tanah Suci Mekkah pada awal abad ke-20. Di sisi lain, proyek penyebarluasan madzhab Islam-Suni Arab Saudi dan madzhab Islam-Syiah Iran beberapa dekade belakangan berimplikasi terhadap dinamika hubungan kelompok keagamaan di Indonesia.

Ada kekhawatiran masyarakat Muslim Indonesia akan terdeterminasi oleh konflik politik kutub Arab dan Iran dengan indikasi peningkatan sektarianisme dan syiar kebencian.

Pilihan bijaknya jelas. Bangsa ini harus punya kesadaran kolektif untuk keluar dari jebakan pengerasan poros Saudi dan Teheran. Asas politik luar negeri "bebas aktif" penting diterjemahkan dalam konteks ini demi kepentingan nasional, tidak terjebak pada ekstremisme ideologi politik sektarian. Indonesia berkesempatan besar bukan sebatas mendapat pengakuan dari negara-negara berpenduduk Muslim, seperti diutarakan pegiat demokrasi Afganistan, melainkan juga menulis "buku baru" dan menjadi bacaan utama dalam konstelasi dunia yang multipolar.

Perlu kerja keras diplomasi pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok sipil dalam menyuarakan pengalaman Indonesia melembagakan nilai dan perangkat demokrasi yang selaras dengan prinsip syariah Islam, yaitu kesetaraan, keadilan, dan bebas dari diskriminasi.

Indonesia bukan lagi halaman belakang di tengah perubahan geo-politik global, melainkan poros alternatif yang mewakili kekuatan baru negara berpenduduk Muslim di Asia. Ini menuntut keseriusan pemerintah dengan visi jauh ke depan.

Kompas, 6 Juni 15. Fajar Riza Ul Haq Direktur Eksekutif Maarif Institute

Muhammadiyah, Gerakan Ilmu, dan Toleransi

HAJRIYANTO Y. THOHARI

DUA di antara tiga belas rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah tanggal 3-7 Agustus 2015, di Makassar, sebagai hasil dari pembahasan *Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal,* adalah, *pertama*, keharusan membangun masyarakat dengan ilmu pengetahuan; dan *kedua*, keharusan membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sungguh kedua poin ini bukan hanya merupakan isu yang penting dan aktual, melainkan juga sangat strategis dewasa ini. Dan karena itu menjadi bagian utama dari pandangan Muhammadiyah tentang isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Pentingnya membangun masyarakat ilmu sangatlah urgen dan strategis. Betapa tidak, bangsa Indonesia yang sebentar lagi memperingati Proklamasi Kemerdekaan yang ke-70 tingkat pendidikan rata-rata rakyatnya baru kelas delapan alias kelas dua SMP. Bayangkan, setelah tujuh puluh tahun berdiri negara ini baru bisa menyekolahkan rakyatnya sampai *segitu*. Bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia (lulus SMA) dan Singapura (Diploma I). Sementara kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini. Sungguh tak terbayangkan bagaimana bangsa dengan tingkat pendidikan rata-rata kelas 8

harus berkompetisi dengan bangsa-bangsa tetangga dekatnya yang tingkat pendidikan rata-ratanya jauh lebih tinggi itu?

Sebagai gerakan yang sejak didirikan pada tahun 1912 dan sepanjang kiprahnya selama satu abad pertama usianya memelopori pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sangat prihatin dengan masih rendahnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Muhammadiyah yang telah mengabdikan dirinya untuk bangsa ini dengan mendirikan 174 Universitas/Perguruan Tinggi, 4.623 Taman Kanak-Kanak, 2.604 SD/MI, 1.774 SMP/MTs, 1.143 SMA/MA/SMK, dan 97 Pondok Pesantren, merasa terkejut dan *galau* dengan fakta masih rendahnya tingkat pendidikan bangsa setelah 70 tahun merdeka ini.

Jika tingkat pendidikan rata-rata rakyat faktanya masih setingkat itu maka sungguh tidak mengherankan manakala perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini juga masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa terbesar keempat di dunia (setelah RRT, India, dan Amerika serikat) alih-alih menjadi pelopor perkembangan ilmu, justru sebaliknya bangsa ini masih konsumen ilmu. Sumbangan Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia masih sangat minimalis. Hampir semua buku teks dan literatur dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu pengetahuan masih impor dari luar negeri. Demikian juga tentunya dengan teknologi. Benar-benar bangsa konsumen *in optima forma!*

Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan itu menjadi sumber masalah yang serius bagi bangsa. Kelemahan budaya keilmuan menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, primordialisme yang sempit, dan beragam perilaku *klenik*, mistis, magis dan takhayul yang mematikan akal sehat. *Aneh bin ajaib*-nya, masih saja ada orang yang berpendidikan tinggi dan berilmu alih-alih memberantas, malah membela perilaku serta praktik-praktik yang antiilmu dan antiakal sehat semacam itu.

Kelemahan budaya ilmu juga menjadi salah satu sebab utama sebagian bangsa ini tidak kritis dan selektif terhadap banjir informasi. Bangsa ini mudah terprovokasi, dihasut, diadu-domba, dan akhirnya bertindak

intoleran terhadap perbedaan. Tak heran jika sekadar perbedaan aliran, mazhab, dan sekte, cukup untuk menjadi sebab terjadinya ketegangan atau malah konflik di tengah masyarakat yang bahkan tidak jarang melahirkan kekerasan.

Gerakan toleransi

Maka seiring, sejalan, dan sebagai kelanjutan dari rekomendasi yang pertama tersebut di atas, Muktamar ke-47 Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi yang kedua, yaitu keharusan bagi bangsa ini membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang berbasis keimanan, keilmuan dan kemajemukan. Kehidupan yang penuh toleran hanya bisa dibangun berdasarkan pemahaman teologi yang kuat, keilmuan yang luas, dan paham kemajemukan yang mendarah-daging dan membalung-sumsum.

Muhammadiyah tidak menginginkan adanya kelompok-kelompok yang karena kurang ilmu suka menghakimi, menanamkan kebencian dengan aroma dendam, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan dengan tuduhan sesat, kafir, liberal, dan tuduhan lainnya. Kecenderungan takfiri bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tawasut, dan toleransi. Sikap mudah mengafirkan pihak lain memang disebabkan oleh banyak faktor antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, fanatisme dan keangkuhan dalam beragama, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri.

Akibatnya akhir-akhir ini energi umat tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Suni dan Syiah. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialogis, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun.

Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah. Untuk mencegah semakin meluasnya konflik antara

kelompok, termasuk di dalamnya kelompok Suni dan Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intra umat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan keagamaan di antaranya dengan menyusun *fiqh khilafiyah* dan kemudian mendiseminasikan atau menyosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat antar dan internal umat beragama untuk meminimalisasi konflik horizontal.

Gerakan ilmu

Sangat meyakinkan bahwa ketegangan dan apalagi konflik horizontal karena alasan perbedaan agama atau aliran/madzhab itu tidak akan mudah terjadi dalam masyarakat yang memiliki budaya ilmu dan pemahaman ilmu agama yang tinggi. Pasalnya, dalam dunia ilmu perbedaan itu memang lumrah karena perbedaan paradigma, dan perbedaan serta kemajemukan dalam agama itu memang sudah sunnatullah alias *given*. Demikian juga halnya fenomena multialiran dan multimadzhab dalam beragama itu juga bukan fenomena baru bahkan hampir setua agama itu sendiri.

Dalam konteks dan perspektif itu bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal positif dan produktif. Perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan *(center of excellence)* yang berbasis *sustainability* dan pusat teknopreneur *(center of technopreneurship)* dalam bentuk universitas riset.

Demikianlah sumbangsih pemikiran Muhammadiyah bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Ini sesuai dengan tema Muktamar ke-47 Muhammadiyah: *Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan.* Semoga!

Pikiran Rakyat, 12 Agustus 2015. Penulis, mantan Wakil Ketua MPR RI 2009-2014.

Muhammadiyah dan Revitalisasi Kebudayaan

FADJAR SUTARDI

SEBUAH ikhtiar untuk melahirkan peradaban utama tampaknya merupakan cita-cita besar Muhammadiyah ketika memasuki millenium ke-2 dengan rancangan membuat sebuah ”tenda besar” sebagai rumah kebudayaan yang berkemajuan dan mencerahkan. Tenda besar yang bernuansa Islam tersebut termuati nilai-nilai kekarimahan yang nantinya diharapkan dapat digunakan bersama-sama sebagai rumah ”dialog pemikiran dan pertukaran amaliah” masyarakat Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa.

Tentu bangsa-bangsa lain itu adalah yang menghendaki lahirnya peradaban yang mengutamakan ketinggian ilmu, kesalehan, pemuliaan akhlak serta budi pekerti, dan praktik amaliah nyata untuk mengangkat persoalan manusia yang terkalahkan oleh kemajuan global yang menimbulkan problem besar bagi kemanusiaan itu sendiri.

Tenda besar peradaban utama tersebut juga akan dikukuhkan dengan pilar-pilar penyangga yang terbangun dari konstruksi yang memperkuat akhlak kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni kekuatan semangat ”al-ma'uniyah” yang pada awal berdirinya Muhammadiyah telah dikonsep Kiai Ahmad Dahlan yang terbukti menjadi praktik amaliah yang mengagumkan.

Kekuatan "al-ma'uniyah" menjadi fondasi bagi empat pilar yang mendasari tenda besar Muhammadiyah, yakni pilar keteguhan dalam memberi (*charity*) berupa gerakan zakat untuk pencerahan bangsa, pilar kekuatan pemberdayaan masyarakat untuk kesadaran akan pentingnya kebudayaan (ekonomi, politik, teknologi, sains dan seni) yang menyejahterakan.

Kemudian pilar kekuatan kecerdasan dalam menghadapi bencana-bencana baik bencana alam dan kemanusiaan, seperti dahsyatnya tsunami, erupsi gunung berapi, terorisme, peperangan, korupsi dan berbagai kejahatan yang memusnahkan nilai-nilai moral manusia.

Yang tak kalah penting adalah pilar kekuatan ekonomi yang menggerakkan dinamika kesadaran sosial untuk memakmurkan dan menyejahterakan bangsa dan mengatasi rongrongan ekonomi kapitalis modern yang menjadi hegemoni kemajuan lahiriah yang terkadang merusak tatanan mental masyarakat.

Keempat pilar penyangga tenda besar itu diyakini sebagai kekuatan untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan dan kemakmuran yang meninggikan harkat kemanusiaan. Uraian di atas adalah inti kajian atau tausiyah yang disampaikan Dr. Fattah Santoso pada pembukaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Muhammadiyah Sragen pada 28 Juni 2015 di Pondok Pesantren Darul Ihsan Sragen.

Tausiyah dan kajian tersebut menjadi penting untuk direnungkan, khususnya warga Muhammadiyah yang menyambut kegembiraan Muhammadiyah, yakni Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 3–7 Agustus 2015.

Muhammadiyah telah bergerak melintasi berbagai zaman, mulai zaman Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Indische Partij. Ketika itu bangsa ini masih sangat tipis saf keintelektualitasannya dan kesadaran politik nasionalismenya sampai dengan zaman teknologi modern Barat sekarang ini.

Meminjam teks pidato Ruslan Abdul Gani (1965), api kebangunan nasionalisme Indonesia semakin berkobar ketika Muhammadiyah yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan menyuarakan nilai-nilai keislaman yang

menjadi gelombang pemukul imperialisme dan materialisme yang memang bertentangan dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan.

Muhammadiyah dengan gerakan untuk kembali kepada sumber-sumber agung kemanusiaan, yakni Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW, secara nyata telah membebaskan dari belenggu-belenggu kemunduran bangsa ini, yakni kultur kekolotan yang sengaja dipelihara penjajah sebagai pembendung kemajuan kecerdasan bangsa ini

Kuantum Kemanusiaan

Kobaran api Islam yang mengutamakan nilai-nilai sosial, yakni kedamaian, keselamatan, dan kebersamaan, perlu terus diembuskan dengan amal praktik di tengah masyarakat luas sehingga pada saatnya, sesuai dengan *causa* waktu, masyarakat dapat dengan tulus ikhlas menghadirkan nilai-nilai keilahian dalam bentuk ucapan, tindakan, dan perbuatan sehari-hari dalam *frame* keimanan yang mendalam.

Keterkaitan atau ketergantungan manusia dengan Allah dalam rangka pemeliharaan alam, dengan dasar ketauhidan yang kuat, pada akhirnya akan terwujud sebuah kehidupan dengan memuliakan kuantum kemanusiaan yang saleh, bermanfaat, bermartabat, dan menghormati perbedaan-perbedaan sebagai media cermin keseimbangan.

Ketika tenda besar peradaban yang diinginkan Muhammadiyah harus berhadapan dengan tenda-tenda lain yang lebih besar serta megah dan bisa menghanyutkan tata nilai kemanusiaan dan melupakan budi akhlak manusia pada umumnya, kemudian harus melakukan apa?

Di kalangan masyarakat awam dan akar rumput, nilai-nilai keagamaan yang disampaikan para pemuka agama hanya pada kisaran teks fikih belaka yang terkadang menyuburkan benturan-benturan dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat lainnya hanya tergantung pada buku-buku terjemahan dan bukan nilai-nilai ajaran agama yang diterjemahkan langsung dalam alam keseharian kehidupan mereka.

Pada masyarakat lapisan lainnya terkadang untuk mempraktikkan nilai-nilai moral keagamaan harus berlari mundur ke belakang untuk

menemukan kesunyian romantisme masa lalu dengan tampilan pada kebudayaan gurun pasir.

Dalam lapangan politik dan ekonomi, amal kemuliaan seakan tak berdaya menghadapi praktik-praktik pembiaran kejahatan ekonomi dan politik yang semakin merangsek kehidupan masyarakat.

Mochtar Lubis (1977) menganggap praktik-praktik kejahatan itu telah menjadi bagian kebudayaan bangsa ini. Yasraf Amir Pilliang (2013) menggambarkan secara paradoksal bahwa masyarakat modern sedang terjangkit kebanalan kompleks yang menjauhkan nilai-nilai spiritualitas agung kemanusiaan dan tentu menyesatkan realitas kebenaran yang diharapkan.

Rasa pesimistis seperti pertanyaan dan gambaran di atas tentu diperbolehkan, senyampang tidak berlebihan. Tenda besar Muhammadiyah yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan masih kokoh dan kuat walaupun umurnya sudah seabad.

Kuntowijoyo (2002) menyatakan dengan tajam dan mendalam bahwa kita tidak perlu takut dengan industrialisasi, monetisasi, komersialisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kita yang digerakkan oleh ideokrasi-ideokrasi tertentu yang bukan idiolatri, Muhammadiyah telah lulus melampaui zaman dengan tegar dan semakin mekar.

Yang perlu perlu dijaga adalah semangat mengembangkan pembaruan. Perlu terus merevitalisasi kebudayaan. Jangan takut mengadakan eksperimen besar dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Kreativitas, inovasi, etos ekonomi, dan persoalan urbanisme perlu terus dijaga oleh seluruh amal usaha dan warga Muhammadiyah.

Yudi Latif (2015) mempertegas bahwa industrialisasi ekonomi tidak perlu ditakutkan, tetapi justru harus direbut oleh Muhammadiyah agar mekanisme *redistributive justice* beralih untuk amal saleh bagi bangsa kita yang terus tertinggal dengan bangsa lain.

Usaha Sendiri

Dari sini jiwa *entrepreunership* menjadi penting bagi warga Muhammadiyah. Pada era sekarang ini Muhammadiyah digerakkan oleh mental birokrat dan bukan mental *self help* atau usaha sendiri.

Untuk itu perlu terus-menerus merevitalisasi kebudayaan dalam Muhammadiyah. Tenda besar tersebut juga perlu dilengkapi ruangan kebudayaan yang nyata, misalnya diperlukan konsep mendasar tentang bangunan realitas ekonomi, realitas politik, realitas kebahasaan (lisan maupun tulisan), realitas sains dan ilmu pengetahuan, realitas kesenian, realitas sosial kemasyarakatan, dan realitas produk/mata pencaharian.

Semua realitas itu saling menguatkan dan meneguhkan tenda besar peradaban yang diimpikan Muhammadiyah sehingga tenda-tenda orang lain tidak mampu menembusnya. Ideokrasi Muhammadiyah perlu di sebarkan secara nyata ke masyarakat luas.

Titik berangkat pengalokasian realitas kebudayaan Muhammadiyah bisa mengacu pada konsep keluarga sakinah yang sudah mengakar dalam masyarakat yang perlu dikembangkan sesuai tuntutan zaman.

Gambaran praktik kebudayaan Islam yang berkemajuan dalam Muhammadiyah setidaknya ada lima persona kebudayaaan. *Pertama,* persona kepribadian dan keluarga. Persona kepribadian yang dibutuhkan pada era kekinian, adalah persona kejujuran dan kepercayaan.

Keduanya menjadi tolok ukur bagi mentalitas dan bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dan tentu akan menghalau ke-*fujur*-an (kejahatan/kesesatan). Jiwa kepercayaan menjadi roh amal yang amat mendasar bagi keberlangsungan postur kemukminan dan keislaman dalam tatanan keluarga Muhammadiyah.

Kedua, persona keluasan wawasan dalam keilmuan. Wawasan keilmuan perlu terus disuarakan kepada masyarakat, utamanya bersumber Quran dan sunah sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan muamalah ilmiah.

Paradigma keilmuan yang mengacu ketauhidan juga amat penting digalakkan sehingga ketika para ilmuwan Muhammadiyah terjun ke masyarakat tidak terjebak pada pusaran kemusyrikan amal yang menumbuhkan jiwa rakus, tamak, dan sombong.

Seandainya mereka memegang amanah kekuasaan, para ilmuwan Muhammadiyah tetap mendasarkan pada *imamun 'adilun* (pemimpin yang adil) dan bukan memperkuat mental birokrat yang korup.

Dunia pendidikan Muhammadiyah, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, penting untuk terus direvitalisasi dengan berbagai model, misalnya kewajiban bagi anak didik dan mahasiswa untuk *mondhok* dan *nyantri* pada pesantren Muhammadiyah, sekaligus sebagai bekal ke medan kuliah kerja nyata bagi amal karimah di lokasi *qoriyah thayyibah* nantinya.

Ketiga, persona kekuatan dalam kekaryaan/produktivitas. Dalam lapangan kehidupan, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan merawat alam. Menyuburkan dan memakmurkan alam menjadi suatu keniscayaan.

Manusia yang berkebudayaan tentu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan menemukan berbagai cara atau metode pemeliharaannya. Saking banyaknya lahan pemeliharaan yang harus ditempuh manusia, mereka menciptakan pengetahuan tentang pekerjaan sebagai medan pengalaman.

Berbagai pengalaman dan temuan melahirkan efek profesi atau keahlian. Manusia yang memiliki keahlian diabdikan kepada kehidupan. Mereka dibayar dengan barter barang, kehormatan, dan alat tukar yang bernama uang sepadan dengan keahliannya.

Bersyukur atau Kufur

Manusia bisa dikatakan sebagai ahli pertanian, pertukangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, pergunungan, sampai disebut sebagai ahli mesin, konstruksi, jasa, desainer, keartistikan, dan sebagainya.

Intinya, manusia diberi kuasa Allah untuk menciptakan pekerjaan atau produksi. Kekuatan berproduksi atau berkarya menjadikan manusia dihargai dan berharga di mata Allah. Persona kekaryaan menjadi alat bukti manusia bersyukur atau kufur.

Kuasa kekaryaan bisa langgeng untuk kemanusiaan asalkan tidak bersekutu dengan kekuasaan politik yang korup. *Keempat,* persona kesalehan sosial. Persona kesalehan dapat di ukur dari kesuntukan memaknai tujuan pengabdian dalam pengelolaan hidup.

Saleh sosial dapat terwujud bila hanya diabdikan kepada Tuhan dengan jiwa berperikemanusiaan. Kesatuan pikiran, hati, dan perbuatan yang diwujudkan dengan tindakan nyata tanpa dibarengi kesombongan tentu akan mengekalkan makna kesalehan-kesalehan. Kesalehan bukan hanya diukur dengan penampilan persona jasmani seperti peci, gamis, atau celana *jigrang*.

Kesalehan lebih dari sekadar basa-basi keagamaan yang tertempel dalam ritual keagamaan. *Kelima,* persona kebudayaan. Dewasa ini telah lahir berbagai sebutan yang membanggakan tetapi belum melengkapi kemauan kehidupan, seperti ekonom, guru besar, teknokrat, birokrat, seniman, politikus, insinyur, selebritas. dan sebagainya. Sebutan-sebutan itu bisa tiba-tiba dan serta-merta tenggelam karena tergelincir oleh kemauan yang menjauhkan nilai-nilai keilahian. Seharusnya kita melengkapi keahlian dengan kebiasaan-kebiasaan yang meneguhkan dan memenuhi panggilan kehidupan.

Persona sebagai budayawan lebih lengkap dan mendalam untuk memenuhi tugas dalam kehidupan. Persona budayawan berbeda dengan persona kesenimanan. Budayawan mengabdi pada kemauan keimanan, keilmuan, kebudipekertian, yang diabdikan kepada kemasyarakatan dan bukan diabdikan kepada kemuliaan diri sendiri. Budayawan berwawasan setinggi langit dan mempraktikkan kemampuannya untuk kemauan kemanusiaan seluas bumi tempat dia berpijak.

Persona–persona di atas dapat memenuhi konsep tenda besar peradaban yang dicanangkan Muhammadiyah asalkan kita mampu dan mau mengerti aspek-aspek tuntutan kehidupan yang perlu di garap dengan sungguh–sungguh dan sepenuh hati. Dalam rumah besar Muhammadiyah, tak ada pensiun karena garapan sangat banyak dan kompleks. Semua garapan tak bisa diabaikan salah satu dari sekian lainnya. Semua harus dibagi rata untuk memenuhi kebahagiaan dan kebersamaan dalam kehidupan agar tercerahkan dan berkemajuan sesuai panggilan roh Islam.

Solo Pos, 5 Agustus 2015. Penulis adalah perupa yang aktif di Komite Seni Rupa Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Sragen

Wasiat Pendiri Muhammadiyah

MUHBIB ABDUL WAHAB

"Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu, warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan (dan teknologi) di mana dan ke mana saja.

Menjadilah dokter sesudah itu kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan profesional lalu kembalilah kepada Muhammadiyah sesudah itu." (KH Ahmad Dahlan).

Wasiat visioner pendiri Muhammadiyah tersebut menginspirasi kita semua dan menarik direnungkan bersama, terutama oleh warga Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah didirikan bukan untuk satu atau dua generasi, melainkan lintas generasi dan sepanjang masa.

Muhammadiyah didirikan juga bukan untuk etnis atau komunitas tertentu, melainkan sebagai wadah perjuangan umat untuk mewujudkan visi Islam *rahmatan lil rahmatan lil alamin*. Muhammadiyah kini telah berusia lebih dari satu abad (didirikan pada 18 November 1912). Karena itu, sebelum meninggal, KH Ahmad Dahlan pernah berwasiat: "Aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu".

Tentu saja, wasiat tersebut dimaksudkan agar cita-cita mulia Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam dan Indonesia Berkemajuan tetap dijaga, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dikembangkan dan didedikasikan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk kelompok orang atau pihak-pihak tertentu.

Sebab itu, spirit perjuangan untuk mewujudkan visi mulia "Islam dan Indonesia Berkemajuan" adalah spirit keikhlasan dan kebersamaan, etos menanam dan merawat gerakan, bukan memanfaatkan Persyarikatan untuk kendaraan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Spirit inilah yang mendorong pendiri Muhammadiyah itu "berwasiat" kepada warga Persyarikatan agar secara tulus ikhlas mengaktualisasikan "Hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah".

Kedua, tantangan Muhammadiyah itu selalu berbeda antara satu generasi dan lainnya. Pada masa lalu Muhammadiyah banyak dihadapkan pada tantangan kolonialisme dan tantangan internal umat berupa kebodohan, kemiskinan, kemunduran, dan kejumudan.

Saat ini tantangan terbesar Muhammadiyah adalah bagaimana mewujudkan Islam dan Indonesia Berkemajuan itu dapat terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara damai, rukun, adil, dan makmur dalam bingkai NKRI?

Ketiga, saat ini bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga masih dihadapkan kepada masalah-masalah warisan kolonialisme masa lalu seperti: kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kemunduran peradaban di satu segi, dan di segi lain juga dihadapkan pada neokolonialisme (kapitalisme global), liberalisme, permisivisme, dan sebagainya.

Untuk itu, dalam kesempatan lain, pendiri Muhammadiyah juga berwasiat: "Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab?" Wasiat ini mengingatkan kita semua bahwa Islam di Indonesia boleh jadi akan tergradasi jika umatnya tidak bertanggung jawab dalam memajukan Islam.

Sebaliknya, Islam di Indonesia bisa menjadi "kiblat dunia Islam" jika mampu mengatasi berbagai tantangan zaman. Kata kuncinya adalah spirit reformasi dan dakwah amar makruf nahi munkar dalam segala aspek kehidupan melalui kerja visioner-kolektif yang terorganisasi rapi dan modern.

Karena itu, berislam dengan "kendaraan Muhammadiyah" merupakan salah satu peta jalan (*roadmap*) atau wadah (institusi) untuk mengawal dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam menuju Indonesia Berkemajuan.

Karena itu, masa depan Muhammadiyah sangat bergantung pada generasi dan suksesi kepemimpinan Muhammadiyah saat ini. Akan dibawa ke manakah Muhammadiyah masa depan? Arah itulah yang dibahas di Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang sedang berlangsung di Makassar.

Visi, misi, dan cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam Berkemajuan dalam bingkai NKRI merupakan spirit gerakan dan perjuangan yang perlu diapresiasi dan diaktualisasikan. Dalam konteks ini, masa depan Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari spirit dan kontekstualisasi "metodologi al-Maun" yang diteladankan dan diwasiatkan KH Ahmad Dahlan kepada para muridnya.

Metodologi ini sebuah kerangka pemahaman dan keyakinan kuat untuk menjadikan Islam Berkemajuan itu membumi dan menginspirasi semua, bukan sekadar menampilkan "Islam wacana" tanpa kerja dan karya nyata.

Metodologi al-Maun yang diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan kepada para muridnya tidak hanya berupa pemahaman kognitif, tetapi bagaimana pemahaman akal-rasional itu diaktualisasikan menjadi perbuatan nyata dan karya kemanusiaan kontekstual dan berwawasan peradaban.

Bangsa Indonesia masa depan bisa semakin maju dan menjadi peradaban besar jika spirit Islam Berkemajuan dipahami, dididikkan, dan disosialisasikan secara transformatif-kultural. Nilai-nilai Islam Berkemajuan tidak ditransmisikan melalui pemahaman dogmatis melainkan pemahaman kritis-transformatif yang kontekstual.

Dengan begitu, Islam Berkemajuan secara teologis menghendaki integrasi dua model kritik sekaligus yaitu kritik teks dan kritik konteks

(realitas sosial) dengan senantiasa merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan relevansi sosial keummatan.

Pada saat yang sama, umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, harus mampu menampilkan citra diri pada masa depan sebagai ummatan wasathan (umat moderat, Islam moderat, Islam jalan tengah), tidak ekstrem kanan, apalagi ekstrem kiri, tidak anarkistis dan tidak pula teroris, toleran, namun tetap tegas dan teguh pendirian.

Islam Berkemajuan akan menusantara melalui proses sivilisasi (pemeradaban) dengan gerakan pencerdasan dan pemberdayaan umat, pemajuan sistem pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, politik, budaya, dan sebagainya.

Sudah saatnya dalam rangka menuju masa depan yang lebih prospektif dan konstruktif, Muhammadiyah mereformasi sistem pendidikan dari sistem yang berorientasi "*market oriented*" menuju "*civilization oriented*".

Sistem pendidikan Muhammadiyah yang menjamur dari TK hingga perguruan tinggi di seluruh Nusantara perlu berinovasi baik dari segi substansi kurikulumnya maupun metodologi pembelajarannya, dari sekadar memenuhi "pangsa pasar dan dunia kerja" menuju pendidikan yang bervisi peradaban modern.

Muhammadiyah juga telah memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi umat. Karena itu, semua warga Muhammadiyah perlu meningkatkan kinerja layanan berbasis ihsan dan terus mengembangkan amal usaha agar tujuan Muhammadiyah tercapai.

Selain itu, Muhammadiyah juga telah memberikan warisan peradaban dan karya-karya kemanusiaan yang dinamis dan kreatif. Generasi muda Muhammadiyah harus lebih proaktif dalam mendalami dan mengaktualisasikan Islam Berkemajuan yang bervisi "*rahmatan lil alamin*".

Masa depan Muhammadiyah dan Islam Berkemajuan juga dapat diaktualisasikan melalui dakwah pencerahan (*da'wah tanwiriyyah*) yaitu dakwah yang membebaskan (*tahrir*), memberdayakan (*taqwiyah*), dan memajukan (*taqdim*).

Islam Berkemajuan yang *rahmatan li al-alamin* harus dijadikan sebagai komitmen moral dan teladan terbaik bagi semua. Jika hal ini dapat

dilakukan melalui sistem dakwah pencerahan yang efektif dan konstruktif, niscaya Muhammadiyah masa mendatang dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia Berkemajuan masa depan.

Sesuai wasiat pendiri Muhammadiyah tersebut, Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah juga harus menampilkan wajah humanis: ramah, penuh perdamaian, toleran, kasih sayang, antikorupsi, antikekerasan, antiterorisme, anti-*illegal logging*, anti-*trafficking*, antiketidakadilan, antiliberisme, dan sebagainya, di samping terus menggerakkan jihad multidimensi, termasuk jihad konstitusi untuk menganulir dan membatalkan aneka produk hukum yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Jadi, Islam Berkemajuan yang diwasiatkan sang pendiri Muhammadiyah harus menjadi visi-misi bersama untuk menjadikan Islam sebagai agama teladan yang sukses membangun peradaban umat dan bangsa yang berkeadaban, berperikemanusiaan, berkemajuan, dan berkeadilan.

Wasiat pendiri Muhammadiyah tersebut masih relevan direnungkan kembali oleh para muktamirin (peserta Muktamar), khususnya calon pimpinan masa depan Muhammadiyah, agar jangan sampai Muhammadiyah "larut dan dibawa" ke arus kepentingan tertentu yang justru merugikan Muhammadiyah.

Kearifan dan kedewasaan para muktamirin dalam memilih pemimpin baru, menyusun program strategis, dan menyatupadukan langkah menuju Indonesia Berkemajuan sangat dibutuhkan. Selamat berMuktamar, Nusantara Indonesia membutuhkan kontribusi positif Muhammadiyah!

Koran SINDO, 6 Agustus 2015. Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta

Pemikiran Keagamaan Haedar Nashir

IWAN SETIAWAN

JALAN panjang menjadi kader Muhammadiyah akhirnya mengantarkan sosok Haedar Nashir (DR H Haedar Nashir M.Si) menjadi orang nomor 1 di Persyarikatan Muhammadiyah. Haedar Nashir diberi amanah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Kota Makassar tahun 2015. Lahir di Desa Ciheulang, daerah Ciparay, Bandung Selatan, sebuah desa yang di masa DI/TII pimpinan Kartosuwiryo menjadi perebutan pengaruh antara DI/TII dan TNI. Lahir 25 Februari 1958 dari pasangan Haji Ajengan Bahrudin dan Hajah Endah binti Tahim. Haedar Nashir adalah anak ragil dari 12 bersaudara, wajar bila Haedar kecil menjadi anak yang disayang orang tuanya.

Berkaitan dengan didikan keislaman, ayahnya Haji Ajengan Bahrudin menerapkan disiplin yang ketat. Guyuran air akan menimpanya bila tidak segera bangun untuk shalat subuh. Begitu juga sambitan selendang haji akan melecutnya saat ia salah membaca Al-Quran. Pendidikan Islam yang pertama berasal dari ayahnya. Selain itu didikan Pondok Pesantren Cintawana,Tasikmalaya Jawa Barat juga juga menjadi modal dalam memahami Islam di kemudian hari. Didikan Agama dari sang ayah dan belajar di pesantren menjadikan Haedar Nashir akrab dengan dunia santri

sejak kecil. Setelah lulus SMA Haedar Nashir merantau ke Yogyakarta sampai hari ini.

Minat Haedar Nashir pada studi sosial dan keagamaan yang mengantarkannya untuk Studi Sosiologi di Pascasarjana UGM (S2,1998) dengan tesisnya berjudul *Perilaku Elite Politik Muhammadiyah di Pekajangan* dan Studi Sosisiologi di Program Doktor di UGM (S3,2007) dengan disertasinya *Islam Syariat:Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Selain itu Haedar Nashir menulis lebih dari 10 buku yang berisi pemikirannya tentang Muhammadiyah. Hajriyanto Y Tohati, mantan Wakil Ketua MPR RI menujuluki Haedar Nashir sebagai "Ensiklopedi Berjalan Muhammadiyah".

Haedar Nashir adalah ideolog Muhammadiyah, hampir semua pemikiran Muhammadiyah yang tertuang dalam keputusan resmi Muhammadiyah menjadi pijakan utama dalam tulisan berserinya di Suara Muhammadiyah. Bagi Haedar Nashir Muhammadiyah memiliki jati diri sendiri dalam pemikiran keislamannya. Tidak perlu latah terhadap pemikiran keagamaan yang ber*sliweran* dalam kehidupan kemasyarakatan. Jadi orang Muhammadiyah adalah menjadi teladan umat, berjuang di Muhammadiyah sama artinya dengan berjuang di jalan Islam.

Moderat, Kultural, dan Berkemajuan.

Dalam Buku *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*, Haedar Nashir memahami alam pikiran Muhammadiyah dapat digali dalam dua level, yakni pemikiran tokoh Muhammadiyah dan pemikiran *adhoc* organisasi. Pemikiran tokoh Muhammadiyah seperti Kyai Ahmad Dahlan, Mas Mansyur, Kyai Hadjid, Buya Hamka, AR Fakhrudin, Ahmad Azhar Basyir, M Amin Rais, Kuntowijoyo, Buya Syafii Maarif dan lain-lain bisa menjadi kompas dalam mencari penyelesaian atas masalah aktual pada masanya. Sedangkan pemikiran kolektif yang tertuang dalam keputusan resmi Muhammadiyah merupakan dasar pijakan dalam menemukan alam pikiran Muhammadiyah yang normatif dan doktriner.

Ada sebagian orang beranggapan bahwa Haedar Nashir adalah liberal, yang dihadapkan dengan Yunahar Ilyas yang lebih puritan. Kalau kita

membaca pemikiran keagamaan Haedar Nashir tidak ada ajakan untuk menjadi sekuler, liberal, dan pluralis. Haedar Nashir mengajak kepada umat Islam untuk paham dengan semangat zaman. Pemurnian Islam yang ditawarkan Haedar Nashir adalah pemurnian Islam yang luwes, pemurnian pembaharuan. Sebagai sosiolog Haedar Nashir selalu menghadirkan konteks masalah yang sedang dihadapi dan memberi tawaran penyelesaian yang didasarkan atas semangat wahyu Al-Quran dan Sunnah Maqbullah dengan reinterpretasi kekinian. Islamnya Haedar Nashir adalah Islam yang progresif, Islam yang mencerahkan.

Haedar Nashir ingin membawa Persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini sebagai gerakan Islam Modern yang memiliki pilar moderat,kultural dan menawarkan Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Moderat berarti Islam yang pertengahan/*washatiyyah* yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kultural adalah yang berjuang dalam wilayah kemasyarakatan dan bukan dalam bidang politik. Berkemajuan adalah Islam yang tidak mandeg, Islam yang mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman dengan memberi solusi dengan pikiran-pikiran yang maju dan mencerahkan.

Kedaulatan Rakyat, 10 Agustus 2015. Penulis adalah dosen STIKES Aisyiyah Yogyakarta, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY.

Modernitas Pemikiran Muhammadiyah

NAFI' MUTHOHIRIN

Muhammadiyah telah menyelenggarakan Muktamar ke-47 di Makassar pada 3-7 Agustus 2015. Pada helatan lima tahunan tersebut, persyarikatan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini mengambil tema besar *Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan*. Dalam perspektif penulis, pengambilan tajuk ini memiliki cita-cita mulia karena Muhammadiyah ingin semakin berperan serta dalam menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.

Sebagai sebuah organisasi yang menjunjung tinggi modernitas, tema Muktamar tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1969 (Khittah Ponorogo). Khittah yang digagas pada era kepemimpinan KH. Abdul Razaq Fachruddin itu merumuskan bahwa Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoretis dan operasional bahwa ajaran-ajaran Islam mampu mengatur masyarakat NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu dengan doktrin-doktrin Islam, masyarakat diharapkan juga bisa merasakan kebahagiaan materiil dan spiritual yang diridai Allah SWT.

Sebab itu, pada konteks kekinian Muhammadiyah perlu memperluas agenda pemikirannya, sehingga tidak melulu berpijak pada **tiga** lahan

garapan yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Sebab selama satu abad perjalanannya, telah banyak kontribusi Persyarikatan bagi kesejahteraan dan pencerdasan bangsa. Ribuan amal usaha yang meliputi ketiga sektor tersebut telah kokoh berdiri.

Data Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan, bahwa organisasi ini memiliki TK/TPQ sebanyak 4.623, SD/MI (2.604), SMP/MTS (1.772), SMA/SMK/MA (1.143), Pondok Pesantren (67), Perguruan Tinggi Muhammadiyah (172), Rumah Sakit/Rumah Bersalin (457), dan Panti Asuhan (318). Sayangnya, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mulai melupakan aspek terpenting yaitu dalam hal pembaharuan pemikiran.

Kini, semakin sedikit sarjana dalam negeri dan peneliti asing yang menjadikan Muhammadiyah sebagai obyek bagi penelitian akademis mereka. Sedikit sekali buku baru yang membahas organisasi yang berdiri pada 1912 tersebut. Jika pun ada, karya tersebut kebanyakan ditulis sendiri oleh kader internal. Karena itu, dalam rangka memberi masukan kepada Muhammadiyah, tulisan ini bisa menjadi otokritik di tengah semarak gelaran Muktamar.

Apalagi perjalanan Muhammadiyah yang sudah berusia satu abad ini telah banyak mewarnai gerakan kebangsaan dan perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia. Jangan sampai karena besarnya jumlah amal usaha malah warga Persyarikatan disibukkan pada persoalan-persoalan teknis, serta melupakan aspek pengembangan pemikiran yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Jika Muhammadiyah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap modernitas pemikiran, maka bukan hal yang tidak mungkin bila dalam beberapa tahun ke depan organisasi Islam *mainstream* ini akan mengalami kejumudan. Stagnasi gerakan akan terlihat pada aktivitas Muhammadiyah beserta seluruh organisasi otonomnya.

Ahmad Syafii Maarif dalam buku yang ditulis secara bunga rampai bertajuk *Menggugat Modernitas Muhammadiyah* (2010) mengingatkan, bahwa persyarikatan yang berdiri pada 1912 ini akan menjadi organisasi yang konservatif dan absoliti jika geraknya hanya berkutat pada ritus-ritus pengembangan amal usaha saja. Kini Muhammadiyah seolah semakin menjauh dari karakter khas kesejarahan awal berdirinya, di mana KH A.

Dahlan begitu keras mendengungkan gerakan tajdid di bidang pemikiran. Hal itu terlihat ketika ia berdebat dengan Kiai-kiai seniornya di Kauman Yogyakarta mengenai arah kiblat shalat.

Kritik terhadap pemikiran pembaharuan Muhammadiyah juga pernah disampaikan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang M. Saad Ibrahim. Menurutnya, modernitas Muhammadiyah mesti digugat apabila organisasi ini terjebak pada tiga hal; *Pertama*, melakukan modernisasi yang meruntuhkan ideologi agamanya. *Kedua*, lambat bergerak sehingga ketinggalan akselerasi modernitas itu sendiri. *Ketiga*, terjadi manipulasi penyandangan nama sebagai organisasi modern, sementara ideologi modernitas belum sepenuhnya menjadi urat nadi bagi gerak aktivitasnya (*Menggugat Modernitas Muhammadiyah*: 2010).

Analisis Saad sepenuhnya harus ditanggapi dengan serius karena Muhammadiyah sedang dalam keadaan kritis akibat terjangkiti oleh model berfikir yang lamban dan tekstual. Hal ini menyebabkan gerak dan langkah organisasi menjadi stagnan, dan dalam beberapa hal menjauh dari modernitas Muhammadiyah itu sendiri.

Menafsirkan modernitas *ala* Muhammadiyah tidak perlu dengan memaksakan diri dengan pendekatan positivistik melalui percampuran antara rasionalisme Rene Descartes (tesis) dan empirisme John Locke (antitesis). Namun, yang lebih penting bahwa modernitas itu punya kekhasannya sendiri dan keberadaannya mampu menjadi acuan bagi progresifitas pemikiran di Muhammadiyah. Sebab jika tidak, berarti Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang kosong sekaligus usang. Apalagi mengingat saat ini semakin deras bermunculan Ormas Islam yang menampilkan label Islam modernis, Tarbiyah, dan pengusung berdirinya negara Islam.

Karena itu, tulisan ini berharap supaya Muhammadiyah lebih membuka diri sebagai gerakan modernis. Agenda "Jihad Konstitusi" yang dilakukan oleh PP. Muhammadiyah belakangan ini menjadi salah satu ijtihad yang patut diapresiasi karena telah berani dan sukses menerjemahkan Khittah Ponorogo 1969.

Banyak peran yang harus dimainkan oleh Persyarikatan melalui model-model gerakan dan pemikiran. Salah satunya adalah dengan menjadi gerakan *civil society* yang menanggapi isu-isu kebangsaan seperti masalah keadilan, prinsip egalitarian, diskriminasi gender, demokrasi, HAM, nasib upah buruh, ketenagakerjaan, dan krisis kemanusiaan lainnya.

Akhirnya, dalam momentum Muktamar Muhammadiyah ke-47 ini, kita berharap ada rumusan-rumusan baru yang bisa memicu berkembangnya pemikiran pembaruan di Muhammadiyah. Sementara pada sisi gerakan, kita berharap agar Persyarikatan semakin mengokohkan keterlibatannya dalam peran-peran kebangsaan. Sehingga, wajah Muhammadiyah akan memperlihatkan raut optimis karena semakin mampu memainkan peran penting dalam dinamika persyarikatan dan kebangsaan di masa-masa mendatang. []

Penulis adalah Aktivis Jaringan Intelektual Muhammadiyah (JIMM) dan Penulis Buku "Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus

Kang Moeslim dan Tenda Kultural

DAVID KRISNA ALKA

INDONESIA kembali kehilangan tokoh terbaiknya. Cendekiawan Muhammadiyah, Moeslim Abdurrahman, menyusul kepergian sahabatnya, Abdurrahman Wahid.

Sebelum wafat, Moeslim Abdurrahman yang akrab disapa Kang Moeslim lebih banyak bergelut dalam ranah budaya. Setelah Kuntowijoyo, memang belum tampak lagi tokoh Muhammadiyah yang aktif mendalami kebudayaan.

Muhammadiyah memang telah menghasilkan banyak intelektual dan aktivis kreatif yang mampu menjalankan organisasi Muhammadiyah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bagaimana dengan kebudayaan?

Strategi kebudayaan

Minimnya perhatian terhadap kajian dan gerakan kebudayaan mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah perlu mengkaji ulang gerakan dakwah kulturalnya. Selama ini, gerakan kebudayaan yang dilakukan Muhammadiyah belum begitu membumikan kebudayaan Indonesia: kemanusiaan yang adil dan beradab.

Maka, menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah telah mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang signifikan dengan cita-cita bangsa? Karena itu, perjuangan penggiat seni dan kebudayaan di Muhammadiyah seharusnya dikonsolidasi. Mereka acap kali terpinggirkan dan tak diperhatikan. Muhammadiyah malah tampak lebih banyak menjalankan rutinitas organisasi semata. Ungkapan Kang Moeslim bahwa Muhammadiyah adalah tenda kultural tampaknya belum mendarat pada praksisnya.

Bidikan strategi kebudayaan Muhammadiyah dalam konteks kekinian adalah fasilitasi berbagai dinamika budaya, ekspresi, dan gagasan yang beragam. Tidak bisa semua kebudayaan dan ekspresinya disamakan. Kebudayaan itu sesuatu yang harus diuji oleh masa dan zaman. Kebebasan berekspresi akan tersaring oleh berbagai filter, seperti agama, nilai sosial, adat, dan seterusnya.

Strategi kebudayaan Muhammadiyah semestinya memiliki watak kebudayaan yang progresif. Jika tak punya watak budaya, gerakan Muhammadiyah cenderung terlena oleh rutinitas kerja ormas seperti biasanya. Di samping itu, Muhammadiyah perlu ideologi kebudayaan. Tanpa itu, Muhammadiyah akan terombang-ambing dalam lintas zaman yang hampir tak bertuan.

Muhammadiyah lahir di Indonesia, oleh orang Indonesia, dan dalam keanekaragaman budaya Indonesia. Maka, ideologi Pancasila mesti dikedepankan untuk melakukan gerakan kebudayaan.

Sebagai ormas sosial keagamaan yang landasannya keislaman dan keindonesiaan, Muhammadiyah perlu mengembangkan budaya lokal, menjaga kedaulatan budaya bangsa, menumbuhkembangkan kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi dalam bingkai keimanan.

Wajah Muhammadiyah

Yang dapat mengubah keadaan tentu saja pimpinan dan warga Muhammadiyah. Pernyataan ini adalah ekspresi otokritik terhadap keringnya kajian dan aktivitas kebudayaan di tubuh Muhammadiyah.

Kerja kebudayaan dapat mengekspresikan zaman sekaligus dapat mengkritik zaman. Kebudayaan berkembang seiring perubahan zaman. Namun, hal ini tak mesti meniadakan "ibu kebudayaan" bangsa ini. Sejalan dengan spirit teologi al-Maun yang sering disuarakan Kang Moeslim, gerakan kebudayaan Muhammadiyah hendaknya mampu membebaskan dan memberikan pencerahan kepada rakyat dan adat yang tertindas.

Selain itu, gerakan kebudayaan Muhammadiyah juga hendaknya menjadi pembela moralitas ketika kesadaran elite dan kesadaran rakyat kian menurun akibat sempitnya nurani solidaritas. Hal ini menjadi penting terutama karena sebagian anggota legislatif ataupun pejabat eksekutif telah menjadikan kebudayaan sebagai alat legitimasi kepentingannya golongannya.

Muhammadiyah juga berkewajiban melapangkan ruang sempit nurani solidaritas sebagai kontribusi baru bagi bangsa. Terutama, generasi muda Muhammadiyah yang sekarang mulai lupa substansi gerakan pencerahan. Jangan sampai Indonesia dan juga Muhammadiyah seakan mengalami seperti apa yang pernah dikatakan Mochtar Lubis, wajah lama tak karuan di kaca, sedang wajah baru belum jua jelas.

Akhirnya, diperlukan peran strategis kebudayaan Muhammadiyah sebagai tenda kultural yang meliputi kesadaran untuk mengakui dan menghormati seni dan budaya sebagai tulang punggung peradaban bangsa.

Kompas, Senin 9 Juli 2012. Peneliti ***Maarif Institute for Culture and Humanity***, Anggota Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Kongres Umat Islam

FAJAR RIZA ULHAQ

Majelis Ulama Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia VI dalam kurun 8-11 Februari di Yogyakarta.

Pertemuan akbar lima tahunan ormas Islam berskala nasional itu mengusung tema "Penguatan Peran Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban". Sekitar 775 peserta diundang mewakili ormas Islam tingkat pusat, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta pengurus MUI tingkat pusat dan provinsi (www.mui.or.id). Menurut Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, tujuan kongres adalah membangun komitmen dan aksi bersama di antara semua ormas Islam demi kepentingan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, khususnya pada ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Menariknya, ormas yang dilibatkan berpartisipasi tak hanya mereka yang mendukung Pancasila, tetapi juga penganut pandangan sebaliknya. Menjelang Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2010, pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia meminta MUI mengundang perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam. Dalam perhelatan kongres tahun ini, hanya dua nama ormas terakhir yang diundang panitia kongres. Namun, usul mengundang kelompok Syiah mendapat penolakan keras dari mayoritas internal MUI.

Konflik dan konvergensi

Sejarah kongres umat Islam diawali oleh Kongres Al Islam Hindia Belanda pada 1922 di Cirebon. Ketegangan antara kelompok Muslim modernis yang direpresentasikan Muhammadiyah dan tradisionalis, kelak berhimpun dengan membentuk NU, pada awal abad ke-20 melatari pertemuan tokoh gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan itu. Sudah muncul fenomena saling menyesatkan di antara sesama umat Islam. Persatuan umat Islam jadi isu sentral. Kongres diharapkan jadi ajang dialog dan mencari kesepahaman di tengah perbedaan paradigma dan perilaku keagamaan. Terjadi perdebatan hebat di antara kedua kelompok tersebut hingga nyaris menggagalkan jalannya kongres.

Upaya meredakan perseteruan antara " madzhab Yogyakarta" dan " madzhab Surabaya" terus dilakukan. Kongres berikut-nya diadakan pada 1924 hingga 1926. Namun, selalu berujung pada kebuntuan. Memang kontestasi Muslim modernis dan Muslim tradisionalis telah jadi arus besar dalam dinamika gerakan keagamaan di banyak daerah pada era kolonial Belanda, tidak terkecuali di Sumatera.

Namun, perlu dicatat, ada sejumlah tokoh Islam independen di Surakarta yang enggan terbawa arus ketegangan NU dan Muhammadiyah, seperti ditunjukkan studi M Nashier (1992) ketika mengupas kemunculan gerakan pembaruan di tingkat lokal pada 1926. Kalangan pemuka agama independen ini bersepakat mendirikan Jamaah Al Islam yang memoderasi Muhammadiyah dan NU.

Kebijakan pemerintah kolonial yang kian mengebiri peran politik dan ekonomi umat Islam telah menyadarkan elite Muslim sehingga menurunkan tensi pertikaian kelompok modernis dan tradisionalis. Kaum modernis mulai menyadari, proses pemurnian membutuhkan waktu yang panjang dan kaum tradisionalis bersikap realistis bahwa " madzhab Yogyakarta" akan tetap tumbuh di lingkungannya (Ricklefs, 2008: 397). Perjumpaan intens kedua arus besar ini dalam kancah perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan mengarah pada konvergensi, bahkan kohabitasi, seiring dengan mobilitas sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, elite

Muhammadiyah dan NU membidani pembentukan Majelis Islam A'laa Indonesia pada 1937. Keduanya berperan besar dalam pembentukan Partai Masyumi yang lahir dari keputusan kongres umat Islam pada 1945 meski akhirnya bersimpang jalan. Semakin berkembangnya institusi pendidikan dan keberagamaan inklusif membuat konvergensi kedua massa ormas Islam itu kian mendekat.

Optimisme

Ada rentang 93 tahun antara penyelenggaraan KUII VI dan Kongres Al Islam pada 1922. Jelas ada beda konteks dan panggilan zaman masing-masing. Orientasi Kongres Al Islam sebatas menengahi konflik domestik umat Islam yang berporos pada perebutan klaim kebenaran. Namun, arah KUII VI lebih pada upaya mentransformasikan peran umat Islam pada ranah publik dalam koridor kebangsaan yang berpijak pada kemajemukan.

Umat Islam Indonesia sudah tidak lagi terbelenggu oleh imajinasi Islamisasi negara seiring dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Survei global Gallup pada 2002 memperlihatkan mayoritas pemeluk Islam di dunia tak menginginkan negara agama dan tak pula demokrasi sekuler. Mereka lebih memilih model alternatif yang memadukan prinsip keagamaan dan nilai demokratis (Esposito & Mogahed, 2008: 91). Menurut An Naim, pilihan jadi negara netral tak otomatis secara kaku memisahkan Islam dan negara, tetapi justru negara berkewajiban mengatur hubungan Islam dan politik. Negara tak semata-mata menghormati agama dan kepercayaan warganya masing-masing, tetapi juga memfasilitasi mereka hidup sesuai dengan keyakinannya.

Soekarno meyakini negara Pancasila bukanlah monopoli satu kelompok agama karena prinsip keadilan dan kemajemukan merupakan identitas bangsa. Kesadaran inilah yang mendorong mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali berani mendeklarasikan bahwa model negara modern yang dianut Indonesia adalah model terbaik yang pernah dipikirkan sehingga harus jadi tujuan akhir bagi Muslim Indonesia. Argumentasinya, Pancasila merupakan kerangka yang kukuh dan memungkinkan

pendefinisian konsep kewarganegaraan berdasarkan alasan sekuler maupun agama. Ideologi Pancasila memiliki komitmen terhadap pluralisme dan toleransi agama yang sangat berarti dalam pengembangan etos kewargaan yang inklusif (2007: 434). Negara Pancasila menjadi model terbaik untuk bangsa Indonesia yang merefleksikan semangat kebinekaan yang mengakar dalam sejarah Nusantara.

Model negara Pancasila dan pengalaman demokratisasi politik yang mulus merupakan modal penting bangsa Indonesia menjadi kiblat baru dunia Islam di abad ke-21. Kondisi dunia Islam di Timur Tengah hari ini masih terus dihantam konflik politik sektarian, ketakpastian politik, dan perang saudara. Kekejian NIIS dan kompleksitas konflik negara-negara Timur Tengah telah menghantui wajah dunia Islam.

Pada konteks inilah KUII diharapkan memaksimalkan momentum ini dengan mendorong transformasi nilai keislaman yang mengutamakan kesetaraan, welas asih, kemandirian, serta keadilan pada budaya politik kewargaan dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Semangat keislaman harus bersenyawa dengan hajat hidup publik tanpa diskriminatif. Umat Islam Indonesia harus segera beranjak dari buritan menuju kemudi peradaban yang kosmopolitan. Indonesia bisa mewakili wajah optimisme dunia Islam "pasca Timur Tengah".

KOMPAS, 11 Februari 2015. Penulis adalah *Direktur Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity*

Warisan Din Syamsuddin untuk Muhammadiyah

AHMAD NAJIB BURHANI

Din Syamsuddin telah usai menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah memimpin organisasi Islam modernis terbesar itu selama dua periode 2005-2010 dan 2010-2015. Meski sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) ia masih bisa dipilih lagi menjadi salah satu pimpinan kolektif-kolegial Muhammadiyah yang terdiri dari 13 orang, namun ia memutuskan untuk tidak mengembalikan formulir kesediaan untuk dipilih lagi sebagai upaya kaderisasi sehingga muncul pimpinan baru. Seperti yang beberapa kali disampaikannya, ia memilih untuk menjadi ketua Muhammadiyah ranting Ragunan, daerah tempat ia tinggal saat ini.

Karena Din Syamsuddin tidak lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka barangkali ini saat yang tepat untuk membicarakan *legacy* atau karya unggulan yang ia wariskan kepada organisasi modernis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang berdiri tahun 1912 ini. Tentu saja ada catatan yang sering disebut sebagai kekurangannya selama sepuluh tahun (2005-2015) memimpin Muhammadiyah, misalnya kurang berhasilnya organisasi ini dalam menempatkan kader-kader terbaiknya dalam birokrasi pemerintahan. Namun tulisan ini khusus melihat apa saja warisan dan

prestasi dari Din Syamsuddin yang patut dilanjutkan oleh para penerusnya di Muhammadiyah.

Karir Zig Zag

Din Syamsuddin merupakan sosok yang multidisiplin secara akademik, memiliki karier profesional yang tidak tunggal, dan pergaulan yang tak terkungkung pada kelompok tertentu. Pendidikan sarjananya sebetulnya dalam ilmu perbandingan agama, namun ia lantas menulis disertasi doktoral tentang politik Islam dan setelah itu terjun dalam politik sebagai Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) DPP Golkar. Setelah Reformasi, ia menjadi Direktur Jenderal Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja) Departemen Tenaga Kerja. Yang menjadi *element of surprise* (mengejutkan), ia lantas menjadi Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dari segi pergaulan, Din juga tidak membatasi dirinya untuk bergaul hanya dengan kalangan akademisi atau politisi atau agamawan, tapi ia juga memiliki jamaah pengajian yang peserta adalah kalangan artis.

Disiplin akademik, karir profesional, dan pergaulan yang luas itulah yang membuat Din Syamsuddin sering disalahpahami dan persalahkan. Di kalangan aktivis NGO dan pengamat asing, Din Syamsuddin sering dipandang dengan sinis dan bahkan menjadi bahan ledekan karena sikapnya yang sering kali dianggap tidak konsisten, terutama dalam kaitannya dengan isu kelompok minoritas. Ia memiliki posisi strategis di MUI, sebagai wakil ketua dan kemudian menjadi ketua, namun tak mampu menahan lembaga tersebut mengeluarkan fatwa-fatwa kontroversial berkaitan dengan kelompok minoritas, pluralisme, dan liberalisme. Ia sering mengadakan pertemuan tingkat tinggi tokoh-tokoh agama, namun suaranya jarang terdengar dalam kasus-kasus kecil intoleransi keagamaan.

Pertanyaannya sekarang, sebagaimana tertulis dalam pengantar buku *Kiprah Pencerahan: Karya Unggulan Muhammadiyah 2005-2015,* seperti apakah sebetulnya sosok Din Syamsuddin itu? Apa prestasi dan warisan

kepemimpinan Muhammadiyah masa Din Syamsuddin dalam dua periode itu (2005-2010 dan 2010-2015)?

Konservatisme dan Kosmopolitanisme

Beberapa kalangan sering menuduh Din Syamsuddin sebagai representasi dari kelompok konservatif dari Muhammadiyah. Ia memimpin organisasi itu setelah periode Buya Syafii Maarif yang dikenal sangat progresif. Namun di Muhammadiyah sendiri, ia sering menjadi jembatan antara kubu Islam kanan dan kiri. Bahkan ia sering dituduh sebagai orang liberal dalam internal Muhammadiyah karena pembelaannya terhadap Syiah dan beberapa pernyataannya bahwa Syiah adalah bagian dari Islam. Peran "*bridging*" (menjembatani) Din Syamsuddin itu, misalnya, terlihat hasilnya ketika isu liberal vs. konservatif itu tak muncul lagi di Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta. Justru yang tampil adalah warna kultural Muhammadiyah sebagai organisasi berbudaya Jawa. Din Syamsuddin sendiri tampil sebagai pemain dalam pertunjukan ketoprak dengan judul "*Mletheking Surya Andadari*" (Terbitnya Matahari yang Bersinar Terang).

Dalam periode kedua kepemimpinannya, beberapa kegiatan Muhammadiyah banyak yang merefleksikan bagaimana organisasi ini merespons tantangan global, termasuk pengaruh budaya dari Arab dan Barat. Ini terwujud dalam beberapa hal, di antaranya adalah jihad konstitusi, internasionalisasi Muhammadiyah, pelayanan sosial baru dalam wadah MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dan MPM (Majelis Pengembangan Masyarakat), serta pengembangan hubungan antar agama. Dalam Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah bahkan memilih tema yang berkaitan dengan posisi Muhammadiyah yang mengusung Islam Berkemajuan atau Islam yang Kosmpolitan, yakni Islam yang berwawasan dunia, keluar dari kungkungan negara-bangsa.

Dalam dunia yang global ini Muhammadiyah berupaya untuk ikut berdialog dan berbagi dengan berbagai peradaban dunia, tidak hanya sebagai penerima pengaruh asing tapi juga memengeruhi masyarakat

dunia. Inilah makna dari kosmopolitanisme yang dalam aktivitas nyata diwujudkan program internasionalisasi Muhammadiyah. Program ini lantas menginspirasi pendirian beberapa PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, Mesir, dan Iran. Di samping PCIM, beberapa negara bahkan telah memiliki cabang Muhammadiyah yang didirikan oleh warga asli negara tersebut, seperti di Mauritania, Vietnam, dan Malaysia.

Jihad konstitusi Muhammadiyah erat kaitannya dengan kapitalisme global. Dengan berdatangannya orang dan modal asing di Indonesia, banyak sekali kekayaan alam di negeri ini, seperti air, minyak, dan gas bumi, yang kemudian justru lebih banyak memberi manfaat kepada orang asing. Ini dimungkinkan karena beberapa perundang-undangan kita dibuat atau dikontrol oleh para kapitalis demi memuluskan kepentingan mereka. Jihad konstitusi adalah upaya untuk menjaga agar konstitusi kita mampu melindungi kekayaan kita dari dominasi kapitalis yang tidak memedulikan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan sosial baru itu misalnya terwujud dalam pelayanan sosial yang nonsektarian dan mempersiapkan masyarakat agar tidak gagap terhadap bencana. Muhammadiyah, melalui MDMC dan MPM, misalnya, melakukan bantuan kepada kelompok yang sering dituduh sesat, semisal Syiah, dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang hidup dalam *ring of fire* (rangkaian gunung berapi) untuk tidak gagap terhadap bencana.

Itulah beberapa warisan *distinctive* (sangat berbeda) yang menandai masa kepemimpinan Din Syamsuddin di Muhammadiyah dibandingkan ketua umum sebelumnya. Beberapa karya tersebut perlu untuk menjadi pelajaran dan dilanjutkan oleh pimpinan baru di Muhammadiyah. Hal yang masih menjadi tanda tanya sekarang adalah, karier dan aktivitas apa yang akan dipilih Din Syamsuddin seusai purna tugas di Muhammadiyah?

Koran SINDO, 21 Agustus 2015. Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) & Maarif Institute.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Peradaban

David Krisna Alka

Terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti sebagai ketua umum dan sekretaris umum dalam Muktamar ke-47Muhammadiyah di Makassar belum lama ini, Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan menjadi organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan Indonesia menjadi lebih beradab dan berkemajuan.

Muhammadiyah dengan perjuangan dakwah sosial dan amal usahanya sungguh besar perannya bagi republik ini. Ya, republik ini bisa saja sulit maju jika sedari dulu hingga kini tak ada peran Muhammadiyah yang turut menggerakkan kemajuan bangsa. Sejati-jatinya gerakan adalah perbuatan yang tampak dalam kenyataan, bukan sekadar banyaknya kuantitas anggota yang dibanggakan.

Perbuatan Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan dakwah, nyata tampak dengan banyaknya amal perbuatan yang biasa disebut sebagai Trisula Muhammadiyah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dan kini,Muhammadiyah akan berupaya untuk melakukan gerakan kemajuan kualitatif dengan memajukan Trisula baru, yakni pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan gerakan zakat.

Trisula baru itu sudah bergerak terlembaga dalam bentuk MDMC (Muhammadiyah Management Disaster Center), Majelis Pemberdayaan

Masyarakat (MPM), dan Lazismu. Ketiganya itu menurut Hajriyanto Y Thohari (2015) merupakan sebuah gerakan yang tersistem sebagai Muhammadiyah Aids, Relief, dan Disaster Management.

Hal itusudah tentu secara nyata untuk kemajuan Republik Indonesia. Bahkan, MDMC Muhammadiyah sudah bergerak membantu korban bencana di beberapa negara.

Namun, ada agenda perbuatan selain itu yang seharusnya lebih digerakkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Agenda bagi Muhammadiyah untuk republik yang pernah diutarakan Kuntowijoyo (1993:214) masih signifikan untuk dilanjutkan. Pertama, menumbuhkan kekuatan demokratis di kalangan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi politik yang mampu menangani permasalahan masyarakat industri.

Kedua, menumbuhkan kekuatan demokrasi ekonomi yang mampu melakukan delegitimasi terhadap monopoli, oligopoli, dan oligarki ekonomi. Ketiga, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, memobilisasi kecerdasan bangsa dan hati nurani bangsa untuk tujuan-tujuan nasional yaitu menciptakan Indonesia sebagai sebuah keluarga besar.

Selain itu, lanjut Kuntowijoyo, program yang sangat mendesak bagi Persyarikatan Muhammadiyah ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang merupakan *exemplary center* yang mampu menjadi panutan bangsa. Hal ini diperlukan karena elite nasional kita yang sekarang sudah banyak kehilangan legitimasinya sebagai panutan.

Empuknya kekuasaan terkadang membuat lembek kekuatan moral sehingga republik ini kehilangan panutan. Moral kepemimpinan bangsa di pusat maupun daerah masih banyak yang kusut masai. Dalam konteks ini, Persyarikatan Muhammadiyah dan kepemimpinan di dalamnya harus menjadi panutan umat dan bangsa, penjaga moral bagi republik ini.

Tak hanya bagi republik, dalam konteks global, Muhammadiyah juga mesti lincah gerakannya dalam menciptakan perdamaian di dunia dan melawan segala bentuk perbuatan durjana di atas dunia, seperti terorisme dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

Mantan Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan, kedurjanaan atas nama demokrasi dan hak-hak asasi manusia harus ditolak dengan segala kekuatan moral dan intelektual yang tersedia dalam semua unit peradaban. Janganlah karena kerakusan terhadap benda dan kekuasaan, pihak adidaya mau mempermainkan kemanusiaan secara zalim. Kemanusiaan yang masih murni pasti menentang setiap perbuatan durjana, siapa pun yang melakukan, tidak peduli apa pun agama dan aliran politiknya.

Dalam pelaksanaan hasil keputusan Muktamar MuhammadiyahKe-47itu, juga diharapkan Muhammadiyah menjadi "mesin budaya" yang bergerak aktif bagi kemajuan republik ini. Tapi, "mesin budaya" yang seperti apa?

Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2015), mengutip pernyataan Rendra, "Mesin budaya yang berdaulat rakyat, adil, berperikemanusiaan, dan menghargai dinamika kehidupan, adalah "Mesin Budaya" yang mampu mendorong daya hidup dan daya cipta anggota masyarakat dalam Negara. Tetapi "Mesin Budaya" [sic.] yang berdaulat penguasa, yang menindas dan menjajah, yang elitis dan tidak populis, sangat berbahaya."

Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi "mesin budaya" yang membuat republik ini lebih berdaulat, adil, berperikemanusiaan, menghargai dinamika kehidupan, dan mampu mendorong daya hidup dan daya cipta masyarakat yang lebih beradab, seperti kata Rendra. Semoga.

Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanitydan Research Associate The Indonesian Institute

9

Agenda Pasca Muktamar

Muhammadiyah Pasca Din Syamsuddin

FAJAR RIZA UL HAQ

JAKARTA-SEGENAP warga Muhammadiyah akan kembali menggelar Muktamar ke-47 pada 3-7 Agustus di Makassar dengan tema "Gerakan Pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan". Dalam 10 tahun terakhir, 2005-2015, Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah cukup berhasil membawa organisasi ini sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil Islam terdepan. Tidak terkecuali peran aktifnya di kancah global dalam isu perdamaian, dialog antaragama, multikulturalisme, dan rekonsiliasi konflik.

Sebagai contoh, World Peace Forum, yang diprakarsai Muhammadiyah bersama CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations), telah menjadi pertemuan reguler para aktor strategis gerakan perdamaian tingkat dunia. Organisasi ini juga aktif sebagai anggota International Contact Group (ICG) dalam proses perundingan perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina.

Selain Muhammadiyah, keanggotaan ICG diisi oleh pemerintah Malaysia, Turki, Jepang, Inggris, Arab Saudi, Conciliation Resources, dan Asia Foundation. Kedua pihak yang berkonflik meminta Muhammadiyah terlibat dalam proses rekonstruksi pascakonflik di Mindanau. Muhammadiyah menjalankan strategi diplomasi kebudayaan dalam mengejawan-

tahkan misi dakwahnya di kancah global. Satu pekerjaan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pada ranah kebangsaan, Muhammadiyah menggulirkan jihad konstitusi bersama pelbagai kelompok sipil dan individu. Gerakan ini menggugat perundangan dan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Mereka menempuh jalur hukum melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gerakan ini mulai mencuri perhatian publik pasca-Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* mereka terkait UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Pembubaran BP Migas merupakan konsekuensi dari keputusan MK tersebut.

Target jihad konstitusi selanjutnya adalah *judicial review* tiga undang-undang yang dinilai *proliberalisme* ekonomi: UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (detikNews, 15/4).

Rupanya jihad konstitusi yang dimotori Muhammadiyah ini telah menimbulkan kekhawatiran dari para investor asing. Dalam satu obrolan makan malam dengan Wakil Presiden pada awal Juni lalu di rumah dinasnya, Jusuf Kalla mengaku pemerintah tidak terlalu terganggu oleh gerakan Muhammadiyah tersebut. Justru, menurutnya, investor asinglah yang sangat berkepentingan karena menganggap bisa mempengaruhi kebijakan investasi di Indonesia (Lihat "Legal Jihad Against Private Sector Gathers Pace in Indonesia", *Reuters*, 24/4).

Peran Profetik

Ekspansi pergerakan Muhammadiyah, seperti dicontohkan di atas, mencerminkan spirit dakwahnya tak bisa dipisahkan dari kesadaran kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Saat Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912 di Yogyakarta, benih-benih nasionalisme sedang tumbuh.

Perjumpaan dan perkawanan Dahlan dengan para aktivis pergerakan, seperti Budi Utomo, membuat gerakan dakwah Muhammadiyah ditujukan pada upaya pencerdasan dan pencerahan anak negeri, utamanya melalui pendidikan. Tengok saja tujuan awal organisasi yang berdiri di Kauman, Yogyakarta, ini. Menurut Anggaran Dasar Tahun 1914 pada artikel 2a, "memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland."

Alam pikiran Muhammadiyah selalu berorientasi pada nilai-nilai peradaban yang kosmopolit, melintasi sekat-sekat kultural, dan memperjuangkan tegaknya keadaban publik. Pendekatan purifikasi pada aspek akidah dan dinamisasi pada domain muamalah (urusan non-akidah) merupakan ciri khas elastisitas Muhammadiyah. Keseimbangan inilah kunci keberhasilan Muhammadiyah memadukan modernisme dan Islam.

Menurut sejarawan asal Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwanto, Muhammadiyah mewakili produk persilangan budaya di dalam keberagaman yang melibatkan Islam, Jawa, Minangkabau, dan modernitas Barat. Kesadaran kebangsaan pada era itu tumbuh ketika rakyat terjajah dalam kubangan kemiskinan, kebodohan, dan diskriminasi. Menjadi sangat beralasan Muhammadiyah mendirikan sekolah dan pusat layanan kesehatan di masa-masa awalnya.

Dengan demikian, menjadi jelas tanggung jawab profetik Muhammadiyah dan bagaimana ia membumikan nilai-nilai Islam di bumi Indonesia. Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah berkomitmen mendudukkan Islam lebih maju, bukan semata Islam yang mengusung toleransi dan kemanusiaan tanpa diskriminasi, tetapi juga Islam yang obyektif, Islam yang membangun keadaban bangsa (Kompas, 4/6). Dalam bahasa Kuntowijoyo, Islam yang sudah mengalami proses "obyektivikasi". Muhammadiyah bertekad untuk tidak semata berkutat sebagai penganjur toleransi, tapi melangkah maju dengan menyentuh isu-isu publik yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Kepemimpinan Muhammadiyah pasca-Din Syamsuddin harus lebih mampu memetakan akar persoalan-persoalan di tiga ranah secara

simultan dan menemukan masing-masing solusinya secara sinergis, yaitu lokal, nasional, dan global. Pekerjaan rumah lainnya adalah pembangunan pola komunikasi organisasi yang efektif antarlevel pimpinan dan efisiensi pelayanan kelembagaan.

Dengan mendudukkan dirinya bukan semata organisasi penganjur toleransi, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa gerak dakwah di ranah isu-isu publik dan humanitarian lebih menyentuh kepentingan masyarakat sesuai tanggung jawab profetik yang diembannya. Muktamar Muhammadiyah di Makassar menjadi sangat krusial, akan menentukan wajah dan langgam kepemimpinan untuk lima tahun mendatang. Tentu yang pasti kepemimpinan baru Muhammadiyah harus berhasil merepresentasikan semangat pencerahan dan keadilan yang mengayomi semua warga bangsa, tanpa kecuali. Wallahualam.

---

detikNews. Penulis adalah Direktur Eksekutif MAARIF Institute for Culture and Humanity, Anggota Lembaga Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah, alumni Chevening Fellowship Universitas Birmingham (2009), Sloan School of Management, MIT (2011-2012) dan School of Economics and Management, Universitas Tsinghua (2013).

Muktamar Muhammadiyah Pasca Satu Abad Pertama

AHMAD FUAD FANANI

Muktamar Muhammadiyah ke 47 telah ditutup secara resmi pada Jumat, 7 Agustus 2015 kemarin. Muktamar pertama pada abad kedua Muhammadiyah (1912-2012) ini, menghasilkan keputusan dan rekomendasi penting untuk persyarikatan, umat, bangsa, dan dunia. Muktamar juga telah menetapkan Haedar Nashir sebagai Ketua Umum dan Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk 2015-2020. Muktamirin sebelumnya juga telah memilih 13 anggota PP Muhammadiyah yang diberikan amanah untuk mengelola dan memajukan Muhammadiyah ke depan.

Anggota 13 PP Muhammadiyah yang telah dipilih muktamirin berdasarkan nomor urut perolehan suara adalah: Haedar Nashir, Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, Busyro Muqoddas, Abdul Mu'ti, Anwar Abbas, Muhadjir Effendy, Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, Suyatno, Agung Danarto, Goodwill Zubir, dan Hajriyanto Y Thohari. Komposisi 13 anggota PP terpilih itu adalah perpaduan yang ideal antara intektual, ulama', ahli manajemen organisasi, dan ideolog organisasi. Dengan model kepemimpinan kolektif kolegialnya, Muhammadiyah ke depan diharapkan akan lebih maju dan bermakna.

Sosok Ketua Umum dan Sekretaris Umum sekarang ini juga menunjukkan perpaduan yang ideal. Ketua Umum PP Muhammadiyah sebelumnya, M. Din Syamsuddin, pada pidato *wada'* (penutupannya), menyampaikan bahwa Haedar Nashir adalah seorang intelektual, penulis prolifik, dan ideolog yang selama ini banyak menggawangi penyusunan konsep-konsep penting Muhammadiyah. Beliau juga terkenal sebagai manajer yang handal yang bisa memperkuat ideologi dan laju Muhammadiyah ke depan. Sedangkan Abdul Mu'ti adalah sosok intelektual yang aktif bergerak dalam dunia pendidikan dan aktivitas Muhammadiyah di tingkat internasional. Dengan komposisi anggota PP Muhammadiyah sekarang ini, optimisme gerak internal dan eksternal Muhammadiyah ke depan layak disematkan.

Karena kebutuhan internal dan eksternal Muhammadiyah serta tantangan ke depan yang semakin kompleks, maka 13 anggota PP Muhammadiyah kemungkinan tidak cukup. Oleh karena itu, sebagaimana periode sebelumnya, perlu ada tambahan anggota PP Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Marpuji Ali, Imam Addaruqutni, Rahmawati Husein, Agus Taufiqurrahman, Muhammad Alwi Uddin, dan Agus Samsuddin layak masuk sebagai PP tambahan. Dengan tambahan itu, gerak internal dan eksternal PP Muhammadiyah ke depan akan bisa lebih dinamis dan progresif. Di jajaran PP Muhammadiyah kita mempunyai Hajriyanto Y. Thohari, Muhadjir Effendy, Suyatno, dan sebagainya yang piawai berkomunikasi dan bergaul di tingkat nasional; dan juga Syafiq Mughni dan Rahmawati Hussein yang bisa mengisi aspek internasionalnya.

Konsep dan Isu-Isu Strategis

Selain memilih 13 pimpinan pusat dari 39 calon PP Muhammadiyah yang telah disahkan pada forum Tanwir pada 1-2 Agustus 2015, Muktamar Muhammadiyah ke 47 kemarin juga membahas berbagai hal yang terkait dengan persoalan umum dan program PP Muhammadiyah 2015-2020; Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*; model dakwah pencerahan berbasis komunitas; serta Muhammadiyah dan Isu-isu

Strategis. Dan dokumen-dokumen itu telah dipersiapkan berbulan-bulan sebelum Muktamar dan dikaji secara terus menerus dengan berbagai pakar sebelum akhirnya dibawa ke forum Muktamar. Itu semua bertujuan agar Muktamar benar-benar menjadi forum persyarikatan tertinggi yang menghasilkan keputusan strategis, mendalam, dan proyektif untuk gerakan Muhammadiyah.

Muhammadiyah terkenal sebagai organisasi modern yang rapi dan mendasarkan semua programnya berdasarkan konsep yang matang, mendalam, dan terstruktur. Banyak dokumen-dokumen Muhammadiyah tentang konsep kebangsaan dan keumatan yang terus diproduksi dari waktu ke waktu. Sebelum Muktamar ini, Muhammadiyah juga telah menyusun berbagai konsep seperti: Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan; Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua; dan Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna. Semua konsep itu telah disosialisasikan ke berbagai forum Muhammadiyah dari tingkat nasional hingga daerah-daerah. Konsep yang sama juga diberikan pada pihak-pihak yang berwenang seperti Presiden-Wakil Presiden RI, Ketua DPR, Ketua MPR, dan jajaran pemerintah lainnya.

Pada Muktamar kemarin, Muhammadiyah juga menyusun konsep tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Persaksian). Dalam konsep ini, ditegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menentang Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui bahwa negara Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari itu, Muhammadiyah ingin mengajak seluruh anggotanya dan seluruh rakyat Indonesia agar mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila ini sebagai negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. Maka, langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini seperti Jihad Konstitusi, tidak lain adalah cara Muhammadiyah untuk mengisi negara Pancasila agar lebih memberikan keadilan dan kemakmuran pada rakyatnya. Jihad Konstitusi Muhammadiyah adalah upaya Muhammadiyah untuk mengajak rakyat

Indonesia mengisi negara Pancasila ini secara produktif dan kritis melalui jihad kebangsaan.

Muktamar Muhammadiyah kemarin juga mengesahkan panduan tentang Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas. Konsep ini sangat menarik karena mengkaji dan memetakan model dakwah di abad global ini secara mendalam dan komprehensif. Dalam konsep dakwah berbasis pencerahan, dakwah diklasifikasi berdasarkan berbagai komunitas yang ada dan terus kembang. Komunitas itu adalah: komunitas atas, komunitas menengah, komunitas bawah, komunitas marjinal, komunitas khusus, dan komunitas virtual. Model dakwah berbasis komunitas ini ke depan bisa digandengkan dengan konsep Trisula Baru Muhammadiyah yang sering disampaikan Hajriyanto Y. Thohari dan Rahmawati Hussein yang berbasis pada MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat), dan LazisMU.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar juga berhasil mengesahkan rumusan rekomendasi dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Isu-isu strategis ini dirumuskan jauh-jauh hari sebelum Muktamar bersama para pakar. Isu-isu strategis dan rekomendasi yang disahkan adalah: membangun masyarakat ilmu, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, peningkatan daya saing umat Islam, penyatuan kalender Islam, melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan komunitas rentan lainnya, pengendalian narkotika psikotropika dan zat adiktif, tanggap dan tangguh menghadapi bencana, memaksimalkan bonus demografi, gerakan berjamaah lawan korupsi, jihad konstitusi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta *human trafficking* dan perlindungan buruh migran. Rekomendasi dan isu-isu strategis itu secara langsung menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat peka dan tanggap terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat, bangsa, dan dunia.

Optimisme

Berbagai hal yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah kemarin tentu sangat menggembirakan dan membuat optimisme tentang masa depan gerakan Islam modern terbesar di Indonesia ini. Harapan itu akan menjadi abstrak jika tidak segera ditindaklanjuti dengan kerja keras dan semangat jihad untuk kebaikan dari para aktivisnya. Maka, sudah seyogyanya bahwa Muhammadiyah pada abad keduanya harus semakin progresif untuk membumikan semangat Islam Berkemajuan untuk Indonesia yang berkemajuan dan dunia yang berperadaban. Gerak internal Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas program kerja dan amal usahanya, serta gerak eksternal untuk melakukan internasionalisasi pemikiran dan gerakan Muhammadiyah harus segera dilakukan secara bersama-sama dengan berjamaah.

Ke depan, Islam Indonesia yang salah satunya diwakili oleh Muhammadiyah, harus menjadi jawaban terhadap krisis dunia Islam dan negara-negara Muslim yang hari ini sering terjadi di berbagai penjuru dunia. Semoga Islam Indonesia bisa menjadi, meminjam istilah Fazlur Rahman—-jawaban dan harapan tentang Islam hari ini dan masa depan. Keputusan-keputusan dan berbagai konsep yang dihasilkan Muktamar kemarin, tentu akan menjadi panduan pemikiran dan gerak Muhammadiyah untuk melangkah dengan lebih optimis dan percaya diri untuk menjadi representasi Islam Indonesia yang berkemajuan.

Penulis adalah Peneliti MAARIF Institute for Culture and Humanity; Mahasiswa PhD di University of Toronto, Canada). Sumber tulisan dari *Majalah MONDAY*, Edisi Agustus 2015

Pertaruhan Muhammadiyah Setelah Muktamar

MARPUJI ALI

MUKTAMAR ke-47 Muhammadiyah di Makasar berlangsung lancar, sejuk, dan sarat dinamika. Sekali lagi, eksperimen demokrasi ala Muhammadiyah bisa melewati ujian terjal secara elegan sehingga keutuhan organisasi tetap terjaga, dan aspirasi arus bawah bisa terserap.

Setelah melalui proses pemilihan secara bertahap dan berjenjang, akhirnya Haedar Nashir terpilih menjadi nakhoda baru Muhammadiyah untuk lima tahun mendatang. Karena model kepemimpinan terkait dengan upaya dinamisasi organisasi biarlah menjadi konsumsi internal, tetapi ide Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial, transisi kepemimpinan dari Din Syamsuddin kepada Haedar Nashir diprediksi tidak akan membawa gejolak yang berarti.

Muktamirin bukan hanya sukses memilih nakhoda baru, melainkan juga berhasil menelurkan dan menyepakati ide-ide strategis untuk mendinamisasi organisasi dan memajukan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Ihwal ide strategis yang bersentuhan dengan problem-problem keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, para stakeholder boleh ikut aktif mengemukakan dan memperbincangkannya secara terbuka.

Dengan cara demikian, publik dapat berperan aktif membaca, menilai, dan mengkritisi hasil pemikiran Muhammadiyah dalam kerangka

membangun keadaban dan memajukan bangsa. Tentu bukan suatu kebetulan ketika pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah beriringan dengan detik-detik perayaan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.

Sekalipun usia bangsa ini menginjak tujuh puluh (70) tahun, cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat masih menemui jalan terjal dan berliku. Situasi ekonomi dunia yang melambat, dan goyahnya ketahanan pangan nasional yang ditandai dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, membuat beban rakyat kian berat sehingga cita-cita untuk hidup sejahtera sebagai esensi kemerdekaan semakin menjauh.

Dalam situasi bangsa yang demikian, peran serta Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil tentu sangat strategis. Salah satu isu strategis yang hangat diperbincangkan selama Muktamar adalah bagaimana Muhammadiyah dapat berperan lebih progresif dalam kesertaannya memajukan bangsa. Hal ini sebenarnya telah tercermin dari tema Muktamar, ”Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”. Wujud konkret dari upaya itu adalah disepakatinya konsep ”Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*”.

Negara yang terbentuk atas dasar kesepakatan para pendiri negara ini, yang memerlukan persaksian nyata dari warga bangsa dalam bentuk usaha memajukan negara Pancasila tersebut berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, kerja dakwah Muhammadiyah beserta seluruh amal usaha yang di bawah naungannya difokuskan pada upaya memajukan dan mewarnai negara Pancasila sehingga bisa terwujud kemerdekaan sejati sebagaimana amanat mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Muhammadiyah juga menegaskan bahwa kepeloporannya dalam memajukan bangsa itu tidak melalui jalur politik kepartaian, tapi melalui politik kebangsaan; berpolitik yang berorientasi pada nilai-nilai adiluhung (bermartabat), bukan berorientasi pada mengejar kekuasaan. Dengan politik kebangsaan, Muhammadiyah dapat berkiprah secara luas dan luwes, laksana garam yang bisa meresap ke seluruh dimensi kehidupan bangsa.

Dalam tradisi Muhammadiyah, Muktamar bukan sekadar ajang kontestasi kekuasaan dan pemilihan pemimpin baru, juga bukanlah puncak perayaan (festival) organisasi, tetapi merupakan ekspresi ukhuwah bermuhammadiyah dalam membangun bangsa. Lebih dari itu, Muktamar adalah arena evaluasi bersama dan penentuan arah perjalanan organisasi ke depan sehingga setelah Muktamar membuncah harapan agar Muhammadiyah seperti terlahir kembali.

Gerakan Muhammadiyah terlihat lebih *fresh*, lebih gesit, tampak muda kembali, dan lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Gambaran tentang arah dan proyeksi organisasi ke depan tercermin dari hasil rekomendasi Muktamar di mana Muhammadiyah menekankan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Tiga isu strategis itu belakangan ini populer dengan istilah tiga pilar gerakan Muhammadiyah; pilar keumatan, pilar kebangsaan, dan pilar kemanusiaan universal. Keberadaan dan kelangsungan persyarikatan Muhammadiyah tampaknya sangat bergantung pada kemampuannya dalam memahami, merespons, mengurai secara bertahap dalam kerangka memberikan solusi masalah-masalah umat, bangsa, dan kemanusiaan universal secara cerdas dan bijak.

Dengan kata lain, pertaruhan Muhammadiyah setelah Muktamar sangat menjadi lebih *visible* (*cetho*). Bila pimpinan baru mampu membawa organisasi ini untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, sesungguhnya masa depan Muhammadiyah sangat cerah dan prospektif. Gerakan Muhammadiyah akan semakin mengakar di hati umat, menyatu dengan semangat kebangsaan, dan semakin terintegrasi dengan gerakan kemanusiaan universal.

Tetapi, apabila yang terjadi sebaliknya, pimpinan baru Muhammadiyah terlena dengan kesibukan internal organisasi sehingga tidak menghiraukan isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global, dengan sendirinya Muhammadiyah akan terasing dengan lingkungan nasional maupun global itu sendiri.

Dengan kata lain, keberadaan Muhammadiyah tidak dapat dirasakan langsung oleh umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sehingga keberadaannya tidak bermakna bagi kehidupan di masa depan.

Isu-isu strategis ada baiknya intisari isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal itu disebutkan di sini sebab pada hakikatnya isu-isu tersebut merupakan masalah-masalah aktual kehidupan yang harus menjadi perhatian publik.

Ada lima agenda yang menjadi isu keumatan: keberagamaan yang moderat, membangun dialog antariman dan antarbangsa, substansialisasi agama, dan membangun budaya hidup bersih. Dari lima isu tersebut, bermuara pada upaya menciptakan keberagamaan yang dialogis, toleran, dan bersih.

Sedangkan isu-isu strategis atau agenda kebangsaan meliputi: keberagamaan yang toleran, melayani dan memberdayakan kelompok difabel, tanggap dan tangguh menghadapi bencana, membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi, mengatasi krisis air dan energi, memaksimalkan bonus demografi, membangun masyarakat ilmu, dan menyelamatkan negara dengan jihad konstitusi.

Titik berat isu kebangsaan ialah kepedulian Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah-masalah bangsa sehingga bangsa Indonesia benar-benar menjadi negara yang maju dan bermartabat. Isu-isu strategis kemanusiaan universal terkait langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Secara rinci, isu-isu kemanusiaan universal meliputi: adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perlindungan kelompok minoritas, eksistensi manusia di bumi, pemanfaatan teknologi komunikasi, dan mengatasi masalah pengungsi. Ini artinya Muhammadiyah sadar sebagai bagian dari warga dunia yang harus terlibat aktif dalam mengurai dan mengatasi masalah-masalah global yang berada persis di hadapan kita.

Tiga isu strategis yang dikemukakan di muka, baik keumatan, kebangsaan, maupun kemanusiaan universal benar-benar aktual dan kritikal. Disebut aktual karena ia benar-benar masalah riil yang dihadapi semua orang. Dikatakan kritikal karena dibutuhkan pemecahannya sesegara dan

terencana. Ini artinya, masalah-masalah itu bukan hanya pekerjaan rumah bagi Muhammadiyah, tapi menjadi perhatian semua manusia yang hidup di planet bumi ini.

Secara konseptual, gagasan yang terkandung dalam isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan mungkin bukan sesuatu yang benar-benar baru. Namun, karena tradisi pemikiran Muhammadiyah bercorak praksis yang tidak memisahkan antara gagasan dan tindakan, yang mendesak dilakukan saat ini adalah merumuskan kerangka aksinya.

Kerangka aksi ini penting karena bisa dijadikan panduan. Bukan hanya untuk kalangan internal, melainkan juga pihak eksternal yang memiliki perhatian serupa terhadap isu-isu strategis tersebut. Setelah sketsa kerangka aksi dirumuskan, langkah berikutnya adalah menyosialisasikan ke seluruh struktur Muhammadiyah dan pengelola amal usaha sehingga mereka bisa menjadi kekuatan inti yang menggerakkan dan menerapkan ide-ide itu sesuai posisi dan profesinya masing-masing.

Bersamaan dengan sosialisasi internal juga perlu dikomunikasikan dengan pihak luar, baik publik secara luas maupun pemerintah, sehingga ide-ide itu dapat terus bergulir dan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam gerakan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Sebagai catatan akhir, sesungguhnya bukan hanya pimpinan, tapi seluruh warga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi orang pertama yang bisa menerapkan isu-isu strategis yang dikemukakan itu ke alam kehidupan nyata.

Inilah ciri kesalehan egaliter dalam Muhammadiyah, di mana kesalehan bukan dinilai dari tingginya jabatan struktural dalam organisasi, tapi dari komitmen untuk menerapkan hasil-hasil keputusan organisasi dengan penuh tanggung jawab. Kesalehan egaliter inilah yang mendorong generasi awal Muhammadiyah, di samping menjadi pimpinan struktural, juga menjadi pemangku masjid, pengasuh sekolah, mengurusi panti asuhan, dan lain-lain sebagai amalan keseharian yang konkret.

Sesungguhnya esensi gerakan Muhammadiyah ada di bawah, berupa gerakan amal yang nyata dalam kehidupan sosial. Kalau perhelatan Muktamar dimaknai sebagai arena penyegaran kembali organisasi,

setelah Muktamar gerakan amal ini mestinya bergerak semakin dinamis dan bertambah maju sebagai wujud nyata bakti Muhammadiyah kepada bangsa.

Koran SINDO, 14 Agustus 2015. Penulis adalah ***Dosen Fakultas Agama Islam UMS***

Harapan Terhadap Muhammadiyah

ABD ROHIM GHAZALI

SEJUMLAH harapan mengemuka menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-47, 3-7 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan. Publik memberikan sambutan yang cukup antusias. Selama kurang lebih sebulan sebelum Muktamar, setiap hari ada berita atau isu yang muncul terkait Muktamar Muhammadiyah.

Berbagai pemikiran dan gagasan (baik yang benar-benar baru maupun lama tapi diperbarui) untuk memajukan Muhammadiyah bermunculan dari kalangan akademisi dan cendekiawan, baik dari mereka yang merasa dirinya punya *attachment* dengan Muhammadiyah atau pun tidak.

Bagi sebagian kalangan, Muhammadiyah merupakan magnit yang dipersepsi bisa mempersatukan berbagai ide dan gagasan di tengah pola hidup kompetitif akibat perputaran roda zaman yang kian cepat dan mengakibatkan banyak orang terpelanting atau hanyut dalam arus yang tidak selamanya konstruktif baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sosialnya.

Ketika berbicara tentang suksesi kepemimpinan, siapa yang akan menggantikan Prof Din Syamsuddin? Banyak sekali kader berkualitas yang sudah menyatakan kesediaan untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah. Sebagian besar cukup mumpuni di bidangnya dengan menyandang gelar Ph.D atau doktor, dan bahkan Guru Besar.

Selain itu, banyak pula kader-kader muda yang belum bersedia menjadi pimpinan, tapi diprediksi akan menjadi pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di masa yang akan datang. Mereka ini para doktor lulusan luar negeri dengan prestasi akademik yang membanggakan, atau para mantan ketua organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah yang sudah melewati proses kaderisasi pada tingkat paripurna.

Tapi, di balik harapan-harapan itu, ada juga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul setelah melihat dan mencermati kenyataan objektif yang berkembang di luar Muhammadiyah. Tiga pekerjaan (amal usaha) utama Muhammadiyah,yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, meskipun secara kuantitatif belum bisa ditandingi organisasi mana pun, namun secara kualitatif relatif tertinggal dari yang "sekadar" dimiliki yayasan atau bahkan perorangan.

Mengenai banyaknya gagasan yang muncul, ada juga kekhawatiran hanya akan menjadi gagasan semata karena belum tersedianya infrastruktur organisasi yang kompatibel dengan gagasan-gagasan tersebut, misalnya gagasan tentang Islam Berkemajuan, atau Indonesia Berkemajuan yang diusung menjadi tema Muktamar Muhammadiyah. Masih ada sejumlah prasyarat berkemajuan yang belum dimiliki Muhammadiyah, misalnya dalam bidang penguasaan media massa baik cetak, elektronik, maupun daring.

Soal siapa pengganti Din Syamsuddin yang dalam aturan main (Pasal 13 ayat [1-2] Anggaran Dasar Muhammadiyah) tidak bisa lagi menjadi Ketua Umum karena sudah dua periode berturut-turut, ini juga masih dalam tanda tanya besar. Memang banyak yang ingin menggantikannya, tapi yang memiliki *leverage* yang setara di tingkat nasional atau internasional, harus diakui belum ada. Apalagi kalau ingin mencari yang lebih.

Untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan progresif. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah perlu melakukan terobosan-terobosan dengan mendirikan lembaga pendidikan percontohan dengan standar mutu yang tinggi untuk setiap jenjang. Misalnya di tiap-tiap provinsi untuk jenjang Perguruan Tinggi/Universitas; di tiap kabupaten untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Atas; dan di tiap Kecamatan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah.

Begitu pun dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah perlu memiliki Rumah Sakit percontohan dengan standar pelayanan yang *excellence.* Atau bisa juga dengan mendirikan Rumah Sakit yang benar-benar gratis untuk masyarakat miskin tanpa harus memiliki asuransi kesehatan terlebih dahulu dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Dalam pelayanan sosial, Muhammadiyah sudah waktunya meninggalkan manajemen panti asuhan yang dikelola alakadarnya. Panti bukan sekadar tempat menampung mereka yang kurang beruntung, tapi untuk menolong dan memberdayakan melalui program-program yang sesuai kapasitas namun memiliki nilai manfaat yang produktif sekaligus kompetitif pada saat sudah keluar dari panti.

Untuk penanganan (korban) bencana alam dan pengelolaan filantropi, peran-peran *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LazisMU) perlu ditingkatkan dan diperluas, setidaknya bisa melebihi kapasitas lembaga-lembaga yang sama yang "hanya" ditangani lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau ormas lain yang jika dibandingkan dengan Muhammadiyah jauh lebih kecil.

Agak sulit diterima akal sehat, Muhammadiyah yang begitu besar, dengan memiliki pedoman hidup Islami dan sejumlah perangkat aturan keislaman yang lain, dalam mengelola zakat yang menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan amil zakat yang dimiliki LSM.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan progresif ini merupakan keniscayaan jika benar-benar ingin menjadikan Muhammadiyah mampu menampilkan Islam Berkemajuan dan atau Indonesia Berkemajuan.

Caranya, antara lain dengan menampilkan kepemimpinan yang kondusif, yang berpikiran maju (progresif) dan terbuka (inklusif), memiliki kapasitas (mumpuni), dan berpengaruh baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika pemimpin yang terpilih tidak memadai, usulan-usulan ini kemungkinan besar hanya akan menjadi sebatas gagasan yang tidak bisa direalisasikan.

Koran SINDO, 3 agustus 2015. Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina

Inspirasi Cabang dan Ranting Unggulan

AHMAD-NORMA PERMATA

SELAMA ini publik sudah cukup *mafhum* dengan kontribusi Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara: mulai dari KH. Ahmad Dahlan, KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Sudirman, Kasman Singodimejo, Ir. Djuanda, hingga Amien Rais, dan A. Syafii Maarif.

Namun sebenarnya kontribusi Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh dan kegiatan berskala besar, melainkan juga ke akar rumput yang jauh dari liputan media. Di seluruh pelosok Indonesia lebih dari dua belas ribu PRM dan lebih dari tiga ribu PCM ikut bergerak melakukan perbaikan dan penataan kehidupan, baik di internal umat Islam maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mendalami dinamika kehidupan akar rumput Muhammadiyah akan memberikan banyak pelajaran yang dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia di tengah perkembangan kehidupan yang makin kompleks.

Pasang Surut Gerakan Akar Rumput

Pada awal sejarah Muhammadiyah, Ranting dan Cabang adalah kelompok-kelompok mandiri yang dibentuk oleh Pimpinan Muhammadiyah, maupun kelompok keagamaan yang sudah ada lalu secara sukarela

bergabung dengan Muhammadiyah, sehingga memiliki corak yang beragam sesuai dengan konteks lokal.

Di beberapa wilayah, Ranting dan Cabang Muhammadiyah berkembang di kalangan para saudagar dan pedagang, seperti di Jatinom-Klaten atau Pekajangan-Pekalongan di Jawa Tengah, serta berbagai daerah terutama di kalangan perantau Minang mulai dari Sulawesi Selatan hingga NTB, bahkan NTT. Di tempat lain, seperti Garut Jawa Barat, atau Lamongan Jawa Timur, Muhammadiyah berkembang di kalangan ulama dan pesantren. Sementara di tempat lain Muhammadiyah banyak dikembangkan oleh para profesional seperti pegawai dan guru.

Namun, karena tuntutan tata-kelola organisasi, Muhammadiyah mulai melakukan berbagai penataan dan standarisasi mulai struktur Ranting (waktu itu disebut "Gerombolan") dan Cabang, kepengurusan dan pemilihan pimpinan (Congres XIX di Minangkabau 1930), hingga penyeragaman pengelolaan dan kurikulum sekolah Muhammadiyah (Muktamar ke 34 di Yogyakarta 1959). Pelan namun pasti kondisi ini menjadikan program dan kinerja Ranting dan Cabang semakin homogen.

Penataan ini menjadikan Muhammadiyah lebih tertib, efektif dan efisien. Namun di saat yang sama melemahkan kemampuan Ranting dan Cabang dalam merespons dinamika dan perkembangan yang muncul dalam konteks lokal. Akibatnya, gerak Ranting dan Cabang lebih banyak menunggu petunjuk dari Pusat, serta melihat program lebih sebagai kewajiban dan bukan kebutuhan.

Puncaknya adalah pergantian rezim Orde Baru tahun 1998, ketika berbagai organisasi Islam baru bermunculan, dan mulai terjadi gesekan dan bahkan konflik, karena ruang geraknya berhimpitan dengan Muhammadiyah. Mulailah tersiar beragam berita dan cerita tentang pimpinan Ranting atau Cabang mengundurkan diri karena tidak sanggup melanjutkan perjuangan, atau mengundurkan diri dari keanggotaan Muhammadiyah karena merasa tidak cocok lagi, bahkan keluar dari Muhammadiyah sambil membawa jamaahnya pindah ke organisasi lain karena ada kesempatan yang lebih menjanjikan.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan di seluruh jajaran pimpinan Persyarikatan, dan menjadi isu yang mengemuka pada Muktamar ke 46 tahun 2005 dan dilanjutkan dengan Muktamar ke 47 di Yogyakarta tahun 2010 dengan pembentukan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) sebagai unit yang mendapatkan mandat menggerakkan potensi dan sumber daya Persyarikatan guna pemberdayaan organisasi di level akar rumput.

Selama kurun 2010-2015 LPCR sudah melakukan berbagai program, mulai dari pendataan dan pemetaan kondisi Ranting dan Cabang, Rakor dan Raker baik nasional, Regional, hingga Wilayah, serta berbagai lokakarya dan pelatihan mulai dari organisasi, kepemimpinan, hingga partisipasi pembangunan Desa. Hasilnya, sudah mulai terlihat peta persoalan sesuai konteks dan karakter daerah dan wilayah, adanya paket-paket program dan kerja sama pemberdayaan termasuk kegiatan terutama antara persyarikatan dan AUM, serta profil Ranting dan Cabang unggulan dan percontohan sebagai model untuk direplikasi, sehingga kejayaan Ranting dan Cabang sebagai ujung tombak Persyarikatan dapat segera dikembalikan.

Inspirasi dari Cabang dan Ranting Unggulan

Menarik untuk dicatat bahwa di tengah kemerosotan kondisi Persyarikatan di akar rumput, sebenarnya masih sangat banyak Ranting dan Cabang yang aktif dan inspiratif dalam keberhasilan menyelenggarakan dakwah, maupun kecerdikan dalam memilih strategi dalam berdakwah.

Sedikit di antaranya, dari arah barat, di Medan Sumatera Utara ada Cabang Sidorame yang berhasil mengembangkan sekolah unggulan, di Jawa Barat ada Cabang Cileungsi Kab. Bogor, Sukajadi Bandung, Ranting Gondrong Kota Tangerang, Sumbersari Kab. Bandung. Di Jawa Tengah ada Ranting Plompong Brebes, Tamanagung Magelang, dan Longkeyang Pemalang; serta Cabang Pekajangan Pekalongan, Gombong Kebumen. Di DIY ada Ranting Nitikan, Warung Boto, dan Jogokaryan. Di Jawa Timur ada Cabang Krembangan Surabaya yang fenomenal dengan dakwah di lingkungan lokalisasi; di Kalimantan ada Ranting Bukit Pariaman Kab.

Kukar, dan Ranting Muhajirin di Banjarmasin. Sementara di Makassar ada Cabang Tello yang berhasil meramu dakwah dengan ilmu manajemen modern.

Masing-masing Ranting dan Cabang unggulan di atas memiliki banyak keunggulan yang layak dijadikan contoh dan inspirasi, bukan hanya oleh kalangan Muhammadiyah, melainkan juga untuk kehidupan berbangsa secara luas, karena keunggulan dan keberhasilan mereka sejatinya mencerminkan dan mewakili misi dan semangat dakwah Muhammadiyah. Paling tidak ada lima poin yang bisa menjadi catatan bersama:

***Pertama*, kesalihan dan keikhlasan**. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin bertopang biaya dan pertarungan kepentingan, yang bahkan juga terjadi di lingkungan Persyarikatan, serta kehidupan agama yang semarak di media massa namun kental dengan aura "pamer" bahkan komersial, pimpinan Ranting dan Cabang menjadi benteng terakhir Muhammadiyah bisa menyandarkan visi tentang amal shalih dan keihlasan. Karena aktivisme di level ini, suka atau terpaksa, orang akan lebih banyak memberi ketimbang menerima. Dapat dikatakan, pimpinan Muhammadiyah di level ini punya peluang lebih besar masuk surga dibanding pimpinan pada level di atasnya.

***Kedua*, kepedulian dan komitmen keberpihakan**. Barangkali untuk peduli dengan penderitaan sesama bukanlah sebuah hal yang sulit, sebagaimana banyak dilakukan para pejabat di iklan layanan sosial atau orang banyak di media-media sosial. Namun untuk peduli sekaligus memiliki komitmen keberpihakan, bukanlah perkara mudah. Misalnya, mungkin untuk saat ini banyak yang ingin bergabung dengan PCM Krembangan Surabaya yang sudah punya reputasi karena berhasil berdakwah di lokalisasi. Namun ketika di awal perjuangan, menghadapi tantangan, cemoohan, dan godaan, hanya segelintir yang sanggup menjalani.

***Ketiga*, kepemimpinan dan ketauladanan**. Dua kata ini sepertinya mulai hilang dari kehidupan kolektif kita sebagai bangsa. Kita punya banyak pejabat, politisi, publik figur, namun miskin pimpinan apalagi tauladan. Dalam kondisi seperti ini Ranting dan Cabang Muhammadiyah

merupakan oase di mana kepemimpinan dan keteladanan menjadi menu keseharian. Dalam kerja sukarela, pimpinan Ranting dan Cabang hanya dapat menggerakkan orang lain jika mereka sendiri melakukannya terlebih dahulu, dan bersedia menanggung bagian lebih banyak—seperti pendiri Ranting Sumbersari yang meski sudah udzur (90+)namun selalu berusaha dapat hadir dalam shalat bersama jamaah. Mendorong para pejabat dan selebrita berkunjung ke Ranting dan Cabang Muhammadiyah barangkali dapat menjadi obat jiwa untuk mengembalikan kesadaran tentang apa itu kepemimpinan dan ketauladanan.

***Keempat*, kemandirian dan keteguhan**. Semua Ranting dan Cabang Muhammadiyah unggulan merupakan komunitas yang mandiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka bukan hanya orang yang ihlas namun juga istiqomah dalam menjalankan perjuangan. Komodifikasi (menukar hal-hal simbolik dengan materi) bukan tradisi di Ranting dan Cabang Muhammadiyah, dan kelompok unggulan di atas meski sudah memiliki pengikut, prestasi dan reputasi, tidak tertarik untuk menukarkannya dengan materi atau posisi, seperti Ketua Ranting Gondrong yang memilih mundur dari jabatan Kepala Desa untuk berkhidmat di Ranting Muhammadiyah.

***Kelima*, melayani dan memberdayakan**. Ranting dan Cabang unggulan Muhammadiyah berkembang bukan dengan mengambil dari lingkungan, melainkan dengan memberi. Cabang Cileungsi lahir di tengah masyarakat yang tidak ramah dengan Muhammadiyah, namun bisa tumbuh berkembang karena mengedepankan kebermanfaatan dengan mendirikan sekolah dan berbagai pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat menerima karena sudah membuktikan bahwa Muhammadiyah hadir untuk kebaikan mereka.

Ranting dan Cabang merupakan mutiara bagi organisasi maupun ruh perjuangan Muhammadiyah, namun masih banyak terabaikan bahkan terlupakan. Dalam catatan LPCR, hampir semua PDM di seluruh PWM tidak memiliki data yang valid dan *update* mengenai kondisi Ranting dan Cabang yang dimiliki. Sehingga bisa dipastikan tidak ada program yang sistematis untuk pembinaan dan pemberdayaan. Ke depan, perlu

menjadi perhatian semua jajaran pimpinan bahwa memperhatikan dan memberdayakan Ranting dan Cabang bukan hanya sebagai program organisasi, melainkan sebagai upaya merawat ruang di mana kita dapat menjernihkan nurani dan menguatkan semangat perjuangan.

Suara Muhammadiyah, Edisi Khusus Muktamar ke-47. Penulis adalah Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH DI ABAD KEDUA

HAJRIYANTO Y THOHARI

MUHAMMADIYAH menggelar Muktamar ke-47, 3-7 Agustus 2015, di Makassar. Muktamar pertama di abad yang kedua usianya ini bertema "Gerakan Pencerahan menuju Indonesia Berkemajuan", sebuah tema yang menggambarkan wilayah kepeduliannya yang mengatasi batas-batas golongan, suku, etnis, dan agama.

Sebagai gerakan yang telah berumur 103 tahun, bukan masanya lagi bagi Muhammadiyah memperkatakan nasionalisme, patriotisme, inklusivisme, dan pluralisme secara verbal dengan segala jargon kenes seperti yang dilakukan anak-anak baru gede. Muhammadiyah tak lagi berada pada fase diskursif, tetapi sudah lama dalam fase praksis. Ketika orang berwacana tentang toleransi, moderasi, keterbukaan, atau pluralisme, Muhammadiyah mendirikan Universitas Muhammadiyah Sorong (9.000 mahasiswa), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Kabupaten Sorong (3.000 mahasiswa), Universitas Muhammadiyah Kupang (4.000 mahasiswa), di mana sivitas akademikanya 55 persen-80 persen beragama Kristiani.

Ketika orang berpidato dengan gagah tentang pentingnya nasionalisme dan patriotisme, Muhammadiyah pada 1918 sudah mendirikan Padvinder Muhammadiyah alias kepanduan Hizbul Wathan (HW), yang namanya

saja artinya adalah Tentara dan Pembela Tanah Air. Kiai Ahmad Dahlan tidak menamakannya dengan Kepanduan Hizbullah atau Hizbul Islam, tetapi Hizbul Wathan. Itu artinya jauh sebelum Sumpah Pemuda (1928) dan Proklamasi Kemerdekaan RI (1945), Muhammadiyah sudah menanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air kepada bangsanya.

Sangat meyakinkan HW secara ideologis sangatlah patriotik dan nasionalistik. Tak heran jika pada masa lalu, yang tidak terlalu jauh, banyak perwira dan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alumnus HW. Fenomena ini adalah sebuah truisme belaka. Pasalnya, Bapak TNI Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah pimpinan HW dan pendiri organisasi Pemuda Muhammadiyah (1938). Dari sudut pandang ini, mungkin dapat dikatakan bahwa dalam tubuh TNI mengalir darah Hizbul Wathan Muhammadiyah dan, sebaliknya, dalam tubuh Muhammadiyah juga mengalir darah patriotisme TNI.

Semangat patriotisme inilah yang menjadikan banyak tokoh Muhammadiyah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Bahkan, Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, sebagai suami-istri, secara bersama-sama menjadi pahlawan nasional. Tidak mengherankan juga jika Muhammadiyah dari dulu banyak melahirkan dan mewakafkan kader-kader bangsa untuk negara ini. Roh cinta Tanah Air HW ini pula yang mengilhami Ir H Djuanda, kader Muhammadiyah, mengeluarkan Deklarasi Djuanda (1957) yang sangat monumental, yang kemudian diterima dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea*/UNCLOS) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982.

Memberi Sebanyaknya

Dalam sepanjang usia seabad ini, Muhammadiyah tak pernah kehilangan *alan* vitalnya. Sebagai gerakan, Muhammadiyah terus melaju menuju cita-citanya untuk mewujudkan cetak birunya berdasarkan pandangan dunianya untuk—meminjam ajaran Pak Harran, guru SD Muhammadiyah Gentong, Belitung, kepada sepuluh muridnya dalam film *Laskar Pelangi*—”memberi sebanyak-banyaknya”. Laksana sebuah lari

maraton, tongkat estafet kepemimpinan boleh saja berganti dan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, tetapi tetap saja Muhammadiyah terus berjalan ke depan, kadang berlari tak pernah henti, untuk memberi dan mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara.

Dalam rangka itulah, Muhammadiyah terus berkembang dan kini telah menjelma menjadi gurita raksasa gerakan sosial Islam. Volume aktivitas pergerakan Muhammadiyah telah menjadi sedemikian besar dan mencakup wilayah yang sedemikian luas. Muhammadiyah kini telah menjadi, meminjam kata-kata Tamim Ansary dalam *Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes* (2009), sebuah narasi besar: cerita atau deskripsi besar dari suatu rangkaian kejadian dan peristiwa.

Sebagai ahli waris tradisi Muslim, lagi-lagi meminjam Tamim Ansary, Muhammadiyah memang dipaksa mencari makna sejarahnya dalam kekalahan: kekalahan negerinya dari Belanda yang memecundangi negeri ini selama—benar atau salah, mitos atau realitas—350 tahun dan kekalahan dari apa yang disebut dengan dunia Islam atas dunia Barat, baik secara ekonomi, politik, dan militer, maupun peradaban sampai hari.

Muhammadiyah mencari makna sejarahnya bukan dalam kemenangan negerinya, Indonesia, juga bukan dalam kemajuan dari apa yang disebut dunia Islam itu sendiri. Meski demikian, Muhammadiyah, toh, tetap menjadi pemain utama di gelanggang sejarah Indonesia dan dunia Islam, betapa pun sedemikian tak adanya kata terakhir ini dalam kenyataan.

Muhammadiyah kini telah menjelma menjadi sebuah gerakan raksasa yang berwajah banyak dalam rangka merekonsiliasikan keimanan dan tindakan nyata melalui banyak aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan peradaban. Semua itu adalah proyek-proyek sosial untuk menjembatani kesenjangan antara Islam dalam cita-cita (*ideal Islam*) yang serba anggun dan Islam sejarah (historical Islam) yang serba terbelakang. Mengutip kata-kata Dr Alfian dalam disertasi doktornya, *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During the Ductch Colonial Period 1912-1942* (1969), Muhammadiyah sebagai gerakan sosial bertujuan memodernisasi umat Islam agar terangkat dari

ketertinggalannya sehingga mencapai kedudukan yang terhormat dan posisi terpenting di negara ini.

Muhammadiyah memiliki cetak biru sebagai narasi besar untuk memajukan umat dengan tawarannya yang oleh Ahmad Dahlan disebut sebagai "Islam yang berkemajuan". Sangat meyakinkan bahwa untuk mewujudkan cetak biru itu, gerakan ini memerlukan bukan hanya kepemimpinan dan kader-kader yang berkualifikasi tinggi yang siap terjun di semua arena kehidupan, melainkan juga strategi kebudayaan.

Strategi kebudayaan penting karena ada kecenderungan Muhammadiyah mengalami kemiskinan instrumen budaya untuk memperkokoh kohesivitas gerakan. Tanpa instrumen budaya, Muhammadiyah tak bisa menghadapi problem dalam memobilisasi gerakan secara sistematis sekaligus sistematisasi yang dinamis. Sebuah narasi besar harus dihela oleh orang yang sungguh-sungguh paham dan menghayati gerakan ke arah mana hendak menuju.

"Noblesse Oblige"

Kini kader-kader Muhammadiyah harus tampil ke depan dengan gigih dan ambisi yang besar. Kader Muhammadiyah harus tetap berpikir dalam wawasan kebangsaan dan terus mengintegrasikan diri dalam arus kebangsaan secara paripurna.

Jangan melayani wacana yang menghabiskan energi untuk meratapi kontestasi dan konflik ideologi prolog dan epilog formasi ideologi nasional tahun 1940-an sampai 1950-an. Kader Muhammadiyah harus bekerja keras untuk menjamin tegak dan utuhnya republik ini dan memantapkan dasar-dasar konstitusional Republik Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Harus disadari bahwa utuhnya Indonesia bukanlah sesuatu yang *taken for granted*, melainkan harus terus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan terencana secara sistematis. Betapa benarnya hal itu, terlebih lagi jika kita melihat fakta tambahan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bahkan mungkin yang paling majemuk di dunia. Pluralisme yang multidimensional, tersegmentasi, dan terfragmentasi ini telah membentuk

mosaik keindonesiaan yang sangat indah dan memesona, tetapi sekaligus rawan akan skisma manakala tidak dikelola dengan hati-hati.

Pemahaman bahwa Indonesia ini majemuk atau pluralis perlu dimajukan lagi. Jika sebelumnya pluralisme hanyalah kesadaran bahwa kita terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda, kini harus diberi pemahaman baru, yaitu menjadikan pluralisme sebagai prosedur hidup bersama secara nyaman. Dengan menjadikan pluralisme sebagai pandangan hidup seperti ini, diperlukan strategi kebudayaan yang jitu. Sebagaimana kata sebuah *adagium*, *noblesse oblige* (dalam kedudukan yang tinggi ada tanggung jawab), demikianlah Muhammadiyah: tidak boleh lari dari tanggung jawab dalam proyek panjang mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Dalam konteks dan perspektif ini, Muhammadiyah tidak boleh menghabiskan energi untuk melayani polemik-polemik sektarian warisan lama pasca Perang Shiffin (657 M) dengan *Tahkim*-nya itu. Alih-alih Muhammadiyah harus tampil ke depan sebagai perekat persaudaraan kebangsaan dan peredam konflik primordial dan sektarian dengan amal-amal nyata (*da'wah bi lisani 'l-hal*).

Dalam hal ini pun Muhammadiyah harus tetap mempertahankan diri sebagai kekuatan nyata dengan karakter lama, "sedikit bicara banyak kerja", yang menjadi semboyan kepanduan HW itu. Semoga!

KOMPAS, 03 Agustus 2015. Penulis adalah ***Wakil Ketua MPR 2009-2014***

EPILOG (1)

MASA DEPAN MUHAMMADIYAH

M. AMIEN RAIS

PERSYARIKATAN kita dinamakan Muhammadiyah tentu dengan tujuan jelas, yakni menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dan tarikh SAW sebagai rujukan baku perjuangan Muhammadiyah. Pada dasarnya kita memiliki dua uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS (QS al-Ahzab [33]: 21 dan al-Mumtahanah [60]: 4).

Nabi Ibrahim sebagai Bapak Monotheisme mengemban misi penegakkan tauhid dan menunaikan tugas memimpin kemanusiaan (QS al-Baqarah: 124). Sebagai khalilullah, Nabi Ibrahim melakukan perlawanan terhadap Namrud yang merupakan simbol kemusyrikan dan kezaliman.

Tauhid yang ditancapkan Nabi Ibrahim pada gilirannya diikuti tiga agama samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tauhid mencapai kulminasi pada agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW sebagai nabi pamungkas dan penyempurna millah Ibrahim, kita jadikan satu-satunya pemimpin yang mutlak harus kita ikuti. Komitmen kita menjadi pengikut perjuangan Rasullullah bersifat total. Bahkan, sayap perempuan Muhammadiyah dinisbatkan dengan salah satu istri tercinta Nabi, yakni ʻAisyah dan jadilah ʻAisyiyah.

Kini Muhammadiyah menapaki abad kedua kehidupan perjuangannya. Satu hal yang perlu kita ingat, sejarah terus berubah, bergerak ke depan

dan Al-Quran memberi tahu bahwa nasib manusia, organisasi, dan bangsa serta negara berputar secara *cakra-manggilingan* (QS Ali Imran: 140).

Wajib kita syukuri bahwa Muhammadiyah mampu melewati satu abad perjuangan dengan sehat, sukses, dan tidak menunjukkan gejala sakit maupun melemah karena usia. *Syajarah thayyibah* atau pohon indah Muhammadiyah tetap segar, makin banyak buah amal salehnya sepanjang masa dan dinikmati segenap bangsa (QS Ibrahim: 24).

Kita bersyukur punya Al-Quran dan sunnah sahihah yang bersifat abadi dan mampu memberikan pijakan kokoh untuk menjawab segala tantangan itu. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 6 disebutkan, maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Ketika Muhammadiyah didirikan pada 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M, bangsa Indonesia masih berada dalam zaman kolonial, belum merdeka, sehingga konteks historis, sosial, politik, dan ekonominya sangat berbeda dengan zaman sekarang, 106 tahun (sesuai dengan kalender Hijriyah) atau 103 tahun (sesuai kalender Masehi) kemudian.

Muhammadiyah pernah mengalami zaman kolonial, revolusi, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan sekarang zaman reformasi atau pasca-reformasi, dan entah apalagi di masa depan. Tujuh Presiden Indonesia dan visi politik serta ekonomi nasional boleh bergonta-ganti, tapi kapal Muhammadiyah terus melaju.

Konteks Global

Bila kita bicara masa depan Muhammadiyah, tidak bisa tidak kita harus meletakkan Muhammadiyah dalam konteks Islam internasional karena hakikatnya umat Islam adalah umat yang satu. Para musuh Islam pada tataran global atau mondial sejak dulu menerapkan strategi dasar yang sama, sekalipun bentuk permusuhannya berubah. Kita insya Allah

tidak akan pernah terkecoh bilamana kita selalu mencari petunjuk abadi dari Al-Quran.

Banyak orang awam menyangka dan banyak pula intelektual Muslim mengira, setelah usai Perang Dunia II, kekuatan Barat yang diikat oleh Judeo-Christian Ethics tidak mungkin lagi melancarkan invasi militer, politik, ekonomi, dan *ghazwul fikri* pada dunia Islam. Persangkaan itu keliru besar. Kekuatan dajal dari Barat itu datang kembali dengan invasi ekonomi, *sosio-kultural*, dan proses westernisasi pendidikan, gagasan neolib dan neocon ke arah kaum terpelajar Muslim.

Hasilnya, muncul barisan *westomaniac*, manusia dengan pikiran yang tergila-gila pada apa saja yang datang dari Barat dan memandang rendah khazanah Islam sendiri. Malahan secara sangat ironis muncul kelompok Muslim Zionis, yakni pembela utama zionisme yang beragama Islam.

Sejak usai Perang Dunia II sampai dekade 1970-an, tidak banyak orang percaya kekuatan imperialisme Barat yang dulu berslogan *Gospel*, *Gold and Glory* akan kambuh, yaitu melakukan kembali pendudukan militer atas negara yang akan dijajah lagi, walaupun bukan dengan cara persis sama.

Amerika Serikat melakukan pendudukan militer kembali. Sejak 2003 hingga kini, Amerika Serikat tetap bercokol di Irak dengan segala macam alasan, juga di sebagian Afghanistan, dan militer Amerika berkeliaran di seantero dunia Islam dengan berbagai dalih. Bahkan, beberapa negara Arab menyediakan pangkalan udaranya bagi Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengagresi Irak, Afghanistan, Libya, dan lain-lain.

Ketika dunia Arab sebagai bagian sangat penting dari dunia Islam disapu Musim Semi Arab yang bergulir sejak 2010, rakyat awam di negeri itu berharap hilangnya kekangan otoriter para penguasa Arab, berganti yang menghargai hak asasi manusia. Juga diharapkan muncul proses demokrasi yang egaliter untuk membentuk pemerintahan yang baru dan membersihkan korupsi serta ekonomi diatur kembali dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Karena nilai-nilai Islam telah berperan besar dalam mendorong proses perubahan itu, ada yang menilai bangsa-bangsa Arab sedang menikmati musim semi Islami. Namun, musim semi Arab atau musim semi Islami

yang dimulai dari Tunisia itu kini telah berbalik arah dan pada umumnya gagal. Musim semi Arab telah berubah jadi musim dingin yang gelap, mencekam, dan menakutkan.

Negara-negara Arab yang disapu cita-cita musim semi Arab telah terbenam perang saudara, pertumpahan darah, pembonekaan para raja, presiden, sultan, dan amir oleh kekuatan penjajah Barat. Israel yang kolonialis, rasialis, dan Zionis makin kuat dan menjadi ujung tombak kekuatan Barat yang mengibarkan Judeo-Christian Ethics.

Sebab kegagalan musim semi Arab itu cukup banyak. Satu sebab terpenting adalah ketidakmampuan para pemimpin mereka membebaskan diri dari cengkeraman asing secara politik, diplomatik, ekonomi, dan hankam. Mentalitas ketergantungan itu sudah berurat-berakar sehingga mereka tidak sanggup berdiri dan berjalan tanpa dibimbing master dan mentor politik, ekonomi, dan militer mereka.

Saya yakin pelemahan dan bahkan penghancuran negara-negara Arab Muslim di Timur Tengah itu merupakan bagian dari strategi dan skenario global kekuatan Barat yang belum pernah sembuh dari penyakit imperialisme dan kolonialisme lama. Seperti penyakit kambuhan, imperialisme kambuhan beraksi lebih ganas dan destruktif.

Keterbelakangan Umat

Keinginan Muslimin dunia pada awal abad 15 Hijriyah menyaksikan kebangkitan Islam di abad ini, kini tampak kandas, paling tidak untuk sementara. Dunia Islam didera berbagai masalah, seperti perang, kemiskinan dan pengangguran, kekuasaan zalim dan otoriter, konflik antaretnik, penegakan hukum yang diskriminatif, buta huruf yang masih sangat luas, dan lainnya.

Dibandingkan dunia Barat, kelihatan dunia Islam lebih lemah, lebih tidak terdidik, lebih miskin, dan lebih terbelakang. Padahal, doa sapu jagat Islam memohon kepada Tuhan YME agar dikaruniai kebahagiaan dunia akhirat dan dilindungi dari api neraka (QS al-Qashash: 77).

Salah besar kalau ada orang beriman berpendapat tidak mengapa di dunia menjadi manusia yang lemah, miskin, bodoh, dan tersisih menjadi pelengkap penderita, tetapi esok akan bahagia di akhirat. Ini gejala *self-defeatism*, mengaku kalah dan jadi pecundang tanpa berani bertanding, dan memilih kehinaan daripada kemuliaan. Agaknya akhlak ini dikutuk agama karena hakikatnya menghina agama itu sendiri.

Sayangnya, sebagian fakta dan angka belum berpihak pada dunia Islam. *UN Report on Human Development Index* tahun 2009 mencatat, mayoritas negeri Muslim berada pada urutan atas merajalelanya korupsi. Dalam indeks pembangunan manusia yang diukur lewat harapan hidup, melek huruf, dan penghasilan berbagai bangsa, mayoritas bangsa-bangsa Muslim berada di urutan menengah bawah dan urutan bawah.

Lebih dari 30 negara di dunia Islam, hanya ada sekitar 500 universitas, sementara di Amerika Serikat ada 5.758 universitas, bahkan di India 8.407 universitas. UNDP pada 2004 mencatat, dari 500 universitas terkemuka, tak ada satu pun dari dunia Islam.

Di Barat yang mayoritas Nasrani, jumlah melek huruf 90 persen, sementara dunia Islam baru 50 persen. Yang selesai sekolah dasar di Barat 90 persen, di dunia Islam 50 persen. Di Barat 40 persen penduduknya mengenyam perguruan tinggi, di negeri-negeri Muslim hanya 2 persen. Yang pertama mengeluarkan biaya R&D 5 persen, yang kedua hanya 0,2 persen. Apalagi bila kita bicara perbandingan kekuatan militer Barat dan dunia Islam, kesenjangan itu kian lebar.

Mengapa sekarang umat Islam menjadi terbelakang? Pasti bukan karena Islam itu sendiri. Islam sudah terbukti menggelar revolusi kemanusiaan yang paling dahsyat sepanjang sejarah ketika Nabi Muhammad SAW memimpin transformasi zaman jahiliyah dunia Arab menjadi zaman pencerahan segala bidang dalam tempo satu generasi.

Islam juga melahirkan Khilafah 'Abbasiyah selama separuh milenium yang menghadirkan puncak ilmu pengetahuan dan peradaban. Islam juga memunculkan imperium terbesar sepanjang sejarah, yakni Imperium Osmaniah. Khilafah Osmaniah ini berlangsung sekitar 7 abad (1299-1923) dan menjadi penghubung utama peradaban Timur dan Barat. Ia berakhir

pada 1923 dengan meninggalkan kemegahan sejarah Islam di beranda Eropa.

Dewasa ini kita menyaksikan pemikiran dan gerakan Islamofobia. Mereka yang membenci Islam demi membenci tanpa alasan apa pun dinamakan Islamophobes. Manusia pembenci Islam ini di Barat maupun di Timur semakin bertambah dengan menggunakan media cetak, media sosial, dan ceramah di kampus dengan tujuan tunggal: mencemarkan nama baik Islam, melakukan disinformasi dan distorsi, sekaligus demonisasi Islam agar agama samawi terakhir ini berwajah seram, seolah-olah pendendam, dan menyukai kekejaman.

Di Amerika Serikat saja ada 46 lembaga yang melancarkan serangan Islamofobia. Para Islamophobes di AS itu terdiri atas akademisi, orientalis, wartawan, ketua lembaga studi, pendeta, dan lainnya. Di antara mereka ada juga bekas pegiat sosial Islam, penulis, dan aktivis LSM yang sudah murtad atau meninggalkan Islam.

Jangan lupa, di Indonesia ada juga lingkaran Islamofobia itu, meskipun omongan dan aksinya tidak sejelas kelompok Islamofobia Barat. Saya melihat dengan kasihan ada sejumlah aktivis Muslim, junior dan senior, tampak menikmati pujian yang datang dari lingkaran Islamophobes Indonesia.

Kondisi Muhammadiyah

Kita harus terus berpikir membuat peta jalan perjuangan persyarikatan di masa depan. Berikut beberapa realitas yang perlu kita cermati tentang Muhammadiyah. Pertama, semangat beramal saleh di kalangan persyarikatan agak lesu. Banyak bangunan Muhammadiyah yang sudah diresmikan peletakan batu pertamanya, setelah beberapa tahun bangunan itu tak kunjung selesai. Sebab utamanya, pembiayaan yang macet atau berjalan sangat pelan. Kedua, proses kaderisasi di Muhammadiyah berjalan cukup lamban. Makin jarang terdengar latihan kepemimpinan Darul Arqam di daerah. Ketiga, kecintaan pada Al-Quran masih terlihat belum menyeluruh di kader dan pimpinan.

Keempat, kantor persyarikatan cukup megah tetapi sering kali lengang. Sedikit aneh, gerakan tajdid tidak sering menyaksikan para kadernya bermusyawarah memecahkan berbagai masalah.

Kelima, semboyan tidak ada kejayaan Islam tanpa dakwah dan tidak ada dakwah tanpa pengorbanan agaknya tidak bergaung lagi di kalangan keluarga besar Muhammadiyah.

Keenam, semangat menjalankan ibadah makhdhah, seperti shalat berjamaah di masjid terasa sepi. Masjid-masjid Muhammadiyah tak lagi jadi pusat bertemunya pimpinan dan kader serta anggota Muhammadiyah.

Ketujuh, kecintaan sebagian pimpinan Muhammadiyah pada sekolah sendiri sering kali basa-basi. Malah acap kali kita saksikan sebagian tokoh atau kader Muhammadiyah baru mau menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah setelah ditolak ke sana kemari.

Kedelapan, semangat berjuang atau berjihad tampak melempem. Tak sedikit aktivis kita yang mengeluh kalau harus turun ke bawah, membina persyarikatan di tempat yang relatif jauh dan sedikit sulit perjalanannya.

Kesembilan, sering kali kita lihat fenomena aneh, sebagian pimpinan Muhammadiyah tidak begitu cinta dan bangga dengan Muhammadiyah. Mungkin agak mirip dengan sikap sebagian kiai pimpinan pesantren yang tidak bangga dan cinta dengan pesantrennya.

Kesepuluh, kadang kala ada fenomena aneh, sebagian pimpinan Muhammadiyah menderita penyakit rendah diri. Islam tak pernah mengajarkan umatnya bersikap rendah diri (kompleks inferioritas) maupun jemawa dan percaya diri berlebihan (kompleks superioritas).

Saya ingat rumus Pak AR, kalau pemimpin Muhammadiyah bertemu pejabat negara setinggi apa pun harus wajar-wajar saja. Tidak perlu membungkuk sampai nyaris tiarap, tetapi juga tidak perlu berkacak pinggang.

Tentu masih banyak potret Muhammadiyah masa kini yang dapat kita bicarakan, yang menggambarkan betapa Muhammadiyah agak lesu darah, kurang bertenaga dalam menggerakkan amal saleh, cenderung dijangkiti penyakit malas dan kurang percaya diri. Pertanyaan pentingnya, apa yang mesti kita kerjakan agar usaha *izzul Islam wal muslimin* kembali meriah, penuh syiar, bertenaga, dan lebih efektif?

Beberapa Langkah Baru

Mengingat cukup besarnya tantangan, kita perlu membuat langkah penting. Pertama, menegaskan dan memperluas doktrin perjuangan kita. Dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam, selama ini Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid melalui amal usaha, program tertentu.

Sudah tiba saatnya bagi Muhammadiyah juga mengembangkan *da'wah al-amru bil 'adli* dan *an-nahyu 'anil dhulmi*, yakni berjuang menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman (QS an-Nahl: 76 dan 90). Barangkali, *al-amru bil ma'ruf* dan *an-nahyu 'anil munkar* lebih menitikberatkan pada kehidupan moral atau akhlak. Sedangkan, *al-amru bil 'adli* dan *an-nahyu 'anil dhulmi* lebih menyangkut persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Alangkah baiknya bila dua doktrin Al-Quran ini kita jadikan motivasi pokok pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Dengan perhatian yang lebih tajam lagi pada persoalan kezaliman sosial, ekonomi, politik, dan hukum, kiprah Muhammadiyah akan menjadi lebih relevan, lebih terasa, dan lebih menggigit.

Menurut Nabi Muhammad SAW, ketika kita memberantas kemunkaran caranya harus makruf maka ketika kita memberantas kezaliman caranya pun harus adil. Tidak boleh memberantas kemunkaran dan kezaliman malahan memunculkan kemunkaran dan kezaliman baru.

Kedua, selama ini sebuah kata yang indah, penuh makna, dan dapat menghidupkan (*ihyaa*) kaum beriman, yakni kata jihad, jarang kita bahas dan dalami di berbagai latihan kepemimpinan. Kata jihad dalam berbagai bentuknya di Al-Quran disebut 41 kali sementara zakat hanya 31 kali. Demikian pentingnya jihad dalam Islam hingga ada sebagian ulama yang mengusulkan agar jihad dijadikan rukun Islam keenam.

Secara sangat padat dan singkat, jihad berati *badhlul juhdi* atau kerah total dari segenap kesanggupan untuk memperbaiki keadaan dari kezaliman ke keadilan, dari masyarakat yang bodoh ke yang berilmu, dari masyarakat yang sakit ke yang sehat, dari penjajahan ke kemerdekaan, dari ketergantungan ke kemandirian, dari kegelapan ke pencerahan, dan seterusnya.

Jihad dalam bidang apa pun pasti memerlukan pengorbanan harta (untuk logistik) dan pengorbanan jiwa (manusia yang bertanggung jawab mengatur strategi, program, dan rangkaian aksi). Tidak ada jihad tanpa pengorbanan *amwal* dan *anfus*.

Cerita tentang KH Ahmad Dahlan pada suatu pagi buta memukul kentongan sehingga menggegerkan warga Kauman perlu kita ambil moral lesson-nya. Warga Kauman menyangka ada pencurian atau musibah besar. Ternyata KH Ahmad Dahlan mau melelang jam dinding, perhiasan istrinya, dan perabotan rumah tangga untuk membiayai amal saleh (dakwah) Muhammadiyah. Jihad dengan harta bukan hanya diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah, tetapi dilaksanakan dalam perbuatan nyata.

Ketiga, semangat jihad yang lembek. Kadang kala kita menemukan kader Muhammadiyah yang terlalu mudah mengkritik sesama Muslim dengan tuduhan bid'ah. Dengan segala kerendahan hati, kita harus ingat, pada dasarnya ada dua jenis bid'ah atau *ibtida'*. Yang pertama *bid'ah bi ziyadah*, yakni menambah-nambah apa yang tak diajarkan. Kedua, *bid'ah bi nuqshan*, yakni mengurang-ngurangi apa yang diajarkan.

Daripada kita mencari kesalahan pihak lain, lebih baik kita bertanya, "Jangan-jangan kita tanpa sadar melakukan *ibtida' bi nuqshan*?" Misalnya, ajaran jihad yang demikian sentral dalam Al-Quran maupun sunah Nabi cenderung kita lupakan?

Keempat, posisi yang diambil Muhammadiyah, cukup jelas dan mantap, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang berpegang teguh pada *kalimah thayyibah* sehingga memunculkan *syajarah thayyibah* yang memberi manfaat ke alam sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Ada pula yang berpegang pada *kalimah khabitsah* dan melahirkan *syajarah khabitsah*, bagaikan pohon buruk yang tumbang menjadi penghalang kebaikan.

Kelima, Al-Quran memberi petunjuk bahwa kaum Muslim harus memerangi kaum musyrikin secara *kaaffah*/ (menyeluruh, totalitas) sebagaimana mereka memerangi kaum Muslim secara kafah (at-Taubah: 36). Perintah Al-Quran agar kita menghadapi serbuan kaum musyrikin secara kafah itu dalam konteks perang yang sedang berjalan.

Jangan disalahpahami, seolah-olah kita harus menyerbu kaum musyrikin dalam keadaan damai, tanpa sebab, sehingga kita disuruh Al-Quran membuat gara-gara. Sangat jauh dari hal itu. Yang penting kita pahami, geliat dan postur yang diambil kaum musyrikin itu harus kita wapadai supaya kita tidak mudah terkejut karena tak membaca langkah mereka yang sama sekali tidak pernah kenal lelah.

Hanya ada lima kata kafah dalam Al-Quran dan ada dua kata itu dalam satu ayat. Dari petunjuk Al-Quran ini, bahwa orang-orang musyrik dalam arti luas menggunakan totalitas kemampuan mereka untuk meredupkan cahaya Allah. Musuh-musuh kebenaran, sejak dulu sampai kapan pun, akan secara total menggunakan organisasi, koordinasi yang rapi, dan pembagian kerja untuk melemahkan kaum pendukung kebenaran dan keadilan.

Keenam, mengingat masalah dakwah terus bergerak makin kompleks, semakin mendesak perlunya *think tank* atau semacam pusat pemikiran yang dilembagakan, apakah di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid atau berdiri sendiri. Tugasnya menyiapkan pemikiran yang relatif solid dan meyakinkan, tentu lewat proses R&D agar Muhammadiyah bukan saja memiliki kemampuan *anticipation of change*, tapi juga *management of change.*

Kita bersyukur pada Allah makin banyak barisan intelektual muda dan ulama muda yang dapat dikerahkan untuk keperluan penajaman pemikiran dan doktrin perjuangan Muhammadiyah. Kita juga dapat mengajak intelektual dan ulama dari kalangan UII (Umat Islam Indonesia) yang lain.

Ketujuh, kita menghadapi sumber informasi yang tak seimbang karena informasi yang kita hadapi setiap hari berjalan searah, yaitu dari pihak yang kuat menyasar ke pihak lemah. Kuat dalam arti kemampuan finansial, kecanggihan jaringan, dan konsistensi pencapaian target atau tujuan, serta seni manipulatif yang cukup halus dan bergerak perlahan, tapi pasti. Dalam peperangan informasi, dunia Islam banyak tersudut.

Bila kita tidak kritis menyaring informasi, bukan mustahil kita akan menari-nari sesuai gendang orang lain. Pergeseran opini yang kita alami bisa bergerak sejengkal demi sejengkal, tapi akhirnya kita terseret jauh tanpa disadari. Untuk menghindari ini, berhenti menari mengikuti gen-

dang orang lain. Kita harus waspada, cerdas, dan paham, ke arah mana lagu yang ditabuh pihak lain.

Kedelapan, hubungan sedikit pelik yang akan selalu bersama Muhammadiyah adalah dengan pemerintah. Pada masing-masing zaman, hubungan itu bisa berbeda dalam nuansa, bahkan posisi. Tetapi, satu hal yang jelas, keduanya saling membutuhkan.

Ada ratusan ribu murid dan mahasiswa ditampung dan dididik di ribuan SD, SMP, dan SLTA serta ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah. Setiap hari ada ribuan anggota masyarakat yang sakit pergi ke rumah sakit atau klinik Muhammadiyah. Dan, ada ribuan anak yatim piatu yang diasuh di ratusan panti asuh yatim Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, dididik, disantuni secara sangat manusiawi hingga berangkat dewasa.

Muhammadiyah telah membantu meringankan tugas konstitusional pemerintah atau negara. Sebaliknya, Muhammadiyah juga tetap memerlukan bantuan pemerintah. Dalam pendidikan, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah/'Aisyiyah masih perlu akreditasi pemerintah.

Kesembilan, sedikit *mau'idhah hasanah* atau saling wasiat saya sampaikan (QS al-'Asr: 1-3) untuk kebaikan persyarikatan kita pada masa datang. Pada masa silam, persyarikatan pernah mencoba meretas usaha ekonomi. Kita akuisisi sebuah bank dengan proses kurang teliti.

Ternyata, bank yang kita akuisisi lewat pembagian saham baru yang bernama Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) menjadi bank bermasalah. Hampir saja bank bermasalah itu menyeret Muhammadiyah ke persoalan berat, tapi Allah masih berkenan menolong Muhammadiyah sehingga kita lolos dari kemelut.

Kesepuluh, apresiasi dibarengi rasa syukur dan harapan dibarengi doa. Satu langkah cerdas Mas Din Syamsuddin adalah Jihad Konstitusi. Jihad Konstitusi ini autentik dan orisinal dari Din.

Ditinjau dari sudut pandang agama ataupun asas manfaat, jihad ini sungguh tepat dan efektif. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din mencatat ada 100 UU yang dianggap melenceng dari UUD. Muhammadiyah berjuang untuk meluruskannya lewat gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sudah ada 4 UU yang dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dua di antaranya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dua UU ini lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri.

Akhirnya saya berharap, Muhammadiyah yang sekarang lebih baik dari Muhammadiyah masa silam dan Muhammadiyah masa depan akan lebih baik dari Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah adalah kumpulan hamba Allah yang beriman yang berpegang teguh pada hukum Allah dan menjauhi hukum jahiliyah.

Mari, kita terus meningkatkan tahlilan kita pada tiga level. *Tahlilan bil qalbi* (dengan hati), *tahlilan bil lisan* (dengan ucapan), dan lebih penting lagi *tahlilan bil arkan* (dengan anggota badan) dalam wujud amal saleh. Yang terakhir ini paling penting karena dengan menjalankan amal saleh tanpa henti, kita insya Allah dapat masuk golongan as-shalihin. Amin.

Republika, 3, 4, 5 Agustus 2015. Penulis adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah (1995-1998)

Epilog (2)

Antara Pembantu dan Penentu

Ahmad Syafii Maarif

BILA tidak ada aral melintang, Muhammadiyah akan menyelenggarakan Muktamarnya yang ke-47 di Makassar pada 3-7 Agustus 2015. Berbagai persiapan telah dilakukan, sehingga diharapkan Muktamar akan berjalan lancar dan produktif, sekalipun bendahara panitia Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc. telah wafat pada 24 April 2015 di RS PKU Gamping, Yogyakarta. *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*, semoga sahabat kita ini mendapatkan *husnu al-khâtimah* di akhir hayatnya, amin. Kematian Dasron memang sebuah kehilangan besar bagi Muhammadiyah, tetapi agama mengajarkan agar orang tidak boleh larut dalam suasana duka, betapa pun berat dirasakan.

Muhammadiyah dibentuk pada 8 Dzulhijjah 1330/18 Nop. 1912 di kampung Kauman, Yogyakarta. Dalam usianya yang sudah melampaui satu abad dengan segala kebesaran dan kelemahannya, **Resonansi** ini ingin berbagi dengan para pembaca untuk melihat dengan tenang, tetapi kritikal tentang perjalanan gerakan Islam modern ini dalam perspektif kebangsaan dan peran apa yang mungkin dimainkan Muhammadiyah di dalamnya. Di ranah kerja-kerja sosial-kemanusiaan dan pendidikan, Muhammadiyah terus saja berekspansi dalam bentuk amal-usahanya tanpa kenal lelah. Ketika saya ceritakan kepada kaum intelektual Hindu di New Delhi beberapa tahun yang lalu tentang kiprah Muhammadiyah ini, mereka hanya terkagum-kagum mendengarnya, mengapa bisa seperti itu. Saya tidak punya catatan

lengkap sudah berapa pula jumlah tesis dan disertasi yang ditulis para sarjana Indonesia dan sarjana asing tentang gerakan Islam ini.

Pada 18 November 2015 ini, genaplah usia Muhammadiyah menjadi 103 tahun. Tetapi jika kalender hijriah yang dipakai patokan, maka usia gerakan Islam ini sudah memasuki angka 106 tahun (sekarang 1436 H.). Dalam AD (Anggaran Dasar) pertama tahun 1912, Artikel 2a, maksud Muhammadiyah didirikan dirumuskan dengan sederhana, sesuai dengan kondisi saat itu, yaitu: "menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wassalam* kepada penduduk Bumiputera di dalam residensi Yogyakarta." Radius yang hendak dijangkau oleh gerakan ini belum melebihi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini.

Dua tahun kemudian dalam AD 1914, Artikel 2a rumusan tujuan mengalami perubahan yang cukup berarti menjadi: "memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Igama Islam di Hindia Nederland," sebuah langkah revolusioner, sekalipun saat itu format Indonesia merdeka belum terbayangkan. Barangkali bermula dari AD 1914 inilah kemudian Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam Berkemajuan, bukan gerakan *status quo* yang anti kemajuan. Salah satu syarat untuk maju adalah agar orang bersedia membuka diri seluas-luasnya dengan belajar dan belajar, di mana pun, ke mana pun, dan kepada siapa pun di muka bumi ini. Ahmad Dahlan, pendiri gerakan, tidak segan-segan belajar pada pihak missi dan zending asing, demi memajukan pendidikan, pengajaran, dan pelayanan sosial-kemanusiaan.

Bahkan untuk membangun sebuah organisasi modern, Muhammadiyah pada awal dasa warsa kedua abad ke-20 banyak dibantu oleh BU (Budi Utomo) yang memang dipimpin oleh mereka yang telah mendapat pendidikan Barat. Pada tahun 1909 Ahmad Dahlan bahkan telah menjadi anggota BU itu bersama beberapa pengikutnya. Ahmad Dahlan juga menjadi pimpinan Sarekat Islam Yogyakarta di awal berdirinya.

Dalam pergaulan Dahlan terkesan sangat longgar, tidak mau dibatasi oleh sekat-sekat sosial, agama, dan bahkan oleh sekat-sekat politik. Demikianlah, sekitar tahun 1915, di kampung Kauman Yogyakarta, Dahlan pernah menerima tamu tokoh-tokoh ISDV (Indische Sociaal-Demo-

cratische Vereniging/Himpunan Sosial Demokratik Hidia) yang beraliran kiri, dipimpin oleh H.J.F.M. Sneevliet, penyebar marxisme di Hindia Belanda, bersama Adolf Baars, Semaun, dan Darsono. Baars adalah editor *Het Vrije Woord* (Dunia Bebas), media ISDV, mulai terbit bulan Oktober 1915. Kedatangan tokoh-tokoh ini dari Semarang adalah untuk menjelaskan tujuan ISDV itu kepada pimpinan Muhammadiyah.

Adaptasi Perubahan dan Penentang Arus

Bagi Dahlan, menerima tamu-tamu kiri terkesan biasa saja, tanpa beban apa-apa, sekalipun kemudian ada beberapa priyayi anggota Muhammadiyah yang mengundurkan diri sebagai protes atas kedatangan mereka itu. Tidak kurang dari dua setengah jam Semaun dan Darsono menjelaskan paham ISDV itu kepada pimpinan Muhammadiyah. Saya belum menemukan sumber apakah dalam pertemuan ada dialog antara kedua belah pihak. Tetapi yang pasti, bagi ISDV Muhammadiyah perlu didekati, sebagaimana yang dilakukannya terhadap Sarekat Islam. Bedanya, beberapa tokoh Sarekat Islam Semarang terpikat dengan marxisme, sementara Muhammadiyah tidak beranjak dalam pendiriannya.

Sikap terbuka ini terus berlanjut sampai hari ini, sekalipun bisa saja terdapat sekelompok kecil warga Muhammadiyah yang tidak nyaman dengan suasana ini, mungkin karena khawatir terseret arus. Hanya saja saya belum mendapat informasi tentang adanya warga Muhammadiyah masa sekarang yang meninggalkan organisasi karena perbedaan pandangan, sebagaimana priyayi Kauman pada tahun 1915 itu. Dalam Muhammadiyah, perbedaan sikap terhadap politik semasa tidaklah membawa perpecahan di ranah teologis.

Memang ada saja orang yang takut terseret arus. Tetapi hendaklah dipahami bahwa dari si penakut tidak akan muncul perubahan apa pun, apalagi yang mendasar, tentu dengan pertimbangan menjaga *status quo* dan kenyamanan hidup. Dahlan adalah penentang arus dengan keberanian teologis dan kulturalnya yang luar biasa, bila diukur dengan zamannya, saat perubahan itu dilancarkan. Karena memang bukan berlatar belakang

pendidikan Barat, maka demi kemajuan Islam dan umatnya, Dahlan mau belajar kepada mereka yang telah mengenyam sistem pendidikan modern itu. Dengan cara itu, Muhammadiyah berhasil menggumulkan dirinya dengan realitas zaman yang berubah dengan cepat dan berupaya mengawal perubahan itu sambil mempertajam visi Islamnya yang berkemajuan.

Dalam kaitan ini, ada baiknya dikutip pendapat fisikawan ateis yang termasyhur, Stephan W. Hawking yang memberi definisi tentang intelijensi (kecerdasan): "*Intelligence is the ability to adapt to change*" (Kecerdasan adalah kemampuan menyesuaikan [diri] kepada perubahan). Dahlan jelas memiliki kriteria kecerdasan untuk perubahan itu. Tetapi berbeda dengan Hawking yang di akhir hidupnya merasa tidak lagi memerlukan Tuhan, Dahlan dengan Muhammadiyah ingin menancapkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam jiwa manusia agar mereka tidak kehilangan jangkar spiritual dalam menghadapi kehidupan duniawi yang sarat godaan dan tantangan.

Demikianlah, dengan bergulirnya zaman Muhammadiyah 27 tahun sepeninggal Dahlan di alam kemerdekaan, merasa perlu mengubah tujuan organisasi. Perubahan AD yang fundamental tentang tujuan terjadi pada Muhammadiyah ke-31 (21-26 Desember 1950) di Yogyakarta. Dalam Pasal 2, perumusan tujuan itu berbunyi: "*Maksud Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*." Dalam suasana kemerdekaan bangsa, gagasan bagi tegaknya sebuah masyarakat Islam di Indonesia dinilai menjadi mungkin. Caranya terbaca dalam Pasal 3g: "*Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat*." Tetapi bagaimana gambaran yang relatif utuh tentang corak masyarakat Islam tidak dijelaskan dengan memuaskan. Bagi saya, masyarakat Islam tidak lain dari pada 'masyarakat adil-makmur' di bawah pengawasan wahyu.

Era tahun 1950-an adalah tahun pertarungan ideologi politik untuk mencari dan menetapkan Dasar Negara bagi Indonesia merdeka. Warga Muhammadiyah terlibat dalam suasana pertarungan ini. Bulan September 1955 diselenggarakan Pemilu I untuk DPR dan bulan Desember 1955 untuk Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru bagi

Indonesia. Meskipun majelis ini telah bersidang selama tiga tahun dan telah merampungkan sekitar 90% tugas konstitusionalnya, masih ada 10% yang tersisa: pilihan tentang Dasar Negara antara Pancasila dan Islam. Perdebatan tentang masalah krusial ini keras dan panas, tetapi di ujungnya tanpa pemenang.

Dengan Asas atau Tanpa Asas

Akhirnya Presiden Soekarno dengan dukungan penuh Angkatan Darat mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan membubarkan Majelis Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Konstelasi politik berubah total dan dramatis. Publik terbelah antara pendukung dekrit dan pihak penentang. Indonesia seakan-akan mau pecah, gara-gara Dasar Negara. Pada 20 Maret tahun 1960 DPR pilihan rakyat juga dibubarkan, diganti dengan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang ditentukan sendiri oleh presiden. Kekuasaan otoritarian mencapai puncaknya yang tertinggi. Partai penentang dekrit tidak diajak masuk ke dalam DPRGR itu.

Kegagalan memperjuangkan dasar Islam dalam Majelis Konstituante rupanya punya imbas langsung dalam perumusan AD Muhammadiyah sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah ke-34 (Nop. 1959) di Yogyakarta. Selama 47 tahun Muhammadiyah tidak pernah mencantumkan asas atau dasar dalam AD-nya, sekarang pada Pasal 2, asas itu dinyatakan: "*Persyarikatan berasaskan Islam*." Rumusan maksud dan tujuan tidak mengalami perubahan sampai tahun 1985, saat asas Pancasila wajib di-cantumkan. Berhadapan dengan kondisi politik riil di Indonesia, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 (Desember 1985) di Surakarta, asas dalam Pasal 2 AD diubah menjadi: "*Persyarikatan berasaskan Pancasila.*"

Tetapi untuk mengamankan identitas organisasi dalam situasi politik nasional yang tidak bebas itu, maka dalam Muktamar di atas, AD dalam Pasal 1:1 dirumuskan bahwa: "*Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH, adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar ma'ruf nahi mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunah.*"

Inilah siasat Muhammadiyah untuk menyelamatkan asas Islam berhadapan dengan tembok kekuasaan yang tidak toleran. Padahal, seperti dikatakan di atas, sejak era Ahmad Dahlan sampai 47 tahun berikutnya, pencantuman asas dalam AD Muhammadiyah tidak pernah terpikirkan.

Boleh jadi dalam Muktamar Surakarta yang agak panas itu, dokumen AD sejak awal tidak sempat dikaji, sehingga masalah asas menjadi topik perdebatan serius. Seolah-olah tanpa asas, keislaman Muhammadiyah tidaklah kokoh. Inilah akibatnya, jika orang berpikir tidak berdasarkan sejarah. Di era Reformasi dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta (Juli 2000), asas Islam kembali dicantumkan, setelah absen sejak 1985. Dalam perjalanan sejarahnya, dengan asas atau tanpa asas, identitas Muhammadiyah tetap saja tidak berubah sebagai gerakan Islam Berkemajuan *par excellence,* yang mendidik, menggembirakan, dan mencerahkan. Sejak 10 tahun terakhir melalui MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Muhammadiyah mulai menggarap ranah pertanian, peternakan, dan perikanan. Di bawah pimpinan alm. DR (HC) Said Tuhulele (wafat 9 Juni 2015), MPM semakin berkibar dan siapa tahu akan menjadi arus utama ketiga dalam Muhammadiyah dalam beberapa tahun yang akan datang setelah pendidikan dan kesehatan.

Rekam jejak Muhammadiyah untuk menegakkan dan melaksanakan amar makruf dalam bentuk membantu negara di ranah pendidikan dan pelayanan sosial-kemanusiaan sudah sangat teruji. Dari hari ke hari perkembangannya semakin dinamis dan ekspansif dengan segala rintangan yang dijumpai dalam kerja di atas. Di ranah ini, Muhammadiyah tidak punya tandingan mitranya di seluruh dunia Islam. Sebagai pembantu negara, Muhammadiyah sangat setia menjalankan tugasnya, sekalipun negara kadang-kadang tidak menghargainya. Tetapi bagaimana dengan konsep nahi mungkar, sebagaimana yang dicantumkan dalam AD 1985 itu? Sebenarnya istilah *amar ma'ruf nahi mungkar* itu adalah terminologi Al-Quran yang sudah tersiar di kalangan Muhammadiyah sejak periode awal. Hanya saja, baru dimasukkan ke dalam AD tahun 1985 itu.

Adapun sumber yang digunakan untuk konsep amar makruf dan nahi mungkar itu adalah ayat 104 surat Âli 'Imrân (3) yang dikaitkan dengan

pembentukan organisasi/komunitas (*ummat*). Adapun ayat 41 surat al-Hajj (22) yang berhubungan dengan kekuasaan, sepengetahuan saya, tidak dijadikan rujukan. Bunyinya: "*Alladzîna in makkannâhum fî 'l-ardh aqâmû al-shalât wa âtawu 'l-zakât wa amarû bi 'l-ma'rûf wa nahaw 'ani 'l-munkar wa lillâhi 'âqibatu 'l-umûr*/Mereka kami beri posisi yang kuat dan berpengaruh di muka bumi, mereka mendirikan salat, membayarkan zakat, memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan semua muara urusan adalah milik Allah."

Posisi Kuat atau Pengaruh Kuat

Posisi kuat dan berpengaruh adalah posisi penentu, bukan posisi pembantu, sebagaimana yang telah diperankan Muhammadiyah selama lebih satu abad. Dari kata kerja *makuna* yang bermakna kuat dan berpengaruh, maka kata kerja bentuk kedua *makkana* menjadi *makkannâhum* (Kami telah beri mereka posisi yang kuat dan berpengaruh) bisa saja dalam bentuk kekuasaan negara yang memang punya hak memerintah dan melarang. Dalam kaitan ini, apa yang telah dilakukan Muhammadiyah barulah sebatas dalam posisi moral-sosial, bukan posisi kekuasaan untuk mencegah kemungkaran. Di ranah kemungkaran ini, jangankan Muhammadiyah, negara Indonesia sendiri pun kadang-kadang seperti tidak berdaya, lantaran perkasanya kekuatan hitam itu.

Dalam posisi sebagai pembantu, apakah Muhammadiyah yakin akan berhasil mencapai tujuan yang dicantumkan dalam AD-nya? Pengalaman lebih satu abad memberikan jawaban negatif. Sebenarnya kemerdekaan bangsa dan pengalaman panjang memberi peluang besar kepada Muhammadiyah untuk mengubah statusnya tidak hanya sekadar pembantu, tetapi juga sekaligus sebagai penentu. Memang sudah ada berbagai upaya ke arah itu, tetapi belum pernah efektif, karena memang Muhammadiyah sejak awal tidak dirancang untuk mengurus negara. Apakah situasi semacam ini mau diteruskan pada abad kedua sejarah keberadaan Muhammadiyah? Apakah wawasan kebangsaan Muhammadiyah tidak perlu lebih dipertajam berhadapan dengan zaman yang selalu berubah?

Pertanyaan ini memerlukan pemikiran mendalam untuk menjawabnya, karena memang sangat tidak sederhana. Tetapi tuan dan puan jangan salah tangkap, pemikiran ini untuk jangka panjang, sama sekali terbebas dari sisi pragmatisme politik. Muhammadiyah pernah turut mendirikan partai politik, bahkan pernah menjadi Orsolpol (organisasi sosial politik), tetapi semua pengalaman itu berharga, dan bahkan juga pahit. Oleh sebab itu saya termasuk orang yang menentang keras jika ada pikiran agar Muhammadiyah mengubah dirinya menjadi parpol. Jika itu berlaku, maka bisa dibayangkan misi besarnya di ranah sosial kemanusiaan akan berantakan. Politik bisa menjadi racun yang mematikan di tangan mereka yang lemah iman dan lemah ekonomi.

Lalu bagaimana? Harus diingat bahwa posisi sebagai pembantu tetaplah pembantu, sebagaimana disinggung di atas, bukan penentu bagi perjalanan bangsa dan negara, khususnya bila berhadapan dengan masalah kemungkaran, Muhammadiyah tak berdaya. Tercakup dalam ranah kemungkaran ini adalah segala macam jenis korupsi, pengrusakan lingkungan, mafia migas, mafia imigrasi, pencurian ikan, mafia pajak, mengakali APBN/APBD/BUMN/BUMD, dan segala macam perbuatan busuk dan najis yang merusak sendi-sendi moral bangsa dan memiskinkan rakyat banyak. Sampai batas yang jauh, Muhammadiyah hanyalah sebagai penonton belaka bersama yang lain, tidak punya kekuatan apa pun untuk melawannya.

Sebuah gerakan Islam yang bertekad memerintahkan yang makruf dan mencegah segala yang mungkar dalam posisi sebagai pembantu adalah mustahil untuk dapat berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Jika logika ini benar, maka perlu dikaji ulang secara tenang, tetapi kritikal, tentang hubungan Muhammadiyah dengan negara. Jika peran Muhammadiyah tetap sebatas yang telah dikerjakan sekian lama, maka yang akan berlaku adalah: manakala bangsa dan negara ini tersungkur sebagai negara gagal misalnya, Muhammadiyah pun pasti tersungkur. Status sebagai pembantu tidak punya pilihan lain, kecuali mengikuti nasib buruk pihak yang dibantu. Sekiranya nasib malang itu benar-benar terjadi (semoga kita terhindar), maka semua jaringan amal-usaha Muhammadiyah akan rontok satu persatu. Dan bayangan untuk sebuah masyarakat Islam

yang sebenar-benarnya akan tetaplah tinggal sebagai bayangan untuk kemudian tenggelam bersama Indonesia ditelan oleh kekejaman zaman, karena ketidakpiawaian kita menyusun strategi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara secara strategis melalui kajian yang mendalam.

Karena bukan sebagai parpol, Muhammadiyah terkesan gamang bila berurusan dengan politik, tetapi akan kecewa jika kader-kadernya tidak diperhitungkan orang dalam urusan kenegaraan. Situasi semacam ini tidaklah terlalu mengejutkan, karena seperti telah dikatakan bahwa Muhammadiyah memang tidak dirancang untuk mengurus politik kenegaraan. Maka jangan heran, bila kader-kader Muhammadiyah kurang percaya diri untuk masuk ke arena pertarungan dan persaingan yang tidak jarang menghalalkan semua cara di tengah-tengah kemungkaran yang semakin masif. Menghadapi semuanya ini, perlu dicari terobosan baru yang penuh perhitungan untuk merumuskan hubungan Muhammadiyah dengan negara, demi mencapai posisi simbiotik (saling menguntungkan) antara keduanya.

Menyiapkan Kader Negarawan

Dengan modal PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) yang ada sekarang ini, terobosan politik itu menjadi mungkin. Syaratnya, harus ada gagasan dan rancangan besar bersama yang jelas ke arah itu sebagai ijtihad kolektif warga Muhammadiyah dalam upaya melangkah ke depan, demi terwujudnya sebuah negara yang berkeadilan. Indonesia tidak boleh terus dirusak dan dipecundangi oleh anak-anaknya sendiri yang lupa daratan, lupa lautan. Sebagai gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, Muhammadiyah harus turut bertanggung jawab untuk kemajuan dan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini.

Di muka sudah dijelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah yang panjang, dinamis, dan ekspansif, tanpa asas atau dengan asas Islam, Muhammadiyah tetaplah diakui sebagai sebuah gerakan Islam dengan kepribadian khasnya yang tidak pernah berubah. Dalam hubungannya dengan negara, posisi sebagai pembantu tidak perlu ditinggalkan, tetapi

harus dicari pintu aman agar Muhammadiyah juga tampil sebagai kekuatan penentu dalam merumuskan kebijakan negara untuk kepentingan publik, demi keadilan yang merata.

Tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan, Muhammadiyah bersama NU dan lain-lain organisasi Islam, memprakarsai berdirinya partai Masyumi di Madrasah Mu'allimin Yogyakarta pada 7/8 November 1945, tetapi setelah terbentuk tidak menjadi penentu dalam partai itu. Cukup baginya mengambil posisi sebagai anggota istimewa sampai saat partai itu dilarang akhir tahun 1960 oleh presiden. Dengan demikian Muhammadiyah memang tidak pernah berpengalaman mengurus partai, sekalipun sebagai pendiri tetap setia mengawal Masyumi sampai bubar dengan segala kegetiran yang menyertainya.

Sebagai kekuatan sipil dengan PTM sebagai gudang calon negarawan potensial, saya berpendapat agar Muhammadiyah lebih baik berpikir strategis jangka panjang bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jalan yang mungkin ditempuh adalah agar beberapa PTM unggulan mengambil inisiatif bersama-sama untuk menyiapkan para negarawan pada semua bidang untuk dilatih dan diarahkan untuk pada saatnya dengan segala modal kepakarannya agar turut menjadi penentu bagi perjalanan bangsa dan negara. Dengan kata lain, Muhammadiyah harus berada dalam posisi sangat siap untuk memberikan kader-kader terbaiknya kepada negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, pertanian, pertahanan, politik, pendidikan, kesehatan, kelautan, sosial, dalam negeri, luar negeri, dan segala bidang apa pun yang diperlukan negara.

Dalam pantauan saya sejauh ini, dengan segala jasanya yang luar biasa dalam membantu negara, Muhammadiyah masih sangat kesulitan menawarkan pakar mumpuni yang dimilikinya kepada negara saat diperlukan. Maksud saya, kader-kader itu haruslah memenuhi semua kualifikasi dengan standar yang sangat tinggi, sehingga negara tidak punya pilihan lain, kecuali meminta kepada Muhammadiyah agar para kader itu disumbangkan. Gagasan ini memang idealistik, tetapi bila demokrasi sudah berjalan normal, maka aspek meritokratik pasti akan dipertimbangkan untuk kepentingan negara.

Bukan saja negara, partai politik pun yang punya wawasan kenegaraan tentu akan memerlukan kader-kader Muhammadiyah yang mumpuni itu. Para kader ini mesti dikenal secara luas sebagai negarawan moralis, berwawasan keindonesiaan yang jelas, toleran, tetapi pakar di bidang tertentu. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka antara Muhammadiyah dan negara akan berada pada sebuah keserasian yang elok karena saling mendukung. Dengan posisi ini, siapa tahu, Muhammadiyah akan dapat ikut serta menolong bangsa dan negara dalam upaya menghalau semua kemungkaran yang membelit batang tubuh Indonesia sampai ke batas yang jauh dan semua perbuatan yang makruf akan semakin menjadi arus utama di negeri tercinta ini. Muhammadiyah harus mengajak semua mereka yang punya potensi sebagai negarawan dari golongan mana pun untuk bersama-sama memperbaiki dan memajukan bangsa dan negara ini. Anak bangsa yang kadar kebangsaannya sudah menipis semoga cepat sadar akan kekeliruannya.

Sebagai penutup, saya kutipkan pesan Bung Karno kepada Muhammadiyah puluhan tahun yang silam: "…Dengan sedikit bicara banyak bekerja, Muhammadiyah telah memodernisasi cara mengembangkan Islam, sehingga di seluruh Tanah air Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke telah berdiri Cabang-cabang dan Ranting-rantingnya. Selaku seorang yang pernah berkecimpung dalam lingkungan Muhammadiyah, saya ingin berpesan kepada Saudara-saudara, supaya selalu berpegang teguh kepada motto: 'Banyak bekerja!'… Inilah sebabnya: Muhammadiyah berkumandang dan menjadi besar." (*Lih*. Departemen Penerangan, *Makin Lama Makin Cinta: Muhammadiyah Setengah Abad, 1912-1962*. Jakarta: 1963, hlm. 204. Ejaan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku). Semestinya, "Muhammadiyah berkumandang dan menjadi besar," tidak hanya sekadar pembantu, tetapi sekaligus menjadi penentu bagi hari depan Indonesia di semua ranah. *Eman-eman* bangsa besar ini sering dijadikan permainan oleh mereka yang serbatuna. Semoga!

Resonansi, 16, 23, 30 Juni 2015, 7, 14 Juli 2015

Indeks

B

C

H

I

J

K

L

M

N

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Tentang Editor

Abdul Mu'ti

Lahir 1968 adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020). Selain itu, Mu'ti adalah ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) periode 2012-2017.

Sebelumnya, Mu'ti pernah menjadi wakil sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2005-2010, advisor the British Council (2006-2011), dan anggota *Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Board* (2007-2009).

Fajar Riza Ul Haq

Fajar merupakan Direktur Eksekutif MAARIF Institute For Culture and Humanity, Jakarta. Dirinya juga aktif menulis artikel yang tulisannya dapat dilihat di koran-koran nasional Indonesia.

Dalam jenjang pendidikan formal, ia meraih pendidikan master pada Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada (2006), dan pendidikan S1 di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 2002. Ia terpilih dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri/pelatihan di tingkat Internasional di antaranya adalah Chevening Fellowship di Centre for Studies in Security and Diplomacy, University Birmingham (Januari-April

2009), The 17 New Generation Seminar, the East West Centre, Hawai (2007), Facilitation of Dialogue Process and Mediation Efforts, Folke Bernadotte Academy, swedia (2007), dan Program Australia-Indonesia Young Muslim Leaders Exchange (2005).

Di samping itu, Fajar juga memiliki latar belakang pengalaman yang cukup kuat di kancah gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan; Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Sukoharjo, Ketua Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM, dan sekretaris bidang Hikmah PP Pemuda Muhammadiyah. Hingga saat ini, alumni pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shobron, Solo, ini telah melahirkan karya publikasi sebagai berikut; *Membangun Keragaman, Meneguhkan Pemihakan: Visi Baru Politik Muhammadiyah* (2004) dan *Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara Jawa: Muhammadiyah dan Seni Lokal* (dkk, 2003). Adapun beberapa karya yang dieditorinya adalah *Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan berwawasan HAM: Buku Pegangan Guru* (2008), *Pendidikan Al Islam Berwawasan HAM* (2008), *Pendidikan Kemuhammadiyahan Berwawasan HAM* (2008), dan *Islam, HAM, dan Keindonesiaan* (2007). Juga, tulisan-tulisan artikelnya dapat dijumpai di beberapa media cetak seperti *Kompas, Republika, Koran Sindo,* dan *Jawa Pos.*

Azaki Khoirudin

Sosok pemuda inspiratif yang terlahir di Lamongan, Jawa Timur, 25 November 1989 dari kultur keluarga Muhammadiyah. Ia mendapat pendidikan formal Muhammadiyah: TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kebalankulon (1996), MI Muhammadiyah 08 Sekaran (2002), SMP Muhammadiyah 19 Lamongan (2005), SMA Muhammadiyah 1 Gresik (2008), alumni Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini sedang menempuh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam. Saat ini Ia adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPM 2014-

2016. Guru SMP Muhammadiyah 12 GKB juga pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ia tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Hal ini yang menjadikan ia sebagai intelektual muda produktif dalam menghasilkan karya.

Beberapa karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Fajar Baru:* (2012), Nûn-*Tafsir Gerakan al-Qalam* (2012, 2013, 2014), *Pendidikan Akhlak Tasawuf* (2013), *Mewujudkan Impian Masyarakat Berkemajuan: Sejarah Muhammadiyah Gresik Kota Baru* (2013), *Pelajar Bergerak: Menuju Indonesia Berkemajuan* (2014), *Mercusuar Peradaban: Manifesto Gerakan Pelajar Berkemajuan* (2015), *Teologi Al-'Ashr: Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan* (2015), dan *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia* (2015). Selain itu, ia juga menulis di beberapa Media seperti *Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah Suara 'Aisyiyah, Majalah Matan, Majalah Kuntum, Jurnal Tajdida UMS, Jurnal Afkaruna UMY,* serta *Koran Kedaulatan Rakyat, Solopos* dan *Republika*. Email: azakikhoirudin@gmail.com

Ahmad Fuad Fanani

Lahir di Blitar, 27 Juni 1979, adalah Peneliti MAARIF Institute for Culture and Humanity dan Pengajar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya ia pernah menjadi Direktur Riset MAARIF Institute pada 2012-2015, Peneliti di International Center for Islam and Pluralism (ICIP), dan Pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan pascasarjananya diselesaikan di School of International Studies, Flinders University, Adelaide, Australia dengan dukungan Australian Development Scholarship (ADS). Aktif di persyarikatan Muhammadiyah semenjak tahun 1997 hingga sekarang. Ia pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat (2000-2001), Ketua Lembaga Studi Islam DPP IMM (2001-2003), Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah (2006-2014), Ketua

Program Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) (2003-2006), Presidium JIMM (2006-2014), dan anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah (2015-2020). Beberapa karya tulis dan buku editannya antara lain: *Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagamaan Liberatif* (2004), *Ijtihad Pesantren untuk Toleransi dan Good Governance* (2009), *Muhammadiyah Progressif: Manifesto Pemikiran Kaum Muda* (2007), *Catatan 1 Dekade MAARIF Institute Berkhidmat untuk Kebinekaan* (2013), *Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Ahmad Syafii Maarif* (2015), dan *Fikih Kebinekaan* (2015). Berbagai analisis politik dan sosial keagamaannya bisa ditemui di berbagai media massa nasional seperti: *Kompas*, *Republika*, *Koran SINDO, Koran Tempo, Media Indonesia*, *Jawa Pos*, dan *the Jakarta Post*. Sedangkan beberapa artikel substantifnya sudah diterbitkan di Majalah *Prisma*, Jurnal *MAARIF*, *Journal of Indonesian Islam, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* (IJIMS), Jurnal *Inovasi*, dan Jurnal *Afkaruna*,. Sejak bulan September 2015 ia meneruskan studi S3-nya di the University of Toronto, Canada dengan dukungan the Indonesian Presidential Scholarship LPDP RI. Bisa dihubungi melalui email: fuadfanani27@gmail.com, twitter: @fuadfanani